ISSN 1411 - 0911
eISSN 2443-2660

SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 20, No. 2, Juli 2018

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Lala Adilla Nur

Alamat Penerbit / Redaksi:
Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 1
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

Terindeks di:

ISSN 1411 - 0911
eISSN 2443-2660

DAFTAR ISI

SOSIOHUMANIORA
Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 20, No. 2, Juli 2018

Usefulness Of Management Accounting Systems: Peran Perubahan Lingkungan Eksternal terhadap upaya Peningkatan Kinerja Perusahaan BUMD Pemerintah Kota Bandung
(Muhammad Dahlan) ..... 103 - 108

Pengaruh Keberadaan Gapoktan terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan
(Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryano dan Lina Nur Aminah) ..... 109 - 114

Sistem Sapaan Bahasa Bali menurut Hubungan Kekerabatan
(I Nyoman Suwija) ..... 115 - 121

Politik Identitas Etnik Asli Papua Berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong
(Ferinandus Leonardo Snanfi, Muhadjir Darwin, Setiadi, dan Hakimul Ikhwan) ..... 122 - 131

Seni Kerajinan Kelom Geulis di Kota Tasikmalaya sebagai Pelengkap *Fashion* Wanita
(Agus Nero Sofyan, Kunto Sofianto, Maman Sutirman, dan Dadang Suganda ..... 132 - 137

Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Utara
(Leviane Jackelin Hera Lotulung, Deddy Mulyana, dan Evie Ariadne Shintadewi ..... 138 - 144

Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pelestarian Ekosistem Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)
(Iwang Gumilar) ..... 145 - 153

Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor
(Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi) ..... 154 - 161

Kepercayaan dan Praktik Budaya pada Masa Kehamilan Masyarakat Desa Karangsari, Kabupaten Garut
(Juariah) ..... 162 - 167

Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia
(Uyat Suyatna) ..... 168 - 176

Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Migrasi Internal di Sulawesi Selatan
(Ambar Dwi Santoso, Bonar M. Sinaga, Sri Hartoyo, dan M. Parulian Hutagaol ..... 177 - 187

Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
(Evie Ariadne Shintadewi dan Benazir Bona Pratamawati) ..... 188 - 198

PENGANTAR REDAKSI

Kali ini, dari 12 tulisan terdiri dari satu kajian ekonomi, dua berkaitan dengan aktivitas pertanian dan perikanan, 3 tulisan berkenaan dengan budaya, dua politik, 2 komunikasi dan 2 kebijakan publik. Kesemuanya cukup penting untuk disimak lebih jauh agar dapat diperoleh manfaat oleh pembaca. Sorotan terhadap kinerja BUMD di kota Bandung dikuak oleh Dahlan dalam Volume 20 No 2. Bisa jadi hal ini penting untuk diketahui publik dari sisi ekonomi, khususnya kajian akuntansi. Tulisan lainnya.

Safe'I dkk menyoroti kehadiran Gapoktan terhadap pendapatan petani. Kelompok ini masih terus diupayakan untuk bisa dipercaya sebagai lembaga yang dapat menyejahterakan anggotanya. Namun tidak semuanya dapat berhasil, demikian juga di sejumlah tempat justru digunakan sebagai media kepentingan tertentu. Kendati demikian, kajian ini bisa menemukan hal penting dalam Gapoktan untuk bisa dijadikan kendaraan yang mampu menjangkau peningkatan penghasilan anggotanya. Dari lndramayu, Gumilar menulis hal yang berbeda. Tulisannya menyangkut tentang partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove. Hasilnya bisa jadi berguna bagi sejumlah pesisir yang memiliki kekayaan hutan serupa.

Dari tiga tulisan budaya, Suwija menulis tentang sistem sapaan bahasa Bali yang dilihat dari kekerabatan. Sapaan bisa menunjukkan hubungan kekerabatan sehingga dari caranya menyapa serta kata sapaan dapat dilihat hubungan kekerabatannya. Sofyan menyoroti seni kerajian kelom di Tasikmalaya. Sebagai pelengkap *fashion* wanita, kelom mesti dapat membanggakan dan menunjukkan kelas bagi wanita pemakainnya. Agaknya, tulisan inipun cukup penting untuk disimak sebagai bahan untuk memproyeksikan selera wanita ketika menggunakan fashion. Juariah menyoroti kepercayaan masyarakat atas kehamilan. Dengan lokasi Karangsari Garut, bisa saja hal yang sama bisa berlaku di sejumlah desa yang berkarakteristik sama wilayah Garut atau Jawa barat.

Snanfi menyoroti politik identitas. Walaupun kajiannya Sorong, namun menarik disimak sejalan dengan pengalaman pemilu serentak beberapa waktu lalu. Bisa jadi bukan hanya di Sorong hal demikian berlaku. Bahkan mungkin kehadiran wanita pun menarik untuk disimak sebagai pihak strategis seperti ditulis Lotulung. Keduanya cukup berkaitan karena di sejumlah tempat keduanya cukup bermain untuk memenangkan atau bahkan meruntuhkan kekuasaan. Untuk jelasnya dapat disimak dalam volume kali ini.

Hal penting lainnya adalah media seperti ditulis Ratnamulyani. Bagi kalangan muda yang dikategorikan pemilih pemula, media sosial agaknya cukup penting kedudukannya, dengan demikian ketepatan penggunaan media ini dapat mengantarkannya kepada perolehan kekuasaan. Bila komunikasi dianggap penting, bisa jadi kelambanan menyosialisasikan MEE oleh pemkab Bandung Barat menyebabkan kabupaten ini agak lamban dapat merespon kemajuan yang ada seperti ditulis Shintadewi.

Ujung dari volume ini adalah evaluasi kebijakan narkotika seperti ditulis Suyatna. Agaknya, keberanian menyelesaikan sumbernya menjadi penting agar musuh besar negeri ini dapat dihentikan. Hal lainnya yang juga menjadi krusial adalah perburuhan. Menurut Santoso, kebijakan yang berkaitan dengan upah bisa menyebabkan maju mundurnya migrasi di Sulawesi Selatan. Untuk itu seluruh tulisan dapat disimak untuk memberikan informasi baru dan pengayaan bagi para pembaca.

Selamat membaca.

Hormat kami,

Dewan Redakur

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 103 - 108
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

USEFULNESS OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS: PERAN PERUBAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN BUMD PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Muhammad Dahlan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
E-mail: dahlanm2004@yahoo.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *Usefulness of Management Accounting Systems*, perubahan lingkungan eksternal, dan kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) Pemerintah Kota Bandung, serta menguji pengaruh moderasi perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara *Usefulness of Management Accounting Systems* dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan kuesioner lima (5) skala *Likert* dalam pengumpulan data sehingga terkumpul data selama bulan Juni 2017 sebanyak 64 pengguna jasa dari 7 BUMD sebagai sampel penelitian. Metode yang digunakan adalah *Time Order Decision* Johnson and Onwugbuzie's (2004). Mengacu kepada *Contingency Theory* dan *Moderate Regression Analysis* (MRA), maka hasilnya adalah mengindikasikan: (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sistem akuntansi manajemen, perubahan lingkungan eksternal, dan kinerja perusahaan; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan terhadap kinerja perusahaan; dan (3) tidak ditemukan peran perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan, atau berbeda dengan hasil penelitian terdahulu.

Kata kunci: Kebergunaan Sistem Akuntansi Manajemen, Perubahan Lingkungan Eksternal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Kinerja Perusahaan.

USEFULNESS OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEMS: THE ROLE OF ENVIRONMENTAL CHANGE ON IMPROVE OF STATE-OWNED ENTERPRISE PERFORMANCE BANDUNG CITY

ABSTRACT. *The aim of this study is to analyze the effect role of environmental change on relationship between usefulness of management accounting systems and firm performance. In this study, data of 7 Stated-Owned Enterprise Bandung District, that is introduce and proportional sampling of 64 as user should conducted on June, 2017. The method of this research is Time Order Decision by Johnson and Onwugbuzie's (2004). This approach had selected considering the data are collect through interviewing should related respondents to re-confirmation. Management accounting system and environmental change has been considered as an important determinant of firm performance and should be conceptualized in different ways in the marketplace, globalization and an explosion of technology in recent year. According to contingency theory and moderate regression analysis should research findings are; (1) positively Pearson correlation among usefulness of management accounting systems, environmental change and firm performance; (2) the result indicate that of positive and significant effect of usefulness of management accounting systems and environmental change on the firm performance; and (3) not expectation of result, insignificant moderate effect of environmental change on the relationship between usefulness of management accounting systems and firm performance, and that's not consistence within finding's of previous researchers.*

Key words: *Usefulness of Management Accounting Systems, Environmental Change, State-Owned Enterprise District, and Firm Performance.*

PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu kebanyakan dilakukan pada perusahaan besar, manufaktur, perusahaan terbuka, usaha kecil dan menengah serta di negara maju, msialnya penelitian Gordon dan Narayanan (1984); Gul dan Chia (1994); Agbejule (2005); dan Soobaroyen dan Poorundersing (2008), masih sedikit dilakukan di negara berkembang dan perusahaan sektor publik. Dahlan dan Sumaryana (2017) menjelaskan terindikasi bahwa responsi terhadap perubahan lingkungan eksternal belum optimal diterapkan dan dimanfaatkan dilingkungan sektor publik, hal ini cenderung terjadi karena operasionalnya lebih melihat kepada agar peraturan-peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, media masa local misalnya Pikiran Rakyat (2015) juga menampilkan kinerja pelayanan publik BUMD Kota Bandung, pemenuhan air bersih warga masyarakat, kebersihan pasar dan kebersihan fasilitas umum, kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal digarap dan disediakan kepada warganya.

Hasil penelitian terdahulu tentunya memperkuat hasil wawancara kami sekitar bulan Mei dan Juni 2017 dengan pengguna jasa di perusahaan daerah (BUMD) Kota Bandung, menjelaskan bahwa BUMD Kota Bandung belum optimal memanfaatkan perubahan lingkungan eksternal seperti kemajuan teknologi, kebutuhan pasar, pesaing baru, dan sebagainya, padahal perubahan-perubahan ini jika dimanfaatkan secara konsisten dan optimal dapat dipredikasi perkembangan usaha dan upaya peningkatan kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan.

Penelitian ini pemaparannya terbagi dalam beberapa bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Dimulai dengan pendahuluan, kajian pustaka dan rumusan hipotesis, metode penelitian, hasil dan diakhiri dengan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan.

Interkorelasi antara Sistem Akuntansi Manajemen, Perubahan Lingkungan Eksternal dan Kinerja Perusahaan

Akuntansi manajemen (sistem akuntansi manajemen) atau akuntansi manajerial merupakan sistem akuntansi penyedia informasi bagi pengguna internal biasanya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang serta dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa serta bisa juga pada perusahaan tujuan sosial dan sektor publik (Horngren, et al., 2015; Hilton dan Platt, 2011; Belkaoui, 1980; dan Weygandt, et al., 2010). Tentunya peran informasi akuntansi manajemen untuk upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perusahaan (Horngren, et al., 2015; dan Belkaoui, 1980). Kinerja dan kualitas pelayanan ini dapat didefinisikan secara kuantitas (finansial) dan kualitas (nonfinansial) dalam berbagai perspektif penggunanya (Horngren, et al., 2015; Tidd dan Bessant, 2013; Robbins dan Coulter, 2009; dan Wheelen, et al., 2015).

Duncans (1972) dan Wheelen, *et al.,* 2015) menjelaskan lingkungan eksternal adalah faktor eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaku bisnis dalam bertindak atau membuat kebijakan dan pengambilan keputusan, yang dampaknya bisa dirasakan saat ini dan masa akan datang. Mengacu kepada teori kontigensi dikenal sebagai faktor kontigen misalnya faktor internal, faktor interdependen dan perubahan lingkungan eksternal (Hayes, 1977, Otley, 1980; dan Fisher, 1998). Perubahan lingkungan eksternal memiliki kondisi yang tidak pasti serta sukar diprediksi dimasa akan datang dan apabila para pelaku bisnis tidak optimal mengantisipasi perubahannya diperkiran akan berdampak negatif bagi kelangsungan bisnisnya (Duncans, 1972; Hayes, 1977; dan Wheelen, et al., 2015). Para manajer biasanya membutuhkan informasi akuntansi manajemen yang akurat dan relevan dengan kondisi perubahan lingkungan yang dihadapinya (Horngren, et al., 2015; Chia, 1995; Gul dan Chia, 1994; dan Soobaroyen dan Poorundersing, 2008). Sesuai dengan teori kontingensi semakin tinggi tingkat ketidakpastian perubahan lingkungan eksternal maka semakin akurat dan menyeluruh berbagai informasi akuntansi manajemen harus tersedia untuk menngendalikan kelangsungan bisnisnya dimasa mendatang (Horngren, et al., 2015; Fisher, 1998; Gul dan Chia, 1994; dan Soobaroyen dan Poorundersing, 2008).

Selanjutnya, hasil penelitian terdahualu menjelaskan terdapat hubungan positif antara sistem akuntansi manajemen dengan kinerja perusahaan (Ghasemi, et al., 2015; Norouzi, et al., 2015; Dahlan, 2015; Agbejule, 2005; dan Gul, 1991). Terdapat hubungan positif antara perubahan lingkungan eksternal dangan kinerja perusahaan (Tings, et al., 2012; Gordon dan Narayanan, 1984; Gul dan Chia, 1994; Dahlan dan Sumaryana, 2017; dan Agbejule, 2005).

Peran Perubahan Lingkungan Eksternal terhadap Hubungan antara Sistem Akuntansi Manajemen dan Kinerja Perusahaan

Variabel pemoderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen (Sekaran dan Bougie, 2010; Cooper dan Schindler, 2006). Misalnya perubahan lingkungan eksternal merupakan variabel pemoderasi atas hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan (Chia, 1995; Gul dan Chia, 1994; dan Soobaroyen dan Poorundersing, 2008). Penelitian terdahulu umumnya menggunakan teori kontingensi dalam menjelaskan peran variabel pemoderasi lingkungan terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan (Hayes, 1977; Chia, 1995; Gul dan Chia, 1994; dan Soobaroyen dan Poorundersing, 2008).

Pengujian statistik sebagian besar peneliti terdahulu cenderung menerapkan analisis regresi pemoderasi dalam menganalisis apakah memperkuat atau memperlemah terhadap hubungan variabel indenpenden dan dependen (Sekaran dan Bougie, 2010; Cooper dan Schindler, 2006; dan Gordon dan Narayanan, 1984). Memperkuat artinya hubungan antar variabel semakin memberikan kontribusi positif dan hubungan tersebut positif dan signifikan, sedangkan memperlemah adalah hubungan antar variabel semakin memberikan kontribusi negatif dan hubungan tersebut negatif dan signifikan.

Misalnya, hasil penelitian menjelaskan semakin tinggi ketidakpastian perubahan lingkungan eksternal maka informasi akuntansi manajemen semakin akurat, relevan dan menyeluruh dibutuhkan manajer untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan untuk memprediksi masa mendatang (Fisher, 1998; Gul dan Chia, 1994; dan Soobaroyen dan Poorundersing, 2008). Apabila informasi tersebut tidak tersedia sebagaimana seharusnya, maka prediksi dan keputusan yang diambil bisa berdampak pada keadaan tertentu akan terjadi yang dapat merugikan kelangsungan operasional bisnisnya atau perusahaan. Atau manajer harus selalu dapat memprediksi masa mendatan agar kondisi-kondisi yang tidak diharapkan tidak merugikan perusahaan jika kondisi itu terjadi di masa mendatang.

Rumusan Hipotesis

Mengacu kepada beberapa literatur secara teori maupun hasil penelitian empiris terdahulu menunjukan terdapat hubungan positif antara sistem akuntansi manajemen dengan kinerja perusahaan, terdapat hubungan positif antara perubahan lingkungan eksternal dengan kinerja perusahaan, dan perubahan lingkungan eksternal

sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dengan kinerja perusahaan. Maka, rumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1= Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan.

H2= Terdapat hubungan positif dan signifikan antara perubahan lingkungan eksternal dan kinerja perusahaan.

H3= Terdapat pemoderasi positif dan signifikan perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor publik 7 perusahaan BUMD Pemerin-tah Kota Bandung. Pengumpulan data mengacu kepada kuesioner 5-skala *Likert* (Sekaran dan Bougie, 2010; Cooper dan Schindler, 2006) yang dirancang khusus dan disesuikan dengan perusahaan BUMD. Minimal 5 pengguna jasa setiap BUMD disebarkan kuesioner sehingga data akhir yang terkumpul siap diolah adalah sebanyak 64 pengguna yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2017. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan Time Order Decision dari Johnson and Onwugbuzie's (2004) dalam Shauki (2016), metode ini mengharuskan peneliti untuk mewawancarai beberapa responden yang terpilih untuk menanyakan kembali atas data yang ada di kuesioner dan informasi-informasi lain yang releven dengan penelitian sebagai konfirmasi keabsahan data dan kondisi yang sesungguhnya memang demikian adanya.

Analisis data menggunakan *Moderate Regression Analysis* (Cooper and Schindler, 2006; Hair, *et. al.*, 2005; Sekaran and Bougie, 2010) dan *Contingency Theory* (Hayes, 1977; Otley, 1980; dan Fisher, 1998). Analsis regresi moderasi bertujuan untuk melihat sejauhmana peran interaksi perubahan lingkungan eksternal atas hubungan antara kebergunaan informasi sistem akuntansi manajemen dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan BUMD.

Operasionalisasi variabel merupakan uraian indikator dan dimensi dari variabel penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kinerja perusahaan, sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan eksternal. Kinerja perusahaan (K_Perusahaan) menggunakan indikator dan dimensi yang dikembangkan oleh Mahoney, *et. al.* (1963). Sistem akuntansi manajemen (SAM) menggunakan indikator dan dimensi yang disediakan oleh Chenhall dan Morris (1986). Indikator dan dimensi kedua variabel ini telah diuji reliabilitas dan validitas oleh Soobaroyen dan Poorundersing (2008). Sedangkan variabel perubahan lingkungan eksternal (PLE) menurut indikator dan dimensi serta reliabilitas dan validitas telah diuji oleh Gordon dan Narayanan (1984) dan Gul (1991).

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan *Moderating Regression Analysis* (MRA) dengan model persamaan regresi seperti berikut:

K_Perusahaan= C+b1SAM+e1…… (1)

K_Perusahaan= C + b1SAM + b2PLE + e2 … (2)

K_Perusahaan= C + b1SAM + b2PLE + Moderasi_SAM.PLE + e3 ..... (3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data Statistik

Analisis pertama dilakukan adalah melihat analisis data deskriptif dari imformasi yang diperoleh melalui kuesioner pada perusahaan BUMD Pemerintah Kota bandung, seperti dijelaskan pada tabel 1.

Hasil uji reliabilitas dan validitas atas semua indikator variabel penelitian seperti pada tabel 1 di atas adalah reliabel dan valid Nunnaly (1978), dan Kaiser dan Rice (1974). Hasil uji juga menunjukan *Bartlet's Test of Sphericity* adalah signifikan untuk variabel kinerja perusahaan, sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan eksternal berturut-turut adalah sebesar 161,066; 261,154; dan 197,313. Nilai korelasi antar variabel adalah positif dan signifikan, seperti dijelaskan pada tabel 2.

Hasil uji *Hotelling's T-Squared* menunjukan variabel sistem akuntansi manajemen tidak signifikan, namun korelasi antara variabel adalah positif dan signifikan pada taraf 1% (0,01) dengan menggunakan korelasi *Pearson 2-teiled*.

Analisis Regresi Pemoderasi

Berdasarkan hasil uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) telah dilakukan dapat kami jelaskan seperti pada tabel 3 di bawah ini. Terdapat tiga (3) model regresi yang diuji yaitu seblum dan sesudah moderasi pengaruh perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan, yang hasilnya sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan eksternal terhadap

Tabel 1: Descriptif Data Statistik

Variables	Mean	Min	Max	Std. Dev	KMO	CA	N
Kinerja Perusahaan	3,307	3,156	3,469	3,925	0,870	0,861	64
Sistem Akuntansi Manajmen	3,182	3,109	3,281	3,571	0,872	0,916	64
Perubahan Lingkungan Eksternal	3,234	3,094	3,406	3,697	0,856	0,905	64

Tabel 2: Korelasi Pearson

Varibel Penelitian	Y	X1	X2	X3	Hotelling's T-Squared	N
Kinerja perusahaan (y)	1	1	1	1	20,755**	6
Sistem akuntansi manajemen (x1)	0,710**	0,724**	0,942**		7,188	6
Perubahan lingkungan eksternal (x2)	0,758**	0,900**			11,193*	5
Moderasi SAM.PLE (x3)	0,788**				-	11

Catatan: **, * adalah level signifikansi pada 1% dan 5%.

kinerja perusahaan; dan (3) tidak terdapat pengaruh perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan.

Tabel 3: Temuan Analisis Hirarkhi Regresi Moderasi

Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan			
Variabel Independen	Unstandardized beta coefficients		
	Model 1	Model 2	Model 3
Sistem akuntansi manajemen	0,780**	0,373**	0,390
Perubahan lingkungan eksternal		0,544**	0,566
Moderasi SAM.PLE			-0,001
R Square	0,504**	0,629**	0,629
Adjusted R Square	0,496**	0,617**	0,611
R Square Change	0,504**	0,125**	0,000
Sig F Test	63,029**	51,724**	33,919**
Durbin-Watson	0	0	1,656

Catatan: **, * adalah level signifikansi pada 1% dan 5%.

Durbin-Watson pada parsamaan regresi model ke-3 adalah 1,656 ini menunjukan upaya peningkatan kinerja melalui interaksi antara sistem akuntansi manajemen dengan perubahan lingkungan eksternal belum dilakukan secara optimal dan nilai koefisien beta negatif sebesar 0,001 serta semua koefisien tidak signifikan. Analisis sebelum dan sesudah regresi moderasi sebagaimana dijelaskan pada tabel 3 di atas, maka dapat menghasilkan beberapa model persamaan regresi pengaruh sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan eksternal terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan BUMD Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

K_Perusahaan= 4,945 + 0,780 SAM + e1

K_Perusahaan= 3,930 + 0,373 SAM + 0,544 PLE + e2

K_Perusahaan= 3,610 + 0,390 SAM + 0,566 PLE – 0,001 SAM.PLE + e3

Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kebergunaan sistem akuntansi manajemen dengan kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu (misalnya Gul, 1991; Gul dan Chia, 1994; Tings, et al, 2012; Dahlan, 2015; Ghasemi, etal., 2015; Soobaroyen and Poorundersing, 2008). Jika pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi akuntansi manajemen dilakukan secara optimal dan kontinyu maka dapat diprediksi dengan akurat dimasa mendatang kinerja akan terus meningkat, ini merupakan harapan semua pelaku bisnis baik di perusahaan mencari laba maupun tujuan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dikatakan bahwa H1 yang diajukan dapat diterima.

Penelitian ini juga menjelaskan terdapat hubungan positif dan signifikan antara perubahan lingkungan eksternal dengan kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu (misalnya Tings, et al., 2012; Gordon dan Narayanan, 1984; Gul, 1991; Agbejule, 2005). Para peneliti terdahulu menyatakan jika perubahan dan ketidakpastian lingkungan eksternal dikawal dan diprediksi dengan seksama dan kontinyu diduga akan memberikan sinyal positif bagi pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dan pada akhirnya secara perlahan akan mendorong iklim usaha akan membaik dan meningkatkan kinerja. Artinya, hasil penelitian ini sesuai dan mengkonfimasi hipotesis yang diajukan maka H2 disimpulkan dapat diterima.

Berkaitan dengan peran perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan, dimana hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pada perusahaan daerah (BUMD) Pemerintah Kota Bandung tidak terbukti sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan. Pada model 1 dan 2 persamaan regresi menunjukan variabel sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan, namun pada model 3 justru terbalik setelah pemoderasi dilakukan yaitu hasilnya tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Maka hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu. Hipotesis yang diajukan H3 harus ditolak dan tidak konfim dengan penelitian terdahulu.

Hasil wawancara kami sekitar bulan Mei dan Juni 2017 dengan pengguna jasa di perusahaan daerah (BUMD) Kota Bandung, menjelaskan bahwa BUMD Kota Bandung belum optimal memanfaatkan perubahan lingkungan eksternal seperti kemajuan teknologi, kebutuhan pasar, pesaing baru, dan sebagainya, pada hal perubahan-perubahan ini jika dimanfaatkan secara konsisten dan optimal dapat dipredikasi perkembangan usaha dan upaya peningkatan kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung Dahlan dan Sumaryana (2017) menjelaskan terindikasi bahwa responsi terhadap perubahan lingkungan eksternal belum optimal diterapkan dan dimanfaatkan dilingkungan sektor publik, hal ini cenderung terjadi karena operasionalnya lebih melihat kepada agar peraturan-peraturan yang berlaku dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian ini mengisyaratkan adanya kelemahan pada jumlah sampel yang hanya sebanyak 64 sampel pengguna jasa layanan BUMD. Diharapkan kepada peneliti berikutnya menambah jumlah jumlah sampel agar hasilnya sesuai dengan hasil peneliti terdahulu, dan bagi pelaku usaha BUMD seyogyanya dan dengan seksama menempatkan responsi yang optimal terhadap peran perubahan lingkungan eksternal sebab jika perubahan dikelola dan dipredikasi dengan akurat akan berdampak positif bagi kelangsungan usaha baik jangka menengah maupun jangka pajang dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sistem akuntansi manajemen, perubahan lingkungan eksternal, dan kinerja perusahaan; dan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sistem akuntansi manajemen dan perubahan lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu (misalnya Gul, 1991; Gul dan Chia, 1994; Tings, et al, 2012; Dahlan, 2015; Ghasemi, etal., 2015; Soobaroyen and Poorundersing, 2008); serta tidak ditemukan peran perubahan lingkungan eksternal terhadap hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan kinerja perusahaan atau berbeda dengan hasil penelitian terdahulu (misalnya, Chia, 1995; Gul dan Chia, 1994; dan Soobaroyen dan Poorundersing, 2008). Perusahaan misalnya BUMD, untuk dapat bersaing umumnya mengantisipasi dan memahami arah perubahan lingkungan eksternal serta secara kontinyu melakukan perubahan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

Agbejule, A. (2005). The relationship between management accounting systems and perceived environmental uncertainty on managerial performance: a research note. *Accounting and Business Research*. 35 (4).

Belkaoui, A. (1980). *Conceptual Foundations of Management Accounting*. First edition. Maasachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Chenhall, R.H. dan Morris, D. (1986). The impact of structure, environment and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. *The Accounting Review,* 61 (1): 16-35.

Chia, Y. (1995). Decentralization, management accounting control (MACS) information characteristic and their interaction effects on managerial performance: a Singapore study. *Journal of Business Finance and Accounting*. 22 (6): 811-830.

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. (2006). *Business Research Methods*. Ninth edition. New York: McGraw-Hill Company, Inc.

Dahlan, M. (2015). Pengaruh audit internal terhadap penggunaan sistem akuntansi manajemen dan dampaknya pada kinerja perusahaan (survey pada BUMN di Indonesia). *Sosiohumaniora*, 17 (2): 133-141.

Dahlan, M. dan Sumaryana, A. (2017). Pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja pelayanan publik, budaya organisasi dan lingkungan eksternal sebagai pemoderasi. Sosiohumaniora, 19 (1): 45-51.

Duncan, R.B. (1972). Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty. *Administrative Science Quarterly*, 321 - 324.

Shauki, E.R. (2016) Enhancing the outcome data analysis by using mixed-method research. *Handout Applied Research Method Part 2*. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Fisher, J.G. (1998). Contingency theory, management control systems and firm outcomes: past results and future directions. *Behavioral Research in Accounting* 10 (S): 47-64.

Ghasemi, R., Mohamad, N. A., Karami, M., and Bajuri, N. H. (2015). The relationship among strategy, competition and management accounting systems on organizational performance. *Journal of Natural and Social Sciences*. 4 (3): 565-581.

Gordon, L.A. dan Narayanan, V.K. (1984). Management accounting systems, perceived environmental uncertainty and organization structure: an empirical investigation. *Accounting, Organizations and Society* 9 (1): 33-47.

Gul, F.A. (1991). The effect of management accounting systems and environmental uncertainty on small business manager's performance. *Accounting and Business Research*. 22 (85): 57-61.

_____ dan Chia, Y.M. (1994). The effects of management accounting systems, perceived environmental uncertainty and decentralization on managerial performance: a test of three-way interaction. *Accounting, Organizations and Society* 19 (4/5): 413-426.

Hayes, D.C. (1977). The contingency theory of manageril accounting. *TheAccounting Review* LII (1): 22-39.

Hilton, R.W. dan Platt, D.E. (2011). *Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment*. Ninnth edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Horngren, C.T., Datar, S.M. dan Rajan, M.V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Fifteenth edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Kaiser, H,F. dan Rice, J. (1974). Little jiffy, mark IV. *Educational and Psychological Measurement*. 34: 111-117.

Mahoney, T.A., Jerdee, T.H. dan Carrol, S.J. (1963). *Development of Managerial Performance: a Research Approach*. Cincinnati: South western Publishing.

Norouzi, E., Panahian, H., Mazandaran, A.G.H. (2015). Evaluation the relationship between competition and management accounting systems change and performance of componies. *Journal of Novel Applied Sciences*. 4 (3): 331-339.

Nunnaly, J.C. (1978). *Psychometric theory*. New York: McGraw Hill, Inc.

Otley, D.T. (1980). The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. *Accounting, Organizations and Society.* 5 (4): 413-428.

Pikiran Rakyat. (2015). Pemanfaatan dan Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

Robbins, S.P. dan Coulter, M. (2009). *Management*. 10th edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Sekaran, U. and Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Fifth edition. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

Soobaroyen, T. dan Poorundersing, B. (2008). The effectiveness of management accounting systems: evidence from functional managers in a developing country. *Managerial Auditing Journal*. 23 (2):187-219.

Tidd, J. dan Bessant, J. (2014). *Managing Innovation: Integrating Technology, market and Organizational Change*. Fifth Edition. Italy: Printer Trento Srl.

Tings, H.F., Wang, B.W. and Wang, D.S. (2012). The moderating role of environmental dynamism on the influence of innovation strategy and firm performance. *International Journal of innovation, management and technology*. 3 (5): 517-520.

Weygandt, J.J., Kimmel, P.D. dan Kieso, D.E. (2010). *Accounting Principles: International Student Version*. Ninth edition. Asia: John Wiley & Sons, Pte Ltd.

Wheelen, T.L. dan Hunger, J.D. (2015). *Strategic Management and Business Policy: Achieving sustainability*. Thirdteenth edition. Boston: Prentice Hall.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 109 - 114
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

PENGARUH KEBERADAAN GAPOKTAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DAN PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DI HUTAN KEMASYARAKATAN

Rahmat Safe'i, Indra Gumay Febryano dan Lina Nur Aminah
Jurusan Kehutanan dan Magister Kehutanan Universitas Lampung
E-mail: Linanuraminah@gmail.com

ABSTRAK. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dengan adanya program HKm masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan HKm merasakan dampak yang besar. Dengan adanya program HKm masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keberadaan gapoktan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pengelola lahan HKm serta melihat perbedaan tutupan lahan diareal kerja gapoktan sebelum dan sesudah terbentuknya gapoktan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan anggota di kedua gapoktan cenderung mengalami peningkatan. Pendapatan anggota Gapoktan Beringin Jaya mengalami peningkatan dari rata-rata Rp. 25.473.684/ha/tahun menjadi rata-rata Rp. 29.368.421/ha/tahun. Pendapatan anggota di Gapoktan Sinar Mulya juga meningkat dari rata-rata Rp. 31.416.66/ha/tahun menjadi Rp. 37.054.042/ha/tahun. Perubahan tutupan lahan di areal kerja kedua gapoktan mengalami perubahan yaitu semakin meluasnya areal pertanian dan lahan terbuka pada areal kerja gapoktan.

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Perubahan tutupan lahan, Pendapatan petani.

EFFECT OF THE EXISTENCE GAPOKTAN TO FARMER INCOME AND LAND COVER CHANGE IN COMMUNITY FOREST

ABSTRACT. *Community Forest (HKm) is a state forest whose main use is to empower communities in and around forest areas. With the community forestry program and the government can work together to preserve the forest. The community as the main actors in the management of community forest feel a great impact. With the community forestry program the community has access to utilize non-timber forest products that can help the community in increasing the economic income. This study aims to see the effect of the combined presence of farmer groups on improving the economics of community forest managers and to see the difference of land cover in gapoktan working area before and after the formation of gapoktan. The methods used in this research are participant observation, in-depth interview, and document analysis. The results showed that the income of the members in both gapoktan tend to increase. Gapoktan Beringin Jaya member's income increased from an average of Rp. 25.473.684 / ha / year to an average of Rp. 29.368.421 / ha / year. Revenue members in Gapoktan Sinar Mulya also increased from an average of Rp. 31.416.66 / ha / year to Rp. 37.054.042 / ha / year. Changes in land cover in the second work area gapoktan change that is the increasingly widespread agricultural area and open land in the working area of gapoktan.*

***Key words**: Community Forest (HKm), Change of land cover, Farmers income.*

PENDAHULUAN

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Dephut, 2007). HKm merupakan salah satu program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kawasan secara bersama-sama (Dephut, 2007). Program ini ditetapkan Menteri Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No: P.37/MENHUT-II/2007 yang kemudian di revisi melalui Peraturan Menteri Kehutanan No: P.18/MENHUT-II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.13/MENHUT-II/2010. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur segala sesuatu tentang bentuk pelaksanaan program HKm.

HKm memberikan keuntungan tersendiri baik bagi masyarakat sekitar hutan, maupun pemerintah. Dengan adanya program HKm yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat mencegah terjadinya degradasi kawasan hutan dikarenakan banyaknya pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat swekitar kawasan hutan. Dengan adanya program HKm masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan HKm merasakan dampak yang besar. Masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu, hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi.

Dalam pengelolaan lahan HKm upaya pelibatan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan pada kelompok tani HKm dapat menjadi dasar dalam melaksanakan

setiap program yang ada di dalam kelompok tersebut. Partisipasi aktif masyarakat pengelola lahan HKm dalam kelembagaan dapat memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif terhadap prilaku masyarakat dalam mengelola lahan HKm. Dampak tersebut dapat dilihat dari kondisi tutupan lahan HKm sebelum dan sesudah adanya program HKm di wilayah tersebut, keberhasilan masyarakat dalam mengelola lahan HKm dapat dilihat juga dari adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan HKm dibutuhkan sistem pengelolaan yang terencana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan HKm itu sendiri, karena pengelolaan HKm yang dilakukan secara personal akan berbeda dengan pengelolaan secara kelompok. Pengelolaan HKm akan berjalan dengan baik melalui sebuah wadah yaitu berupa kelompok tani/ kelompok tani hutan. Kelompok tani merupakan sebuah kelembagaan di tingkat petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya mengembangkan unit usaha secara bersama dan di dalamnya terjadi interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai. Keberadaan kelembagaan kelompok tani dijadikan suatu wadah oleh anggota kelompok dalam menjalankan suatu program dimana kelompok memiliki aturan main dalam mengelola dan menggarap lahan HKm. Menurut Hermanto et al. (2007) menyebutkan partisipasi aktif petani dalam kegiatan kelembagaan memberikan dampak positif yaitu berupa peningkatan pendapatan dari usaha tani yang sangat signifikan. Keberadaan gapoktan seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi anggota dan keberadaan hutan itu sendiri. Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan HKm dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan HKm itu sendiri. Menurut Purwita et al (2009) menyebutkan bahwa pendapatan yang rendah merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan kegiatan perambahan di dalam hutan. Kemiskinan merupakan faktor paling berpengaruh terhadap sumberdaya hutan Dien (2004). Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran keberadaan suatu kelembagaan gapoktan dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat pengelola lahan HKm sehingga masyarakat tetap memperoleh peningkatan pendapatan sedangkan keberadaan lahan HKm tetap terjaga kelestariannya.

METODE

Penelitian dilakukan di Gapoktan Beringin Jaya (berada di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo) dan Gapoktan Sinar Mulya (berada di Pekon Sukamaju Kecamatan Ulu Belu) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan kedua gapoktan merupakan gapoktan yang mengelola lahan HKm. Gapoktan Beringin Jaya merupakan gapoktan yang sudah berhasil dalam mengelola HKm. HKm Beringin Jaya merupakan HKm yang memperoleh penghargaan sebagai pengelola HKm terbaik pada tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Gapoktan Sinar Mulya merupakan gapoktan yang sampai saat ini belum terlihat prestasinya. Kedua gapoktan ini berdiri pada waktu yang hampir bersamaan dibawah pendampingan Konsorsium Kota Agung Utara. Untuk melihat apakah keberadaan gapoktan dampak memberikan dampak baik bagi peningkatan pendapatan maupun kelestarian keberadaan lahan HKm di kedua gapoktan maka perlu dilakukan analisi pendapatan dan analisi perubahan tutupan lahan di kedua areal kerja gapoktan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, Men*download* citra landsat Pengamatan dengan menggunakan *software* arc view dan analisis dokumen. Penelitian ini di laksanakan pada Bulan Januari-Februari 2017. Responden dalam penelitian ini adalah 43 orang dari total sample 1272 orang (Gapoktan Beringin Jaya sebanyak 571 dan Sinar Mulya sebanyak 701 petani). Menurut Arikunto (2000) jika populasi lebih dari 100 maka batas *error* yang digunakan adalah 10-15%. Berdasarkan ketetapan batas *error* yang telah disebutkan maka, batas *error* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 % karena lebih menunjang data. Rumus dalam penentuan sampel menggunakan rumus:

Keterangan :

n : Jumlah responden

N : Jumlah total petani pengelola lahan HKm

e : Presisi 15%

$$n : \frac{1272}{1272\ (15\%)^2+1} \quad \frac{1272}{1272\ (15\%)^2+1}$$

n : 43 responden

Jumlah responden masing-masing Gapoktan dihitung dengan rumus (Sugiyono,2007):

$$n = \frac{Ni}{N}\frac{Ni}{N} x\ ni$$

Keterangan:

n = jumlah sampel yang akan diambil.

N = jumlah total populasi pada kedua Gapoktan.

Ni = jumlah populasi pada masing-masing Gapoktan (i).

ni = jumlah responden dari masing-masing Gapoktan.

Tabel 1. Jumlah sampel di Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya

No	Nama Gapoktan	Jumlah Anggota	Jumlah Responden
1	Beringin Jaya	571	19
2	Sinar Mulya	701	24

Sampel dipilih dengan cara *purposive* dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih merupakan petani yang mengelola lahan HKm di Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis penutupan lahan dan analisis pendapatan petani dari lahan HKm. Analisis yang dilakukan pada

perubahan tutupan lahan meliputi: (1) pemulihan citra, (2) penajaman citra (*image enhancement*), (3) pemotongan citra (*Subset image*), (4) klasifikasi citra (*Image classifcation*), (5) *accuracy assesement*, (6) *overlay* hasil klasifikasi, (7) tabulasi data, (8) analisis deskriptif dan kuantitatif (Darmawan, 2002). Sedangkan analisis pendapatan dilakukan dengan cara menghitung pendapatan yang diterima dari lahan HKm dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan HKm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Pelaksanaan HKm dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); kedua, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati/walikota/gubernur); dan ketiga, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu program yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan pengelolaaan yang mengkedepankan aspek keberlanjutan. Karena suatu hal yang tidak dapat diabaikan bahwa keberadaan kawasan hutan dengan berbagai potensi keanekaragaman hayatinya, adalah sebagai penyangga kehidupan umat manusia baik masyarakat disekitarnya maupun masyarakat pada umumnya.

KPH IX Kota Agung Utara aktif dirambah oleh masyarakat sekitar kawasan hutan, sebelum terbentuknya gapoktan sebagai wadah bagi petani pengelola lahan HKm. Kesadaran dari beberapa masyarakat disekitar kawasan hutan tentang pentingnya keberadaan hutan, mereka mengajak masyarakat lain untuk menjaga keberadaan kawasan lindung tersebut.

Keberadaan gapoktan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi peningkatan ekonomi anggotanya dengan tetap menjaga kelestarian di areal HKm, karena dalam kegiatan kelembagaan gapoktan anggota diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggotanya, dengan tetap memperhatikan aspek konservasinya. Berikut hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan responden terkait dengan pendapatan anggota gapoktan dari lahan HKm. Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya merupakan 2 dari 14 gapoktan yang mengelola lahan HKm di Wilayah KPHL Kota Agung Utara. Kedua gapoktan tersebut memiliki sistem kelembagaan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan kinerja yang dicapai. Pengertian kelembagaan dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa definisi umum yang digunakan selama ini. Kartodihardjo (2006) mendefinisikan kelembagaan sebagai perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, dan konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya. Schmid (2004) mengartikan kelembagaan sebagai seperangkat ketentuan yang tersedia, merumuskan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya.

Gapoktan Beringin Jaya merupakan gabungan dari delapan kelompok tani yang anggotanya merupakan penggarap lahan HKm di register 30 wilayah KPHL Kota Agung Utara adapun kelompok tani yang tergabung di dalam Gapoktan Beringin Jaya adalah Kelompok Tani Lestari Jaya 1, Lestari Jaya 2, Lestari Jaya 3, Lestari Jaya 4, Lestari Jaya 5, Lestari Jaya 6, Lestari Jaya 7 dan Lestari Jaya 8. Gapoktan Beringin Jaya terbentuk pada tahun 2009. Gapoktan ini menerima penyerahan izin penetapan peta areal kelola HKm dari menteri kehutanan dan pada tahun 2013 dengan nomor SK.886, Menhut-II,2013 dan pada tahun 2014 menerima izin usaha pemanfaatan HKm pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanggamus dengan luas 871 ha dan jumlah anggota sebanyak 571 KK dari Bupati Tanggamus dengan No SK. B.465/34/II/2014.

Gapoktan Sinar Mulya merupakan sebuah organisasi gabungan dari lima kelompok tani yang mengelola areal HKm yaitu Kelompok Tani Delong Selatan, Delong Tengah, Delong Utara, Lungur Buntung, dan Pondok Rejo. Gapoktan ini terbentuk pada tahun 2009 dan menerima penyerahan izin penetapan peta areal kelola HKm dari menteri kehutanan pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 menerima izin usaha pemanfaatan HKm di register 39 Kota Agung Utara dengan luas 917 ha dari Bupati Tanggamus dengan No SK. 80. Menhut-II.2014.

Terbentuknya Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya didasari oleh adanya kesamaan keinginan antar petani pengelola lahan HKm di Wilayah KPHL Kota Agung Utara untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan keluarga, dari adanya tujuan yang sama antar anggota. Sebelum adanya Gapoktan, Kelompok-kelompok tani tersebut tidak berjalan dengan maksimal/jalan ditempat kemudian dengan adanya pendampingan dari KORUT (Konsorsium Kota Agung Utara), KPHL Kota Agung Utara, IPKINDO (Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia), Forum HKM (terdiri dari pengurus tiap kelompok yang tergabung dalam

gapoktan). dan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) maka terbentuklah Gapoktan Beringin Jaya dan Sinar Mulya pada tahun 2009. Proses terbentuknya kedua gapoktan ini menentukan kekuatan kelompok yang terbentuk.

Keberlangsungan kedua gapoktan sampai saat ini tidak terlepas dari peran serta *stakeholder* dalam melakukan pendampingan terhadap kedua gapoktan. Pendampingan dari *stakeholder* yang terlibat memberikan dampak positif terhadap gapoktan. Gapoktan Beringin Jaya merupakan gapoktan yang dijadikan model percontohan oleh KORUT sehingga Gapoktan Beringin Jaya lebih maju dibandingkan dengan Gapoktan Sinar Mulya dan gapoktan yang lainnya. Pembangunan SDM ketika diimplementasikan dengan baik di dalam organisasi yang produktif, dapat secara langsung berkontribusi dalam peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi (Swason dan Arnold 1996; Brown *et al.* 2000; Danish dan Usman 2010). Pendapat di atas sesuai dengan apa yang telah dilakukan Gapoktan Beringin Jaya. Gapoktan Beringin Jaya yang cenderung aktif dalam membangun SDM yang ada di dalamnya, menjadikan anggota gapoktan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal pengelolaan HKm. Kemampuan tersebut yang selanjutnya digunakan oleh gapoktan untuk pengembangan organisasi atau kelembagaan gapoktan. Dengan kemampuan yang lebih baik yang dimiliki, menjadikan gapoktan ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengelola lahan HKm terbaik pada tahun 2016 lalu.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja SDM dalam mengelola lahan Hkm. Menurut (Syamsuddin 2006) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas kinerja individu dalam organisasi keterampilan, pengalaman, kesanggupan. Menurut Senoaji (2017) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh tingkat pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Menurut Sinaga (2016) Kelompok yang sumber dayanya terkelola dengan baik akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan kelompok itu sendiri. Kinerja Gapoktan Beringin Jaya dipengaruhi oleh aktif atau tidaknya pengurus dan anggota kelompok. Hal tersebut juga yang mendasari ketika pemilihan kepengurusan atau struktur gapoktan selain melalui seleksi juga harus melalui kesanggupan dari pihak yang terpilih.

Gapoktan Sinar Mulya merupakan salah satu gapoktan yang sedang merintis untuk dapat maju seperti Gapoktan Beringin Jaya. Saat ini Gapoktan Sinar Mulya masih pada tahap berkembang, dan dari segi kinerja belum terlalu memperlihatkan hasil, namun dengan mulai aktifnya kepengurusan Gapoktan Sinar Mulya mereka mengharapkan gapoktan ini dapat maju dan berkembang beberapa tahun kedepan. Saat ini gapoktan sedang berusa membuat perencanaan agar pengembangan ekowisata air terjun tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi seluruhh anggota Gapoktan Sinar Mulya.

Berdasarkan hasil perhitungan data kuesioner, pendapatan anggota dari kedua gapoktan cenderung mengalami peningkatan dari sebelum adanya gapoktan dibandingkan dengan kondisi saat ini setelah ada gapoktan. Pendapatan anggota Gapoktan Beringin Jaya mengalami peningkatan dari rata-rata Rp. 25.473.684/ha/tahun menjadi rata-rata Rp. 29.368.421/ha/tahun. Pendapatan anggota di Gapoktan Sinar Mulya juga meningkat dari rata-rata Rp. 31.416.66/ha/tahun menjadi Rp. 37.054.042/ha/tahun. Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari budidaya kopi dan tanaman MPTs di lahan gapoktan. Peningkatan pendapatan ekonomi anggota gapoktan ternyata tidak dibarengin dengan kondisi tutupan lahan di areal kerja kedua gapoktan.

Keberadaan gapoktan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi anggotanya namun berdasarkan analisis citra terhadap tutupan lahan di areal kerja kedua gapoktan, tutupan lahan di areal kerja gapoktan cenderung berkurang. Penutupan lahan menggambarkan kontruksi vegetasi yang menutup permukaan tanah. Menurut Yusri (2011), penutupan lahan merupakan status lahan secara ekologi dan penampakan permukaan lahan secara fisik, yang dapat berubah karena adanya intervensi manusia, gangguan alam dan suksesi tumbuhan secara alami. Perubahan tutupan lahan di Gapoktan Beringin Jaya dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

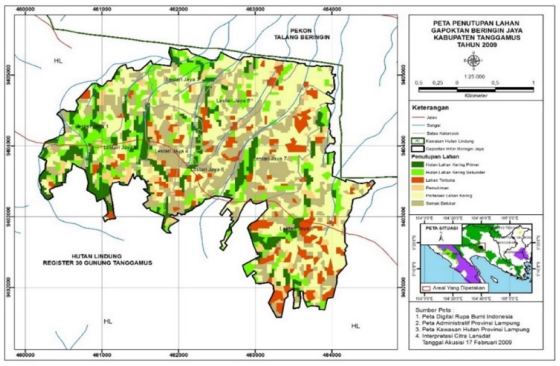

Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Gapoktan Beringin Jaya 2009 (Sumber: Lina, 2017)

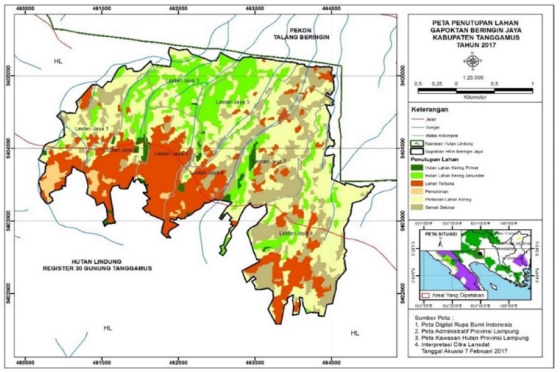

Gambar 2. Peta Tutupan Lahan Gapoktan Beringin Jaya 2017 (Sumber: Lina, 2017)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perubahan tutupan lahan di areal kerja Gapoktan Beringin Jaya mengalami perubahan. Pada tahun 2009 hutan lahan kering primer sebesar 98.04 ha menjadi 13.79 ha pada tahun 2017. Hutan lahan kering sekunder dari 118 ha meningkat menjadi 140.57 ha. Lahan terbuka pada tahun 2009 76.04 ha meningkat menjadi 197.44 ha. Pemukiman penduduk di dalam kawasan berkurang dari 45.55 ha menjadi 17.24 ha. Pertanian lahan kering bertambah dari 327.92 ha menjadi 331.15 ha. Semak Belukar dari 188.29 ha berkurang menjadi 153.84 ha.

Kondisi perubahan tutupan lahan di areal kerja Gapoktan Beringin Jaya juga terjadi pada areal kerja Gapoktan Sinar Mulya, dimana kondisi lahan terbuka saat ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2009 sebelum gapoktan terbentuk. Perubahan tutupan lahan pada areal kerja Gapoktan Sinar Mulya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

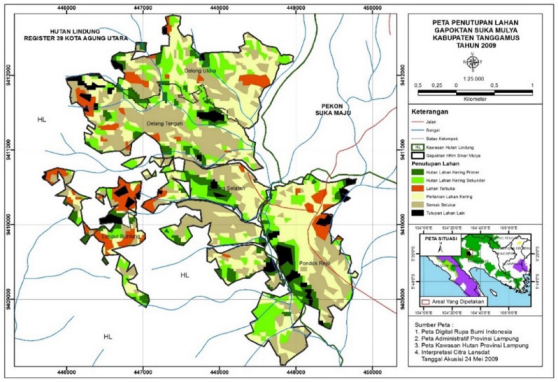

Gambar 4. Peta Tutupan Lahan Gapoktan Sinar Mulya Tahun 2009 (Sumber: Lina, 2017)

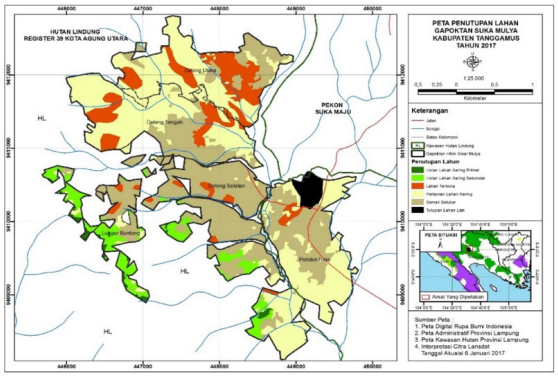

Gambar 5. Peta Tutupan Lahan Gapoktan Sinar Mulya Tahun 2017 (Sumber: Lina, 2017)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perubahan tutupan lahan di areal kerja Gapoktan Sinar Mulya mengalami perubahan. Pada tahun 2009 hutan lahan kering primer sebesar 61.75 ha menjadi 7.08 ha pada tahun 2017. Hutan lahan kering sekunder dari 125.96 ha menjadi 51.90 ha. Lahan terbuka pada tahun 2009 sebesar 55.57 ha meningkat menjadi 85.42 ha. Pemukiman penduduk di dalam kawasan meningkat dari 244,54 menjadi 309.66 ha. Pertanian lahan kering bertambah dari 233.87 ha menjadi 292.06 ha. Semak Belukar dari 233.87 ha meningkat menjadi 292.06 ha.

Perubahan tutupan lahan di areal kerja gapoktan disebabkan oleh semakin meluasnya areal pertanian, lahan terbuka pada areal kerja gapoktan disebabkan oleh adanya penggarap yang ingin melakukan perluasan lahan garapan. Dilihat dari grafik di atas pertanian lahan kering di areal kerja kedua gapoktan juga cenderung meningkat. Hal tersebut yang mungkin menyebabkan peningkatan ekonomi anggota gapoktan. Menurut Darmawan (2002), salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lahan adalah faktor sosial ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia terutama masyarakat sekitar kawasan. (Yatap, 2008) menyatakan faktor sosial ekonomi berpengaruh dominan terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) adalah kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, luas kepemilikan lahan, perluasan pemukiman dan perluasan lahan pertanian.

Wijaya (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penutupan lahan diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas dan fasilitas pendukung kehidupan serta kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah telah mendorong penduduk untuk membuka lahan baru untuk digunakan sebagai pemukiman ataupun lahan-lahan budidaya. Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah berkaitan erat dengan usaha yang dilakukan penduduk di wilayah tersebut. Perubahan penduduk yang bekerja di bidang pertanian memungkinkan terjadinya perubahan penutupan lahan. Semakin banyak penduduk yang bekerja di bidang pertanian, maka kebutuhan lahan semakin meningkat. Hal ini dapat mendorong penduduk untuk melakukan konversi lahan pada berbagai penutupan lahan.

Berkurangnya tutupan lahan di areal kerja gapoktan, menyebabkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari polhut dan pamhut yang bertugas di areal kerja masing-masing gapoktan. Menurut Kanninen *et al.* (2009) menyebutkan bahwa pengawasan yang lemah menyebabkan semakin besarnya peluang terjadi kerusakan hutan. Kondisi areal HKm yang semakin terbuka dan kurangnya tutupan lahan berupa tanaman kayu, menjadikan gapoktan harus lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap penggarap dan menyarankan untuk menanam tanaman kayu atau MPTs pada areal kerja gapoktan. Meskipun telah memiliki izin HKm penggarap diharapkan tetap memperhatikan aspek konservasi di lahan HKm dengan tetap menanam tanaman kayu sesuai dengan yang ketetapan yang dalam peraturan HKm.

SIMPULAN

Pendapatan anggota di kedua gapoktan mengalami peningkatan dari sebelum adanya gapoktan dibandingkan dengan kondisi saat ini setelah ada gapoktan. Pendapatan anggota Gapoktan Beringin Jaya mengalami peningkatan

menjadi rata-rata Rp. 3.894.737/ha/tahun. Pendapatan anggota di Gapoktan Sinar Mulya juga meningkat dari rata-rata Rp. 5.637.376/ha/tahun.

Perubahan tutupan lahan di areal kerja Gapoktan Beringin Jaya mengalami perubahan pada areal pertanian lahan kering mengalami penambahan luas sebesar 3,23 ha yaitu dari 327.92 ha menjadi 331.15 ha. Begitupula di areal kerja Gapoktan Sinar Mulya pada tahun 2009 kondisi perubahan lahan pada pertanian lahan kering bertambah seluas 58.19 ha dari 233.87 ha menjadi 292.06 ha.

Keberadaan kelembagaan disuatu gapoktan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan anggota, tetapi tidak bagi keberadaan lahan HKm yang mereka kelola dikarenakan tutupan hutan primer semakin berkurang dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka. Cipta. 370 hlm.

Darmawan, A. (2002). Perubahan Penutupan Lahan di Cagar Alam Rawa Danau. (Skripsi). Bogor: Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Departemen Kehutanan. (1999). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41_99. Htm.

Departemen Kehutanan. (2007). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016. *Peraturan Menteri Kehutanan nomor :P.37/Menhut-II/2007*.http: //www.dephut.go.id/files/P37_07.pdf

Dien. V.T. (2004). *Susceptibility to for est degradation: A case study of the application of remote sensing and GIS application in Bach Ma National Park, Tua Tien Hue Province,* Vietnam [Thesis]]. The Netherlands: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation..

Hermanto. (2007). Rancangan Kelembagaan Tani. Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Kanninen. (2009). Apakah hutan dapat tumbuh di atas uang? Implikasi penelitian deforestasi bagi kebijakan yang mendukung REDD. Bogor: Perpesktif Kehutanan No 4. CIFOR.

Purwita T., Harianto., Sinaga, B.M., Kartodihardjo, H. (2009). Analisis Keragaman Ekonomi Rumah Tangga: Studi Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Pengalengan Bandung Selatan. Bandung: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 6 (1): 53 - 68.

Senoaji, G. (2011). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. Sosiohumaniora. Vol. 13(1): 1-17.

Sinaga, D. (2016). Hubungan Sumber Daya Manusia Dan Sosial Budaya Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Senembah Tanjung Muda Hulu Kabupaten Deli Serdang. Sosiohumaniora 18 (3): 218-226.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, (2006). Analisis Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Perilaku Kepemimpinan, Kinerja Bawahan dan Pertumbuhan Usaha: Studi Kasus

Wijaya, C.I. (2004). Analisis Perubahan Penutupan Lahan di Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis. (Skripsi). Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Yatap, H. (2008). Pengaruh Peubah Sosial Ekonomi Terhadap Perubahan Penggunaan dan Penutupan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. (Tesis). Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Yusri, A. (2011). Perubahan Penutupan Lahan dan Analisis Faktor Penyebab Perambahan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. (Skripsi). Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 115 - 121
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

SISTEM SAPAAN BAHASA BALI MENURUT HUBUNGAN KEKERABATAN

I Nyoman Suwija
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali
E-mail: inyoman.suwija63@gmail.com

ABSTRAK. Sebagai bahasa ibu suku Bali, bahasa Bali masih diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mengamati eksistensi bahasa Bali seperti itu, penyusunan artikel ini bertujuan untuk memerikan sistem sapaan bahasa daerah Bali. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik Fishman (1986). Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi dan metode wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode distribusional. Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal, dibantu dengan teknik induktif dan deduktif. Kata sapaan dalam bahasa Bali cukup banyak dan bervariasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa bentuk hubungan kekerabatan yang meliputi faktor: (1) usia partisipan, (2) kedudukan dalam keluarga, (3) jenis kelamin, dan (4) hubungan keluarga langsung. Bentuk sapaan bahasa Bali tergantung situasi dan status sosial para partisipan. Artinya, pada keluarga *wangsa jaba* atau orang kebanyakan berbentuk *basa andap* atau bahasa tingkatan biasa, sedangkan untuk keluarga *triwangsa* atau bangsawan menggunakan kata-kata bahasa Bali yang halus atau *kruna alus*.

Kata kunci: kata sapaan bahasa Bali, hubungan kekerabatan, sosiolinguistik

BALI LANGUAGE SYSTEM ACCORDING TO KINSIP RELATIONSHIP

ABSTRACT. *As the mother language of tribe of Bali, the Balinese language is still taught as a local content subject in elementary, junior and senior high school education. Observing the existence of Balinese language, the preparation of this article aims to describe Balinese language greeting system. To achieve this objective, this study used the sociolinguistic theory of Fishman (1986). In the data collection is used method of observation and interview method. The collected data is analyzed by distribution method. Presentation of data analysis result used formal and informal method, assisted by inductive and deductive technique. The word greeting in Balinese is quite numerous and varied. This is due to several forms of kinship relationships that include the following factors: (1) participative age, (2) family status, (3) sex, and (4) direct family relationships. The form of Balinese language greetings depends on the situation and social status of the partisans. It means that the family wangsa jaba or ordinary people the form basa andap or ordinary language level, while for the family triwangsa or nobility use the words of the Balinese language is smooth or kruna alus.*

Key words: *the word of Balinese greeting, kinsip relationship, sociolinguistic*

PENDAHULUAN

Bahasa Bali merupakan bahasa ibu bagi masyarakat Bali. Sebagai bahasa ibu, bahasa Bali berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, pendukung kebudayaan dan lambang identitas masyarakat suk Bali. Ketiga fungsi itu dapat diamati melalui kegiatan-kegiatan anggota masyarakat dalam berkomunikasi antara sesamanya. Fungsi dan peranan bahasa Bali yang cukup besar itu mendorong penulis untuk membahas salah satu aspek kebahasaan, yaitu sistem sapaan menurut hubungan kekerabatan.

Kridalaksana (1982) mengatakan bahwa yang termasuk kata-kata sapaan dalam bahasa Bali dapat berbentuk morfem, kata-kata, dan atau frasa. Bentuk kata-kata sapaan tersebut digunakan untuk saling merujuk dalam situasi pembicaraan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan antara pembicara itu.

Penelitian ini merupakan penggambaran hasil inventarisasi sistem sapaan yang terdapat dalam bahasa Bali. Penggambaran itu dilihat dari sistem sapaan yang berlaku di dalam lingkungan keluarga serta kaitannya dengan status, adat, agama, jenis kelamin, kedudukan, dan sopan santun. Unsur-unsur kajian seperti siapa yang menyapa (si pembicara), siapa yang disapa (mitra bicara), serta topik apa yang dibicarakan dapat melahirkan kata atau frasa yang berbentuk sapaan.

Kajian ini berkaitan dengan satuan gramatikal yang berupa klausa. Sebagai satuan gramatikal, klausa dapat dianalisis berdasarkan (i) fungsi unsur-unsurnya, (ii) kategori unsur-unsurnya, dan (iii) peran unsur-unsurnya (Ramlan, 1987: 90). Di samping itu, makna yang terkandung dalam sapaan sangat erat kaitannya dengan norma-norma sosial kebahasaan yang berlaku. Dapat pula dikatakan bahwa variasi-variasi pemakaian bahasa mencerminkan pemakai bahasa atau masyarakat penuturnya.

Penelitian ini bertujuan memerikan sistem sapaan yang berlaku dalam kekerabatan masyarakat suku Bali. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori sosiolinguistik yang dikemukakan oleh Fishman (1986). Menurutnya, sosiolinguistik mengkaji tingkah laku yang meliputi latar, topik, dan fangsi interaksi. Dengan kata lain, kajian sosiolinguistik tidak memfokuskan perhatian pada fenomena kebahasaan saja, tetapi juga

memusatkan perhatian pada soal tingkah laku sikap berbahasa, tingkah laku nyata terhadap bahasa dan pemakai bahasa. Dikemukakan pula bahwa kedudukan partisipan dalam masyarakat akan mewujudkan atribut kebahasaan seperti hubungan suami dan istri, atasan dan bawahan, serta aturan-aturan khusus yang berlaku di masyarakat. Koentjaraningrat (1990) menyatakan bahwa di dalam suatu bahasa terdapat sistem penggunaan kata-kata yang dikenal dengan istilah kekerabatan. Sistem kekerabatan memiliki sangkut-paut yang erat dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat. Dipandang dari sudut cara pemakaian istilah kekerabatan pada umumnya, tiap bahasa mempunyai dua macam sistem yang disebut dengan istilah sapaan *(term of address)* dan acuan *(term of reference)*. Penggunaan istilah sapaan yang tepat terhadap seseorang dapat terjadi jika diawali dengan pengenalan tentang istilah sebutan apa yang diberikan kepada orang yang disapa (pesapa) itu. Hal ini berarti bahwa istilah menyapa dipakai jika kita meyapa atau memanggil seseorang untuk menjadi mitra bicara atau orang kedua, sedangkan istilah menyebut dipakai jika kita berbicara dengan orang lain dan menyebut-nyebut orang yang tidak terlihat dalam situasi pembicaraan atau sebutan kepada orang ketiga.

Terkait pelajaran bahasa daerah Bali, struktur masyarakat Bali dibedakan atas dua golongan, yaitu masyarakat *triwangsa* dan *wangsa jaba*. *Triwangsa* dipakai menyebut tiga kasta (*brahmana, ksatria*, dan *sudra*) yang mendapat penghormatan lewat bahasa dan boleh berbahasa biasa terhadap *wangsa jaba*. Sementara, *wangsa jaba* merupakan sebutan orang kebanyakan yang berkewajiban berbahasa Bali *alus* (menghormat) kepada *triwangsa*. Dengan demikian kata-kata sapaan bahasa Bali cukup banyak variannya.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Penerapan metode kualitatif sejalan dengan pernyataan Djajasudarma (2006:10) bahwa metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data secara deskriptif, baik tulis maupun lisan yang berkembang atau berada di masyarakat (dalam Sofyan, 2015: 263). Lebih lanjut Sofyan mengatakan bahwa terkait metode ini, data dihasilkan secara deskriptif maksudnya untuk membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat, serta kaitannya dengan fenomena-fenomena.

Metode deskriptif dilengkapi dengan tiga metode dan teknik, yaitu metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, serta metode dan teknik penyajian hasil analisis data (Sudaryanto, 1982).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudaryanto (1993: 133) bahwa dalam metode simak digunakan teknik dasar yang meliputi teknik sadap, libat cakap, simak bebas libat cakap, rekam, dan catat (dalam Sofyan: 2015: 263).

Selanjutnya menurut Firdaus (2011: 226), Analisis data, menggunakan metode padan, adalah metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan diagonal dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa, terlepas dari bahasa yang bersangkutan (Firdaus, 2011: 226). Penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal, dibantu dengan teknik induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bilamana seseorang berbicara kepada orang lain, penggunaan bentuk-bentuk sapaan akan sangat tergantung pada hubungan antara penyapa dengan pesapa serta ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: jenis kelamin, usia, kedudukan, penghargaan, sopan santun, dan azas kekeluargaan. Penggunaan kata-kata sapaan sangat erat kaitannya dengan situasi kemasyarakatan dalam kehidupan budaya.

A. Sapaan Menurut Usia

Faktor usia cukup berpengaruh di dalam kesopanan bertutur sapa. Tidak sembarang kata-kata boleh diucapkan oleh seorang yang lebih muda usianya kepada lawan bicara yang usianya lebih tua. Begitu pula yang lebih tua terhadap yang usia muda, walaupun yang tua lebih leluasa berbicara menurut adat dan budaya, namun bukan berarti keleluasaan itu tanpa batas-batas kesopanan dalam bertutur sapa. Misalnya, yang pantas disapa *adi* 'adik' disapa *adi,* yang pantas disapa *beli* 'kakak laki-laki' disapa *beli,* yang pantas disapa *panak* 'anak' disapa *panak,* yang pantas disapa *bapa* 'ayah' disapa *bapa,* yang pantas disapa *mémé*'ibu' disapa *mémé,* yang pantas disapa *pekak* 'kakek' disapa *pekak,* yang pantas disapa *dadong* 'nenek' disapa *dadong*,yang pantas disapa *uwa* 'paman' disapa *uwa,* yang pantas disapa *bibi* 'bibi' disapa *bibi,* dan banyak lagi yang lainnya.

Penggunaan kata *cai/nyai* 'kamu' tidak boleh digunakan dalam percakapan dengan sanak famili atau orang lain, terutama oleh yang lebih muda usianya terhadap yang lebih tua. Misalnya, **Made Budi** adalah seorang adik dari **Wayan Raka**. Untuk menanyakan I Wayan Raka akan ke mana oleh Made Budi, tidak boleh menggunakan kalimat berikut.

(1) Cai lakar luas kija to Yan?
'Kamu akan pergi ke mana Wayan?'

Kalimat pertanyaan tersebut sangat umum dan boleh diucapkan dengan mengganti kata sapaannya, sebagai berikut.

(1a) *Bli lakar luas kija to, Bli?*
'Kakak akan pergi ke mana, Kak?'

Demikian juga misalnya **Made Budi** mau menanyakan kakak perempuannya yang bernama **Putu**

Lestari. Made Budi tidak boleh menggunakan kalimat berikut.

(1b) *Nyai lakar luas kija, Luh?*
'Kamu akan pergi ke mana, Luh?'

Kata *aké*'aku' juga tidak sopan diucapkan oleh orang yang usianya lebih muda kepada yang lebih tua, apalagi di kalangan bangsawan atau *Triwangsa*. Misalnya, seoarang anak kepada ayahnya. Perhatikan contoh berikut.

(2) *Aké lakar luas ka Jakarta, Bapa.*
'Aku akan berangkat ke Jakarta, Bapak.'
(3) *Aké lakar luas ka Jakarta, Cok.*
'Aku akan berangkat ke Jakarta, Cokorda.'

Bagi orang yang lebih tua dan atau bagi kalangan bangsawan (*brahmana* atau *ksatria*), penggunaan kata *aké*'aku' pada kalimat (2) dan (3) kurang sopan, sehingga lumrah digunakan kata *iang*, *tiang* 'saya'. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi kalimat (2a), (2b), dan (3a) di bawah ini.

(2a) *Iang lakar luas ka Jakarta, Bapa.*
'Saya akan berangkat ke Jakarta, Bapak.'
(2b) *Tiang lakar luas ka Jakarta, Bapa.*
'Saya akan berangkat ke Jakarta, Bapak.'
(3a) *Titiang jagi luas ka Jakarta, Ratu/Cok/Gusti/Gung/Dewa.*
'Saya akan berangkat ke Jakarta, Ratu/Cok/Gusti/Gung/Dewa.'

B. Sapaan Menurut Kedudukan dalam Keluarga

Penyapa dan pesapa harus menyadari kedudukannya di dalam keluarga pada saat berinteraksi. Masing-masing harus memilih kata sapaan yang tepat berdasarkan tata krama dan norma adat istiadat. Sapaan menurut kedudukan ini membedakan usia dan strata sosial, sehingga sapaan yang digunakan akan tampak bervariasi. Misalnya: antara menantu dan mertua, antara kakak dan adik, meskipun dalam kedudukan dan status sama tetapi strata sosialnya berbeda.

1) Sapaan *Bapa/Nanang* dan *Mé/Mémé*

Sapaan *Pa/Bapa* atau *Nang/Nanang* ditujukan kepada seorang tua laki-laki (ayah) atau ayah mertua dari keluarga orang kebanyakan (*wangsa jaba*) yang disapa oleh anaknya atau oleh menantunya. Contohnya:

(4) *Nyén ngejang baju daki dini, Pa?*
(5) *Dija ngalih nyuh nguda lakar saté, Nang?*

Demikian seorang anak atau menantu misalnya yang bernama **Luh Rai** menyapa ayahnya atau mertua laki-lakinya. Kalimat tersebut berarti,

(4) 'Siapa menaruh baju kotor di sini, Pak?
(5) 'Di mana mencari kelapa muda untuk saté, Yah?

Demikian jika yang disapa seorang tua laki-laki. Jika yang disapa seorang perempuan merupakan ibu atau mertua perempuan dari keluarga orang kebanyakan (*wangsa jaba*), sapaannya *mé* atau *mémé* seperti contoh berikut.

(4a) *Nyén ngejang baju daki dini, Mé?*
(5a) *Dija ngalih nyuh nguda lakar saté, Mé?*

Demikian seorang anak atau menantu misalnya yang bernama **Putu Darma** menyapa ibunya atau mertua perempuannya. Kalimat tersebut berarti,

(4a) 'Siapa menaruh baju kotor di sini, Bu?
(5a) 'Di mana mencari kelapa muda untuk saté, Bu?

2) Sapaan *Aji/Ajung* dan *Biang/Ibu*

Sapaan *Aji/Ajung* dikenakan bagi seorang tua laki-laki (ayah) atau ayah mertua dari keluarga orang keturunan *triwangsa* (*brahmana, ksatria, wesia*) yang disapa oleh anaknya atau oleh menantunya. Contohnya:

(6) *Bin pidan payu luas ka Lombok, Jik?*
(7) *Dija ada anak ngadep nasi séla, Jung?*

Demikian seorang anak atau menantu keluarga bangsawan misalnya yang bernama **Cokorda Isteri Laksmi** menyapa ayahnya atau mertua laki-lakinya. Kalimat tersebut berarti,

(6) 'Kapan jadi berangkat ke Lombok, Ayah?'
(7) 'Di mana ada orang menjual nasi ketela, Ayah?'

Sapaan *jik* singkatan dari kata *ajik* 'ayah' sangat umum dikenakan terhadap ayah keturunan *brahmana* (*ida bagus*) maupun *ksatria* (*anak agung, cokorda*, *gusti*), sedangkan sapaan *jung* singkatan dari kata *ajung* 'ayah' hanya digunakan oleh keturunan *ksatria* (anak agung dan cokorda) tertentu saja, maksudnya kebiasaan keluarga tertentu saja.

Demikian jika yang disapa seorang ayah atau mertua tua laki-laki. Jika yang disapa seorang perempuan merupakan ibu atau mertua perempuan dari keluarga orang bangsawan (*triwangsa*), sapaannya *biang* atau *ibu,* seperti contoh berikut.

(6a) *Bin pidan payu luas ka Lombok, Biang?*
(7a) *Dija ada anak ngadep nasi séla, Ibu?*

Demikian seorang anak atau menantu keluarga bangsawan misalnya yang bernama **Ida Bagus Made Sika** menyapa ibunya atau mertua perempuannya. Kalimat tersebut berarti,

(6a) 'Kapan jadi berangkat ke Lombok, Ibu?'
(7a) 'Di mana ada orang menjual nasi ketela, Ibu?'

Bagi masyarakat *triwangsa*, sapaan *biang* 'ibu' hanya digunakan oleh keluarga tertentu saja terutama keturunan *dewa, brahmana,* dan *gusti* (tergantung kebiasaan). Sementara itu, sapaan *ibu* 'ibu' lebih umum digunakan oleh keluarga anak agung dan cokorda.

3) Sapaan *Ning/Cening* dan *Gus/Gung*

Seorang anak laki-laki dari keturunan orang kebanyakan (*Wangsa Jaba*) disapa oleh ayah, ibu, atau

mertuanya dengan menyebut namanya atau sapaan *Ning/Cening* seperti pada contoh berikut.
(8) *Aduh ... eda menék tegeh-tegeh,* ***Ning****!*
(9) *Jani* ***Cening*** *suba kelih adané, patut jemet malajah!*

Demikian bahasa seorang tua misalnya **Pan Kaler** atau **Men Lecir** menyapa seorang anak laki-laki keturunan orang kebanyakan (*wangsa jaba*) misalnya I **Ketut Darma**, jadi mereka tidak menyebut nama I Ketut Darma atau Darma, melainkan *Ning* atau *Cening*. Kalimat tersebut berarti
(8) 'Aduh ... jangan naik tinggi-tinggi, Nak!'
(9) 'Sekarang Nanak sudah makin dewasa, harus rajin belajar!'

Kalimat di atas untuk anak-anak keturunan orang kebanyakan (*wangsa jaba*). Jika yang disapa anak laki-laki dari keturunan orang bangsawan (*triwangsa*) akan menggunakan sapaan *Gus/Gung* seperti pada kalimat seperti contoh di bawah ini.
(8a) *Aduh ... eda menék tegeh-tegeh,* ***Gus****!*
(9a) *Jani* ***Gung*** *ampun duur adané, patut jemet malajah!*

Demikian bahasa seorang dewasa atau tua ketika menyapa seorang anak laki-laki keturunan bangsawan (*triwangsa*) misalnya **Ida Bagus Rai** atau **Anak Agung Mahendra,** jadi mereka tidak menyebut nama Gus Rai atau Gung Mahendra, melainkan *Gus* atau *Gung*. Kalimat tersebut berarti
(8a) 'Aduh ... jangan naik tinggi-tinggi, Gus?'
(9a) 'Sekarang Nanak sudah makin dewasa, harus rajin belajar!'

Sapaan dengan kata *gus* 'nak' digunakan untuk menyapa anak laki-laki keturunan kasta brahmana, sedangkan kata *gung* 'nak' digunakan untuk menyapa anak laki-laki keturunan anak agung, gustu agung, dan dewa agung.

4) Sapaan *Luh* dan *Gék/Yuk*

Sapaan *Luh* dan *Gék/Yuk* dikenakan terhadap seorang anak perempuan yang disapa oleh ayah, ibu, atau mertuanya. Sapaan *Luh* untuk anak perempuan dari keluarga orang kebanyakan (*Wangsa Jaba*), sedangkan sapaan *Gek/Yuk* bagi keturunan keluarga bangsawan (*Triwangsa*). Perhatikan contoh berikut.
(10) *Tulung jemakang jep bapa payung,* ***Luh****!*
(11) *Tulung jemakang jep ajik payung* ***Gék/Yuk****!*

Demikian seorang ayah misalnya bernama **Pak Gunawan** atau orang tua *triwangsa* **Gung Aji Satria** kepada seorang anak perempuan misalnya **Luh Manik** (*wangsa ja*ba) dan atau **Ida Ayu Laksmi** (*triwangsa*), yang terjemahannya sebagai berikut.
(10) 'Tolong ambilkan ayah payung, **Luh**!'
(11) 'Tolong ambilkan ayah payung, **Gek/Yuk**!'

5) Sapaan *Buk, Méméné* atau Menyebut Nama

Seorang suami akan menyapa isterinya dengan kata *buk* atau menyebut nama isteri atau nama singkatnya. Misalnya isterinya bernama *Luh Manik*, maka sapaannya seperti pada contoh kalimat berikut.
(12) *Suba suud nyakan,* ***Buk****?*
(12a) *Suba suud nyakan,* ***Méméné****?*
(12b) *Suba suud nyakan,* ***Nik****?*

Kalimat-kalimat di atas digunakan oleh seorang suami keturunan orang kebanyakan (*wangsa jaba*) yang misalnya bernama **Bapak Gede Hartawan** untuk menyapa isterinya yang bernama **Ni Made Wardani**, tidak menyebut nama asli isterinya. Terjemahan kalimat tersebut sebagai berikut.
(12) 'Sudah selesai memasak, Bu?'
(12a) 'Sudah selesai memasak, Bu?'
(12b) 'Sudah selesai memasak, Manik?'

Jika seorang suami *wangsa jaba* membicarakan isterinya kepada orang ketiga akan digunakan kata milik *kurenan tiangé* 'isteri saya' atau menyebut nama anak sulungnya, seperti pada contoh kalimat berikut.
(13) *Luh Rai suba luas ajaka* ***kurenan tiangé****.*
(13a) *Luh Rai suba luas ajaka* ***ibukné Budi****.*

Misalnya sang isteri bernama **Luh Manik**, anak sulungnya bernama **Budiasa**, sang suami menyebut isterinya dengan bentuk sapaan *kurenan tiange* 'isteri saya' dan atau *ibukne Budi* 'ibunya Si Budi'. Jadi, si pembicara tidak akan menyebut nama isterinya. Terjemahan selengkpnya kalimat di atas sebagai berikut.
(13) 'Luh Rai sudah pergi bersama isteri saya'
(13a) 'Luh Rai sudah pergi bersama ibunya Budiasa'

6) Sapaan *Pak* atau *Bapané*

Seorang isteri akan menyapa suaminya dengan kata *Pak* atau *bapané*. Berbeda dengan sapaan suami terhadap isteri yang dapat menyebut nama isteri. Pada sapaan seorang isteri tidak umum menyebut nama suami. Hal ini sudah menjadi tradisi bahwa dianggap tabu atau kurang hormat jika seorang isteri menyebut nama suaminya. Perhatikan contoh berikut!
(14) *Bapak sing nyidang libur buin puan,* ***Pak****?*
(14a) *Nyén maan giliran ngayah banjar jani,* ***Bapané****?*

Demikian seorang isteri keturunan *wangsa jaba* misalnya bernama **Luh Kartika Sari**, ketika bertanya kepada suaminya yang bernama I Made Lara, tidak akan menyebut nama suami, melainkan dengan sapaan seperti di atas, yang terjemahnnya sebagai berikut.
(14) 'Ayah tidak bisa libur lagi du hari, Yah?'
(14a) 'Siapa mendapat giliran ngayah sekarang, Pak?'

Selanjutnya, jika seorang isteri membicarakan suaminya kepada pihak lain, sangat umum menggunakan kata milik *kurenan tiangé* 'suami saya' atau menyebut nama anak sulungnya. Misalnya sang isteri bernama Suparta, anak sulungnya bernama Arik, sang isteri menyebut suaminya dengan bentuk sapaan di bawah ini.

(15) *Pak Madé suba luas ajaka* ***kurenan tiangé****.*
'Pak Made sudah pergi bersama suami saya'

(15a) *Pak Made suba luas ajaka* ***bapaknéArik****.*
'Pak Made sudah pergi bersama bapaknya Arik'

7) Sapaan *Kak/Pekak* dan *Dong/Dadong*

Seorang cucu akan menyapa kakeknya dengan kata *kak* atau *pekak.* Berbeda dengan sapaan suami terhadap isteri yang dapat menyebut nama isteri. Pada sapaan seorang isteri tidak umum menyebut nama suami. Contoh kalimat berikut.

(16) *Kak sing bisa masatua Bali,* ***Kak****?*

(16a) *Dong, pidan Dadong taén masekolah?*

Demikian sapaan **Nyoman Mandia**, seorang cucu keturunan *wangsa jaba* menyapa kakeknya yang bernama Pekak Budi, menggunakan sapaan *Kak* 'Kakek', tidak menyebut nama kakeknya. Terjemahan kalimat di atas sebagai berikut.

(16) 'Kakek tidak bisa mendongeng Bali, Kek?'

(16a) 'Nek, dulu Nenek petnah bersekolah?'

C. Sapaan Menurut Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan munculnya istilah-istilah seperti pria, wanita, ayah, ibu, nenek, kakek, suami, istri, paman, bibi, dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Bali juga memiliki sejumlah kata atau istilah yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

1) Sapaan untuk Laki-laki

Ada sejumlah kata sapaan bahasa Bali yang biasa digunakan dalam bertutur sapa, khususnya yang terkait dengan jenis kelamin laki-laki sebagai berikut.

(a) Sapaan laki-laki bangsawan (*triwangsa*):
gus, gung, cok 'nak' (untuk anak-anak)
jik, aji, jung 'ayah' (untuk bapak/ayah)
jung wa/uwa 'paman' (untuk paman)
kakiang, gung kak 'kakek' (untuk kakek-kakek)

(b) Sapaan laki-laki orang kebanyakan (*wangsa jaba*):
ning, gus 'nak' (untuk anak-anak)
pa, nang, pak 'ayah' (untuk bapak/ayah)
wa/uwa 'paman' (untuk paman)
kak, kaki 'kakek' (untuk kakek-kakek)

(b)Sapaan laki-laki bangsawan (*triwangsa*):
gus/gung 'nak' (untuk anak-anak)
jik, aji, jung 'ayah' (untuk bapak/ayah)
jung wa/uwa 'paman' (untuk paman)
kakiang, gung kak 'kakek' (untuk kakek-kakek)

(b) Sapaan laki-laki orang kebanyakan (*wangsa jaba*):
ning, gus 'nak' (untuk anak-anak)
pa, nang, pak 'ayah' (untuk bapak/ayah)
wa/uwa 'paman' (untuk paman)
kak, kaki 'kakek' (untuk kakek-kakek)

2) Sapaan untuk Perempuan

Di samping kata sapaan untuk laki-laki, ada juga sejumlah kata sapaan untuk perempuan yang biasa digunakan dalam bertutur sapa bahasa Bali sebagai berikut.

(a) Sapaan perempuan bangsawan (*triwangsa*):
gék, yuk 'mbak yu' (untuk anak-anak)
biang, bu, ibu 'ibu/bu' (untuk ibu-ibu)
ni, niang 'nenek' (untuk nenek-nenek)
pi/kumpi 'kumpi' (untuk kumpi)

(b) Sapaan perempuan orang kebanyakan (*wangsa jaba*):
gék, luh, yuk 'mbak yu' (untuk anak-anak)
buk, mek, mak 'ibu/bu' (untuk ibu-ibu)
dadong, odah 'nenek' (untuk nenek-nenek)
pi/kumpi 'kumpi' (untuk kumpi)

Berikut disajikan daftar bentuk sapaan yang disertai dengan peran, usia, dan fungsi penyapa dan pesapa.

Tabel 1. Daftar Kata Sapaan Berdasarkan Peran, Usia, dan Fungsinya

No.	Sapaan	Peran	Usia Penyapa	Fungsi Pesapa
1	*bapa/bapak*	pesapa	lebih muda	ayah dari penyapa atau orang lain (kebanyakan)
2	*aji/ajung*	pesapa	lebih muda	ayah dari penyapa atau orang lain (bangsawan)
3	*mémé/ibu/ mamak*	pesapa	lebih muda	ibu dari penyapa atau orang lain
4	*bu/ibu, biang*	pesapa	lebih muda	ibu dari penyapa atau orang lain (bangsawan)
5	*bli/beli*	pesapa	lebih muda	kakak laki penyapa atau orang lain (kebanyakan)
6	*wi*	pesapa	lebih muda	kakak laki penyapa atau orang lain (bangsawan)
7	*embok*	pesapa	lebih muda	kakak wanita penyapa atau orang lain
8	*yan, dé, man, tut, tu, mang, dék,*	pesapa	lebih tua	adik penyapa orang kebanyakan
9	*gus/gék*	pesapa	lebih tua	adik penyapa orang bangsawan
10	*wa/uwa*	pesapa	lebih muda	paman dari penyapa (orang kebanyakan)

11	*jung wa/ ajung wa*	pesapa	lebih muda	paman dari penyapa (orang bangsawan)
12	*bik/bibik*	pesapa	lebih muda	bibik dari penyapa
13	*kak/pekak/ kiang kaki*	pesapa	lebih muda	kakek dari penyapa (orang kebanyakan)
14	*kakiang/gung kak*	pesapa	lebih muda	kakek dari penyapa (orang bangsawan)
15	*dong/ dadong/odah mbah,nini*	pesapa	lebih muda	nenek dari penyapa (orang kebanyakan)
16	*nini/niang/ gung nini*	pesapa	lebih muda	nenek dari penyapa (orang bangsawan)
17	*pak yan, pak de, pak man, pak tut, pak tu, pak dek*	pesapa	lebih muda	bapak-bapak dari orang kebanyakan disapa oleh yang lebih muda
18	*buk yan, buk de, buk man, buk tut, buk tu, buk dek,*	pesapa	lebih muda	ibuk-ibuk dari orang kebanyakan disapa oleh yang lebih muda

D. Sapaan Menurut Hubungan Keluarga Langsung

Hubungan keluarga langsung masih dibedakan menjadi hubungan langsung vertikal (urutan orang-orang yang melahirkan), dan hubungan langsung horizontal/ hubungan sejajar (hubungan antarorang yang masih mempunyai hubungan satu ayah, satu ibu, satu nenek.

1) Hubungan Keluarga Langsung Vertikal

Bentuk-bentuk sapaan bagi orang-orang yang terikat dalam hubungan langsung vertikal adalah sebagai berikut.

(a) Sapaan *Pekak* dan *Dadong*

Pekak dan *dadong* adalah bentuk sapaan untuk orang tua laki dan perempuan dari ayah/ibu. Dapat berarti kakek dan nenek. Sapaan *pekak* sering disingkat *kak* dan *dadong* disingkat *dong*. Dalam percakapan langsung sebutan *pekak* dan *dadong* dapat berdiri sendiri tanpa tambahan kata apa pun di belakangnya. Perhatikan contoh data berikut ini.

(17) *Pekak suba ngajeng?*
'Kakek sudah makan?'
(17a) *Suba ngajng busan, Kak?*
'Sudah makan tadi, Kek?'
(18) *Dija dadong lakar sirep?*
"Di mana nenek akan tidur?'
(18a) *Dija lakar sirep, Dong?*
"Di mana akan tidur, Nek?'

Kalimat (17 dan 18) menunjukkan komunikasi dengan orang yang usianya jauh lebih tua sangat memperhatikan nilai-nilai kesopanan bertutur sapa, sesuai tradisi masyarakat Bali. Kata-kata seperti *ngajeng* 'makan' pada kalimat (17), juga kata sirep 'tidur' pada kalimat (18) memiliki nilai rasa yang lebih halus dari kata yang biasa dipakai dengan orang sebaya yaitu *ngalih nasi* atau *madaar* untuk kata *ngajeng* 'makan' dan kata *pules* untuk kata *sirep* 'tidur'.

(b) Sapaan *Bapa* dan *Mémé*

Bapa dan *mémé*berarti 'ayah' dan 'ibu'. Selain *bapa, bapak* 'ayah' digunakan juga bentuk sapaan lain, yaitu *mémé, ibuk,* dan *mamak* 'ibu'. Dalam percakapan sehari-hari sapaan *bapa* sering disingkat *pa* atau *pak,* dan kata *mémé* disingkat *mé* atau *buk* atau *mak.* Perhatikan contoh di bawah ini.

(19) *Bapa lakar kija?*
'Ayah mau kemana?'
(20) *Meme suba manjus?*
'Ibu sudah mandi?'

Sapaan *bapa* 'ayah' dan *meme* 'ibu' di atas digunakan bagi mayarakat Bali dari strata sosial yang paling umum. Kata sapaan *bapa* 'ayah' dan *meme* 'ibu' untuk *triwangsa* atau kaum bangsawan adalah aji/ajung 'ayah' dan ibu/biang 'ibu'.Perhatikan contoh kalimat berikut!

(21) *Aji/ajung jagi ngajeng mangkin?*
'Ayah mau makan sekarang?'
(22) *Dija ibu/biang numbas wastra ndek punika?*
'Di mana ibu membeli kain ndek itu?'

(c) Sapaan *Ning* dan *Luh*

Sapaan *ning* singkatan dari *cening* 'nak'digunakan untuk menyapa anak laki-laki di kalangan masyarakat umum. Sapaan *luh* singkatan dari *iluh* dipakai untuk menyapa anak-anak perempuan dari kalangan orang kebanyakan. Sebagai contoh:

(23) *To ngudiang jag neyebeng uli tuni, Ning?*
'Mengapa selalu cemberut dari tadi, Nak?'
(24) *Memeh jegegne, kal kija to Luh?*
'Aduh, cantik sekali, akan ke mana itu Nak?'

Sapaan anak laki-laki untuk golongan *triwangsa* atau bangsawan menggunakan kata *gus/gung/cok* 'nak' dan untuk anak perempuan dari *triwangsa* menggunakan kata *gek*/*gung ayu/cok* 'nak' seperti pada contoh berikut.

(25) *Gung Gus jagi lunga kija mangkin?*
'Gung Gus mau ke mana sekarang?'
(26) *Ring dija mangkin ngranjing Cok?*
'Di mana sekarang sekolah Cok?'
(27) *Yu gek sampun marayunan wawu?*
'Yu gek sudah makan tadi?'
(29) *Malih pidan jagi durus malancaran, Cok?*
'Kapan akan jadi melancong, Cok?'

2) Hubungan Keluarga Langsung Horizontal

Bentuk-bentuk sapaan yang digunakan untuk menyapa orang-orang yang terikat dalam hubungan langsung horizontal sebagai berikut.

(a) Sapaan *Beli*

Kata sapaan *beli* berarti 'kakak laki-laki'. Dalam percakapan sehari-hari sering disingkat *Bli.* Kata sapaan *beli* bersifat terbatas (artinya hanya dapat digunakan untuk menyapa kakak laki-laki), serta dapat digunakan dalam sapaan langsung dan tak langsung. Perhatikan contoh berikut.

(30) *Bli, dija ada anak ngadep don lontar?*
'Kak, di mana ada orang menjual daun lontar?'

(31) *Dija kurenan bline magae, Bli?*
'Dimana istrimu bekerja, Kak?'

(32) *Suba ulihang Bli bukune Luh Rai?*
'Sudah Kakak kembalikan bukunya Luh Rai?'

(**b) Sapaan *Mbok***

Kata sapaan *mbok* berarti 'kakak perempuan'. Kata sapaan *mbok* juga bersifat terbatas (artinya hanya dapat digunakan untuk menyapa kakak perempuan), serta dapat digunakan dalam sapaan langsung dan tak langsung. Perhatikan contoh berikut.

(33) *Mbok, dija mbok kuliah jani?*
'Kak, di mana kakak kuliah sekarang?'

(34) *Saja kurenan mboke suba pensiun, Mbok?*
'Benar suaminya kakak sudah pensiun, Kak?'

(c) Sapaan *Urutan Kelahiran*

Kata sapaan urutan kelahiran meliputi: *yan*/*wayan*, *de/made/gede, man/nyoman, tut/ketut, tu/putu, dek/kadek,* dan *mang/komang*. Semua kata sapaan tersebut bersifat netral (dapat digunakan untuk menyapa laki-laki dan atau perempuan) dan dapat digunakan dalam sapaan langsung dan tak langsung. Perhatikan contoh berikut.

(35) *Lakar kija jani, Yan?*
'Akan ke mana sekarang, Yan'

(36) *Ngudiang entungang jukute, De?*
'Mengapa dibuang sayurnya, De?'

(37) *Man, payu cai/nyai ngabaang mboke nasi?*
'Man, jadi kamu membawakan kakakmu nasi?'

(d) Sapaan *Uwa*

Sapaan *uwa* berarti 'paman'. Kata *uwa* digunakan untuk menyapa saudara laki dari ayah atau ibu. Dapat digunakan dalam sapaan langsung dan tak langsung. Perhatikan contoh data berikut ini.

(38) *Uwa, pidan uwa teka uli Jakarta?*
'Paman, kapan paman datang dari Jakarta?'

(39) *Buin pidan odalan di pura desa, Uwa?*
'Kapan odalan di pura desa, Paman?'

(40) *Uwa,pidan meli kedis titiran ane ba duur to?*
'Paman, kapan membeli perkutut yang di atas itu?'

(e) Sapaan *Bibik*

Kata sapaan *bibik* berarti 'bibi'. Kata sapaan *bibik* yang sering disingkat *bik* digunakan untuk menyapa adik perempuan dari ayau dan atau ibu. Dapat digunakan dalam sapaan langsung dan tak langsung. Perhatikan contoh berikut ini.

(41) *Dija meli kain ndek ane asli, Bik?*
'Di mana membeli kain ndek yang asli, Bik?'

(42) *Bibik, jani lakar malali kuman tiang?*
'Bibik, sekarang mau main ke rumah saya?'

SIMPULAN

Kata sapaan dalam bahasa Bali cukup banyak dan bervariasi. Hal itu disebabkan oleh bentuk hubungan kekerabatan yang meliputi faktor: (1) usia partisifan, (2) kedudukan dalam keluarga, (3) jenis kelamin, dan (4) hubungan keluarga langsung. Penggunaan bentuk-bentuk sapaan dalam bahasa Bali dapat mengalami perubahan bentuk atau varian tergantung situasi pembicaraan dan dan status sosial para partisipan. Artinya, sapaan dalam bentuk bahasa biasa digunakan pada keluarga *wangsa jaba* atau orang kebanyakan dan yang termasuk kata-kata bahasa Bali halus digunakan pada keluarga *triwangsa* atau bangsawan karena bahasa Bali mengenal sistem *anggah-ungguh kruna* atau tingkat-tingkatan kata.

DAFTAR PUSTAKA

Djajasudarma, T.F. (2003). *Analisis Bahasa Sintaksis dan Semantik*. Bandung: Uvula Press Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

Firdaus, W. (2011). Kata-Kata Serapan Bahasa Aceh dari Bahasa Arab: Analisis Morfofonemis. *Sosiohumaniora*, Vol. 13 (2): 223-234.

Fishman, J.A. (1986). *Directions in Sociolinguistics: Etnography of Communi-cations.* New Holt: Renehard and Winston

Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial.* Jakarta: Dian Rakyat.

Kridalaksana, H. (1982). Kamus lingustik. Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Ramlan, M. (1987). Sintaksis. Yogyakarta: C.V. Karyono.

Sofyan, A.N. (2015). Frasa Direktif yang Berunsur Di, Dari, Dan Untuk Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Sintaktis dan Semantis. *Sosiohumaniora*. Vol. 17 (3): 262-266

Sudaryanto. (1982). *Metode Linguistik: Kedudukan, Aneka Isinya, dan Faktor Penentu Wujudnya.* Yogyakarta: Fak. Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 122 - 131
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

POLITIK IDENTITAS ETNIK ASLI PAPUA BERKONTESTASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SORONG

Ferinandus Leonardo Snanfi, Muhadjir Darwin, Setiadi, dan Hakimul Ikhwan
Program Studi S3 Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
E-mail: ferisnanfi@yahoo.com

ABSTRAK. Tujuan penelitian, (1) Untuk mengetahui bagaimana politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. (2) Untuk mengetahui bagaimana etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Otonomi khusus melahirkan politik identitas etnik, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Kedua etnik asli Papua saling marginalisasi dalam strategi isu kampaye politik identitas, family, marga, kampung, organisasi etnik, gereja, televisi,spanduk, koran, elit DPRD Kota. Kedua etnik tidak bersatu dikarenakan egosime budaya, adat, diantara kedua etnik asli Papua itu sendiri di Kota Sorong. Tujuan politik identitas etnik untuk menguasai sumber daya ekonomi (dana) otsus Kota Sorong. (2) Alasan etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dikarena etnik Maybrat mempunyai perjanjian politik yaitu etnik Maybrat walikota dan etnik Makassar wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Serta mengguasai pasar umum, transportasi kendaraan umum.

Kata kunci: Politik Identitas Etnik, Asli Papua Berkontestasi, Pemilihan Kepala Daerah.

THE IDENTITY POLITICS OF PAPUAN INDIGENOUS ETHNICS IN CONTESTATION OF REGIONAL CHIEF ELECTION IN SORONG CITY

ABSTRACT. *This research was aimed (1) to know the identity politics of Papuan indigenous ethnics identity in contesting to seize power in regional chief election of Sorong City. (2) to know how Papuan indigenous ethnics in collaboration with non-Papuan ethnics in seizing power of regional chief of Sorong City. Qualitative research method was used.The research results showed that (1) Special Autonomy (Otsus) bring forth identity politics of village egoism ethnics, margaism, culture, family, to seize power in voting regional chief in Sorong City. Both Papuan indigenous ethnics marginalized to each other in issues of primordialism identity politic campaign, village, culture, clan, language. Strategy of issues of identity politics campaign, family, clan, village, ethnical organization, church, television, banner, newspaper, elite of city DPRD. Both ethnics did not unity because of cultural egoism, custom, among both Papuan indigenous ethnics themselves in Sorong city. The political objective of ethnics identity is to dominate economic resource of Otsus's fund of Sorong City. (2) the reason of Papuan ethnics collaborated with non-Papuan ethnics are for the political agreement in seizing power in voting regional chief in Sorong City, Maybrat ethnics for major and Makassar ethnics for deputy major. The collaboration has dominated the public market, public transportation and easy to get custom land.*

Key words*: Ethnics Identity Politics, Papuan Indigenous to Contest, Regional Chief Election.*

PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini, melihat politik identitas etnik asli Papua yaitu, etnik Maybrat dan etnik Moi menggunakan identitasnya masing-masing dalam berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala di Kota Sorong. Politik identitas etnik itu, dimainkan dalam kehidupan sehari-hari. Etnik Maybrat dan etnik Moi. Dari budaya, adat, kampung, keluarga, marga dan egoisme etnik masing-masing yang tertanam dalam diri mereka berdua dan ingin mendominasi diantara satu etnik dengan yang lainnya. Berbagai akatifitas sehari-hari dari, pendidikan, politik, birokrasi pemerintahan dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari di Kota Sorong.

Etnik Maybrat dan etnik Moi, sehari-hari menggunakan identitasnya dalam ranah dinamika politik pemilihan kepala daerah yang di selengarai oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Republik Indonesia, dalam pesta lima tahunan sekali dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong. Kedua etnik Maybrat dan etnik Moi memajukan pemimpin yang berkualitas dari keduan etnik dalam mencalonkan dirinya. Namun mereka dua tidak, bergandengan tanggan bersama untuk merebut kekuasaan di Kota Sorong. Kenapa kedua etnik asli Papua ini tidak bergandengan tanggan untuk merebut kekuasan di Kota Sorong, itu disebabkan karena ada egoisme kulurtur dari budaya, etnik, marga, kampung dan sebangainya.

Dinamika dalam proses masa-masa kampaye inilah, dikeluarkan politik identitas keduanya etnik Maybarat dan etnik Moi. Identitas yang di politisir sebagai "alat" mempersatukan kelompok-kelompok etnik dari, keluarga, kampung, marga, ipar, om, dan sebagainya, masing-masing antara etnik Maybrat dan etnik Moi dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Proses kampaye politik identitas etnik Maybarat dan etnik Moi, saling memarginalisasi satu dengan yang lainnya dalam isu-isu politik identitas etnik kepada etnik-etnik asli Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong. Isu-isu kampaye politik identitas etnik yang dikemas rapi oleh etnik Moi dan dikeluarkan dari, etnik, keluarga, kampung, marga, egoisme. isu kampaye, pemerintahan satu kampung etnik mengguasai birokrasi, satu etnik

mengguasai bantuan pemerintah, pejabat yang mengisi jabatan di birokrasi tidak kemampuan karena hasil etnik pemimpin di birokrasi menujut dari etniknya, dan satu etnik yang mengguasai dana Otsus, DAK, DAU, APBD, PAD dan proyek-proyek di Kota Sorong.

Isu-isu kampaye politik identitas etnik yang dikeluarkan oleh etnik Maybarat kepada etnik-etnik asli Papua (etnik yang bayak dari segi jumlah etnik Teminabuan dan etnik Raja Ampat di kota sorong) dan non Papua di Kota Sorong yaitu, jangan salah memilih, kalau tidak mau tanah, rumah, usahmu di ambil kembali oleh etnik Moi kalau etnik Moi yang kekuasaan, etnik Moi tidak mempunyai tidak mempunyai kemampuan dalam memimpin dan merangkung etnik asli Papua dan etni non Papua, etnik Moi buka tokoh pembangunan di Kota ini. Dari permainan politik identitas etnik ini, sudah ada dua irisan saling memarginalisasi yang tajam dimainkan dalam politik lokal. Maka ini bisa dikatakan kalau satu etnik yang berkuasa diantara mereka dua akan marginalisasi etnik yang satu dalam bentuk politik, didalam birokrasi pemerintahan atau dalam aktifitas pemerintah di Kota Sorong.

Etnik non Papua Bugis, Buton, Makassar, Ambon, dan Toraja, (selanjutnya disingkat BBMAT, diambil etnik ini di Kota Sorong banyak segi jumlah etniknya). Etnik non Papua (BBMAT) disini tidak menojolkan politik identitasnya. Karena etnik non Papua pihak yang berkolaborasi dengan kedua etnik asli Papua yang berkontestasi dan saling memarginalisasi satu dalam bentuk kampaye yang didulis diatas. Etnik non Papua disini melihat kelebihan dan kekurangan politik yang dimainkan kedua etnik asli Papua dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Dan etnik non Papua memberikan dukungan lewat berbagai cara seperti, organisasi-organisasi etnik, DPRD Kota, dan pejabat etnik di birokrasi yang mempunyai pengaruh di lingkungan tempat tinggal. Perjanjian-perjanjian politik yang disepakati oleh kedua etnik Maybrat dan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan itu, dalam berbagai kekuasan didalam birokrasi pemerintahan dan diluar birokrasi pemerintahan. Maka semua dukungan suara mayoritas etnik non Papua diberikan kepada etnik Maybrat dan etnik Makassar untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

Otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, agar semua etnik asli Papua bergandengan tangan membangun daerahnya sesuai dengan kondisi di wilayah Papua. Dengan demikian, akan terjadi pembangunan ekonomi masyarakat, percepatan pembangunan sumber daya manusia, percepatan pembangunan institusi pemerintah, dan percepatan pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagainya. Sayangnya hal tersebut terkendala dengan fakta yang ditulis diatas sebelumnya. Ini bisa menegaskas kepada semua etnik-etnik asli Papua, etnik non Papua yang ada di Kota Sorong dan etnik yang diluar Papua bawah etnik-etnik Papua di Kota Sorong, itu tidak bersatu dalam pelaksanan Otsus, setiap etnik-etnik lebih bersatu kepada hubungan kelompok-kelompok etnik dari identitasnya dari, kampung, marga, keluarga ipar, om, saudara dalam hubungan darah dan kelompok politik. Dibandingkan persatuan kepapuaan, dan etnik-etnik Papua di Kota Sorong, saling marginalisasi satu dengan yang lainnya dan ingin tampil menojol, "mengecilkan" identitas etnik-etnik Papua yang lain. Maka memainkan politik identitas etnik dalam kelompok-kelompoknya untuk merebut kekuasaan di Kota Sorong.

Maka Dari masalah yang diuraikan diatas peneliti tertarik menganalisis dampak proses kerja politik identitas etnik yang dimainkan kedua etnik asli Papua yaitu etnik Maybrat dan etnik Moi dan juga melibatkan etnik non Papua untuk berkolaborasi dalam menjalankan politik identitas etnik untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah pokok dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong ?
2. Bagaimana etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong ?

Maka tujuan dari Penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.
2. Untuk mengetahui Bagaimana etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

METODE

Metode penelitian kualitatif, Nasir (1988: 64). Nawawi (2001:167), informan yang diambil 52 informan dari representasi PNS tingkat OPD etnik Maybrat dan etnik Pendatang, PNS dari etnis-etnis yang termarginalisasi, Tokoh-tokoh masyarakat dari etnis-etnis asli Papua serta etnis Pendatang, Tokoh Agama, masyarakat Moi, masyarakat Pendatang, masyarakat Teminabuan, masyarakat Raja Ampat, masyarakat Maybrat, didalam birokrasi pemerintahan dan di masyarakat Kota Sorong. Teknik pengumpulan data primen yaitu, wawancara yang sifatnya spontan,objektif, tidak rekayasa. (Salim, 2006:223). wawancara mendalam suasana keakraban dengan mengajukan pertanyaan (Bungin, 2005: 108). Observasi sistematis pada obyek penelitian (Nawawi, 1991:100), observasi sederhana non partisipasi, mencatat pengamatan. Observasi melalui pengamatan dan pengindraan (Bugin, 2005: 115). teknik pengumpulan data sekunder, menurut Bungin (2001:152), dokumen foto-

foto, karya ilmiah. analisis data penelitian menggunakan M.B. Miles dan A.M. Huberman Singarimbun dan Effendi (1995: 163).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Kerjanya Politik Identitas Etnik Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong

Proses Politik identitas etnik yang dimainkan kedua etnik asli Papua yaitu etnik Maybrat dengan etnik Moi dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Isu-isu identitas yang dipertontongkan sangat menojol dengan politik identitas, saling serang dalam isu-isu yang menjadi buah bibir dikalangan etnik Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong. Kubangun (2014:3) yang menyebutkan bahwa, kontestasi di antara orang asli Papua berdasarkan ikatan primordialisme semakin menguat. Dalam isu kampaye yang digunakan politik identitas oleh etnik Maybrat kepada etnik Moi yaitu: etnik Papua dan etnik non Papua kami (etnik Maybrat) adalah tokoh pemekaran, etnik Maybrat yang membuat kota ini maju di tanah Papua, etnik Maybrat yang bisa menyatukkan etnik asli Papua dan etnik non Papua di Kota, etnik Maybrat yang membuat kota ini aman serta bisa berdangan dari pagi sampai pagi, jika etnik Papua, etnik non Papua, salah memilih maka etnik Papua dan etnik non Papua, akan kehilangan tanah, rumah, usah karena mereka (etnik Moi), berkuasa maka tanah adat mereka di ambil kembali. Mengunakan simbol-simbol baju, mahkota, bahasa daerah setiap berkampaye di etnik Papua dan etnik non Papua, mengatakan bawah etnik Maybrat yang bisa merangkung semua etnik-etnik dan agama-agama di Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).

Isu kampaye politik identitas, yang dimainkan kepada internal etnik Maybrat itu sendiri. Ini bukan pertarungan merebut jabatan untuk individu atau kelompok yang memberikan dukungan. Tetapi masalah harga diri etnik Maybrat dari keluarga, marga, kampung yang dipertarukan dalam merebut kekuasan di Kota Sorong. Semua pejabat-pejabat yang memberikan dukungan politik kepada etnik Maybrat di setiap basis atau lingkungan kelurahan dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Diangkat atau dipertahankan dalam pengisian jabatan struktural. Kampaye politik identitas etnik meberikan bantuan pelayanan pemerintah kepada etnik Papua dari air bersih, jalan raya, penerangan jalan, dan membuka lapangan perkerjaan kepada etnik Papua (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).

Proses Kerjanya Politik Identitas Etnik Moi Di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sorong

Isu kampaye politik identitas etnik yang dikemas dalam politik identitas etnik Moi. Etnik asli Papua dan etnik non Papua, oleh etnik Moi kepada etnik Maybrat di Kota Sorong yaitu. Isu Identita etnik dalam internal etnik Moi kita harus menjadi tuan di atas tanah leluhur tanah malamoi, supaya kita bisa membangun dan menjaga alam kita (etnik Moi) sendiri yang ditinggalkan oleh leluhur etnik Moi, etnik Maybrat sudah menjadi berkuasa di kota sorong, tetapi mereka selalu diskriminasi membawah etniknya dalam menguasai birokrasi dari atasan sampai bawahan di birokrasi pemerintahan Kota Sorong, mereka selalu diskriminasi dalam memberikan bantuan pemerintah kepada etnik-etnik yang lainnya (Sumber: wawancara dengan Bapak SK Ketua lembanga masyarakat Adat malamoi jumat, 1 September 2017. jam 9; 00 WIT).

Isu kampaye politik identitas etnik yang disebarkan oleh etnik Moi kepada etnik Maybrat menggunakan politik yang kurang bagus dalam daftar pemilihan tetap ada penambahan nama-nama orang-orang yang kurang jelas tempat tinggalnya dan menggunakan politik uang kepada masyarakat yang memilihnya, isu politik identitas yang dimainkan satu kampung etnik Maybrat menguasai jabatan publik semua di Kota Sorong, dari ketua umum DPRD Kota, Anggota DPRD Kota semuanya dikuasai oleh etnik Maybrat saja dan tidak ada etnik lain di Kota sorong, etnik Maybrat terlalu egoisme dan KKN.

Strategi Aktor-Aktor Elite dari Etnik Maybrat dan Etnik Moi dalam Kontestasi Politik Identitas Etnik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong

Kontestasi politik identitas yang dimainkan oleh aktor-aktor kedua etnik asli Papua, yaitu etnik Maybrat dan etnik Moi, dalam merebut kekuasaan politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Proses Politik identitas etnik yang dimainkan kedua etnik asli Papua yaitu etnik Maybrat dengan etnik Moi dalam pemilihan daerah untuk merebut kursi nomor satu di Kota Sorong. Dengan mengunakan Isu-isu identitas yang dipertontongkan sangat menojol dengan politik identitas, saling serang dalam isu-isu yang menjadi buah bibir dikalangan etnik Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong. Isu kampaye yang digunakan politik identitas oleh etnik Maybrat kepada etnik Moi yaitu: etnik Papua dan etnik non Papua kami (etnik Maybrat) adalah tokoh pemekaran, etnik Maybrat yang membuat kota ini maju di tanah Papua, etnik Maybrat yang bisa menyatukkan etnik asli Papua dan etnik non Papua di Kota, etnik Maybrat yang membuat kota ini aman serta bisa berdangan dari pagi sampai pagi, jika etnik Papua, etnik non Papua, salah memilih maka etnik Papua dan etnik non Papua, akan kehilangan tanah, rumah, usah karena mereka (etnik Moi), berkuasa maka tanah adat mereka di ambil kembali. Mengunakan simbol-simbol baju, mahkota, bahasa daerah setiap berkampaye di etnik Papua dan etnik non Papua, mengatakan bawah etnik Maybrat yang

bisa merangkung semua etnik-etnik dan agama-agama di Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).

Etnik Moi memainkan politik identitas dengan mengembangkan isu di masyarakat bahwa jika warga etnik mereka tidak terpilih, maka tanah-tanah adat Malamoi di Kota Sorong akan mereka sita atau ditarik kembali. Mereka yang tidak memilih warga etnik Moi tidak akan diakui sebagai pemilik hak adat yang sah di atas tanah lelurnya di Kota Sorong. Di samping itu, etnik Moi juga membangun komunikasi dengan etnik pendatang untuk bersama-sama merebut kursi nomor satu di Kota Sorong. Mereka juga membangun politik identitas etnik di masyarakat dengan menggalang dukungan lewat, kampung, marga,om, ipar, saudara, partai politik, hubungan keluarga, dan gereja.

Aktor-aktor elite dari etnik Maybrat dan etnik Moi memainkan strategi yang berbeda dalam kontestasi politik identitas etnik untuk pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Menurut Brown (dalam Subianto, 2009:335), mengatakan bahwa identitas kelompok menunjang konstruksi sosial untuk mempromosikan keterwakilan kepentingan kelompoknya. Perilaku sosial politik terkait dengan identitas kelompoknya yang pada momen tertentu dibangkitkan demi kepentingan kelompoknya. Maka ini kita bisa lihat kedua etnik saling memarginakan dan memainkan politik identitas etnik yang kental dengan isu kampungisme, saudaraisme, iparisme, dan gerejaisme. Strategi aktor-aktor etnik Maybarat sangat diunggulkan dalam kontestasi politik identitas etnik ini, dikarena etnik Maybrat sangat cakap bernegosiasi dengan semua etnik asli Papua dan etnik non Papua (BBMTA) di Kota Sorong. Dapat dikatakan bahwa berkuasanya etnik Maybrat selama lebih dari 30 tahun di Kota Sorong membuat mereka berada di posisi tawar yang baik di hadapan etnik lainnya. Etnik Maybrat juga telah menguasai sumber daya ekonomi yang penting di Kota Sorong, seperti posisi Ketua DPRD Kota Sorong dan Ketua Umum Partai Golkar yang selalu menang selama 30 tahun di Kota Sorong. Warga etnik Maybrat juga menguasai DPRD Kota dari berbagai partai politik yang berbeda dan menguasai sumber daya ekonomi (uang) di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Di samping itu, etnik Maybrat juga mempunyai teman politik yang telah mereka bina selama 30 tahun lewat pendidikan di universitas, perdangan di pasar, proyek-proyek pemerintah, yaitu warga etnik Makassar. Hal itu menjadi kekuatan besar dari kontestasi politik dalam strategi yang dibangun oleh aktor-aktor elite Maybrat dan tidak dapat dikalahkan oleh etnik Moi atau etnik lain yang mau bersaing merebut kursi nomor satu di Kota Sorong.

Strategi politik aktor-aktor etnik Moi sangat mudah terbaca dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah karena mereka tidak menguasi sumber daya yang paling penting, yaitu uang. Warga etnik Moi tidak tersebar di posisi-posisi penting di partai politik atau menduduki banyak kursi DPRD Kota Sorong. Mereka pun tidak pernah menguasai jabatan-jabatan penting birokrasi Kota Sorong. Oleh karena itu, politik identitasnya kurang diminati oleh etnik asli Papua dan etnik non Papua. Dikatakan bahwa undang-undang otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada orang Papua pada umumnya dan lebih khusus di Kota Sorong tidak berjalan sesuai harapan, yaitu semua etnik asli Papua harus bergandengan tangan untuk memajukan daerahnya. Tampak dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong, politik identitas etnik bermain sangat menojol di setiap aktivitas politik dan etnik asli Papua harus saling menjatuhkan dengan strategi-strategi yang tidak dapat dilihat secara kasat mata saja. Seperti isu-isu yang dimainkan oleh etnik Maybrat kepada etnik Moi. Kalau etnik Moi menjadi pemimpin di Kota Sorong, tanah-tanah adat malamoi yang sudah kita miliki dan tempat, membangun rumah akan diambil kembali dan juga akan sulit kita mendapat tanah-tanah adat mereka dalam perbagai proses di Kota Sorong seperti berdangan, pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah dan kita etnik semua akan membayar tanah-tanah adat etnik Moi di Kota Sorong. Isu yang dimainkan oleh etnik Moi kepada etnik Maybrat yaitu, sudah cukup lama etnik Maybrat memimpin tetapi semua program untuk etnik mereka dalam berbagai aspek, dan semua jabatan di kuasai oleh etnik mereka.

Etnis Makassar Memberikan Dukungan kepada Etnik Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sorong

Politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong terjadi dinamika kontestasi politik lokal di Kota Sorong, dengan ikut sertanya etnik Makassar dalam politik lokal itu. Maka ini akan berdampak kepada tokoh etnik lokal yang bersaing memperebutkan kekuasaan politik dan akses terhadap sumber daya materil Klinken 2001, (dalam Pandji Santosa, 2010:15). Ini terlihat lobi-lobi politik yang dilakukan dari etnik Maybrat dan etnik Moi, dengan sadar membuat kesepakatan proses nilai tawar politik yang serius kepada etnik non Papua didalam organisasi-organisasi etnik non Papua dan para pejabat-pejabat etnik non Papua didalam birokrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh disetiap basis lingkungan dikelurahan etnik di Kota Sorong. Negosiasi politik yang di lakukan etnik Maybrat Dan etnik Moi kepada etnik non Papua. Negosiasi politik etnik Maybrat kepada etnik non Papua lebih tertarik berkolaborasi kepada etnik Maybrat (Sumber: Wawancara dengan bapak MM dari etnik Toraja hari Selasa 5 September 2017. Jam 11; 24 WIT).

Perjanjian-perjanjian politik etnik non Papua kepada etnik Maybrat akan memberikan dukungan politik jumlah suara etnik non Papua semua kepada etnik Maybrat. Untuk merebut kuris nomor satu yaitu walikota sorong dan juga wakil walikota dari etnik Makassar akan

merebut kuris nomor dua atau wakil walikota sorong. Maka semua perjanjian politik yang harus ditepati dalam perebutan kekuasaan di Kota Sorong. (Sumber: wawancara dengan Bapak HS Wakil ketua KKS. Hari Selasa, 29 Agustus 2017 WIT).

Etnik non Papua di Kota Sorong juga berperan penting dalam dinamika politik yang dimainkan oleh etnik asli Papua keduanya. Namun etnik non Papua disini tidak menggunakan politik identitas yang berbauw etnik atau agama, tetapi politik identitas kesamaan tujuan politik dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Maka etnik Maybrat walikota dan etnik Makassar wakil walikota Sorong. Etnis Makassar sangat mengetahui kekurangan setiap etnik asli Papua yang mencalonkan kandidatnya dalam perebutan kekuataan di Kota Sorong berdasarkan pengalamannya berkolaborasi dengan etnik Maybrat selama 30 tahun. Untuk melancarkan jalanya merebut kekuasaan itu, etnik Maybrat memberikan janji-janji politik kepada etnik Makassar sebagi ganti dukungannya dan janji-janji itu selalu ditepati. Berdasarkan pembagian kekuasaan yang telah disepakati, etnik Makassar akan mendapatkan kekuasaan di sektor-sektor ekonomi, seperti pasar umum dan transportasi, serta posisi wakil wali kota dan jabatan di dalam birokrasi yang berkuasa atas proyek-proyek di Kota Sorong.

Etnik Makassar juga melihat politik identitas yang dibangun oleh etnik Maybrat sangat kuat kental mendominasi, baik di dalam maupun di luar birokrasi (Sumber: wawancara Hari Selasa, 29 Agustus 2017. Jam 16;230 WIT, dengan Bapak HS. Wakil Ketua KKSS di Kota Sorong).

Hubungan komunikasi kelompok etnik Maybrat dengan etnik Makassar sudah terjaling sangat baik satu dengan lainnya dalam komunikasi politik yang di bangun keduanya. Kedua etnik saling menerima gagasan politik atau ide-ide politik yang berbedaan di antara satu dengan yang lainnya, menerima perbedaan etnik, bahasa, agama, dan keduanya menjadikan satu tujuan pikiran dalam tindakan yang rasional dalam memberikan dukungan untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepalah daerah di Kota Sorong. Maka ini senada yang dikutip menurut Abdillah (2002:16), etnisitas adalah kelompok yang sedikitnya telah menjalin hubungan atau, kontak dengan kelompok etnik yang lainnya, setiap etnik menerima gagasan dan ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara kultur maupun politik. Dalam bahasa lain, etnisitas muncul dalam kerangka hubungan relasional saat berinteraksi. Maka dari hubungan komunikasi politik itu etnik Makassar meyakini bahwa orang nomor satu di Kota Sorong pasti berasal dari etnik Maybrat kemudian etnik Makassar akan menjadi orang kedua di Kota Sorong. Dalam pembagian kue kekuasaan yang diperoleh dari dukungan itu adalah dikuasainya sektor ekonomi, seperti pasar umum dan transportasi, serta sektor swasta dan jabatan birokrasi dan partai politik oleh etnik Makassar. Dari lobi politik untuk memberikan dukungan itu, etnik Makassar juga melihat etnik Maybrat telah menguasai sumber daya ekonomi yang sangat banyak di dalam jabatan birokrasi pemerintahan, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar yang selalu memenangi pilkada di Kota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong. Etnik Makassar juga melihat kuatnya

Etnik Makassar Memberikan Dukungan kepada Etnik Maybrat lewat Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong

Monuver etnik Makassar dan etnik Maybrat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong adalah untuk mempertahankan kursi kekuasaan wali kota dan wakil wali kota Sorong. Dengan demikian, kedua etnik itu melakukan lobi-lobi politik di tingkat elite politik di dalam partai politik dan DPRD Kota Sorong. Di sinilah politik identitas dimainkan sebagai alat pengikat negosiasi di dalam partai politik dan anggota DPRD Kota Sorong, Maka ini senada dengan yang dikutip menurut Nashir (2000) sosiologi politik, teori tentang elite dikembangkan dalam kaitan perjuangan politik untuk meraih posisi utama dari persaingan kekuasaan (Karomani, 2019:169). Diketahui bahwa etnik Maybrat menguasai posisi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum DPRD Kota Sorong, sedangkan etnik Makassar menguasai posisi ketua umum di beberapa partai politik (PPP dan PKB) dan anggota DPRD Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak HS Wakil ketua KKS. Hari Selasa, 29 Agustus 2017 WIT). Jika digambarkan dalam diagram, berikut ini adalah gambaran Persentase etnik dalam DPRD Kota Sorong.

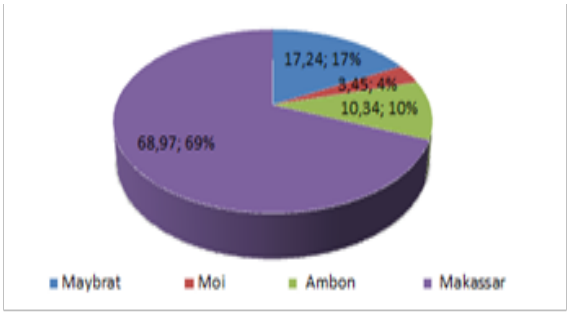

Sumber: Anggota DPRD Kota Sorong, 2017

Gambar 1. Persentase Etnik dalam Jabatan Anggota DPRD Kota Sorong Periode 2014-2019 di Kota Sorong

Berdasarkan gambar itu, diketahui bahwa persentase terbesar yang menduduki posisi anggota DPRD Kota Sorong adalah etnik Makassar dan etnik Maybrat yang diikuti oleh Moi dan etnis Ambon. Kedua etnik yang terakhir juga berkolaborasi memberikan dukungan kepada etnik Maybrat dan etnik Makassar untuk merebut kekuasan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Negosiasi politik di antara etnik Makassar dan etnik Maybrat sangat solid di tingkat partai politik di Kota Sorong. Dukungan itu juga bertambah besar dengan beberapa aktor elite politik yang berkolaborasi dengan etnik Ambon dan etnik Maybrat.

Relasi antar etnik terjadi manakala ada interaksi sosial, sebab interaksi sosial adalah awal dari relasi sosial dan komunikasi sosial antara manusia (Liliweri, 2009:125). Ini bisa dilihat etnik Makassar dan Maybrat menjalankan lobi-lobi politik di tingkat partai politik dan anggota DPRD Kota Sorong dengan sangat baik. Dukungan yang diberikan oleh etnik Makassar dalam bentuk menggunakan kekuatan politik identitas etnik keduanya yang secara emosional menggerakkan warga kedua etnik itu. Koalisi kedua etnik itu terbangun dalam partai politik dan DPRD Kota Sorong yang menggerakkan basis-basis kedua etnik di tingkat kelurahan di Kota Sorong. Dengan jalinan politik yang telah berlangsung lama dalam kontestasi politik lokal pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, posisi tawar kedua etnik telah terbaca dengan baik. Kedua etnik telah membagi kekuasaan dengan baik di tingkat keanggotaan DPRD Kota Sorong, dan sektor swasta. Hubungan politik yang mesra di antara kedua etnik ini menguatkan dukungan di antara keduanya dan tidak mudah dipatahkan oleh strategi politik yang lainnya.

Etnik Makassar Memberikan Dukungan kepada Etnis Maybrat lewat Organisasi Kerukunannya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong

Organisasi ini bertujuan untuk mengoordinasikan semua warga etnik Makassar yang merantau mencari hidup di Kota Sorong. Organisasi ini juga sebagai alat komunikasi dengan masyarakat asli Papua dan etnik non Papua sekaligus menjadi media komunikasi politik bagi etnik-etnik yang memerlukannya. Keberadaan organisasi ini menguatkan posisi aktor elit politik etnik Maybrat untuk meminta dukungan dari etnik Makassar untuk merebut kekuasaan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Tawaran politik itu tampak dengan posisi wali kota Sorong yang dikuasai etnik Maybrat selama dua periode, sedangkan etnik Makassar mendapat porsi wakil wali kota di Kota Sorong (Sumber: wawancara dengan Bapak HS Wakil ketua KKS. Hari Selasa, 29 Agustus 2017 WIT).

Perjanjian politik yang dilakukan di antara kedua etnik itu juga menyangkut penguasaan sumber daya ekonomi di birokrasi pemerintahan di Kota Sorong, keanggotaan di DPRD Kota Sorong, serta proyek dan sektor swasta di Kota Sorong. Dukungan dikerahkan etnik Makassar dari basis-basis etnik ini di tingkat kelurahan sampai dengan menggunakan politik identitas untuk mencari dukungan dari mereka yang masih memiliki hubungan darah atau saudara maupun yang kawin dengan etnik Makassar (Sumber: wawancara dengan Bapak YN Kepala etnik Maybrat Sabtu, 16 September 2017. Jam 11;00 WIT).

Thomas Sowell (dalam Liliweri, 2005:9) mengemukakan bahwa kelompok etnik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Contoh kesamaan nilai di sini adalah kesamaan agama, negara, asal, suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa, yang berpayung pada satu kelompok. Maka pendekatan yang dilakukan dalam kesepakatan politik yang dibangun dengan pendekatan melalui organisasi kerukunan etnik Makassar untuk memberikan dukungan kepada etnik Maybrat. Hal itu diterjemahkan dari ketua organisasi dan badan kepengurusannya kepada seluruh warga etnik Makassar yang berada di Kota Sorong. Mereka harus mendukung etnik Maybrat dan etnik Makassar dalam perebutan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

Melalui organisasi etnik Makassar, mereka yang berasa dirinya adalah bagian dari etnik Makassar harus bersatu dalam semangat keluarga besar etnik Makassar untuk bertarung dalam politik lokal di Kota Sorong. Pertarungan politik itu adalah untuk mendukung berpasangannya etnik Makassar dengan etnik Maybrat dalam merebut posisis orang nomor satu di Kota Sorong. Dengan pengalaman kolaborasi selama 30 tahun, kedua etnik ini telah sangat memahami strategi politik yang harus digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dalam merebut kekuasan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

Budaya Egosentrisme

Kontestasi dalam politik identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, menimbulkan budaya egosentrisme di antara kedua etnik asli Papua, yaitu etnik Maybrat dan etnik Moi. Budaya itu menguat ketika setiap etnik mempertahankan egoisme budaya, kampung, marga, keluarga, bahasa, dan nama baik etnik mereka. Hal itu membuat kedua etnik itu tidak menemukan jalan tengah untuk saling berafiliasi merebut kekuasaan di Kota Sorong. Etnik Maybrat dan etnik Moi berambisi merebut kekuasaan dan menggunakan politik identitas etnik sebagai "kendaraan" politiknya. Keduanya membedakan anggota kelompok etnik yang lain berdasarkan fisik, adat, perkawinan, makanan, minuman, dan hubungan sosial sehari-hari di wilayah mereka di Kota Sorong. Aktor-aktor etnik Maybrat sangat mengetahui kekuatan mereka karena etnik mereka telah berkuasa selama 30 tahun di atas tanah Malamoi Kota Sorong. Etnik itu telah menguasai semua sumber daya ekonomi yang penting mulai dari jabatan-jabatan ketua umum DPRD, birokrasi pemerintahan, partai-partai politik, dan proyek-proyek di pemerintahan. Di samping itu, etnik Maybrat juga menguasai banyak sumber dana yang berasal dari dana APBD, otsus, PAD, DAK, PAD, dan dana lain-lainnya.

Etnik Moi juga mempunyai egoisme yang besar untuk memimpin tanah adat mereka di Kota Sorong. Namun, kelemahan etnik Moi adalah mereka tidak pernah menjadi ketua umum DPRD atau banyak dalam mengisi kursi anggota DPRD dan menguasai jabatan-jabatan strategis di birokrasi Kota Sorong. Hal itu

membuat sumber daya ekonomi (uang) sebagai faktor yang paling penting dalam politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong juga tidak pernah dikuasai etnik Moi. Etnik Maybrat dan etnik Moi saling memarginal dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong dan saling menggunakan politik identitas etnik masing masing.

Menurut Thomas Sowell (dalam Liliweri, 2005:9) mengemukakan bahwa kelompok etnik merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Contoh kesamaan nilai di sini adalah kesamaan asal, etnik bangsa, kebudayaan, dan bahasa, yang berpayung pada satu kelompok. Maka ini juga sama setiap etnik asli Papua mempunyai satu kelompok kepemimpinan kultural yang mempunyai ikatan-ikatan primordial, seperti derajat, martabat, bahasa, adat istiadat, dan keyakinan yang dibawa sejak lahir. Ikatan-ikatan itu terbawa sampai ke dalam pekerjaan, pendidikan, politik, dan lain-lain. Tidak ada kesepakatan antara etnik Maybrat dan etnik Moi untuk bergandengan tangan merebut kekuasaan di Kota Sorong. Hal itu karena masih kentalnya egoisme budaya, kampung, keluarga, bahasa, derajat, dan martabat dalam diri setiap etnik. Setiap etnik mengatakan bahwa dirinyalah yang paling hebat, sedangkan etnik lainnya berada di bawah etnik mereka. Etnik Maybrat juga mempunyai ambisi yang sangat kuat karena mereka mengetahui bahwa mereka telah menguasai kursi nomor satu di Kota Sorong selama 30 tahun. Penguasaan terhadap kursi nomor satu itu berarti pula bahwa mereka telah banyak menguasai sumber daya ekonomi dari setiap jabatan di birokrasi, partai politik, dan proyek-proyek di pemerintahan. Sementara itu, etnik Moi belum pernah menguasai kursi nomor satu di Kota Sorong dan tidak menguasai sumber-sumber daya ekonomi dari jabatan-jabatan penting di birokrasi, partai politik, DPRD Kota Sorong, dan proyek-proyek yang ada di Kota Sorong.

Politik identitas etnik yang dimainkan oleh kedua etnik berakibat pada saling memarginalkan dan berdampak buruk dalam birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Dampak negatif di kemudiaan hari adalah fasilitas umum, seperti pasar umum, pelabuan kapal barang, kapal penumpang, dan rumah sakit umum, yang masuk wilayah administrasi Kota Sorong diklaim oleh Kabupaten Sorong ini dikarena dulu administrasi Kota Sorong masih Kabupaten Sorong di simpan administrasi karena ada konflik para elite maka para elite diklaim masuk aset kabupaten Sorong. Berbicara mengenai praktik dominasi aktor, struktur dan pertarungan etnis, sejatinya, dominasi para aktor tersebut cenderung terlibat aktif dalam setiap kontestasi politik baik yang berasal dari partai politik, birokrasi, maupun struktur informal seperti dari organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, dan tokoh (aktivis) mahasiswa.

Sementara, jika dilihat dari sejarah perjalanan praktik politik identitas etnis yang berkembang di Sorong saat ini, lebih cenderung melibatkan aktor, serta menyeret penguatan egoisme atas budaya dari masing-masing etnis yang ada di Sorong. Dengan mengedepankan parade kekuatan yang secara alamiah terus terpelihara kepentingannya, maka, Giddens (2009) berpandangan bahwa kepentingan kelompok yang dominan erat berkaitan dengan pelestarian *status quo*. Dengan demikian, bentuk-bentuk makna yang menaturalisasikan kondisi yang telah ada dengan menghambat pengakuan atas sifat masyarakat manusia yang dapat diubah dan berciri historis berperan untuk melanggengkan kepentingan semacam itu. Sepanjang sejarah, kenyataan tersebut dipahami dan dapat mengacu pada kondisi-kondisi ketika relasi sosial tampak memiliki sifat undang-undang alami yang tetap dan tak dapat diganggu gugat, maka, kenyataan identitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk utama keberlangsungan proses naturalisasi masa kini.

Dengan kata lain, sejatinya, penonjolan kekuatan identitas etnik dan relasi yang dilakukan para aktor tersebut pada hakikatnya merupakan pijakan dari kondisi objektif etnisitas yang merasa berpeluang untuk menonjolkan eksistensinya dan tidak melanggar konstitusi, serta cita-cita demokrasi langsung. Dalam hal ini, kondisi dan kedudukan kelompok (identitas) etnis yang ada di Kota Sorong dapat mendorong lahirnya *civil society* yang kuat di daerah. Dalam konteks Sorong, peran aktor melalui organisasi paguyuban yang berbasis etnis sangat berpengaruh dan dominan dalam kontestasi politik identitas etnik.

Selain itu, keterlibatan aktor birokrat sebagai peran kelompok lapangan tengah yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dan jejaringnya jauh lebih efektif dari pada partai politik. Pemetaan lebih lanjut atas dominasi aktor informal dan sturktur formal dalam kontestasi atas etnisk di Kota Sorong, dapat dilihat sampai sejauh mana usaha para aktor dalam membangun isu etnik dalam upaya untuk memetakan masyarakat pemilih berdasarkan garis keturunan dari para kontestan yang tampil sebagai kandidat pemimpin di Kota Sorong. Tidak ada yang bisa menepis, betapa konfigurasi etnik dapat terlihat dengan hadirnya para calon yang akan menduduki kursi kekuasaan di Kota Sorong. Terkait dengan peran kekuatan lapangan tengah yang dalam hal ini para aktor etnik yang mewakili kelompok masing-masing kandidat, mereka terus berupaya untuk melembagakan kekuatan politiknya. Walau secara struktur politik tidak dipandang serupa lembaga partai, namun, kekuatan ini mampu memetakan kekuatan politik para kandidat dengan secara politik yang berbasis etnik.

Tujuan etnik asli Papua berkontestasi merebut jabatan dengan mengunakan berbagai cara dengan membangun isu-isu politik identitas etnik kepada etnik-etnik Papua dan etnik non Papua di Kota Sorong, lewat saluran kampaye dalam tulisan-tulisan di spanduk, median massa koran dan siayaran televisi lokal di Kota Sorong. Politik yang dimainkan kedua etnik dengan berbagai cara dengan isu politik identitas etnik untuk

memarginalisasi satu dengan yang lainnya. Maka kedua etnik tersebut menjaling komunikasi kepada etnik Papua dan etnik non Papua untuk bersama-sama berkolaborasi merebut kekuasaan di birokrasi pemerintahan Kota Sorong. Kenapa sampai kedua etnik ini tidak bisa berkolaborasi dikarenakan masih ada faktor egoisme etnik yang dibawah oleh kedua etnik asli Papua. Maka dalam proses-proses kampaye disitu semaking jauh dengan kata bersatu dengan etnik Papua untuk merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

Penyebab Politik Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Sorong

Proses-proses terjadinya politik identitas etnik dalam pemilihan kepala daerah Kota Sorong. Dikarenakan ada hubungan sebelumnya antara etnik Maybrat dengan etnik non Papua di dalam kehidupan sehari-hari. Para elit-elit etnik Maybrat di berikan ilmu pengetahuan (pendidikan) di sebuah lembaga pendidikan (Universitas) yang ternama di Kota Sorong. Didalam menempu pendidikan terjadi kontak-kontak ide-ide politik di antara para elit etnik Maybrat dengan etnik Makassar yang sama. Hubungan yang terbangun diantara kedua etnik itu sangat baik dan saling percaya menggatar kedua etnik tersebut dalam hubungan politik jangka panjang yang serius dalam percaturangan politik lokal dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong.

Proses-proses politik dalam negosiasi politik antara keduanya etnik Maybrat dengan etnik Makassar berjalan dengan mudah karena sudah disampaikan diatas hubungan sebelumnya antara kedua etnik tersebut. Dari kolaborasi politik dalam merebut kekuasan itu sampai sekarang sudah 30 tahun lamannya mereka dua berkolaborasi. Maka ini sudah ada yang menguasai sektor ekonomi serti etnik Makassar sudah mengasai pasar umum sangat lama, jika kolaborasi itu berubah maka otomasti usaha mereka pasti juga akan berubah karena kolaborasi dengan orang lain.

Kenapa negosiasi etnik Moi tidak diberikan dukungan kepada etnik Makassar. Karena hubungan yang dibangun oleh etnik Makassar dengan etnik Maybrat sudah terbangun sejak lama dan saling percaya diantara kedua belah pihak. Etnik Moi kenapa tidak bisa berkolaborasi kepada etnik Makassar, nantinya mengganggu ekonomi yang sudah berjalan yang dipunyai oleh etnik Makassar dan etnik non Papua yang lain. Tidak ada keperyaan antara etnik Makassar kepada etnik Moi dan etnik Moi tidak menguasai Dana, untuk menjamin dalam proses-proses politik pemilihan kepala daerah dan juga etnik Moi tidak banyak mempunyai dukungan di dalam DPRD Kota Sorong.

Maka untuk mengamankan proses politik di masyarakat pada etnik Papua dan etnik non Papua dimainkan politik identitas etnik dalam pemilihan dan juga untuk mengamankan sumber daya ekonomi di birokrasi pemerintahan, harus mengunakan politik identitas etnik yang menojol dari keluarga, kampung dan marga. Untuk kepentingan menjaga kursi nomor satu dalam pertarungan pemilihan kepala daerah lima tahun lagi. Undang-Undang Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk memperkuatkan etnik-etnik asli Papua dari berbagai aspek, yang berorentasi pada peningkatan sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, dalam kenyataannya yang terjadi di daerah timbulnya kontestasi politik identitas etnik di Kota Sorong, dalam politik lokal merebut kekuasaan. Hal itu tergambar dari simbol-simbol primodialisme yang menonjol dalam berbagai aktivitas politik lokal di Kota Sorong.

Maka dari pejelasan diatas dapat mengutip pernyataan Lukmantoro (dalam Bucharim, 2014:20) Politik identitas adalah tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan- kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas. Dari penjelasan politik identitas menurut Lukmantoro (dalam Bucharim, 2014:20), menyebabkan politik identitas etnik menonjol di Kota Sorong untuk penguasan sumber daya ekonomi seperti dana otsus dan lain-lain sebgainya, maka etnik Papua memilih untuk tidak berkolaborasi dengan etnik tertentu di Kota Sorong. dan Memilih etnik lainnya sebagai kawan politiknya. Dan juga alasan di balik pilihan etnik Maybrat yang memilih berkolaborasi dengan etnik Makassar dibandingkan dengan etnik Moi adanya budaya egosentrisme. Sebagaimana diketahui, etnik Maybrat telah menguasai pucuk pemimpin (bupati dan walikota 30 tahun) serta jabatan-jabatan publik di Kota Sorong, partai politik, DPRD Kota Sorong, bahkan Ketua DPRD Kota Sorong, serta juga menguasai proyek-proyek kecil maupun proyek besar yang ada di Kota Sorong. Etnik Maybrat juga menguasai sumber daya ekonomi seperti: Dana Otsus Papua, PAD, DAK, dan DAU di Kota Sorong. Yang juga tidak kalah penting adalah dari segi jumlah penduduk, etnik Maybrat sangat banyak jumlahnya di Kota Sorong dan mempunyai hubungan saudara dengan etnik Teminabuan yang dapat dilihat dari sejarah masa lalu mereka. Hubungan saudara kedua etnik itu, membuat jumlah mereka dua sangat banyak dibandingkan dengan etnik Moi.

Dipilihnya etnik Makassar sebagai etnik yang dirangkul oleh etnik Maybrat untuk berkolaborasi karena etnik Makassar telah menguasai sektor swasta di Kota Sorong. Etnik non Papua, mempunyai banyak sumber ekonomi dalam bentuk pasar umum, ruko, kios, warung makan, transportasi angkutan penumpang maupun angkutan barang, serta kapal-kapal nelayan di Kota Sorong. Etnik Makassar juga menguasai banyak dana yang beredar dari masyarakat kalangan atas maupun kalangan kecil di Kota Sorong. Etnik Makassar juga telah mengetahui kekuatan etnik Maybrat yang telah lama menguasai semua jabatan publik yang telah disebutkan sebelumnya. Dari kolaborasi itu, mereka menekan tanah-

tanah adat di wilayah Kota Sorong yang merupakan tanah adat etnik Moi agar etnik Maybrat, Teminabuan, Makassar, dan etnik lainnya dapat menguasai tanah mereka dengan mudah yang diatur dalam administrasi birokrasi pemerintahan Kota Sorong.

Namun, politik identitas etnik yang dimainkan itu tidak mengganggu hubungan relasi antara etnik di Kota Sorong, yaitu antara etnik Maybrat dengan etnik Moi, Teminabuan, Raja Ampat, Makassar, Toraja, dan Ambon. Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan etnik Moi dengan etnik Maybrat, Teminabuan, Raja Ampat, Makassar, Toraja, dan Ambon, begitu pun sebaliknya, dari etnik Makassar kepada etnik Maybrat, Moi, Teminabuan, Raja Ampat, Toraja, dan Ambon. Hubungan antara etnik terjain dengan baik dan rukun di Kota Sorong, bahkan ini menjadi sebuah catatan penting bahwa dalam permainan politik identitas etnik di Kota Sorong, tidak ada konflik-konflik horizontal yang terjadi. Hal itu membuktikan bahwa etnik-etnik asli Papua dan non Papua di Kota Sorong sangat dewasa dari gaya berpikir dan tindakan setiap individu maupun kelompok-kelompoknya dalam berpolitik di Kota Sorong.

SIMPULAN

Politik identitas etnik asli Papua berkontestasi merebut kekuasaan di Kota Sorong. Otonomi khusus yang diberikan pemerintahan pusat kepada etnik Papua di Kota Sorong untuk bergadengan tanggan untuk membanguan daerah kota sorong sesuai dengan apa yang mereka alami di Kota Sorong berdampak melahirkan politik identitas etnik dalam proses percaturan politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, Politik identitas etnik itu dimanfaatkan sebagai alat untuk mempersatukan kelompok-kelompok etniknya untuk kepentingan merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Maka melibatkan identitas etnik dari primodialisme, egoisme kampung, marga, budaya, saudara, dan kelompok politik untuk melebur menjadi satu dalam semangat merebut kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Maka proses kerja politik identitas etnik yang dimainkan oleh etnik Maybrat dan etnik Moi dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong, kedua etnik tersebut tidak berkerja sama satu dengan yang lainnya. Kedua etnik maybrat dan etnik etnik Moi saling memarginalisasi satu dengan yang lainnya dengan isu-isu kampaye yang berbauw identitas etnik dari primodialisme, kampung, budaya, marga, bahasa, baju adat, mahkota, dan kelompok politik. Strategi-strategi isu kampaye politik identitas yang dimainkan kedua etnik Maybrat dan etnik Moi melibatkan, family, marga, kampung, organisasi etnik asli Papua dan non Papua,gereja, siaran televisi lokal,spanduk, korang dan para elit politik di DPRD kota dan para pejabat-pejabat birokrasi yang mempunyai basis-basis etnik di keluarahan. Kedua etnik Maybrat dan etnik Moi tidak bersatu dan berkerja sama dalam merebut kekuasaan dalam politik lokal di kota sorong ini dikarenakan masih kuatnya egosime budaya, adat, etnik lebih kuat dan menojol diantara kedua etnik asli Papua itu sendiri. Dan juga tujuan mendasar dari politik identitas etnik yang dimainkan di dalam politik lokal di Kota Sorong dalam pemilihan itu, untuk mengguasai sumber daya ekonomi yang banyak di Kota Sorong.

Etnik asli Papua berkolaborasi dengan etnik non Papua dalam merebut kekuasaan di Kota Sorong. Etnik maybrat tidak memilih etnik Moi dikarenakan etnik keduanya mempunyai egoisme kultur dari budaya adat, marga, kampung, dan ingin dominasi etnik satu dengan yang lainnya. Hubungan kedua etnik Papua ini tidak berjalan baik dalam proses pemilihan karena masing-masing saling marginalisasi dengan isu-isu kampaye yang berbauw identitas etnik dan saling menyerang satu dengan yang lainnya. di perluh bantuan kepada etnik non Papua untuk menambah jumlah mayoritas suara pemilih di Kota Sorong, maka etnik non Papua di bernegosiasi dengan perjanjian-perjanjian politik kepada kedua belah pihak maka etnik Maybrat mempunyai perjanjian politik yang di sukai oleh etnik Makassar untuk berkolaborasi dengan etnik Maybrat merebut kekuasaan dalam percaturan politik pemilihan kepala daerah di Kota Sorong. Dalam perjanjian kedua etnik Maybrat menduduki jabatan wakikota dan etnik Makassar menduduki jabatan wakil walikota Sorong. Hubungan yang dibangun oleh etnik Maybrat dengan etnik Makassar sudah jauh hari yang dibangun para elit Maybrat diberikan pendidikan di universitas di Kota Sorong. Dan juga etnik Maybrat sudah menguasai, menjalankan politik identitasnya di Kota Sorong selama 30 tahun lamanya dan juga etnik Maybrat sudah mengguasai jabatan politik dari ketua DPRD kota sorong, banyak anggota dari etnik Maybrat dari berbagai partai politik yang menduduki DPRD kota Sorong, ketua umum dalam berbagaipartai politik, dan proyek-proyek pemerintah di Kota Sorong. Dan etnik Makassar sudah sudah mengguasai perekonomian di kota sorong dari pasar umum, transportasi kendaraan umum, dan sektor perekonomian yang penting di kota sorong, jika ada perjanjian yang politik yang berubah dalam mendukung maka akan berimpas kepada sektor itu juga. Dan juga pembagian Pembagian kekuasan politik yang adil dan dapat dipercaya oleh kedua etnik Maybrat dan etnik Makassar. Etnik Maybrat membuat proses-proses tanah ada etnik Moi di kota sorong, lebih mudah etnik Papau dan etnik non Papua mudah mendapatkan tanah itu karena etnik Maybrat menekan di administrasi dan tidak perduli dengan proses adat mereka. Dari hal-hal ini etnik Papua dan etnik non Papua memberikan dukungan lewat dana maupun basis etnik mereka yang sudah terbanggun seja lama di Kota Sorong. Tujuan kedua etnik Maybrat dengan etnik Makassar berkolaborasi untuk menguasai sumber daya ekonomi ekonomi yang banyak di Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah S.U. (2002). *Politik Indentas Etnis, Pengulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Penerbit Indonesiatera.

Bucharim, S.A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI DKI.

Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

_____. *(*2005). *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Giddens, A. (2009). *Problem Utama Dalam Teori Sosial, menyangkut dengan Aksi,. Struktur, dan Kontradiksi Dalam Analisis Sosial atau dalam judul Asli yang di undu;. Action, Structure, and Contracdition In Social Analysis*. Jakarta: Penerbit Pustaka. Pelajar.

Karomani, (2009). *Ulama, Jawara, Dan Umaro: Studi Tentang Elite Lokal Di Banten*. Sosiohumaniora, Vol. 11 (2): 168-182.

Kubangun I.I. (2014). "Kontestasi Primordialisme dalam *Positioning* pada Struktur Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Manokwari". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Liliweri, A. (2005). *Prasangka & Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Lkis.

_____. (2009). *Prasangka dan Konflik Komunikasi, Lintas Budaya, Masyarakat dan Multikultur*. Yogyakarta: Lkis.

Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, H.H. (2001). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Bidang Sosial, University Press.

_____, (1991). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: University Press.

Pandji, S. (2010). *Disintegrasi, Pemerintahan Lokal Dan Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah*. Sosiohumaniora, Vol. 12 (1): 12 – 24.

Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Subianto, Benny. (2009). *Ethnic Politics and the Rise of the Dayak Bureaucrats in local Election" dalam Deepening Democracy in Indonesia?Direct Elections for Local Leaders (Pilkada).* Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, Pasir Panjang, Singapura: ISEAS.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 132 - 137
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

SENI KERAJINAN KELOM GEULIS DI KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PELENGKAP *FASHION* WANITA

Agus Nero Sofyan, Kunto Sofianto, Maman Sutirman, dan Dadang Suganda
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
E-mail: agus.nero@unpad.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini berjudul "Seni Kerajinan Kelom Geulis di Tasikmalaya sebagai Pelengkap *Fashion* Wanita". Tasikmalaya merupakan kawasan di Priangan Timur Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji pemerolehan dan pemilihan bahan baku, proses produksi (desain, pengukuran, pencetakan, pengepakan, dan pelabelan), dan pemasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei ke lapangan melalui wawancara, pengamatan secara langsung, dan pengambilan sumber-sumber tertulis dari masyarakat dan pemerintah setempat. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan gambar di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kelom geulis sebagai pelengkap *fashion* wanita. Kelom geulis adalah jenis kerajinan khas yang berasal dari Tasikmalaya yang dibuat turun-temurun. Kelom geulis bagian dari jenis sandal pada umumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan melalui *participant observation* sebagai data primer dan sumber kepustakan sebagai data sekunder. Objek penelitian ini adalah kelom geulis di Tasikmalaya. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerolehan dan pemilihan bahan baku kelom yang berkualitas, proses produksi mulai dari mendesain, mengukur, mencetak, melabel, dan mengepak, serta memasarkan kelom geulis ke tempat-tempat yang strategis, baik dalam maupun luar negeri. Hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwa kelom geulis produksi Kota Tasikmalaya memiliki kualitas yang baik, meningkatkan *fashion* pemakainya sehingga nyaman dipandang (*eye-cathcing),* dan meningkatkan jumlah produksi karena banyak permintaan dari dalam dan luar negeri. Selain itu, usaha pemerintah setempat dalam pelestarian seni produksi kelom geulis dengan memberikan peningkatan modal kepada para perajin, mendatangkan investor, dan memberikan peluang pemasaran baik di dalam maupun di luar.

Kata kunci: seni kelom geulis, Tasikmalaya, *fashion,* wanita, pemasaran

ART OF KELOM GEULIS HANDICRAFTS IN TASIKMALAYA CITY AS COMPLEMENTARY OF WOMEN'S FASHION

ABSTRACT. *The title of this research is Art of Kelom Geulis Handicrafts in Tasikmalaya as Complementary of Women's Fashion. Tasikmalaya is an area in East Priangan West Java Province. In this research, will be studied the acquisition and selection of raw materials, production processes and marketing. The method used in this research is descriptive-analytic method, that describes the phenomena of the existence which took place nowadays or the past. Data collection techniques in this research is field surveys through interviews, direct observation, and the retrieval of written sources from local communities and government. In addition, data collection techniques are conducted by taking pictures in the field. The study purpose is to study the kelom geulis as a complement of women's fashion. Kelom geulis is a type of typical craft coming from Tasikmalaya made by hereditary. Kelom geulis is part of the type of sandals in general. Data sources used in this research is field data through participant observation as primary data and source of lust as secondary data. The research object is a kelom geulis Tasikmalaya. The results achieved from this research is the production of Tasikmalaya City has good quality, improves the fashion of the wearer so that it is comfortable eye-cathcing, and increases the number of production due to the many requests from home and abroad. The local government's efforts in the preservation of the art of production of kelom geulis by providing increased capital to the crafters, bring in investors, and provide marketing opportunities both inside and outside.*

Key words: *kelom geulis art, Tasikmalaya, fashion, woman, marketing*

PENDAHULUAN

Kompleksitas kultural yang ada di Indonesia menjadi cerminan kemajemukan kehidupan masyarakat pendukungnya. Kemajemukan yang ada diperlihatkan dengan adanya keanekaragaman budaya, lingkungan, alam, dan wilayah geografis. Ruyadi (dalam Hindaryati ningsih, 2016: 109), menjelaskan bahwa masyarakat Kampung Benda Kerep Kabupaten Cirebon memiliki pola pewarisan yang berhasil guna dalam mewariskan nilai budaya dan tradisi kepada generasi berikutnya; tradisi dan nilai budaya ada yang berupa *tangible* dan *intangible.* Hal yang berupa *tangible* adalah di antaranya produk kerajinan seperti kelom geulis. Dalam kaitannya dengan keanekaragaman budaya, masyarakat Indonesia telah memperlihatkan adanya keragaman seni tradisional yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di dalamnya adalah kerajian tangan tradisional (Gustami, 2007: 31). Keanekaragaman kerajinan ini menjadi satu di antara aset intelektual yang berhubungan dengan sosiokultural yang mesti dilestarikan dan dikembangkan. Sebagai satu aspek di antara tujuh unsur kebudayaan, kesenian tradisional lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat pendukungnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Susanto (1983: 91) bahwa kesenian merupakan milik bersama dari suatu kelompok sosial dan menjadi cerminan sistem nilainya. Selain itu, perlu dicermati pula keadaan sosial budaya

yang ada di kawasan nusantara selama dekade terakhir maka pengkajian nilai-nilai budaya daerah secara intensif dan berkesinambungan perlu dilakukan (Purnomowulan, dkk., 2017: 63).

Kerajian tangan tradisional, dalam konteks kajian budaya yang lebih luas, menjadi satu di antara unsur kebudayaan yang bisa dijadikan sebagai subkajian utama. Kajian mengenai kerajinan tangan tradisional dengan seperangkat nilai estetiknya bukanlah sesuatu yang monolitis. Keberadannya sangat berhubungan erat dengan unsur-unsur pokok lainnya, seperti religi, ekonomi, struktur sosial, dan sebagainya. Nilai estetik dalam kerajinan tangan tradisional merupakan fenomena tanda implisit yang berhubungan dengan konstruksi yang lebih besar, yaitu kebudayaan dalam makna yang lebih umum. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sumardjo (2006: 43) bahwa nilai estetik seni adalah fenomena sensoris yang mengandung makna implisit.

Sandal kelom geulis Tasikmalaya merupakan sandal lokal yang diproduksi di Tasikmalaya. Kerajinan tangan tradisional ini telah menyimpan nilai historis yang cukup tinggi. Secara historis, jenis sandal ini pada zaman dahulu menjadi satu di antara jenis sandal yang sangat diminati oleh penduduk Tasikmalaya dan sekitarnya. Kerajinan tangan tradisional ini juga merupakan satu di antara jenis kerajinan tangan yang memiliki fungsi dan nilai estetis sekaligus.

Kelom diambil dari bahasa Belanda *kelompen* yang artinya sandal kayu, kata *geulis* berasal dari bahasa Sunda yang artinya *cantik* yang berarti sandal kayu yang cantik. Secara produksi, kelom geulis terbuat dari kayu mahoni atau albasia yang dibuat secara manual dengan menggunakan tangan (Daya Tarik Sandal Kelom *Geulis Tasik*, http://news.liputan6.com/daya-tarik-sandal-*kelom-geulis-tasik*). Agar terlihat lebih estetis dan menarik, kelom geulis dilengkapi dengan hiasan yang menggunakan cukilan atau digambar langsung pada bagian kelom. Adapun cara pewarnaannya, digunakan kuas atau dengan *airbrush*. Penerapan pahatan pada kelom geulis dibentuk dengan garis-garis yang tegas, yang pada umunya berupa motif-motif bunga.

Secara faktual, kelom geulis menjadi satu di antara barang konsumtif yang bisa dimanfaatkan dan dibeli oleh khalayak ramai. Dalam perkembangannya, karena menjadi barang komoditas ekonomi, kelom geulis sangat sensitif terhadap perubahan zaman dan perubahan mode yang sangat ditunjang oleh gaya hidup masyarakat pendukungnya. Dalam hubungannya dengan kondisi demikian, para perajin dituntut untuk bisa memosisikan kelom geulis sebagai komoditas yang siap terus eksis di tengah serbuan komoditas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, mereka harus mampu menyeimbangkan kelesuan yang diakibatkan oleh kebosanan konsumen. Tentu, daya kreativitas sangat diperlukan untuk mewujudkan hal demikian.

Umumnya kelom geulis, dalam hubungannya dengan fungsi komoditas, dipakai dan digunakan oleh para wanita, mulai dari remaja hingga orang tua. Pada praktiknya, kelom geulis dimanfaatkan untuk melengkapi busana yang dipakainya sehingga menambah daya tarik estetik bagi pemakainya. Pada posisi inilah, kelom geulis sampai sekarang masih sedikit-banyaknya diminati dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat lokal, khususnya masyarakat di tatar pasundan.

Pemilihan warna dan penggunaan motif bunga, dalam hubungannya dengan proses pembuatan, akan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Kelom geulis yang dilengkapi dengan paduan warna dan motif yang pas akan menghasilkan karya yang memiliki nilai estetik yang sangat tinggi. Pemilihan warna dan penetapan motif pada kelom geulis menjadi elemen terpenting dalam proses produksinya. Biasanya, penetapan motif akan disesuaikan dengan ukuran kaki sehingga motif tersebut mengikuti ukuran kelom yang akan diproduksi. Pemasaran kelom geulis, baik di dalam negeri maupun luar negeri memerlukan lingkungan usaha yang baik, berupa *enviromental* dan *enterpreunership*; kedeua hal tersebut mutlak diperlukan dalam memasarkan produksi (Schaper, dalam Sukoco dan Muchyi, 2015: 156).

Dalam penelitian ini dikaji kelom geulis Tasikmalaya sebagai pelengkap *fashion* wanita. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumbangan intelektual untuk rujukan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata budaya, khususnya dalam kerajinan tangan tradisinal kelom geulis Tasikmalaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Metode kajian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kajian etnografi. Idrus (2009: 59–60) menyatakan bahwa etnografi merupakan satu di antara istilah yang merujuk pada penelitian kualitatif. Etnografi diartikan sebagai usaha mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspeknya dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan secara menyeluruh. Etnografi sebagai bentuk penelitian memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

a. selalu menekankan pada penggalian alamiah fenomena sosial yang khusus;
b. memiliki data yang terstruktur dan rancangan penelitiannya bersifat terbuka;
c. dalam melakukan penelitian, peneliti bertindak sebagai instrumen yang berupaya menggali data yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian;
d. kasus yang diteliti cenderung sedikit atau bahkan hanya satu kasus yang kemudian dikaji secara mendalam;

e. analisis data tentang makna dan fungsi perilaku manusia ditafsirkan secara eksplisit dalam bentuk deskripsi dan penjelasan verbal;
f. etnografi tidak menggunakan analisis statistik, tetapi tidak berarti menolak data yang berupa angka-angka.

Dengan menggunakan metode kajian etnografi, dapat diungkapkan fakta kebudayaan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesenian tradisional kerajinan kelom geulis secara mendalam. Metode etnografi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada metode etnografi yang dikemukan oleh Spradley (1997) sebagai analisis maju bertahap. Analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data dan secara bertahap terus dilakukan hingga akhir peneltian. Akhir penelitian ditentukan sepenuhnya oleh peneliti dengan mengacu kepada metode kajian etnografi (Putra, 2004: 85).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tasikmalaya merupakan satu di antara kabupaten yang berada di wilayah Priangan Timur Jawa Barat yang masyarakatnya masih menjaga kesenian tradisional yang ada di daerahnya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kabupaten Tasikmalaya berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran di sebelah timur, dan Kabupaten Garut di sebelah barat. Terletak di sebelah tenggara di wilayah Priangan, Kabupaten Tasikmalaya dinilai sebagai kabupaten paling besar dan sangat berperan dalam mengembangkan potensi kesenian yang ada di Priangan Timur (Sumber: http://jabarprov.go.id). Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan daerah hijau, terutama pertanian dan kehutanan sehingga petani menjadi penduduk mayoritas di kabupaten tersebut. Lokasinya yang berada di bagian Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya masih menjaga nilai-nilai kesundaan yang terkandung di dalam bahasa dan budayanya. Satu di antara yang menjadi titik perhatian dari Tasikmalaya adalah kesenian kerajinan. Tingkat kreativitas masyarakat Tasikmalaya yang dinilai cukup tinggi menjadikan kabupaten ini menjadi satu di antara daerah penghasil kerajinan terbesar di wilayah Jawa Barat.

Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya masih menjaga kesenian-kesenian tradisional beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini secara tidak langsung telah menyebabkan proses regenerasi pengetahuan seputar kesenian di kabupaten ini masih terjaga dengan baik. Adanya regenerasi pengetahuan dari generasi tua ke generasi menjadi faktor penentu eksistensi kesenian di Kabupaten Tasikmalaya. Jika dipetakan, terdapat banyak kesenian yang ada di Kabupaten Tasikmalaya yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten ini. Kesenian yang paling menonjol dari Tasikmalaya adalah kesenian yang berkaitan dengan kerajinan tangan tradisional. Akan tetapi, pada penelitian ini akan dibatasi hanya pada kesenian yang ikonik di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu kerajinan tangan tradisional kelom geulis. Kesenian ini setidaknya akan mewakili eksistensi seni tradisional di Kabupaten Tasikmalaya.

Seni Kerajinan Tangan Tradisional Kelom Geulis

Secara etimologis, *kelom* diambil dari bahasa Belanda *kelompen* yang artinya sandal kayu dan *geulis* berasal dari bahasa Sunda yang berarti *cantik*. Kelom geulis berarti sandal kayu yang terlihat cantik. Secara kultural, kelom biasanya dipakai untuk acara-acara tertentu yang sifatnya formal, seperti hajatan, walimahan, dan sebagainya. *Kelom geulis* biasanya terbuat dari bahan dasar kayu mahoni atau albasia. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya biasanya membuat *kelom geulis* dengan cara manual. Untuk menambah nilai estetik, *kelom geulis* biasanya dihias dengan ukiran dengan berbagai motif, seperti bunga. Seiring dengan perkembangannya, sekarang kelom geulis sudah banyak juga yang dihias menggunakan cat *airbrush* dan hiasan batik atau yang lebih dikenal dengan kelom batik.

Kerajinan *kelom geulis* banyak diproduksi sebagai industri rumahan di daerah-daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengembangkan kerajinan ini, dibuatlah sentra *kelom geulis* Kota Tasikmalaya yang terdapat di Kelurahan Setiamulya, Kelurahan Mulyasari, Kelurahan Kersanegara, Kelurahan Sukahurip, Kelurahan Sumelap, Kelurahan Linggajaya Mangkubumi, dan Kelurahan Gobras. Bagi masyarakat setempat, kerajinan *kelom geulis* bisa menjadi alternatif sumber penghasilan keluarga.

Kelom khas Tasikmalaya tidak hanya terkenal dalam cakupan nasional, tetapi juga sudah mendunia. *Kelom geulis* telah diekspor ke wilayah Asia Tenggara, Korea, Jepang, Afrika, Panama, Timur Tengah, dan sebagian wilayah Eropa. Takayal, produksi kerajian *kelom geulis* ini bisa menjadi satu di antara produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing dengan produk mancanegara.

Secara keseluruhan, eksistensi seni kerajinan *kelom geulis* ini masih terjaga dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya proses regenerasi pengetahuan seni yang berjalan dengan baik dari generasi tua ke generasi muda, adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk memajukan kerajinan *kelom geulis* tersebut, dan masih adanya loyalitas dari masyarakat untuk menghargai produk-produk buatan dalam negeri, terlebih yang masih mengandung nilai-nilai tradisional (Yudiman, 2015: 48).

Untuk lebih jelasnya, jenis dan bentuk kerajina *kelom geulis* di Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut.

Sumber: http://kerajinanrajapolah.com

Gambar 1. Jenis dan Bentuk Kelom Geulis

Daya tarik kelom geulis terletak pada hiasan yang ada di permukaan sandalnya ataupun di bagian sisi sandalnya. Hiasan kelom geulis mengambil motif bunga seperti bunga mawar, anggrek, melati, kamboja, matahari, bahkan ornamen gambar burung dan karakter tokoh kartun anak-anak juga sering dijadikan hiasan pada sandal kelom geulis. Pada umumnya, pemberian hiasan pada kelom geulis dilakukan dengan teknik cukilan atau digambar langsung pada bagian kelom dengan menggunakan kuas atau dengan *airbrush*, bahkan ada juga yang dengan menggunakan teknik batik dengan cara mencanting sandal kelom geulis menggunakan bahan lilin malam yang biasa digunakan untuk membatik.

Dalam proses pembuatan kelom geulis, aspek-aspek estetis dan ekonomis menjadi pertimbangan yang sangat penting. Untuk lebih jelasnya, berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat kerajinan tangan tradisional kelom geulis.

a. Aspek Fungsi
   Ketika membuat dan memproduksi kelom geulis, seorang perajin seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan dan fungsi produk tersebut dibuat. Aspek ini sangat penting untuk menciptakan produk yang tepat guna dan berkualitas tinggi. Dalam hubungannya dengan nilai estetis, penciptaan motif kelom geulis dengan teknik-teknik tertentu merupakan satu di antara wujud pemenuhan kebutuhan sandang dan kepentingan pelestarian eksistensi estetis kerajinan tangan tradisional, dalam hal ini kelom geulis itu sendiri.
b. Aspek Bahan
   Pemanfaatan bahan-bahan tertentu menjadi satu di antara syarat yang perlu dipertimbangkan dalam menciptakan suatu kerajinan tangan tradisional yang bernilai praktis dan berkualitas tinggi. Barang yang diproduksi dengan memanfaatkan bahan baku berkualitas tentu akan menghasilkan produk yang berkualitas juga.
c. Aspek Proses
   Untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas, perajin tentunya harus mempertimbangkan proses produksi. Pertimbangan kemudahan dan kesulitan dalam membuat produk juga perlu dipertimbangkan sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila menggunakan peralatan yang seadanya.
d. Aspek Estetis
   Seorang perajin kelom geulis dituntut untuk mampu menjaga nilai-nilai estetis agar tercipta sebuah produk yang bernilai estetis. Hal ini menjadi faktor penentu tingkat ketertarikan konsumen untuk membeli dan menggunakan produknya.
e. Aspek Ergonomis
   Aspek ini berhubungan erat dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian pruduk. Aspek ini juga penting agar produk tidak hanya memiliki nilai keindahan dan estetis, tetapi juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang cukup tinggi.
f. Aspek Ekonomis
   Aspek ini berhubungan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan kemungkinan keuntungan yang akan didapat ketika produk sudah dipasarkan. Kondisi ini dengan sendirinya akan meminimalisasi kemungkinan terjadinya kerugian.

Kelom Geulis sebagai Pelengkap *Fashion* Wanita

Seorang wanita dalam berpenampilan perlu mempersiapkan diri dengan berbagai hal. Misalnya, baju, aksesoris, *make up*, dan sepatu (kelom geulis). Sepatu atau sandal bagi wanita merupakan pelengkap dalam berpenampilan menarik. Oleh karena itu, keberadaan sandal atau sepatu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang wanita. Bagian dari sandal atau sepatu dikenal istilah *kelom geulis*. Untuk masyarakat Jawa Barat, keberadaan *kelom geulis* memang sudah populer, terutama di kalangan wanita Priangan. Bahkan, dalam acara resepsi (pernikahan, hajatan, reuni, acara ulah tahun), keberadaan *kelom geulis* bagi kaum wanita tidak dapat dipisahkan dari *fashion* secara keseluruhan.

Tidak sedikit kaum wanita di Jawa Barat, khususnya di Priangan Timur, *kelom geulis* dalam acara-acara tertentu merupakan *conditio sine quanon* 'kondisi yang harus tetap ada' bagi kaum wanita. Selain *fashion*, memakai *kelom geulis* kerap kali dianggap sebagai mode yang *trend, k*arena mereka beranggapan memakai *kelom geulis* dapat memberikan penampilan yang luar biasa, inspiratif, dan memberikan kepercayaan diri. Selain itu, kaum wanita yang memakai *kelom geulis* sering dijuluki juga komunitas enéng-enéng geulis (perkumpulan wanita cantik). *Kelom geulis* berdasarkan penggunanya dibedakan atas *kelom geulis* untuk komunitas gadis (belum menikah) dan *kelom geulis* untuk komunitas yang sudah menikah. Hal ini tampak/dapat dilihat dari bentuk dan warna. *Kelom geulis* untuk komunitas gadis, memakai kelom yang memiliki hak yang tinggi dan warna relatif cerah, sedangkan *kelom geulis* untuk kaum ibu memiliki hak yang relatif tidak tinggi atau sedang dan warnanya yang tidak mencolok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.

Sumber: https://grosirsandaltasiktermurah.files.wordpress.com

Gambar 2. Variasi Kelom Geulis dari Segi Bentuk dan Warna

Hasil wawancara (Dedi, perajin Tasikmalaya, 35 tahun) mengungkapkan bahwa wanita di Priangan Timur Jawa Barat pada tahun 1980-an jika pergi ke pesta/resepsi tidak memakai *kelom geulis* kerap kali mengurungkan/membatalkan kepergiannya pada acara/resepsi tersebut. Dari fakta tersebbut, jelaslah bahwa keberadaan *kelom geulis* bagi kaum wanita pada saat itu memang benar-benar sebagai pelengkap *fashion* dalam berpenampilan menarik. Kini, hal seperti itu tidak kerap ditemukan, tetapi keberadaan *kelom geulis* untuk melengkapi penampilan kaum wanita selalu menjadi bahan yang sangat dipertimbangkan.

Usaha Pelestarian Kesenian Tradisional Kelom Geulis

Sebagai satu di antara kerajinan tangan tradisional ikonik Kabupaten Tasikmalaya, kelom geulis harus terus dijaga dan dilestarikan. Keberadaannya sebagai aset intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional, kerajinan tangan ini sedikit-banyaknya telah memberikan sumbangsih kultural dalam meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam hal penyediaan *souvenir*. Akan tetapi, fakta di lapangan terungkap bahwa regenerasi perajin *kelom geulis* mengalami kendala. Hal ini tampak bahwa generasi penerus (putra-putri dari perajin) tidak/kurang tertarik untuk mengikuti jejak orang tuanya sebagai perajin *kelom geulis*. Lain halnya dengan pengusaha *kelom geulis* yang pada umumnya putra-putrinya (generasi penerus) sangat berminat untuk melanjutkan perusahaan orang tuanya.

Oleh karena itu, tim peneliti memberikan rekomendasi untuk kelestarian *kelom geulis,* yaitu sebagai berikut: (a) adanya pembinaan sedini mungkin (usia SD) memperkenalkan seni leluhur ini kepada generasi penerus, (b) adanya peran pemerintah berupa peningkatan fasilitas (peningkatan kesejahteraan untuk perajin, mendapatkan peluang modal yang mudah, adanya pelatihan dan *workshop*, dan membantu memasarkan).

SIMPULAN

Kerajinan tangan tradisional *kelom geulis* Tasikmalaya merupakan satu di antara kesenian ikonik Tasikmalaya yang sampai sekarang eksistensinya masih terjaga dengan baik. Keterjagaan/keberadaan kerajinan *kelom geulis* di Tasikmalaya tidak lepas dari kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki tradisi (budaya) tinggi dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk produk nyata (*tangible)*.

Kerajinan tangan tradisional *kelom geulis* Tasikmalaya memiliki nilai estetik yang mampu dijadikan sebagai pelengkap *fashion* wanita. Hal ini tampak dari adanya tradisi bahwa setiap acara yang berkaitan dengan pesta pernikahan, ulang tahun, khitanan, dan acara resmi kedinasan eksistensi *kelom geulis* menjadi pelengkap sebagai aksesoris kaum wanita (termasuk kaum ibu-ibu).

Aspek penting yang menunjang kemajuan kerajinan tangan tradisional *kelom geulis* Tasikmalaya adalah aspek fungsi, aspek bahan, aspek estetis, aspek ergonomis, dan aspek ekonomis.

Rekomendasi untuk kelestarian *kelom geulis,* yaitu adanya pembinaan sedini mungkin (usia SD) memperkenalkan seni leluhur ini kepada generasi penerus dan adanya peran pemerintah berupa peningkatan fasilitas (peningkatan kesejahteraan untuk perajin, mendapatkan peluang modal yang mudah, adanya pelatihan dan *workshop*, membentuk sentra kerajinan tangan kelom geulis secara masif dan terpusat, serta membantu memasarkan).

DAFTAR PUSTAKA

Susanto, A.S. (1983). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta.

Gustami, SP. (2007). *Butir-butir Mutiara Estetika Timur Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya Indonesia*. Yogyakarta: Prasista.

Hindaryatiningsih*, N. (2016). "Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Tradisi Masyarakat Buton"*. Sosiohumaniora. Vol. 18 (2): 109.

Idrus, M. (*2009)*. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: Erlangga.

Purnomowulan, R., Machdalena, S., Dewi, E.R. dan Endrawan, A. (2017). "Teknologi Tepat Guna–Membangun Kecintaan dan Kebanggaan pada Kearifan Lokal Bahasa Sunda". Jurnal Panggung. Vol. 27 (1): 63.

Putra, A.H.S. (2004). *Mengembangkan Wisata Budaya dan Budaya Wisata*. Jogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM.

Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sukoco, I. dan Muchyi, H.A. (2015). "*Ecopreneuership* dalam Menumbuhkan Usaha Berwawasan Lingkungan pada Sentra Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Kabupaten Garut". Sosiohumaniora. Vol. 17 (2): 156.

Sumardjo, J. (2006). *Estetika Paradoks*. Bandung: STSI

Yudiman, M. (2015). *Khazanah Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Bagian Humas Setda Kota Tasikmalaya.

http://jabarprov.go.id/index.php/potensi_daerah/detail/133/1 diakses pada tanggal 1 September 2017

https://grosirsandaltasiktermurah.files.wordpress.com/2016/11/kelom-23.jpg?w=359&h=289 diakses pada tanggal 4 September 2017.

http://kerajinanrajapolah.com/images/Kelom%20Geulis%20SJP01.jpg diakses pada tanggal 5 September 2017.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660
Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 138 - 144

PEREMPUAN DALAM POLITIK DI SULAWESI UTARA

Leviane Jackelin Hera Lotulung[1], Deddy Mulyana[2], dan Evie Ariadne Shintadewi[2]
[1]Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
[2]Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung
E-mail: jackelin.lotulung@unsrat.ac.id

ABSTRAK. Pasca reformasi, tren kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Provinsi Sulawesi Utara semakin nyata. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam segala sektor kehidupan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu faktor lainnya yang mendukung perempuan Sulawesi Utara bisa begitu mudah masuk dunia politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta studi literatur. Informannya adalah sebelas legislator perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa. Hasilnya ditemukan beberapa faktor sehingga perempuan Sulawesi Utara masuk dunia politik. Faktor-faktor tersebut yakni dukungan perundang-undangan di bidang politik, faktor sosial budaya, bahkan agama dan kedekatan calon legislator perempuan dengan pimpinan partai dan penguasa. Nama keluarga yang melekat pada nama belakang perempuan sebagai salah satu ciri budaya patriarkhi, baik yang berasal dari nama ayah maupun suami yang popular secara politik, menjadi modal tersendiri guna memperlancar perempuan masuk dunia politik.

Kata kunci: perempuan, gender, politik, patriarkhi.

WOMEN IN POLITICS IN NORTH SULAWESI

ABSTRACT. *Post reformation, the trend of inreasing participation number of women in politics in DPRD North Sulawesi Province more real. This is supported by legislation that encourages the involvement of women in all sectors of life. In this study, researchers want to find out other factors that support women of North Sulawesi could easily join the politics. The research method used is the case study approach by using in-depth interview, field observation, and literature study. The informants were eleven female legislators in North Sulawesi DPRD and several academics. The result found several factors so that women of North Sulawesi join the political world. These factors are legislative support in the field of politics, socio-cultural factors, even religion and the proximity of women legislator candidates with party leaders and rulers. The name of the family attached to the last name of women as one of the characteristics of patriarchal culture, whether it comes from the name of father or husband who is politically popular, became a separate capital to facilitate women to join politics.*

Key words: *women, gender, politics, patriarchy.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang beragam suku bangsa, bahasa, dan agama memiliki beragam perlakuan pula terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan selalu ditempatkan pada kegiatan-kegiatan domestik sedangkan laki-laki pada kegiatan publik termasuk di bidang politik. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat akhirnya diperjuangkan perempuan sehingga pada akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa aturan untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender. Padahal secara hakiki pemerintah Indonesia telah mengakui bahkan menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Undang-undang Dasar 1945 itu ternyata tidak cukup sehingga Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Hak Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan *(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)* yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada negara untuk menyusun peraturan khusus demi mempercepat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. (Amalia dalam Amalia, 2012:238)

Aturan hukum tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini (Amalia, 2012) merumuskan pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dalam keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.(Amalia, 2012:238-239)

Dengan adanya dasar hukum tersebut, sangat terbuka peluang bagi perempuan untuk bisa eksis dalam seluruh komponen kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk mengabdi di bidang politik dan pemerintahan. Namun sangat disadari bahwa ada rintangan-rintangan secara budaya yang masih menjadi halangan terberat bagi perempuan untuk masuk pada bidang politik dan pemerintah.

Sejarah perbedaan gender antara pria dengan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti faktor sosial budaya, faktor agama, dan faktor politik. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.

Konsep gender menurut Fakih (2010:8) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Julia Cleves Mosse (2010:3) berpendapat bahwa gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan dan ini mengacu kepada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan.

Dari ajaran-ajaran agama diperoleh gambaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dalam ajaran agama Kristen, pada Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 dan 31 a, secara jelas ditentukan bahwa:

> Berfirman Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binantang melata yang merayap di atas bumi. Maka Allah menciptakan menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya sungguh amat baik.

Terkait Firman Tuhan itu, maka menurut Stefania Cartore (dalam Sulistyowati Irianto, 2006), diwahyukan bahwa:

1. Laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai hasil keputusan yang khusus dari Allah;
2. Laki-laki dan perempuan, merupakan makhluk yang berasal dari Allah yang satu dan sama; Khalik mereka;
3. Laki-laki dan perempuan, entah bersama-sama atau secara terpisah, memiliki kesempurnaan dengan Allah. Sebagai gambar Allah, baik laki-laki maupun perempuan, mereka dimungkinkan untuk (1) berelasi dengan Allah sebagai orang tua (*parent)*, dengan-Nya, mereka memiliki "keserupaan" (2) bertindak menurut teladan-Nya (3) melanjutkan karya penciptaanNya, entah melalui eksistensi manusia yang lain atau dengan memelihara dunia ciptaannya;
4. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama dalam segala aspeknya. Martabat mereka didasarkan pada "keserupaan" mereka dengan Allah yang mendorong mereka dengan Allah yang mendorong mereka untuk dapat melampaui apa yang dapat mereka capai dan "mendekati" apa yang telah direncanakan Allah bagi hidup mereka.

Penjelasan di atas sangat membantu kita untuk memahami bahwa manusia (perempuan dan laki-laki) memperoleh pandangan yang sama, status yang sama dan juga peran yang sama.

Dalam ajaran agama Islam tertuang juga hal serupa bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Al-Hujurat 13:

> Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengan demikian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Berkaitan dengan itu al-Qur'an sebagai rujukan dan prinsip dasar menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan diakui secara adil dan non-diskriminatif, dalam uraian di hadapan Allah mereka itu sama, kecuali taqwa.

Lebih jauh Nasaruddin Umar (dalam Hulwati 1999:248) mengungkapkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya mempunyai potensi serta peluang yang sama untuk menjadi ideal sehingga mereka dapat bergerak dalam berbagai bidang, lengkap dengan beberapa keistimewahan, dan kelebihan sesuai dengan fitranya.

Dengan melihat uraian di atas mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari kacamata ajaran agama, kemudian peneliti berpandangan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan punya hak-hak yang sama dengan laki-laki di bidang politik, pendidikan, kerja dan ini ditempuh melalui jalur hukum dengan cara mereformasi sistem yang ada.

Praktek perbedaan gender juga terjadi di Indonesia, dimana perempuan lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan domestik, sedangkan kegiatan publik lebih diarahkan kepada kaum laki-laki. Meski begitu, Provinsi Sulawesi Utara, salah satu provinsi di Indonesia dengan partisipasi perempuan dalam bidang politik cukup maju dilihat dari keterwakilan perempuan di legislatif maupun di eksekutif. Hal itu sesuai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 bahwa Sulawesi

Utara menjadi provinsi tertinggi ketiga setelah Provinsi Sumatera Barat dan DKI Jakarta (Kemen PP dan PA, 2016:49).

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan Sulawesi Utara di DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi di Era Reformasi

Periode	DPR- RI	DPD RI	DPRD Provinsi
1999-2004	-	-	7 (15,56 %)
2004-2009	-	2 (50 %)	8 (17,77 %)
2009-2014	2 (50 %)	1 (25%)	12 (26,66 %)
2014-2019	2 (50 %)	2 (50 %)	15 (33,33 %)

Sumber: Data berasal dari KPU Sulawesi Utara diolah peneliti

Dari tabel di atas terlihat ada kecenderungan positif dan naik dari peran perempuan dalam politik sebagai legislatior baik tingkat DPR, DPD, maupun DPRD Provinsi dari periode ke periode selama era reformasi. Ini berbeda dengan kondisi secara nasional keterwakilam perempuan pada dunia politik di DPR RI yang masih rendah sesuai data KPU RI Pemilu 2014 legislator perempuan hanya 97 orang dari jumlah keseluruhan 560 legislator atau hanya 17,32 persen saja (Kemen PP dan PA, 2016:65).

Penelitian-penelitian mengenai gender dan keberadaannya diranah publik sudah sering dilakukan, antara lain oleh Widayani dan Hartati (2014) dengan informan para penulis perempuan di Bali tentang kesetaraan dan keadilan gender pada budaya Bali yang patriarki. Ditemukan dua faktor atas pengalaman perempuan Bali mengenai kesetaraan dan keadilan gender yakni faktor eksternal atau situasional yang mencakup kebudayaan Bali, pendidikan, dan pola asuh. Kedua, faktor internal yang meliputi persepsi, sikap, penilaian, kebutuhan, resistensi, dukungan sosial, penyesuaian diri, *beliefs* dan *future expection.* Hulwati (1999) membahas perempuan dalam wacana politik Islam menemukan bahwa perempuan sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Karena itu perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam Islam dan dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat.

Sinulingga (2006) yang menggali penelitian gender ditinjau dari sudut pandang agama Kristen menemukan ada dua makna gender. *Pertama,* mengikuti budaya (yang dipengaruhi konteks tempat dan waktu), *kedua*, gender yang lepas dari budaya. Dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama, pemahaman gender tidak lepas dari pengaruh budaya. Situasi sosial budaya yang berubah-ubah menghasilkan gambaran tentang status dan peranan laki-laki dan perempuan yang berubah-ubah. Sementara makna gender yang lepas dari budaya, memperlihatkan status dan peran laki-laki dan perempuan yang ideal yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan ketidakadilan gender yang tertulis dalam Alkitab sebagai pengaruh sosial budaya yang panjang yang harus dipelajari latar belakangnya dan tujuan penulisannya sehingga dapat ditemukan pengajarannya untuk masa lalu dan masa kini.

Farida (2013) menggali peluang perempuan dalam birokrasi pemerintahan Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilakukan rekruitmen, seleksi, pendidikan, dan pelatihan guna meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan kota. Dalam penelitian tersebut, Farida menemukan bahwa manajemen SDM (perekruitan, seleksi, pendidikan, dan pelatihan) birokrat perempuan di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung tergolong baik, artinya secara keseluruhan, pengembangan pegawai perempuan sudah dilakukan sesuai standar yang berlaku, walaupun dalam beberapa tingkat tertentu masih dianggap menghambat pengembangan pegawai yang sifatnya lebih pribadi ketimbang administratif atau organisasional. Aspek rekruitmen merupakan aspek yang penting dalam menentukan tingkat partisipasi pegawai perempuan untuk bekerja dan berhubungan dengan masyarakat guna menghasilkan pelayanan publik yang baik.

Sisi otonomi daerah dan komunikasi politik perempuan, Wahid (2014) menemukan masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan saat itu, guna menjadi kandidat perempuan di parlemen Provinsi DKI Jakarta tahun 2009. Ditemukan ketentuan *affirmative action* 30 persen harus lebih berkembang dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah. Otonomi daerah belum mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dikarenakan munculnya kelompok-kelopok masyarakat dan pemerintahan yang kurang mendukung pemberdayaan perempuan di politik. Partai politik sendiri belum mendukung pelaksanaan kuota secara menyeluruh, namun hanya mendukung sebagai ketentuan Undang-undang Partai Politik 2008 dalam penentuan calon anggota legislator DKI Jakarta pada Pemilu 2009. Hal itu dilihat dari ketidaksiapan partai politik dalam menentukan calon legislator perempuannya. Media massa juga tidak berperan sebagai *starting point* yang melahirkan ide, melainkan hanya memainkan peran sebagai *fenomena picker* yang berlandaskan pada kepentingannya sendiri. Media menjadi miskin ideologi yang berkaitan masalah gender. Sebuah peristiwa dipandang oleh media hanya sebagai objek berita yang hanya akan dimuat jika dianggap dapat memenuhi rasa keingintahuan publik sehingga laku dijual. Kaum perempuan membutuhkan ideologi yang komunal untuk menjamin kontinuitas perjuangan yang belum selesai, dan ideologi yang ditawarkan adalah *colletive will*. Tujuannya untuk mendapat dukungan media massa guna meraih posisi tawar calon legislator perempuan terhadap ideologi dominan negara. Terakhir, diperlukan perjuangan lebih keras dan terus menerus dari kaum perempuan dalam bidang politik maupun ruang publik lainnya sebagai bentuk *counter hegemony* terhadap masyarakat politik yang korup dan tidak adil.

Penelitian-penelitian di atas akhirnya mengarahkan peneliti untuk melihat makna dari kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebesar 33,3 persen atau tertinggi di antara seluruh DPRD Provinsi di Indonesia. Dengan

alasan itu akhirnya peneliti mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mendukung perempuan sehingga bisa eksis di dunia politik Sulawesi Utara.

METODE

Keterlibatan perempuan Sulawesi Utara masuk dunia politik cukup memadai. Ini merupakan hal yang positif bagi kemajuan kesetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menurut hemat peneliti adalah metode yang tepat yang ditandai dengan kekhasan dan keunikan dari fenomena yang diteliti.

Studi kasus merupakan penelitian yang berusaha untuk mengali suatu batasan yang jelas, data yang mendalam disertai berbagai sumber informasi yang akurat. Dengan tujuannya untuk mendeskripsikan dengan utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Mujahidin, 2014:126). Data-data dari metode studi kasus bisa menggunakan berbagai sumber data yang bisa menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. (Kriyantono, 2010:65). Cresswell (2015:137) bahkan mengutarakan studi kasus memiliki ciri utama yakni dengan memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Seperti naiknya angka partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2014-2019 menjadi capaian yang tertinggi secara prosentase di antara seluruh DPRD provinsi di Indonesia.

Mulyana (2010:201) pun menjelaskan peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Penelitian ini menggali informasi mendalam mengenai dukungan perundang-undangan atas perempuan, keadaan sosial budaya juga faktor agama yang mempengaruhi keberadaan perempuan dalam politik di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2016 dan 2017. Informannya adalah sebelas legislator perempuan yang terpilih sejak awal periode 2014-2019. Penelitian ini juga menggunakan kajian literatur untuk mendukung hasil yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Aturan

Masa reformasi, keberpihakan pada perempuan untuk masuk politik semakin nyata dengan keluarnya berbagai perundang-undangan. *Pertama*, peluang perempuan untuk masuk dalam partai politik semakin besar dengan pola multi partai yang diterapkan. Pola peserta Pemilu tiga partai politik pun ditinggalkan. *Kedua*, ketentuan *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat 1 menyatakan : *"Setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %"*. Tidak sampai di situ pemerintah juga mengatur kewajiban partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik juga menyertakan keterwakilan perempuan 30%. Kemudian terbitlah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa *"Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat"*. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang kembali mengingatkan keterwakilan perempuan 30% sebagai termuat Pasal 55 menyatakan "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 56 ayat 2 yang menyatakan *"Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon."*

Aturan-aturan tersebut mendorong perempuan calon legislator di Provinsi Sulawesi Utara berusaha sebaik mungkin dalam pelaksanaan kampanye dengan meyakinkan kepada para konstituen mengenai kemampuan dirinya sehingga layak dipilih. Kesempatan itu terus dibuktikan perempuan Sulawesi Utara, sehingga dari periode ke periode terlihat semakin signifikan keberadaannya di DPRD Provinsi Sulawesi. Periode 2014-2019 legislator yang terpilih sudah mencapai 15 personil (33%) dari jumlah keseluruahan 45 personil sehingga capaian tersebut terbesar secara prosentase dibandingkan semua DPRD Provinsi di Indonesia. Bahkan angka itu semakin signifikan ketika terjadi penggantian antarwaktu akibat tiga legislator mengikuti Pilkada tahun 2015 dan satu legislator meninggal dunia. Jumlah legislator perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai 17 personil dari 45 personil keseluruhan atau 37,7 persen.

Faktor Sosial Budaya

Provinsi Sulawesi Utara sama dengan provinsi lain di Indonesia, namun Sulawesi Utara memiliki keunikan tersendiri menyangkut eksistensi dan partisipasi politik kaum perempuannya. Perempuan Sulawesi Utara tidak banyak mengalami hambatan budaya ataupun sosial dalam persamaan hak dengan kaum pria di sektor publik. Hal itu terjadi karena Provinsi Sulawesi Utara didominasi budaya Minahasa lebih menganut budaya egaliter. Provinsi Sulawesi Utara sendiri sekarang terdiri dari empat suku bangsa, yakni Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangihe, dan Talaud.

Keberadaan perempuan dalam kehidupan masyarakat di tanah Minahasa tidak dipandang sebelah mata

malah menjadi ujung tombak bahkan turut menjadi penentu kebijakan untuk masa depan. Laki-laki dan perempuan membawa nama ayah sebagai petanda asal-usul keluarganya yang dinamai *fam*. Namun khusus perempuan nama keluarga (*fam*) akan terhenti ketika perempuan menikah dan kemudian nama keluarga suamilah yang menjadi nama keluarga selanjutnya. Meski begitu budaya Minahasa tidak mengenal perbedaan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, semua tergantung kesepakatan dan keinginan pemberi warisan.

Dalam praktek politik di Sulawesi Utara nama keluarga (*fam*) yang punya latar belakang politik misalnya pimpinan partai ataupun mantan pimpinan partai, sangat berpengaruh untuk keberhasilan anak, isteri, kakak-adik, keponakan, besan juga iparnya. Seperti di DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebelas dari 15 legislator yang terpilih sejak awal periode sangat terkait dengan penguasa dan pimpinan partai. Hal itu ada hubungannya dengan budaya politik dari Lucian W. Pye yaitu sistem politik yang kemudian menjadi isu-isu politik yang terkait dengan sikap-sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat. Keterkaitan calon legislator perempuan juga legislator perempuan dengan nama penguasa dan pimpinan politik merupakan keunggulan sebagai modal awal dalam keberhasilannya di politik (Alfian 2018:50).

Dalam masyarakat Sulawesi Utara, ada pemahaman positif terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di bidang publik. Menurut hemat peneliti, hal itu terjadi karena pengaruh agama Ktisten yang kuat di sana. Jika pada agama lain, pemimpin umat mayoritas laki-laki, sebaliknya di Kristen ada kesetaraan antara pemimpin umat lali-laki dan perempuan. Sebagai contoh, organisasi kekristenan terbesar di Sulawesi Utara, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) malah didominasi oleh pendeta perempuan. Menurut Laporan Badan Majelis Sinode GMIM pada Sidang Majelis Sinode GMIM ke-79 yang digelar pada 19-23 Maret 2018, pendeta GMIM tercatat berjumlah 2.218 orang yang terdiri dari pendeta perempuan 1.547 orang (69,75%) dan pendeta laki-laki 671 orang (30,35%).

Data ini memperlihatkan partisipasi perempuan di sektor publik, tidak saja telah didukung dari segi sosial budaya, tetapi juga didukung dari sisi agama. Perempuan tidak hanya didorong untuk bisa menjadi pemimpin agama, tetapi semakin hari semakin didukung untuk bisa menjadi pemimpin di bidang politik dan pemerintahan.

Kepemimpinan Politik Perempuan di Eksekutif

Masa Orde Baru, politik lokal dan keterwakilan anggota DPRD masih terpusat. Semua kebijakan atau aturan harus sesuai dengan keinginan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan politik. Jabatan gubernur, termasuk walikota dan bupati harus merujuk pada kebijakan pusat sehingga tidak ada kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan. Tak hanya sampai di situ, semua kepala daerah harus berlatar belakang militer, tidak ada pejabat sipil ditempatkan di daerah, khususnya Sulawesi Utara yang merupakan provinsi yang berada di perbatasan dengan negara lain.

Era reformasi, dengan pola Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan kembali perempuan Provinsi Sulawesi Utara di kancah politik, seperti terpilihnya Marlina Moha-Siahaan pada tahun 2001 sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Periode pertama Marlina Moha-Siahaan, proses pemilihan masih menggunakan sistem pemilihan perwakilan melalui DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (belum terjadi pemekaran wilayah). Dirinya bahkan dipercaya selama dua periode memimpin di daerah tersebut. Proses pemilihan kedua sudah menggunakan pola pemilihan kepala daerah langsung. Selanjutnya Vonny Panambunan sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2005-2010, salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Kemudian Vonny Panambunan, pada Pilkada serentak tahap 1 tahun 2015, kembali berjaya dan dilantik kembali menjadi Bupati Minahasa Utara periode 2016-2021 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada 17 Februari 2016.

Begitu juga di Kota Tomohon, salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa, terpilih wakil walikota perempuan periode 2005-2010, Syenny Watoe-langkouw. Kini Syerly Adelyn Sompotan menjadi Wakil Walikota Kota Tomohon periode 2016-2021 mendampingi walikota *incumbent*.

Tahun 2008 terpilih Telly Tjangkulung sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara –kabupaten pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Selatan, Christiany 'Tetty' Paruntu sudah masuk dua periode menjadi bupati di sana. Tahun 2013, Tatong Bara yang diusung Partai Amanat Nasional menjadi Walikota Kota Kotamobagu untuk periode 2013-2018. Kabupaten Kepulauan Talaud juga menghadirkan Bupati termuda di Provinsi Sulawesi Utara yakni Sri Wahyuni Maria Manalip untuk periode 2014-2019. Tahun 2017 bertambah bupati perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow (hasil pemekaran) yakni Yasti Soepredjo untuk periode 2017-2023.

Meski begitu, pada masa Orde Lama, perempuan Minahasa sudah dipercayakan menjadi Walikota di Kota Manado yakni adalah EW Warouw. Informasi yang ada, Waworuntu merupakan walikota perempuan pertama di Indonesia dan menjadi walikota kedua di Kota Manado. Dia memerintah Manado sejak akhir 1949, namun baru diresmikan pada Maret 1950. Perempuan kelahiran 4 Juni 1899 ini menjadi walikota melalui sebuah pemilihan umum (terbatas), namun ia hanya memerintah hingga 29 Maret 1951 saja. (Sjafari, 2012)

Sementara partisipasi perempuan di pemerintahan, tidak kalah majunya. Gubernur Sinyo Harry Sarundajang saat penyampaian LKPJ 2014 di DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa sebanyak 443 birokrat karier perempuan (44%) di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan rincian eselon II sebanyak 11 birokrat perempuan (21%),

eselon III sebanyak 104 birokrat perempuan (36%) dan eselon IV sebanyak 328 birokrat perempuan (44%). (Beritamanado.com, edisi 6 April 2015). Ada tren kenaikan antara partisipasi perempuan di bidang politik dengan pemerintahan (birokrasi).

Kepemimpinan Politik Perempuan di Legislatif

Perjuangan Maria Walanda Maramis akhirnya berbuah manis, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan berbagai faktor-faktor pendukung yang ada, baik faktor sosial budaya, kebijakan politik, maupun agama terutama Kristen dimana antara laki-laki dan perempuan sama derajat di dalam gereja. Kemajuan keikutsertaan perempuan di bidang politik sangat baik berikut tabel tentang kemajuan politik perempuan di bidang politik di tingkat DPR-RI, DPD, dan DPRD Provinsi Sulawesi Utara di era reformasi.

Di ranah legislatif perempuan Provinsi Sulawesi Utara juga bangkit ketika Sus Sualang-Pangemanan dipercaya sebagai Ketua DPRD Minahasa Utara periode 2004-2009, begitu juga Jenny J. Paruntu menjadi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan 2009-2014. Sebelumnya di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pandeiroth-Roeroe menjadi Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999-2004, bahkan Meiva Lintang, STh menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode 2009-2014.

Kemajuan politik perempuan Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya terjadi di tataran legislatif daerah tapi juga di tingkat nasional. Ada Yasti Suprejo Mokoginta, perempuan pertama di Indonesia yang menjadi ketua Komisi di Senayan. Yasti yang dikenal sebagai sosok perempuan energik ini bisa membuktikan kiprahnya dengan menjadi ketua Komisi V DPR-RI. Posisi yang banyak diidamkan oleh 560 anggota DPR RI yang mayoritas laki-laki.

Keterwakilan perempuan di di DPR-RI tidak secemerlang di DPD-RI. Periode 1999-2004 dan 2004-2009 tidak ada satupun legislator perempuan di Senayan. Hal itu terjadi karena ketentuan keterpilihan legislator sangat ditentukan oleh nomor urut bukan suara terbanyak.

Era itu semua partai politik, apalagi legislator pusat (DPR-RI) didominasi oleh kaum pria. Periode 2009-2014 perempuan sudah mulai diperhitungkan, Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Provinsi Sulawesi Utara dengan sangat percaya diri mencalonkan Dra. Yasti Suprejo Mokoginta pada urut satu dan dirinya berhasil ke Senayan. Vanda Sarundajang dari PDIP pada periode 2009-2014 juga berhasil menjadi wakil rakyat di Senayan dan pada periode 2014-2019 terpilih kembali menjadi wakil rakyat.

DPD-RI, sejak kelahirannya pada tahun 2004, Provinsi Provinsi Sulawesi Utara dengan 4 anggotanya, selalu menyertakan dua anggota perempuan. Periode 2004-2009 terpilih Aryanthi Baramuli, Dra. Sintje Sondakh-Mandey, Marhanny V. Pua, dan F. Mokoginta. Periode 2009-2014, keterwakilan perempuan hanya tertinggal Aryanthi Baramuli bersama Marhanny V. Pua, F. Tinggogoy, dan Drs. Alvius Lomban, sedangkan Dra. Sintje Sondakh-Mandey pada akhir periode menggantikan Tinggogoy yang meninggal dunia tahun 2013. Periode 2014-2019, keterwakilan perempuan dan pria kembali seimbang dengan terpilihnya Aryanthi Baramuli, Dr. Maya Rumantir, Fabian Sarundajang, dan Benny Rhamdani.

Kepemimpinan politik perempuan di DPRD Kota/ Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara juga cukup baik. Meski begitu, ada juga kabupaten/kota yang angka legislatornya cukup rendah. DPRD Kota Tomohon berhasil menjadi teratas untuk legislator perempuan yakni sebanyak 7 orang atau 35% dari 20 jumlah keseluruhan legislator di sana. Posisi kedua, Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara yakni sebanyak 13 legislator perempuan atau 32,5 % dari 40 jumlah keseluruhan legislator. Posisi berikut adalah Kabupaten Minahasa sebanyak 11 legislator perempuan atau 31,4% dari 35 jumlah keseluruhan legislator di sana.

Tabel 2. Keterwakilan Legislator Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara periode 2014-2019

No.	Kota/Kabupaten	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Kota Manado	13 (32,5 %)	27(67,5%)	40
2.	Kota Bitung	6(20%)	24(80%)	30
3.	Kota Tomohon	7(35%)	13(65%)	20
4.	Kota Kotamobagu	3(10%)	22(90%)	25
5.	Kabupaten Minahasa	11(31,4%)	24(68,6%)	35
6.	Kabupaten Minahasa Utara	6(20%)	24(80%)	30
7.	Kabupaten Minahasa Selatan	6(20%)	24(80%)	30
8.	Kabupaten Minahasa Tenggara	6(24%)	19(76%)	25
9.	Kabupaten Bolaang Mongondow	1(3,3%)	29(96,6%)	30
10.	Kabupaten Bolmut	2(10%)	18(90%)	20
11.	Kabupaten Bolsel	3(15%)	17(85%)	20
12.	Kabupaten Boltim	1(5%)	19(95%)	20
13.	Kepulauan Sangihe	6(24%)	19(76%)	25
14.	Kepulauan Talaud	1(5%)	19(95%)	20
15	Siau Tagulandang Biaro	7(35%)	13(65%)	20
		79	311	390

Sumber: diolah peneliti dari KPU Provinsi Sulut

Ada beberapa alasan yang dikemukakan legislator perempuan ketika masuk mencalonkan diri menjadi legislator di DPRD Sulawesi Utara, yaitu alasan partai politik, pribadi, keluarga, dan aturan. Menurut mereka, dengan adanya aturan minimal 30 persen keterlibatan perempuan dalam daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DCT), peluang perempuan semakin besar. Apalagi perempuan tersebut punya hubungan tertentu dengan partai politik, jalan tersebut semakin mulus bagi mereka. Perpaduan hal tersebut sangat mendukung perempuan sehingga menjadi calon legislator bahkan akhirnya berhasil menjadi legislator. Faktor-faktor tadi ditambah faktor sosial, budaya, dan agama yang

mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik membuktikan angka keterwakilan politik perempuan di Sulawesi Utara cukup tinggi.

Perempuan yang menjadi legislator di Provinsi Sulawesi Utara dari lima daerah pemilihan yang berbeda menyatakan tidak mengalami kendala budaya maupun sosial ketika mereka menjadi legislator. Dalam aktivitasnya menjadi legislator juga tidak ada kendala, ketika berbicara di sidang-sidang maupun rapat-rapat dengan legislator laki-laki guna menjalankan tugas dan fungsi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Meski harus diakui, ada faktor klasik secara struktural sebagai legislator di DPRD, yang harus mengikuti aturan fraksi yang merupakan perpanjangan tangan dari partai politik.

SIMPULAN

Kuantitas dari partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara sudah memadai. Secara angka Sulawesi Utara juga cukup menonjol jika dibandingkan secara nasional dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Naiknya angka keterlibatan perempuan itu karena didukung oleh faktor sosial budaya termasuk agama bahkan keberpihakan undang-undang pada partisipasi perempuan di politik dan pemerintahan. Apalagi calon legislator perempuan yang memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan partai politik dan penguasa.

Meski begitu, para legislator perempuan masih mengalami kendala klasik ketika menjadi legislator yakni harus mengikuti aturan fraksi. Fraksilah yang menentukan keterlibatan legislator dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam prakteknya di DPRD, satu legislator perempuan yang menjadi ketua fraksi. Dua legislator perempuan dipercaya menjadi ketua Komisi yang strategis yakni Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur. Badan Anggaran dan Badan Kehormatan, masing-masing diketuai oleh legislator perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M.A. (2018). Wawasan Kepemimpinan Politik Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan (Edisi Baru). Bekasi: Penjuru Ilmu.

Andriana, N., Siregar, S.N., Haris, S., Yanuarti, S., Budiatri, A.P. dan Amalia, L.S. (2012) Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal: Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen Indonesia: Suatu Analisis. Jakarta. Penerbit: PT. Gading Inti Prima dan Pusat Penelitian Politik, LIPI.

Cresswell, J.W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antra Lima Pendekatan (Edisi Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farida, I. (2013). Rekruitmen, Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Birokrat Perempuan dalam meningkatkan pelayanan public di Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sosiohumaiora, Vol.15 (1): 55-63

Fakih, M. (2010). Analisis Gender dan Tranformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hulwati. (2012) Perempuan Dalam Wacana Politik Islam. Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol. 2 (1): 61-76

Kemen PP dan PA. (2016). Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik.

Kriyantono, R. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi (Disertai Contoh Praktis Media, Public Relations Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mujahidin, A.M. (2014). Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Mulyana, D. (2010). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mosse, J.C. (2010). Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinulingga, R. (2006). Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Agama Kristen. Jurnal Wawasan. Vol. 12 (1): 47-53.

Sulistyowati, I. (ed). (2006). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wahid, U. (2014). Otonomi Daeran dan Komunikasi Politik Perempuan (Analisis Gramcian Kandidat Perempuan Parlemen Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009). Sosiohumaniora. Vol. 16 (1) 2014 : 29-45.

Widayani, N.M.D. dan Hartati, S. (2014). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. Jurnal Psikologi, UNDIP, Vol. 13 (2) 149-162.

Ini Data Partisipasi Perempuan Sulut di Politik dan Birokrat. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ggb6ykDNuwUJ:https://beritamanado.com/ini-data-partisipasi-perempuan-sulut-di-politik-dan-birokrasi/ +&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id [19/3/18]

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 145 - 153
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE

(Studi Kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat)

Iwang Gumilar
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
E-mail: iwanggumilar1@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Variabel yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove. Pengukuran derajat persepsi dan partisipasi diukur menggunakan metode skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki persepsi bahwa kerusakan ekosistem mangrove selain karena faktor alam juga karena perilaku manusia; mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir; pengelolan hutan mangrove tanggung jawab bersama; perusahaan lokal harus berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pelestarian lingkungan dengan baik melalui penegakan hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah. Indeks partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove berada pada tahap tokenisme yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Hal ini akan menjadi ancaman keberlanjutan ekosistem hutan mangrove karena akan berimplikasi pada *sense of belonging and sense of responsibility* dari masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove.

Kata kunci: persepsi, partisipasi, mangrove

PARTICIPATION OF COASTAL PEOPLES IN THE PRESERVATION OF MANGROVE FOREST ECOSYSTEMS

(Case Study in Indramayu Regency of West Java)

ABSTRACT. *This study aims to analyze the perception and community participation in the preservation of mangrove forest ecosystems in coastal areas Indramayu. The research method used is case study method. The variables studied include perception and community participation in conservation of mangrove forest ecosystem. Measurement of degree of perception and participation is measured using Likert scale method. The results showed that respondents have a perception that the damage to mangrove ecosystems other than due to natural factors are also due to human behavior; mangroves have important benefits for coastal environments; management of mangrove forest joint responsibility; local companies must participate in environmental conservation, and local governments have the obligation to ensure environmental conservation properly through the enforcement of environmental laws and the participation of communities in environmental conservation is still low. The community participation index in the mangrove forest rehabilitation program is at a tokenism level, a level of participation where the community is heard and allowed to argue, but they lack the ability to get assurance that their views will be considered by the decision-maker. This will be a threat to the sustainability of mangrove forest ecosystem because it will have implications on the sense of belonging and sense of responsibility of the community on the management of mangrove forests.*

Key words: *perception, participation, mangrove*

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia, pola pemanfaatan sumberdaya alam dan pola pembangunan dituding sebagai faktor penyebab penting yang terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove. Tindakan manusia seperti membuka lahan untuk tambak yang melampaui batas daya dukung, maupun memanfaatkan tanaman mangrove secara berlebih tanpa melakukan rehabilitasi akan menyebabkan terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove. Pola pemanfaatan lahan yang bersifat tidak ramah lingkungan juga akan mengancam keberadaan ekosistem hutan mangrove. Demikian pula pola pembangunan yang dijalankan di daerah akan mempengaruhi kelestarian sumberdaya hutan mangrove. Kegiatan-kegiatan pembangunan seperti investasi dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem mangrove melalui dua cara, yaitu pertama eksploitasi sumberdaya alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem mangrove. Kedua, kegiatan pembangunan (investasi) memberikan muatan beban pencemar yang dapat menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Dengan kata lain, deradasi ekosistem hutan mangrove dalam banyak kasus sering disebabkan karena perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.

Pada saat ini ada indikasi bahwa kerusakan ekosistem hutan mangrove dan ancaman kepunahan spesies mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu semakin meningkat. Faktor penyebab kerusakan dan akar masalahnya cukup kompleks. Namun inti dari semua permasalahan degradasi hutan mangrove itu pada hakekatnya bersumber pada manusia beserta perilakunya, dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di sekitarnya.

Persepsi, dan partisipasi merupakan unsur perilaku manusia yang akan mempengaruhi bagaimana seorang manusia bertindak (Gumilar 2010).

Guna menjamin fungsi ekosistem hutan mangrove berjalan dengan baik bagi lingkungan secara keseluruhan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, maka sangat diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang efektif yang berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu (integral) dan menyeluruh (holistik) dari aspek-aspek lingkungan terkait yang mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Perumusan strategi kebijakan itu sendiri memerlukan sejumlah data dan informasi yang memadai agar menghasilkan arahan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang jelas. Dalam konteks sosial budaya masyarakat, maka perlu dilakukan studi komprehensif mengenai aspek sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove di Kabupaten Indramayu. Komponen sosial budaya yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu. Dengan studi ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*), yaitu metode penelitian untuk meneliti persoalan-persoalan sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan mangrove secara lebih mendalam. Sesuai dengan tujuannya, penelitian yang menggunakan metode kasus bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta dan hubungan kausal, dalam hal ini adalah fakta-fakta aspek sosial budaya masyarakat, dalam hal ini persepsi, dan partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan pengelolaan ekosistem hutan mangrove.Selain itu, penelitian yang menggunakan metode kasus ini memiliki fungsi eksploratif dan diagnosis untuk mencari keterangan apa penyebab terjadinya degradasi ekosistem hutan mangrove di Indramayu dalam hal ini dilihat dari sudut pandang aspek sosial budaya masyarakat, kenapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder instansional dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk kepentingan konfirmasi data dan informasi dilakukan pengamatan/observasi langsung lapangan menggunakan alat dan bahan yang disebutkan di atas. Variabel yang diteliti meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Indramayu.

Secara garis besar kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan pokok sebagai berikut tahap pertama**,** survey identifikasi dan inventarisasi data persepsi dan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan interview dan pengumpulan data sekunder; Tahap kedua, pengolahan data dengan cara melakukan rekapitulasi, klasifikasi, penyusunan, tabulasi, pembobotan dan scoring data; Tahap ketiga, melakukan analisis data dan informasi hasil pengolahan data dengan cara melakukan komparasi informasi dengan standar nilai tertentu, pendapat pakar terkait atau dengan hasil penelitian sejenis pada tempat yang sama maupun di tempat lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi lapangan, wawancara dan pengumpulan data sekunder atau pendekatan triangulasi (Greenfield 2002). Observasi lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan objek kajian di lapangan secara langsung untuk kepentingan konfirmasi data yang diperoleh dari data sekunder instansional. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan diskusi langsung dengan tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan memahami betul situasi dan permasalahan sosial kemasyarakatan terutama yang ada kaitannya dengan kondisi lingkungan dengan menggunakan daftar pertanyaan/ kuesioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder dikumpulkan dengan cara mendatangi langsung instansi terkait, identifikasi data, koleksi data dan penggandaan data serta hasil *browsing* dari internet dan sumber-sumber lainnya yang terpercaya. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik terpilih (*purposive sampling*) dimana sampel ditentukan atau dipilih sesuai dengan criteria yang ditentukan antara lain tokoh masyarakat setempat yang memahami situasi dan kondisi lingkungan, dan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 orang yang tersebar di desa-desa yang ada di wilayah pesisir Indramayu mulai dari Sukra hingga Krangkeng.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskripsi, yaitu metode analisis yang berusaha menjelaskan kondisi objek kajian menurut kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya terjadi di tempat penelitian tersebut. persepsi dan partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat adalah Metode Skala Likert dan indeks persepsi masyarakat (IPm). Dalam metode ini sebagian besar pertanyaan dikumpulkan, setiap pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga bisa dijawab dalam lima tingkatan jawaban, yaitu sangat setuju (SS, bobot 5), setuju (S, bobot 4), netral /abstain (A, bobot 3), tidak setuju (TS, bobot 2), dan sangat tidak setuju (STS, bobot 1). Indeks partisipasi masyarakat merupakan ukuran agregat untuk menilai persepsi masyarakat tentang isu tertentu dengan rentang nilai 0 hingga 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan diukur dengan mengunakan indeks partisipasi (IP), yaitu ukuran aggregatif yang disusun untuk mengukur suatu variabel tertentu dalam hal ini partisipasi masyarakat. Indeks partisipasi ini berusaha mengukur tingkat partisipasi masyarakat dari derajat keterlibatan dalam berbagai aktivitas pengelolaan ekosistem hutan mangrove atau kelestarian lingkungan (Stuart 1952). Derajat keterlibatan masyarakat diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*) yang meliputi Terapi (*teraphy*), Manipulasi (*manipulation*). Dua tingkat terbawah ini dikategorikan sebagai *non participation*. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk ”mendidik” dan ”mengobati” masyarakat untuk berpartisipasi.Penyampaian informasi (*informing*), Konsultasi (*consultation*), Peredaman kemarahan (*placation*). Tangga ketiga, keempat dan kelima ini dikategorikan sebagai tingkat ”tokenisme” yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Tangga selanjutnya, kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan pengawasan masyarakat (*citizen control*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat

Terdapat sepuluh kriteria pernyataan yang digunakan untuk mengukur dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove di Indramayu sebagai berikut:

1. Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam
2. Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia
3. Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi
4. Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir
5. Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak
6. Pengelolan hutan mangrove tanggungjawab bersama
7. Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai
8. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat
9. Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan
10. Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik

Berikut disampaikan secara rinci mengenai persepsi masyarakat berkaitan dengan kesepuluh kriteria tersebut.

1. **Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam**

Berkaitan dengan kerusakan wilayah pesisir, seluruh responden menyatakan sangat setuju (100%, SS; IPm=1) dengan pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir disebabkan karena pengaruh faktor fisik alam seperti perubahan arus, gelombang yang menyebabkan abrasi. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Pada saat ini secara fisik alam mereka merasakan adanya perubahan pasang surut dimana ketinggian dan derasnya arus dirasakan mulai berubah, musim sering tidak menentu dan gangguan alam lebih banyak sehingga sering aktivitas mereka menjadi terganggu. Dengan tidak menentunya kondisi fisik alam tersebut telah menyebabkan abrasi pantai semakin meningkat, banyak rumah-rumah nelayan dan fasilitas sosial lainnya yang ada di pinggir laut menjadi rusak dan terancam. Rob sering terjadi dan membanjiri lingkungan permukiman dan lokasi tambak mereka. Pencemaran air dewasa ini juga telah menjadi isu pokok yang mengancam degradasi lingkungan. Akibatnya banyak kerugian secara ekonomis yang diderita masyarakat nelayan.

2. **Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia**

Kerusakan wilayah pesisir selain disebabkan karena pengaruh faktor fisik alam juga dikarenakan faktor perilaku manusia. Responden sebanyak 69% menyatakan sangat setuju (IPm=0,69) dan 31% menyatakan setuju (IPs=0,31) terhadap pernyataan bahwa kerusakan wilayah pesisir juga disebabkan karena pengaruh perilaku manusia seperti rendahnya tingkat peminatan masyarakat untuk menanam dan memelihara mangrove, penebangan liar hutan mangrove yang tidak terkendali untuk kepentingan kayu bakar, konversi untuk tambak, dan pemanfaatan untuk pembangunan fasilitas publik. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif.

3. **Kerusakan hutan mangrove karena abrasi dan kepentingan ekonomi**

Menurut persepsi responden (100%, SS; IPm=1) kerusakan hutan mangrove di Indramayu pada saat ini disebakan oleh dua faktor penting yaitu abrasi pesisir dan adanya kepentingan ekonomi seperti konversi lahan tambak yang semakin semarak belakangan ini karena usaha tambak memberikan peluang pendapatan lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Disamping itu, dorongan kebutuhan hidup/ekonomi mereka yang semakin meningkat telah mendorong masyarakat tidak menghiraukan lagi kelestarian lingkungan. Sebagai contoh untuk kebutuhan akan

bahan bakar mereka mulai merambah hutan tanaman mangrove karena harga bahan bakar minyak/bahan bakar yang semakin mahal dan langka. Kondisi seperti ini merupakan ancaman bagi keberlanjutan lingkungan dalam hal ini hutan mangrove.

4. **Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir**

Seluruh responden menyatakan sangat setuju (100%, SS; IPm=1) dengan pernyataan bahwa mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir seperti manfaat menahan abrasi, menahan angin, membuat hijau pemandangan, mengurangi panas / iklim mikro, sumber kayu bakar dan sebagainya. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Seluruh responden menyatakan perlu adanya tanaman mangrove di sepanjang wilayah pesisir.

5. **Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang menyatakan bahwa hutan mangrove kurang bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak. Sebanyak 6% responden menyatakan abstain dan 68% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa hutan mangrove bermanfaat bagi kegiatan usaha tambak (IPm=0,26). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Menurut mereka mangrove sering menyebabkan pengolahan lahan tambak menjadi lebih susah, banyak serasah di lingkungan kolam, timbul proses pembusukan karena banyaknya serasah, timbul penyakit, dan tempat tinggal burung yang dianggap hama untuk udang atau ikan budidaya.

Degradasi ekosistem hutan mangrove di Indramayu secara signifikan dimulai pada era 1990-an dimana keserakahan mencari nafkah dengan merusak ekosistem hutan mangrove-pun mulai dilakukan penduduk. Mereka menebang tanaman mangrove untuk membuat tambak. Kondisi itu diperparah pada saat *booming* udang windu untuk ekspor. Keadaanpun berubah, monyet ekor panjang menghilang dan udang tangkapan semakin sulit diperoleh.

Usaha budidaya tambak dengan sistem *silvofishery* di wilayah Indramayu belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Atas dasar alasan teknis bahwa serasah daun mangrove dan akarnya sering menyebabkan kegiatan pengolahan lahan tambak, pemeliharaan dan pemanenan tambak, terkendala dan menjadi lebih susah, banyak warga masyarakat yang tidak menyukai budidaya tambak *silvofishery*. Maunya mereka budidaya tambak secara terbuka tanpa ada tanaman mangrove yang ada di sekitar tambak. Disamping itu, mereka beranggapan bahwa tanaman mangrove telah menyebabkan hadirnya sejumlah burung yang menjadi ancaman bagi udang atau ikan yang ditanam di tambak. Hal ini telah mendorong mereka membabat tanaman mangrove yang ada di wilayah pesisir untuk budidaya tambak.

Pendapat responden tersebut kontradiksi dengan pragmatisme seorang Cukup Rusdianto, penerima Kalpataru dari Menteri Lingkungan hidup pada 8 Juni 2008, warga masyarakat Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Indramayu. Menurutnya, tanaman mangrove sangat berguna bagi usaha tambaknya. Ikan-ikan atau udang yang ditanam di tambak tidak perlu diberi pakan intensif, karena tanaman mangrove dan plankton yang ada di lingkungan perairan tambak menjadi makanannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Lear dan Turner (1977) bahwa hutan mangrove merupakan daerah yang produktivitasnya tinggi, karena memperoleh energi berupa zat-zat makanan yang terbawa ketika pasang surut air laut. Hal inilah yang mendorong para pembenih ikan untuk melakukan proses budidayanya terutama komoditas yang bisa diusahakan pada aerah tersebut, ang salah satunya adalah budidaya ikan bandeng dan udang. Daun-daun bakau yang telah gugur dan jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur sekaligus berfungsi membantu proses pembusukan daun-daun tersebut menjadi detritus. Detritus ini menjadi makanan binatang pemakan detritus seperti amphipoda, ang selanjutnya binatang ini akan menjadi makanan larva ikan, udang dan kepiting (Aksornkoae 1993; Odum, 1971).

6. **Pengelolan hutan mangrove tanggungjawab bersama**

Berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove, 63% responden menyatakan bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat (IPm=0,63). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Responden sebanyak 37% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pengelolaan hutan mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Diarto (2012) sikap persepsi masyarakat juga terbentuk karena adanya upaya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan stakeholder terkait dalam pengelolaan hutan mangrove. Menurut mereka tanggung jawab pengelolaan hutan mangrove terletak pada pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani dan Dinas instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan dan kehutanan serta dinas perikanan dan kelautan. Responden menyatakan bahwa tidak berhasilnya pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu dikarenakan kegiatan penanaman mangrove umumnya lebih bersifat proyek sehingga terkesan asal-asalan dalam pelaksanaannya. Sudah banyak penanaman mangrove dilakukan bahkan hampir tiap tahun dilakukan tetapi hasilnya tidak nampak. Bahkan menurut sebagian masyarakat ada upaya oknum aparat yang mengkondisikan penanaman sehingga tanaman mangrove tersebut tidak tumbuh atau tersapu gelombang. Sering kali penanaman mangrove dari dinas instansi terkait atau dari pihak lain tidak memperhatikan

teknologi tanamnya. Standar penanaman mangrove yang ideal sering tidak dilakukan sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Masyarakat tidak yakin kalau dinas instansi tersebut tidak mengerti atau tidak tahu cara/teknologi menanam mangrove yang baik.

7. **Penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai**

Adanya oknum aparat yang sering melakukan illegal loging terhadap hutan mangrove disinyalir merupakan ancaman yang tidak kalah penting bagi pengelolaan hutan mangrove. Responden sebanyak 60% menyatakan sangat tidak setuju; sebanyak 23% responden menyatakan tidak setuju; dan 17% responden menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa penegakan hukum lingkungan dinilai sudah cukup memadai (IPm=0). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Responden berpendapat penegakan hukum di lapangan sering tidak jalan dan proses hukum terhadap pelanggar sering tidak tuntas. Roscoe Pound dalam Abdul Manan (2014) mengemukakan konsep yang disebut "law is tool of social engineering" memberikan dasar yaitu hukum digunakan sebagai sarana perubahan masyarakat, hukum harus berperan aktif dalam merekayasa perubahan sosial dalam masyarakat sehingga hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya (Abdul Manan, 2014, 41-42).

Penebangan liar selama ini banyak terjadi pada saat mangrove sudah tinggi sekitar usia 2-3 tahun. Pada saat seperti itu, pencurian terhadap tanaman mangrove semakin meningkat. Mereka membabat tanaman mangrove untuk dijadikan kayu bakar baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual tidak terkecuali oknum aparat atau petugas didalamnya. Disamping itu, ketika tanaman mangrove sudah tinggi sering terbentuk lahan daratan yang tidak berpemilik sehingga banyak orang yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Masalah ini juga otomatis menjadi masalah Pemda.

8. **Partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat**

Masyarakat menyadari bahwa pada saat ini partisipasi masyarakat/gotong royong ada kecenderungan mulai menurun. Hal ini ditunjukkan oleh responden sebanyak 23% menyatakan sangat tidak setuju; responden sebanyak 71% tidak setuju dan hanya 6% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan meningkat (IPm=0,06). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang negatif. Hal ini nampak dari semakin berkurangnya warga masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan gotong royong yang ada di lingkungannya dikarenakan kesibukan masing-masing dalam mencari nafkah, perubahan tata nilai dari masing-masing warga, juga dikarenakan adanya program yang tidak bersifat partisipatif. Masyarakat tidak benar-benar dilibatkan secara langsung dari mulai perencanaan hingga pengawasannya. Handoko (2017) menyatakan bahwa masyarakat pesisir sudah terbiasa dengan model pengembangan yang kurang mengikutsertakan keaktifan masyarakat seiring penetrasi kebijakan sentralistik Orde Baru. Selain itu, keberadaan elit-elit yang biasa terlibat dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa, baik elit formal maupun informal, ketika program pengembangan menuntut arus aspirasi dari tingkat bawah, cenderung menimbulkan gesekan politik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Satu hal lain yang penting pula adalah apakah program pengembangan yang bersifat top-down dan bottom-up juga memiliki orientasi untuk menjaga sustainabilitas program, mengingat pada masa lalu banyak program top-down yang tidak berkelanjutan. Masyarakat yang selama ini terbiasa dengan kebijakan top-down.

9. **Perusahaan lokal berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan**

Perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini PT. Pertamina, dinilai responden memiliki kepedulian yang cukup baik dalam turut serta melestariakan lingkungan termasuk hutan mangrove. Sebanyak 80% responden menyatakan setuju dan 20% responden menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa perusahaan lokal (PT. Pertamina) berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan (IPm=0,8). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif.PT. Pertamina dianggap masyarakat sebagai salah perusahaan andalan yang ada di lingkungan mereka, yang diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selama ini PT. Pertamina banyak memberikan batuan bagi masyarakat dan lingkungan berupa benih mangrove, pembangunan breakwater, permodalan usaha, pembinaan pendidikan dan latihan, dsb.

10. **Pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik**

Berkaitan dengan pengelolan hutan mangrove, responden mengharapkan agar pemerintah daerah berserta jajarannya dapat lebih baik dalam mengelola hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir sehingga kerusakan lingkungan dapat segera di atasi dan manfaat-manfaat lingkungan lebih bisa dirasakan. Responden sebanyak 46% menyatakan sangat setuju; responden sebanyak 49% menyatakan setuju dan sebanyak 5% menyatakan abstain terhadap pernyataan bahwa pemda sudah menjalankan tugas pengelolaan lingkungan dengan baik (IPm=0,95). Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap isu ini berada pada rentang positif. Responden menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove selama ini dinilai cukup berhasil yang diindikasikan diantaranya dengan diperolehnya penghargaan Kalpataru dari pemerintah pusat.

Hasil rekapitulasi data, dari 10 kriteria yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap isu-isu pokok lingkungan ekosistem hutan mangrove di Indramayu disajikan pada gambar berikut.

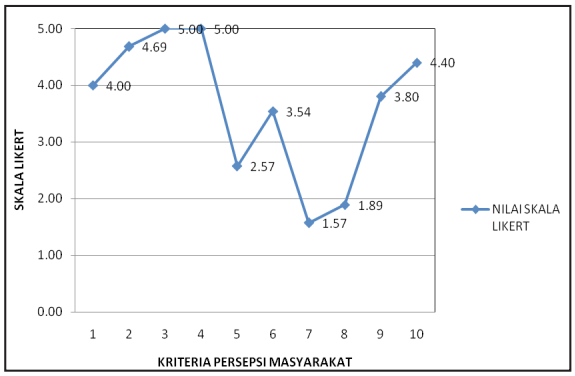

Gambar 1. Grafik Pengukuran Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Lingkungan Ekosistem Dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Indramayu Menggunakan Skala Likert

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kriteria atau isu pokok lingkungan nomor 1,2,3,4,6,9 dan 10 menunjukkan nilai skala Likert yang berada pada rentang positif. Ini artinya, responden memiliki persepsi positif terhadap isu-isu dimaksud. Sementara itu, untuk kriteria nomor 5.7.dan 8, responden memiliki persepsi negatif terhadap isu-isu lingkungan tersebut. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mangrove tidak memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak; penegakan hukum lingkungan dinilai masih sangat kurang memadai; dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan ada kecenderungan mengalami penurunan. Timbulnya pemikiran negatif terhadap sebagian besar responden berkaitan dengan manfaat mangrove bagi tambak, karena responden memandang manfaat tanaman mangrove hanya dari sisi teknis saja bahwa mangrove sering menyebabkan pengolahan lahan tambak menjadi lebih susah, banyak serasah di lingkungan kolam, timbul proses pembusukan karena banyaknya serasah, timbul penyakit, dan tempat tinggal burung yang dianggap hama untuk udang atau ikan budidaya. Mereka umumnya belum memahami dengan baik teknologi *silvofishery*. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi para pihak untuk meyakinkan para petambak bahwa tanaman mangrove dalam kegiatan budidaya tambak dapat memberikan manfaat lebih baik. Upaya melakukan perubahan persepsi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi nampaknya perlu terus digalakkan untuk meyakinkan bahwa kehadiran tanaman mangrove di lingkungan tambak dapat sinergis meningkatkan keberhasilan usaha tambak itu sendiri. Hasil penelitian Slamet Jumaedi (2016) menunjukan bahwa pandangan masyarakat terhadap pengelolaan ekosistem mangrove hanya sebesar 49.1%, artinya masyarakat masih memandang pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir (Kota Singkawang) selama ini berjalan kurang baik. Alternatif solusi untuk mengatasi pemasalahan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di pesisir diantaranya dengan memperbaiki dan memperkuat struktur kelembagaan agar lebih efektif sehingga menghasilkan *performance* yang lebih baik.

Selanjutnya menurut responden, penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan hutan mangrove di Indramayu dinilai masih sangat kurang dan belum memuaskan. Penegakan hukum di lapangan sering tidak berjalan dengan baik dan proses hukum terhadap pelanggar sering tidak tuntas. Kondisi seperti ini tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sering kejadian kasus *illegal logging* terus terulang. Responden juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian lingkungan khususnya hutan mangrove ada kecenderungan mengalami penurunan. Masyarakat mulai individualistis dan mulai kurang perhatian terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan termasuk didalamnya kerusakan ekosistem hutan mangrove.

Tabel 1. Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Lingkungan Dan Pengelolaan Hutan Mangrove Di Kabupaten Indramayu

No	Persepsi	Responden (n=35)					Indeks Persepsi				
		SS	S	A	TS	STS	SS	S	A	TS	STS
1	Kerusakan wilayah pesisir karena faktor alam	-	35	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Kerusakan wilayah pesisir lebih karena perbuatan manusia	24	11	-	-	-	0.69	0.31	-	-	-
3	Kerusakan hutan mangrove krn abrasi dan kepentingan ekonomi	35	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir	35	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Mangrove memiliki manfaat penting bagi kegiatan tambak	-	9	2	24	-	0.26	-	0.06	0.68	-
6	Pengelolan hutan mangrove tanggungjawab Bersama	10	12	-	13	-	0.29	0,34	-	0.37	-
7	Penegakan hukum dinilai sdh cukup memadai	-	-	6	8	21	-	-	0.17	0.23	0.60
8	Partisipasi masyarakat cenderung meningkat	-	2	-	25	8	-	0.06	-	0.71	0.23
9	Perusahaan lokal berpartisipasi dlm pelestarian Lingkungan	-	28	7	-	-	-	0.80	0.20	-	-
10	Pemda sdh menjalankan tugasnya dengan baik	16	17	2	-	-	0.46	0.49	0.05	-	-

Keterangan: SS= sangat setuju (5), S= setuju (4), A= netral/abstain (3), TS= tidak setuju (2), STS= sangat tidak setuju (1).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam era otonomi daerah sekarang ini merupakan isu penting yang terus didorong eksistensinya karena dengan tingginya partisipasi masyarakat akan mengurangi beban biaya pembangunan di daerah dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks partisipasi (IP) dari Stuart Chapin (1952). Sementara untuk derajat keterlibatan masyarakat diukur dengan instrumen partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan tipologi delapan tangga partisipasi masyarakat (*eight rungs on the ladder of citizen participation*). Bentuk partisipasi masyarakat berupa kontribusi tenaga, pikiran, waktu dan dana yang dicurahkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan/pelestarian lingkungan.

Di Kabupaten Indramayu kegiatan pelestarian lingkungan hutan mangrove berupa kegiatan penanaman baru dan rehabilitasi sudah cukup banyak dilakukan tercatat sejak tahun 1995 hingga 2009 paling tidak ada sekitar 24 lokasi/desa yang telah mendapat program rehabilitasi hutan mangrove yang dilaksanakan oleh BRLKT, LH kabupaten Indramayu, Wetland, OISCA, Himateka IPB, Subdin LH, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan (BP DAS) dan Himapikan UNPAD.

Hasil penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat menurut program yang diberikan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa indeks partisipasinya bervariasi menurut *stakeholder* yang ada dengan kisaran indeks antara 0,50-1,00. Nilai indeks 1 menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat sudah tinggi dalam arti posisi partisipasi berada pada tahapan 8 tangga partisipasi dimana masyarakat sudah terlibat secara aktif dalam pengawasan kegiatan. Nilai indeks partisipasi kurang dari 1 mengandung arti bahwa derajat partisipasi masyarakat masih rendah. Secara umum, dari seluruh program rehabilitasi hutan mangrove yang pernah dilakukan oleh komponen *stakeholder* di Indramayu sejah 1995 hingga 2009, indeks partisipasi masyarakat rata-ratanya sebesar 0,59 atau berada pada rentang 0,50-0,60. Ini artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove masih rendah karena kurang dari 1. Menurut Arnstein (1969) partisipasi masyarakat tersebut berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi. Arnstein menyebut tingkatan tersebut sebagai tingkat ”tokenisme” yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Selanjutnya Arnstein menjelaskan, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat diduga karena masyarakat selama ini terbiasa dengan kebijakan top-down (Handoko 2017).

Secara ideal keterlibatan masyarakat baru dikatakan berpartisipasi secara penuh apabila partisipasi berada pada tahapan delapan, yaitu pengawasan masyarakat atau paling tidak pada tahapan kemitraan dan pendelegasian wewenang. Tiga tangga teratas tersebut masuk kedalam tingkat ”kekuasaan masyarakat” (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.

Cormick (1979) membedakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam partisipasi publik dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas dan melaksanakan keputusan.

Dalam faktanya di lapangan masih banyak yang memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan. Secara diagramatis, sebaran nilai indeks dan derajat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove di Indramayu disajikan pada gambar berikut:

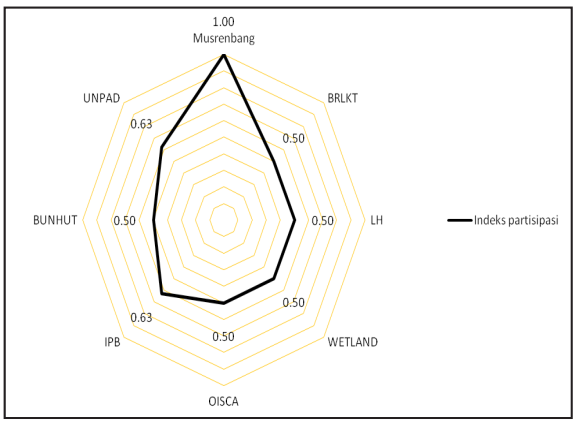

Gambar 2. Sebaran nilai indeks partisipasi masyarakat menurut program stakeholder di Kabupaten Indramayu

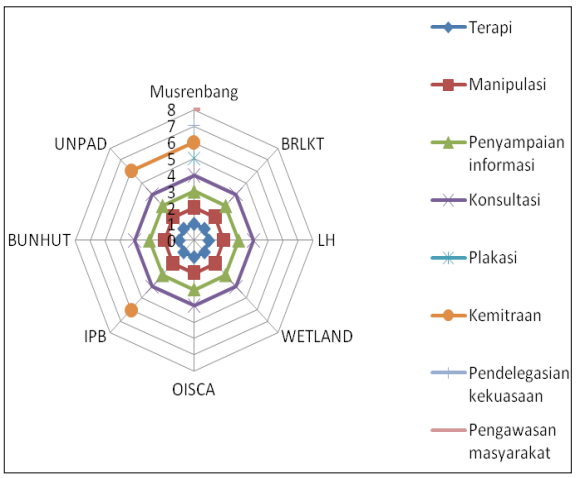

Gambar 3. Derajat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Indramayu (Model tangga partisipasi Arnstein, 1969, dimodifikasi).

Menurut program kegiatan berdasarkan *stakeholder* yang ada, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat terjadi pada program kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang termasuk dalam program musrenbang desa, dimana nilai indeks partisipasinya (IP) sebesar 1. Ini artinya masyarakat terlibat dari mulai penyampaian informasi, konsultasi hingga pengawasan. Pemerintah desa dalam upaya menyelenggarakan praktek perencanaan RPJM Desa sebaiknya memanfaatkan masyarakat desa terutama yang masih usia muda. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memberi masukan atau input-input pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat(Dahyar Daraba, 2017).

Menurut Airnstein (1969), tiga tangga teratas, kemitraan, pendelegasian wewenang dan pengawasan masyarakat, dikategorikan sebagai tingkat ”kekuasaan masyarakat” (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu. Namun berdasarkan fakta yang ada program musrenbang belum mencerminkan adanya kemitraan, pendelegasian dan pengawasan masyarakat. Program pembangunan yang dikelola melalui mekanisme musrenbang sebagai program ideal hingga saat ini masih berupa wacana.

Program penanaman dan rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh sivitas kedua perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu Himateka IPB dan Himapikan UNPAD memiliki nilai indeks partisipasi sebesar 0,63. Artinya derajat partisipasi masyarakat terhadap program yang ditawarkan kedua perguruan tinggi tersebut berada pada tangga ke-enam, yaitu tahap kemitraan. Dengan kata lain, masyarakat dijadikan mitra yang setara untuk sama-sama melaksanakan program tersebut. Tetapi lagi-lagi kemitraan di lapangan masih berada dalam tataran konseptual belum implementatif. Masyarakat seolah-olah diposisikan sebagai mitra tetapi dalam faktanya posisi mereka tidak sejajar dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan.

Lembaga swadaya masyarakat, Wetland dan OISCA, serta instansi pemerintah, BRLKT, lingkungan hidup dan dinas kehutanan dan perkebunan, nilai indeks partisipasinya sebesar 0,50. Artinya derajat partisipasi masyarakat dalam program penanaman dan rehabilitasi hutan mangrove yang ditawarkan/diprakarsai oleh kelembagaan tersebut berada pada tangga ke-empat, yaitu tahap konsultasi. Dengan kata lain, masyarakat dalam program tersebut hanya diajak konsultasi saja.

SIMPULAN

Responden memiliki persepsi bahwa kerusakan ekosistem mangrove selain karena faktor alam juga karena perilaku manusia; mangrove memiliki manfaat penting bagi lingkungan pesisir; pengelolan hutan mangrove tanggung jawab bersama; perusahaan lokal harus berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin pelestarian lingkungan dengan baik melalui penegakan hukum lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah. Indeks partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi hutan mangrove berada pada tahap tokenisme yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, (1969). Social Participation. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sosiohumaniora, Vol. 19 (1): 52-58

Departemen Kelautan dan Perikanan. (2001). Penyusunan Model Perencanaan di Zona Penyangga dan Pemanfaatan Kawasan Sumberdaya Pesisir yang Berbasis Masyarakat di Indramayu Jawa Barat. Jakarta.

Diarto. (2012). Partisipasi Mayarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo Di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Lingkungan Vol.10 (1): 1-7.

Dinas Perikanan dan Kelautan. (2008). Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Indramayu DPK Indramayu.

Jumaedi, S. (2016). Nilai Manfaat Hutan Mangrove Dan Faktor-Faktor Penyebab Konversi Zona Sabuk

Hijau (*Greenbelt*) Menjadi Tambak Di Wilayah Pesisir Kota Singkawang Kalimantan Barat. Sosiohumaniora, Vol. 18, (3): 227- 234

Greenfield, T. (2002). Research Methods for Post graduates. New York: Oxford University Press Inc.

Gumilar, I. (2010). Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan. Studi Kasus di Kabupaten Indramayu), Bogor. Disertasi: Institut Pertanian Bogor.

Handoko, W. (2017). Menjaga Sustainabilitas Pengembangan Masyarakat Pesisir Kebumen: Antara Corak Top-Down, Partisipatif dan Inisiasi Kelembagaan Lokal. Sosiohumaniora, Vol. 19 (3): 244 - 252

Manan, A. (2014). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana, Jakarta.

Stuart, C. (1952). Social Participation Scale. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 154 - 161
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DIKALANGAN PELAJAR DI KABUPATEN BOGOR

[1]Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi[2]
[1]Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor
[2]Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor
E-mail: ikea.ratnamulyani@gmail.com

ABSTRAK. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet, maka semakin penting peran media sosial *online* sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan efek positif dalam peningkatan partisipasi politik dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di dalam pemilihan umum. Namun, realitasnya para politisi atau partai politik yang berkompetisi di pemilihan anggota legislatif di Kabupaten Bogor pada tahun 2014 belum optimal dalam memanfaatkan media sosial berbasis internet tersebut. Dampaknya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dikalangan pelajar rendah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan (1) untuk mendeskripsikan pengguna media sosial dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula; (2) untuk mendeskripsikan pengguna media sosial berbasis internet dikalangan politisi/partai politik (3) untuk mengetahui konten pesan kampanye politik para politisi di media sosial. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, ialah untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Tehnik pengambilan data dengan cara: observasi, wawancara, kuesioner dan FGD (*Focus Group Discations*). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengguna media sosial semakin masif di kalangan pelajar sebagai pemilih pemula di kabupaten Bogor untuk mengakses informasi tentang pemilu, yaitu sebagai pengguna Twiteer 35%, Facebook 28%, dan Instagram 28%. Sedangkan dikalangan para politisi/partai politik dalam kampanye politik masih rendah dalam penggunaan akun media sosial (82,7%). Kemudian konten kampanye politik para politisi dalam media sosial kurang menarik (94,2%). Adapun saran untuk para politisi antara lain: (1) Pemanfaatkan media sosial dalam kampanye pemilu secara optimal (2). Konten pesan politik sebaiknya disesuaikan dengan ciri khas pemilih pemula, seperti: sederhana, praktis, menarik dan mudah dipahami oleh mereka.

Kata kunci: *Media sosial, partisipasi politik, pemilu legislatif, pemilih pemula, kalangan pelajar*

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE IMPROVEMENT OF SELECTED PARTICIPATION OF STUDENTS BASED ON STUDENTS IN BOGOR REGENCY

ABSTRACT. *With the development of Internet-based information technology, the more important the role Along of online social media as one of the factors that can provide a positive effect in increasing political participation among students as novice voters in the general election. However, the reality of politicians or political parties that compete in the election of legislative members in Bogor Regency in 2014 has not been optimal in utilizing the internet-based social media. The impact of voter participation rate of beginner among student is low. Therefore, this study has a purpose (1) to describe social media users among learners as novice voters; (2) to describe users of internet-based social media among politicians (3) to find out the political campaign messages of politicians in social media.This research method is descriptive analysis, is to describe, and interpret data. Techniques of data collection by: interview, questionnaire and FGD. The results showed that social media users are increasingly massive among students as novice voters to access information about the election, ie Twiteer 35% users, 28% Facebook, and 28% Instagram. While the politicians in political campaigns are still low in the use of social media accounts (82.7%). Then the political campaign content of politicians in social media is less interesting (94.2%). (1) Utilizing social media in election campaigns optimally (2). The content of political messages should be tailored to the characteristics of beginner voters, such as: simple, practical, interesting and easily understood by them.*

Key words: *Social media, political participation, legislative elections, novice voters, students*

PENDAHULUAN

Ketika perkembangan teknologi semakin pesat, terutama di bidang teknologi informasi berbasis internet maka peran media komununikasi semakin penting. Oleh karena itu, sekarang media telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Hal ini seiring dengan ditemukannya perangkat-perangkat media yang berbasis internet, sehingga informasi menjadi sesuatu yang mudah ditemukan dibelahan dunia ini, dengan mengakses melalui internet mengenai informasi, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena tersebut, komunikasi yang pada awalnya hanya sebatas proses interaksi personal secara *face to face*, kini berkembang secara *online* berbasis iternet. Dalam hal ini, salah satu komunikasi berbasis internet yang banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online.* Dengan hadirnya media berbasis internet (*media online*) tersebut menunjukkan telah terjadi pergeseran arah penggunaan media komunikasi, yang semula bersifat klasik (media elektronik dan cetak) dan kini mengalami perubahan kepada media baru (*new media*) berbasis internet yang menjadi saluran akses media sosial dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, juga politik, misalnya digunakan di dalam kampanye pemilu untuk mensosialisaikan visi, misi, dan program kerja seorang kandidat kepala daerah misalnya.

Media sosial dijadikan sebagai strategi komunikasi politik adalah merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini. Misalnya, yang paling mendapat sorotan, yaitu ketika kampanye politik kandidat presiden Amerika Serikat, Barac Obama dan tim suksesnya pada 2008 menggunakan media baru untuk menyebarkan informasi seputar program dan kegiatan kampanye dalam rangka menggalang simpati dan dukungan masyarakat Amerika pada saat itu. Di Indonesia, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang paling marak ketika pemilihan presiden Republik Indonesia pada 2014. Maraknya media sosial di dunia maya dalam kampanye Pilpres 2014 berkaitan dengan makin banyaknya pengguna internet di negeri ini. Studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan "pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 20-30 persen, yaitu menjadi 80 juta orang pada akhir 2013. Hal ini berarti pertumbuhannya mencapai 33,3%" (*http://nasional.kompas.com/read/2014/06/24/0245002/*).

Varian media sosial yang tengah berkembang dan banyak diminati orang adalah *Facebook*, *Twitter, WhatsApp, Youtube,* dan sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa orang (penggunanya) untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon secara online dalam waktu yang cepat.

Dalam konteks ini, dilihat dari kasus pemilihan anggota legislatif pada 2014 di Kabupaten Bogor di temukan bahwa pada umumnya para politisi yang ikut berkompetisi dalam pemilihan anggota legislatif kurang memanfaatkan media sosial secara optimal. Dengan kata lain, cendrung masih menggunakan gaya kampannye dalam komunikasi politik bersifat konvensional, dari pada menggunakan jejaring internet, seperti *web site, blog, facebook, twitter*, *whatsApp* dan sebagainya. Padahal, lingkungan telah berubah, yaitu datangnya era baru yang disebut dengan era teknologi digital, atau disebut pula dengan istilah *"new media"* yang bersifat kontemporer. Perangkat teknologi yang bersifat multimedia mulai digunakan sebagai sarana sosialisasi dan kampanye para calon kadidat anggota legislatif. Hal inilah yang menyebabkan tingkat partisipasi politik pemilih, khususnya pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor masih rendah pada pemilu legislatif 2014. (http://www.pemilu.go.id).

Berdasarkan paparan tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; (a) Bagaimana tingkat pemilih pemula melalui jaringan internet di Kabupaten Bogor (b) Bagaimana tingkat pengetahuan tentang pemilu dikalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Bogor. (c) Bagaimana merancang pengguna media sosial dikalangan pelajar sebagai pemilih rancang model komunikasi politik berbasis multi-media sosial untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui multi-media sosial.

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat" (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 751). Bauer berpendapat bahwa peran (seperti dikutip Haris, 2012: 204) "sebagai presepsi mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut". Dari pengertian peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan karakter yang dibawakan oleh seseorang dalam sebuah panggung permainan. Adapun dalam pengertian lain bahwa peran adalah suatu fungsi yang diharapkan dari seseorang yang sedang memegang jabatan. Jadi, suatu peran yang menyebabkan perilaku seseorang memiliki pengaruh dalam menjalankan fungsinya.

Istilah media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata "Medium" yang secara harfiah berarti "perantara" yaitu perantara sumber pesan (*a source*) dengan penerima pesan (*a receiver*). (http://digilib.unila.ac.id/12294/3/BAB%20II.pdf, diakses 16 Feb 2017).

Sementara itu, pengertian media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "mempunyai arti alat (sarana) komunikasi seperti koran, radio, televise, film, poster, dan spanduk" (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 461). Menurut Cangara berpendapat bahwa "media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak." (Cangara,2006: 119). Dari pengertian media di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu sarana atau perantara yang dapat digunakan oleh seseorang atau disebut komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak, baik secara langsung dengan tatap muka maupun tidak lansung melalui koran, radio, televisi, film, foster dan spanduk.

Pengertian Komunikasi

Menurut Mingkid berpendapat metode komunikasi merupakan cara yang dipergunakan dalam mengadakan hubungan dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi yang dalam kategori komunikasi metode lisan dan tulisan. Secara konseptual, pemahaman akan media komunikasi dapat terlihat dari pemikiran Harold Laswell dalam *In which channel* yaitu saluran atau media yang digunakan dalam proses komunikasi apakah langsung atau tatap muka dan sebagainya. Dalam tulisan lainnya, Mangkid mengutip pendapat Siagian Pada bagian lainnya juga mengutip pendapat Onong bahwa poses komunikasi setidaknya melibatkan: Saluran, ialah alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan unsur-unsur komunikasi antara lain adalah media yaitu sarana

atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. (Mingkid, 2012: 190)

Pengertian Sosial

Ada beberapa pengertian sosial yang dikemukakan para ahli ilmu sosial, seperti yang dikutif Nasrullah sebagai berikut.

Durkheim berpendapat bahwa sosial "merujuk pada kenyataan sosial (*the social as social facts*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataaan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak (*softwere*) merupakan sosial dalam makna keduanya merupakan produk dari proses sosial." (Nasrullah, 2017: 7).

Sementara itu, Marx mengungkapkan bahwa:

> Memaknai sosial itu merujuk pada saling bekerjasama (*co-operative work*). Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimanna setiap individu saling bekerjasama, apapun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk. Dalam kajian Marx ini, ada penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerjasaama atau saling mengisi di antara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat. (Nasrullah,2017: 7)

Dari pengertian sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata sosial adalah merupakan tindakan atau aksi dan interaksi seseorang dengan orang lainnya serta melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Pengertian Media Sosial

Dari dua kata media dan sosial yang telah dijelaskan tersebut, kemudian kita gabungkan menjadi kata media sosial. Berikut ini ada beberapa definisi dari media sosial antara lain yang dikemukakan oleh Mandibergh berpendapat bahwa "media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*)". (Nasrullah, 2017: 11).

Sementara itu, Boyd menjelaskan bahwa:

> Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. (Nasrullah, 2017: 11)

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (*media online*) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan berkerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya. Selain itu, penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan. Dalam hal ini, ada beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: *Blog, Twitter, Facebook WashApps, BMM, Line,* Wikipedia dan lain-lain.

Media Massa

Menurut Prasetya berpendapat Media massa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan di media massa mampu menampilkan realita sosial di masyarakat. Media massa yang telah mengalami perkembangan begitu pesat juga mampu membentuk opini public melalui tayangan yang disajikannya, seperti berita misalnya. Televisi sebagai salah satu media massa yang paling besar memberikan pengaruh merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. (Prasetya, 2013: 233)

Peran Media Sosial Dalam Politik

Sebagaimana telah diuraikan bahwa media sosial adalah sebuah media *online* yang menggunakan teknologi berbasis internet yang mendukung interaksi sosial, sehingga mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang timbal balik. Dalam perkembangannya, media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks kampanye pemilu yang dapat menjadi perantara para politisi dengan konstituennya,yaitu antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat massif. Oleh karena itu, melalui media sosial, komunikator dapat melakukan komunikasi politik dengan para pendukung atau konstiuennya, yaitu untuk membangun atau membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon presiden dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg).

Pengertian Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibataan setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Surbakti menjelaskan bahwa "partisipasi politik ialah segala keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya" (Surbakti, 1999: 140). Menurut Budiardjo bahwa partisipasi politik adalah "kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut

serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah" (Budiardjo, 2008 : 367).

Dari pengertian partisipasi politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih Kepala Negara (Maran, 2001: 148).

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Maran, 2001: 148) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu: (a) menduduki jabatan politik atau administrasi; (b) mencari jabatan politik atau administrasi; (c) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik; (d) menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik; (e) menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik; (f) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik; (g) partisipasi dalam rapat umum, demontrasi, dsb; (h) partisipasi dalam diskusi politik internal; dan (i) partisipasi dalam pemungutan suara.

Pengertian Pemilih Pemula

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin(Pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu). Kemudian pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutanm suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu).

Sementara itu, pemilih pemula adalah terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya. Mereka biasanya adalah pelajar berusia 17-21 tahun, namun ada juga kalangan muda lainnya yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yakni para mahasiswa semester awal dan kelompok pemuda lainnya yang pada pemilu periode sebelumnya belum genap berusia 17 tahun (Modul 1 KPU, Pemilih Untuk Pemula. 2010: 48)

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi pemilih adalah: 1. Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya 3. Terdaftar sebagai pemilih 4.Bukan anggota TNI/Polri 5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya 6.Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7.Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan (Sekretariat Jenderal KPU, 2010:1).

Pengertian Pemilihan Umum

Secara umum, pengertian Pemilihan Umum, yang selanjutya disingkat Pemilu adalah suatu proses politik untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan politik, seperti di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Oleh karena itu, pemilu adalah merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta juga memilih Presiden dan Wakil presiden. Menurut Ramlan: "Pemilu diartikan sebagai "mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai" (Surbakti,1992: 181).

Pemilu tidak hanya diperuntukan memilih eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), tetapi juga untuk memilih badan legislatif (memilih wakil-wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat) (UU. No. 8 tahun 2012 dan UU. No. 15 tahun 2011), yaitu:

1) anggota DPR,
2) DPD,
3) DPRD Provinsi, dan
4) DPRD Kabupaten /Kota

METODE

Penelitiaan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif adalah "disebut pula metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah" (Sugiyono, 2014: 13). Pendekatan deskriptif adalah "suatu penelitian yang didasarkan pada data yang ada atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah (Winarno, 2002: 175). Dengan demikian, pendekatan kualitatif-deskripsi adalah penelitian yang menggambarkan data kualitatif sebagaimana adannya, dan kemudian data tersebut dianalisis makna dibalik fakta yang tampak.

Penelitian ini melibatkan 40 Sekolah Menengah Umum Negeri (SMAN) se Kabupaten Bogor. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang masih berstatus pelajar tingkat SMU dan mahasiswa semester satu yang sudah memenuhi cukup umur 17 tahun. Penarikan sampel berdasarkan teknik purposif *(purposive sampling)* kepada siswa/siswi kelas III yang sudah memenuhi syarat memilih atau mencoblos pada pemilihan umum. Setiap sekolah (SMAN sampel) akan diwakili oleh lima orang calon pemilih pemula, yang seluruhnya 100 siswa dari 20 sekolah sampel. Sampel lain diambil dari kalangan umum sebesar 50 orang pemilih pemula yang telah memenuhi syarat memilih. Jumlah sampel keseluruhan berjumlah 150 orang.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen; (1) observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung, (2) kuesioner, bersifat tertutup, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam. Adapun data *sekunder* diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian.

Kemudian sebagai pisau analisis, didukung dengan teori-teori yang berkaitan dengan teori penggunaan media dan teori komunikasi politik, untuk melihat bagaimana kandidat anggota legislatif memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi politik dan masyarakat meresponnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data informan merupakan analisis mengenai data-data pribadi untuk melengkapi data penelitian. Dari 150 informan, bahwa jumlah informan yang berkelamin perempuan menduduki urutan pertama sebesar 58%, sedangkan urutan kedua diduduki oleh informan laki-laki sebesar 42%. Sementara itu, dilihat dari usia informan bervariasi, yaitu dimulai usia 21 sekitar 34%, urutan berikutnya 29% berusia 16 tahun, 16,9%, berusia 18 tahun 12,8%, dan berusia 20 tahun sekitar 6,7%. Terdapat variasi usia informan tersebut, *pertama* karena usia dimulainya sekolah berbeda, *kedua*, dari 150 informan yang dijadikan sampel, selain sejumlah 100 informan dari kalangan siswa SMAN, dan 50 informan adalah mahasiswa.

Analisis Pemanfaatan Media Sosial

Bagian ini merupakan gambaran pemanfaatan media sosial oleh pemilih pemula dari kalangan pelajar, yang diukur dengan: (1) pemanfaatkan fasilitas internet melalui Handphone, Tablet, dan Laptop dikalangan pelajar sebagai pemilih pemilih pemula, (2) pemanfaatan media sosial dengan berbagai aplikasi didalamnya dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula; (3) Frekuensi pemanfaatan media sosial dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula; dan (4) Gambaran keinginanan para pelajar sebagai pemilih pemula dalam keterlibatan dalam media sosial, dan (5) Keinginanan Keterlibatan dalam membuat akun Media sosial; (6) dan (7) Urgensi pemanfaatan media sosial dikalangan pelajar.

Pemanfaatkan Fasilitas Internet

Bagian ini menggambarkan tentang pemanfaatan fasilitas internet melalui handphone, tablet, dan laptop dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula. Terlihat bahwa pengguna internet melalui handphone sebesar 96,7%, dan hanya 3% yang menggunakan tablet, dan laptop. Dari fakta ini, menunjukkan bahwa mayoritas di kalanngan pelajar sebagai pemilih pemula di Kabupaten Bogor sangat aktif mengakses internet melalui handphone.

Pemanfaatan berbagai aplikasi media sosial

Pemanfaatan berbagai aplikasi media sosial dengan mengakses internet di kalangan pelajar di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa *Facebook* (85,3%), *Whats App* (72,7%), *Instagram* (71,3%), *Path* (14,7%), *Line* (18,7%), dan sisanya *Youtube, Pinnterest. Ask fm*, Telegram, Line, Kakaotalk masing-masing hanya 0,07%. Hal ini memiliki makna bahwa penggunaan aplikasi media sosial dikalangan pelajar sudah masif, yang ditunjukkan dengan angka 85,3% yang pemanfaatkan *Facebook,* diikuti dengan 72,7% *WhatsApp,* dan 71,3% Instagram. (Hasil Penelitian, 2017)

Frekuensi Pemanfaatkan aplikasi media sosial

Pemanfaatan aplikasi media sosial, yaitu dilihat dari frekuensi mengakses aplikasi media sosial dikalangan pelajar di Kabupetn Bogor yaitu ditunjukkan dengan angka 34,7 % yang paling sering diakses adalah *WhatsApp*, 28 %, dan *Faccebook* urutan kedua, dan 5% adalah BBM, Line dan lainnya Hal ini bermakna pada umumnya pemilih pemula dikalangan pelajar sering pemanfaatkan aplikasi di dalam berkomunikasi atau mencari informasi adalah pertama melalui WhatsApp, kedua Instagram dan Facebook, dan ketiga BBM, Line. (Hasil Penelitian, 2017)

Keinginanan keterlibatan di media sosial

Indikator minat keinginan keterlibatan dalam media sosial dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula di Kabupaten Bogor dapat ditunjukkan dengan angka 92,7% menyatakan memiliki keinginan besar untuk terlibat didalam kegiatan berkomunikasi melalui media sosial, dan 5% yang menyatakan kurang memiliki minat, dan 0% menyatakan tidak sama sekali berkeinginan terlibat untuk pemanfaatkan media sosial serta hanya 1% yang sama sekali tidak memiliki keinginan terlibat di media soaial. Hal ini jelas hampir mayoritas di kalangan pelajar memiliki minat besar untuk memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi. (Hasil Penelitian, 2017)

Alasan keterlibatan di akun media sosial

Untuk mengetahui apa alasan para pelajar sebagai pemilih pemula untuk terlibat di media sosial, maka dapat dilihat dari hasil penelitian yang menujukkan angka 77,3% beralasan karena kesadaran sendiri, 10,7 %, pengaruh teman sekolah, 5% dorongan teman dari lingkungan rumah, 4% dorongan dari orang lain, dan 3% untuk dianggap modern. Hal ini berarti hampir mayoritas kalangan pelajar di Kabupaten Bogor telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dengan pemanfaatkan akun media sosial untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. (Hasil Penelitian, 2017)

Manfaat membuka akun media sosial

Untuk mengetahui pandangan para pelajar mengenai manfaat membuka akun media sosial, dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan angka 54%

menyatakan manfaat untuk mendapatkan berbagai informasi, 36% untuk memudahkan berkomunikasi sesama teman sekolah dan teman di luar sekolah, 7% untuk untuk tempat bertukar pikiran sesama teman, dan untuk menemukan teman, dan hanya 1% untuk menambah teman. Dari data ini menunjukan pada umum para pelajar di Kabupaten Bogor, bahwa dengan dengan membuka akun media sosial banyak memberikan banyak manfaat yang akan diperoleh.(Hasil Penelitian, 2017)

Urgensi menggunakan fasilitas akun media sosial

Untuk mengetahui pandangan para pelajar mengenai urgensi keberadaan media sosial untuk mendapatkan informasi dengan mengakses variasi aplikasi yang ada didalam media sosial, dapat dilihat hasil penelitian yang menunjukkan angka 52,7% menyatakan urgensi aplikasi media sosial untuk mengakses ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan tugas di sekolah, 19,3% untuk mencari pengetahuan umum lainnya, 11,3% untuk menghubungi teman, dan 10,7% men-*download* lagu-lagu (hiburan).Hal ini menggambarkan para pelajar di Kabupaten Bogor bahwa menganggap fasilitas akun media sosial adalah penting untuk mengakses informasi. (Hasil Penelitian, 2017)

Analisis Pemanfaatan Aplikasi Media Sosial dalam Pemilu Legislatif

Pemanfaatan aplikasi media sosial tidak sebatas hanya untuk berkomunikasi secara umum, juga sekarang sudah merambah ke dunia politik, khusus dalam pemilu. Hal ini nampak jelas pada pemilu 2014 penggunaannya semakin meluas. Pada bagian ini merupakan gambaran pemanfaatan media sosial dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula, yang diukur dengan: (a) Urgensi media sosial dalam pendidikan politik, (b) Urgensi pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi politik, (c) Politisi menggunakan akun media sosial, (d)

Urgensi aplikasi media sosial untuk pendidikan politik

Pemanfaatan aplikasi media sosial di arena pemilu semakin meluas sekarang ini, hal ini karena media sosial memiliki daya jangkauan yang luas, dan dari segi biaya lebih murah ketimbang menggunakan media cetak klasik, misal spanduk, pamplet, liflet dan sebaginya, serta realitasnya masyarakat, khusus dikalangan pelajar yang rata-rata telah menggunakan berbagai aplikasi media sosial. Untuk mengetahui pandangan dari kalangan pelajar sebagai pemilih pemula di Kabupaten Bogor, mengenai urgensinya media sosial yang dimanfaatkan untuk pendidikan politik dalam rangka mencerdaskan pemilih, khususnya pemilih pemula. Merujuk hasil penelitian, menunjuk angka 96,3% menyatakan penting media sosial sebagai medium pendidikan politik di kalangan pemilih pemula, dan 3% menyatakan sangat penting, serta hanya 1% menyatakan tidak penting. Hal inijelas bahwa mayoritas pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor menganggap penting media sosial sebagai medium pendidikan politik. (Hasil Penelitian, 2017)

Urgensi Media sosial dimanfaatkan untuk Sosialisasi Politik

Pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor, hampir memiliki pandangan yang mayoritas terhadap urgensi media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mensosialisasikan visi, misi, dan *flatform* (program kerja) kandidat anggota legislatif, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang cerdas untuk memilih. Hal ini ditujukkan dari hasil penelitian, bahwa 94,6% menyatakan penting urgensi media sosial dimanfaatkan untuk mensosialisasikan visi, misi, dan *flatform* (program kerja) kandidat anggota legislatif, 4% menyatakan sangat urgensi, dan hanya 1% menyatakan tidak penting urgensi. (Hasil Penelitian, 2017)

Analisis Media Sosial sebagai Sarana untuk Menyebarkan Pengetahuan tentang Pemilu

Telah disinggung di atas bahwa media sosial sudah menjadi trend dikalangan para politisi untuk menyebarkan informasi kepada khalayak, khususnya dikalangan para pelajar sebagai pemilih pemula tentang pengetahuan pemilu. Pada bagian ini merupakan gambaran pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk mengakses pengetahuan tentang pemilu, yang diukur dengan: (a) Mengetahui tentang pemilu legislatif dengan mengakses media sosial, (b)Sumber informasi lain tentang pemilu legislatif (c)Urgensi mengetahui informasi pemilu legislsatif.

Mengakses Media Sosial untuk MendapatInformasi Pemilu Legislatif

Dari hasil penelitian diketahui 98,7% menyatakan mengetahui informasi pemilu legislatif dengan mengakses media sosial, dan hanya 1,3 % yang tidak pernah mengakses media sosial untuk mengetahui informasi tentang pemilu.Hal ini bermakna umumnya para pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor mengetahui informasi tentang pemilu dengan mengakses media sosial. (Hasil Penelitian, 2017)

Sumber Informasi Lain tentang Pemilu Legislatif

Selain mengetahui informasi tentang pemilihan pemilu legiastif melalui mengakses media sosial, juga didapatkan dari sumber lainnya. Untuk mengetahui sumber lainnya, ialah merujuk pada hasil penelitian yang menun-jukkan 61,3% bersumber dari televisi, 14% dari Ibu/Bapak Guru pengajar mata pelajaran PKN, 9% dari akun aplikasi media sosial yang dimiliki responden, sejumlah 8,7% dari orang tua di rumah, dan sejumlah 7,3% dari para calon kandidat anggota legislatif melalui berbagai media sosial. Dari fakta tersebut di atas,

menunjukkan pemilih pemula dari kalangan pelajar di Kabupaten Bogor selain mengakses media sosial, juga mendapatkan pengetahuan tentang pemilu legislatif dari televisi. (Hasil Penelitian, 2017)

Urgensi Mengetahui Informasi Pemilu Legislsatif

Indikator pentingnya mengetahui informasi tentang pemilu legislatif, dengan merujuk hasil penelitian yang menunjukkan angka 98,7% menyatakan pentingnya mengetahui infomasi tentang pemilu legislatif, dan hanya 1,3% bependapat tidak penting. Hal ini bermakna mayoritas pemilih pemilu dikalangan pelajar di Kabupetan Bogor telah memiliki kesadaran bahwa pentingnya mengetahui informasi tentang pemilu legislatif. (Hasil Penelitian, 2017)

Politisi Partai Politik Menggunakan Akun Media Sosial

Pada umumnya, ada kecendrungan para politisi partai politik menggunakan akun media sosial untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja, atau untuk penciteraan dirinya agar lebih dikenal khalayak dalam kampanye pemilu. Untuk mengetahui para politisi menggunakan akun media sosial untuk kepentingan kampanye, dapat diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan angka 82,7% menyatakan para politisi partai politik di Kabupaten Bogor sangat kurang menggunakan akun media sosial dan hanyan 17,3 % yang mengatakan para politisi partai politik menggunakan akun media sosial dalam kampanye pemilu. (Hasil Penelitian, 2017)

Politisi Penyampaian Visi dan Misi di Media Sosial

Untuk mengetahui tingkat ketersetujuan pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor mengenai politisi perlu penyampaian visi dan misi sebagai kandidat anggota legislatif, dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan angka 62% setuju partai politik memanfaatkan media sosial untuk penyampaian visi dan misi, dan 38% yang berpendapat ketidak setujuan partai politik pemanfaatkan media sosial. Hal ini berarti sebagian besar pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor setuju para politisi ketika pemilu penyampaian visi dan misi melalui media sosial. Untuk memudahkan mendapatkan informasi mengenai apa yang akan dilakukan apabila terpilih. Hal ini pula yang akan dijadikan pertimbangan untuk memilih. (Hasil Penelitian, 2017)

Keefektipan Kampanye melalui Media Sosial

Dengan kemajuan teknologi informasi semakin dimudahkan untuk mendapat informasi, yang salah satunya melalui aplikasi media sosial. Karena itu semakin marak digunakan oleh para politisi dalam kampanye, dengan pertimbangan penggunaan akun media sosial sudah menyebar luas dan hampir tampa batas, pesan kampanye relatif berlangsung lebih cepat ketimbang menggunakan media kampanye konvesional seperti spanduk, baliho, lieflet, pamflet dan sebagainya. Untuk mengetahui pandangan dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor mengenai keefektivan kampanye melalui media sosial dapat ditunjukkan dengan angka 73,3% mengatakan sangat efektif apabila kampanye pemilu legislatif dengan memanfaatkan media sosial, dan 26,7% mengatakan kurang efektif.Dari fakta ini, pemilih pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor menyatakan kampanye lebih efektif melalui media sosial, hal ini dapat dipahami karena sesuai dengan jiwa "anak muda" suka yang praktis. Mudah mendapatkan informasi dengan mengakses akun media yang mereka miliki, kapan dan dimana saja. (Hasil Penelitian, 2017)

Analisis Konten (isi)Pesan Politik di Media Sosial

Bagian ini menggambarkan konten (isi) pesan politik yang diharapkan mencakup: (1) Isi pesan kampanye politik menarik; (2) Isi pesan kampanye padat dan sederhana, dan (3) konten (isi) pesan kampanye dalam bentuk slogan dan bergambar animasi.

Isi Pesan Kampanye Menarik

Kampanye merupakan aktivitas kegiatan politik, karena itu yang terkait dalam kegiatan ini adalah komunikator, media, dan pesan politik. Ketiga komponen komunikasi tersebut akan mempengaruhi keberhasilan kampanye. Untuk mengetahui konten atau isi kampanye di media sosial, yang dibuat para politisi di Kabupaten Bogor menarik atau tidak, maka dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan angka 73,5% mengatakan bahwa isi pesan kampanye sangat tidak menarik, dan 26,7 mengatakan kurang menarik.Hal ini berarti isi pesan kampanye yang disebarkan di media sosial kurang mendapatkan respon positif dari pemulih pemula dari kalangan prelajar.Sebab isi pesan kampanye kurang sesuai dengan karakteristik pemilih pemula dari kalangan pelajar yang menyesukai hal-hal yang menarik. (Hasil Penelitian, 2017)

Isi Pesan Kampanye Dibuat dengan Kalimat Singkat dan Padat

Selain perlu dibuat menarik isi pesan kampanye itu, juga isi pesan kampanye perlu dibuat dengan kalimat singkat dan padat.Untuk mengetahui isi pesan kampanye dibuat dengan padat dan singkat, dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 86,7% menghendaki isi pesan kampanye dibuat secara singkat dan padat di media sosial, dan hanya 13,3% mengatakan tidak perlu singkat dan padat. Dari fakta tersebut di atas, mayoritas kalangan pelajar di Kabupaten Bogor menghendaki isi pesan kampanye dikemas dengan kalimat singkat dan padat. Hal ini dapat dipahami karena jiwa "anak muda" selalu menghendaki hal-hal yang praktis. Misalnya, "Gunakanlah hak kesempatan anda untuk memilih, kalau tidak Anda akan menderita lima tahun kedepan." (Hasil Penelitian, 2017)

Isi Pesan Kampanye Dibuat dengan Menggunakan Slogan dan diberi Gambar Animasi

Isi pesan kampanye pemilu yang ditujukan kepada kalangan para pelajar di media sosial dikemas dengan kalimat slogan dan gambar animasi.Hal ini sesuai dengan karakteristik anak muda hal-hal yang menarik perhatian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan angka 94% para pemilih pemula dari kalangan pelajar di Kabupaten Bogor suka isi pesan kampanye pemilu dibuat dalam bentuk slogan dan diberi gambar animasi, dan 5% kurang suka, serta hanya 1% tidak suka. Dari fakta tersebut mayoritas kalangan pelajar di Kabupaten Bogor menyukai isi pesan kampanye di media sosial dikemas selain dalam bentuk slogan juga diberi gambar animasi agar lebih menarik.Ini sesuai dengan karakteristik jiwa anak muda yang umumnya menyukai objek yang memberikan daya tarik mereka.Misalnya, dengan kalimat bahasa "gaul"; "Coblos Keren, Kabupaten Bogor Maju!"

SIMPULAN

Dari seluruh uraian pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Para politisi di Kabupaten Bogor, belum mampu mengoptimalkan pemanfaatkan aplikasi media sosial berbasis internet untuk kepentingan kampanye dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pemula dari kalangan pelajar, (2) Para politisi kurang mampu memanfaatan potensi pemilih pemula dikalangan pelajar yang mayoritas telah memiliki akun media sosial untuk kepentingan kampanye pemilu legislatif di Kabupaten Bogor, (3) Penggunakan fasilitas akun media sosial belum dianggap urgen, dan (4) Pada umumnya konten (isi) pesan kampanye yang dimuat di media sosial kurang memiliki daya tarik. Karena konten (isi) kampanye dikemas belum sesuai dengan karakteristik pemilih pemula dikalangan pelajar.Misalnya dikemas dalam bentuk kalimat sederhana, singkat, padat, dan berupa slogan serta diberi gambar dan animasi.

Isi pesan politik dalam kampanye belum dikemas sesuai dengan karakteristik para pemilih pemula. Dari aspek pengetahuan tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula sudah banyak mengetahui melalui dengan mengakses aplikasi melalui smartphone atau internet.

UCAPAN TERIMAKASIH

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian No. 1598/K4/KM/2017 Tahun Anggaran 2017

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Cangara, H. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mingkid, E. (2015). *Penggunaan Media Komunikasi Promosi Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Manado*. Sosiohumaniora Vol. 18 (3): 188-192.

Michael, R. dan Philip. A. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prasetya, A.B. (2013). *Kiprah New Media dalam Percaturan Politik di Indonesia*. Bandung: Sosiohumaniora Vol. 15 (3): 232-238.

Maran, R. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methodes)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Surbakti, R. (2000). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Modul KPU (Modul I Pemilih Untuk Pemula. 2010.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Winarno, S. (2002). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

*http://digilib.unila.ac.id/12294/3/BAB%20II.pdf*diakses 16 Februari 2017.

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/24/0245002/ diakses 02 Februari 2017.

http://www.pemilu.go.id diakses 06 Januari 2016.

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 162 - 167
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

KEPERCAYAAN DAN PRAKTIK BUDAYA PADA MASA KEHAMILAN MASYARAKAT DESA KARANGSARI, KABUPATEN GARUT

Juariah
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
E-mail: ai_arriandhi@yahoo.co.id

ABSTRAK. Desa Karangsari Kabupaten Garut telah mengalami perubahan secara fisik karena adanya beberapa tempat wisata, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai praktik-praktik budaya pada masa kehamilan di daerah tersebut, termasuk apakah masyarakat masih mempertahankan budaya yang dianut selama ini, ataukah sudah terjadi pergeseran nilai budaya sebagai pengaruh dari perubahan fisik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepercayaan dan praktik budaya masyarakat Desa Karangsari pada masa kehamilan, serta manfaat dan dampak dari praktik tersebut terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, melalui pendekatan studi kasus, dengan informan berjumlah 20 orang. Data hasil wawancara dianalisis dengan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangsari masih mengikuti kebiasaan yang harus dilakukan ibu pada saat hamil dan juga pantangan/larangan yang harus dihindari oleh ibu hamil, dengan keyakinan jika pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan hal buruk pada ibu dan bayi yang dikandungnya. Masyarakat Desa Karangsari juga masih mempertahankan adat upacara *opat bulanan* dan *nujuh bulanan* walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ibu hamil dan keluarganya. Suami terlibat dalam kehamilan istrinya dengan mengikuti keharusan dan pantangan dan meyakini akan ada akibat buruk jika tidak mengikuti kebiasaan tersebut. Tenaga kesehatan dan *maraji* pemanfaatannya saling berdampingan, walaupun *maraji* memiliki otoritas terutama dalam ritual seremonial.

Kata kunci: Kepercayaan,Praktik, Budaya Masa Kehamilan

CULTURAL PRACTICES AND BELIEFS DURING PREGNANCY OF KARANGSARI VILLAGE COMMUNITY, GARUT DISTRICT

ABSTRACT. *Karangsari Village, Garut has undergone physical changes due to several tourist destination. Therefore, it is need to be done a study on cultural practices during pregnancy, including whether people still maintain the culture or has been a shift in cultural values as the effect of physical changes that is happened. Purpose of this study was to explore cultural practices and beliefs of Karangsari Village community during pregnancy and the benefit and impact of such practices on the health of the mothers and their baby. This study used a case study method. Number of informants was 20 people. Data from interviews were analyzed by content analysis. Results of this study indicated that the villagers still followed the customs and restrictions/taboos during pregnancy. They believed that if it was contravened will lead to bad things for mother and her baby. They also still retained opat bulanan and nujuh bulanan, although it was adjusted with the ability of pregnant women and their families. Involvement husbands obeyed rituals and taboos and they believed there would be bad consequences if not followed these traditions. Maraji and health care professionals complemented each other, even maraji had authority in leading ritual ceremonies.*

Key words*: Beliefs, Practices, Cultural During Pregnancy*

PENDAHULUAN

Kehamilan dan persalinan merupakan fase krisis dalam kehidupan seorang wanita. Peristiwa ini memiliki dampak pada bagaimana seorang wanita melewati fase transisi untuk menjadi ibu termasuk kesehatan fisik dan mentalnya dan juga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Beech and Phipps, 2004: 61). Van Gennep (1960) dalam Winson (2006) menggambarkan status sosial seorang wanita pada saat hamil berada pada status *marginality* di mana dia mulai berperilaku berbeda dari biasanya misalnya dengan memperhatikan pola makan, aktifitas, dan lain-lain.

Masyarakat di berbagai budaya memberi perhatian pada fase krisis ini. Pada masa kehamilan ada banyak ritual yang harus dilakukan yang menandakan bahwa masyarakat di budaya mana pun menganggap kehamilan sebagai peristiwa yang luar biasa, bukan hanya dalam kehidupan wanita hamil itu sendiri tetapi juga suami dan keluarganya. Perhatian masyarakat terhadap ibu yang sedang hamil merupakan bentuk dukungan sosial. Menurut McCourt (2006) ada tiga komponen kunci dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan informasi dan dukungan praktis. Dukungan emosional ditunjukkan dengan hubungan yang hangat, persaudaraan, persahabatan dan keinginan untuk mendengar. Saran dan informasi yang baik merupakan contoh dari dukungan informasi. Sedangkan dukungan finansial pada ibu hamil, pijat untuk mengurangi ketidaknyamanan merupakan bentuk nyata dukungan praktis.

Dukungan sosial selama kehamilan sangat penting untuk mengurangi stress. Selama kehamilan dukungan dapat menimbulkan rasa percaya diri pada wanita bahwa dia memiliki persiapan yang cukup untuk melahirkan. Menurut Oakley (1990) dalam Mander (2001) dukungan sosial berperan positif pada kesehatan, secara tidak langsung mengurangi bahaya yang disebabkan stress, mengurangi resiko terpapar stress dan memudahkan penyembuhan dari kondisi stress seperti sakit.

Bukan hanya calon ibu, calon ayah pun berada pada periode transisi atau marginalitas (Van Gennep, 1960) dalam Blackshaw (2003). Hal ini karena meskipun kehamilan dan persalinan merupakan peristiwa yang dialami perempuan, secara fisik dan sosial, laki-laki terlibat secara mendalam pada kelahiran anak-anaknya. Pada berbagai budaya calon ayah memiliki peranan untuk melakukan ritual tertentu selama periode kehamilan. Tugas-tugas itu dilakukan untuk melindungi ibu dan anaknya serta untuk mempermudah proses persalinan. Heggenhougan (1980) dalam Helman (2002) menyebutnya sebagai *ritual couvade* (*couvade* berasal dari bahasa Perancis, *Basque* yang artinya mengerami) yang mana ayah diminta untuk mengikuti tabu atau pantangan tertentu. Menurut Heggenhougan ritual *couvade* merupakan suatu keterlibatan yang disadari atau mungkin tidak disadari. Seorang calon ayah akan melakukan berbagai ritual selama kehamilan seperti perilaku, diet, spiritual dan sexual, fenomena psikosomatik, pendidikan menjadi orangtua serta menghindari hal-hal yang bersifat polutan.

Budaya pada masa kehamilan dan persalinan di sebagian daerah telah terjadi pergeseran namun di sebagian lain masih dipertahankan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh O'Neil (2006) bahwa semua budaya yang diwariskan cenderung untuk berubah tetapi ada kalanya juga dipertahankan. Ada proses dinamis yang mendukung diterimanya hal-hal dan ide-ide baru dan ada juga yang mendukung untuk mempertahankan kestabilan budaya yang ada. Hiller (2003) menyatakan bahwa ketika perubahan terjadi, maka terjadi destruksi nilai-nilai tradisional, kepercayaan, peran dan tanggungjawab, pendidikan, keluarga dan lain-lain yang hampir simultan dengan proses konstruksi cara baru sebagai pengaruh dari perubahan sosial. Nilai dan ritual yang baru ini menggantikan nilai dan ritual yang lama. Namun di sebagian masyarakat adakalanya terjadi kompromi yang mana nilai dan ritual baru dijalankan dengan tanpa menghilangkan nilai dan ritual lama.

Desa Karangsari yang termasuk wilayah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut berada di pesisir Jawa Barat Selatan. Desa ini telah mengalami perubahan secara fisik karena berdekatan dengan beberapa pantai yang sekarang menjadi tempat wisata yaitu pantai Sayang Heulang, Santolo dan Rancabuaya. Masyarakat di Desa ini, memiliki adat istiadat yang kuat mengenai kesehatan ibu dan anak termasuk budaya pada masa kehamilan. Sampai saat ini belum banyak diungkap mengenai praktik-praktik budaya pada masa kehamilan di daerah tersebut termasuk apakah masyarakat masih mempertahankan budaya yang dianut selama ini ataukah sudah terjadi pergeseran nilai budaya sebagai pengaruh dari perubahan fisik yang terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepercayaan dan praktik budaya masyarakat Desa Karangsari pada masa kehamilan yang meliputi kebiasaan yang harus dilakukan ibu pada saat hamil, pantangan/larangan yang harus diikuti ibu pada saat hamil, upacara pada masa kehamilan serta ritual yang dilakukan suami pada saat istrinya sedang hamil. Selain itu juga untuk mendapatkan penjelasan dari masyarakat mengenai manfaat dan dampak dari praktik tersebut terhadap kesehatan ibu dan janinnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, melalui kajian studi kasus untuk mengeksplorasi kepercayaan dan praktik budaya pada masa kehamilan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2016 bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Sumber data penelitian ini adalah kata-kata informan. Jumlah informan penelitian ini ada 20 orang yang terdiri dari dua orang *maraji* (dukun bersalin), satu orang tetua kampung, dua orang kader, sebelas orang ibu hamil dan lima orang ibu menyusui.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan sedangkan data sekunder merupakan hasil telaah dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menelaah dokumen yang ada yaitu profil desa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan pedoman wawancara. Pada waktu melakukan wawancara dibantu dengan alat perekam suara. Pengolahan dan analisis data menggunakan tahapan transkripsi data, pengorganisasian data, pengenalan dan koding. Data yang sudah diolah dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Data hasil penelitian diinterpretasikan untuk memperoleh makna yang luas dan mendalam. Hasil penelitian dibahas dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Karangsari

Desa Karangsari termasuk wilayah Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Jarak dengan ibu kota kecamatan sekitar 12 kilometer dan jarak dengan Ibu kota kabupaten sekitar 75 kilometer. Desa ini memiliki luas wilayah 1.642 hektar yang terbagi atas empat kampung yaitu Mekarlaksana, Cicalengka, Parabon dan Cidahon. Jumlah penduduk Desa Karangsari ada 5.793 jiwa terdiri dari 2.874 jiwa penduduk laki-laki dan 2.919 jiwa penduduk perempuan. Tingkat pendidikan penduduk 50% tamat SD dan 32% berpendidikan SMP. Hal ini kemungkinan disebabkan karena akses masyarakat untuk melanjutkan ke sekolah SMA belum tersedia di Desa Karangsari bahkan di kecamatan Pakenjeng.

Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Karangsari hanya ada satu puskesmas pembantu yang buka dua kali dalam seminggu. Sedangkan tenaga kesehatan yang ada

di desa ini adalah satu orang bidan desa dan satu orang mantri (perawat) yang sudah tinggal menetap selama puluhan tahun. Selain itu di desa ini masih ada dua orang *maraji* yang masih dipercaya masyarakat untuk membantu dalam urusan kesehatan ibu dan anak. Pada praktiknya, *maraji* berdampingan dan saling melengkapi dengan bidan dan mantri.

Kepercayaan Dan Praktik Budaya Pada Masa Kehamilan

Kebiasaan Yang Dilakukan Ibu Pada Saat Hamil

Berdasarkan hasil wawancara kebiasaan-kebiasaan yang masih dipatuhi ibu pada saat hamil di Desa Karangsari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kebiasaan yang Dilakukan Ibu Pada Saat Hamil

No	Kebiasaan	Pengaruh yang diyakini
1	Membawa benda-benda tajam seperti gunting, peniti yang diikatkan pada baju atau pakaian dalam ibu hamil	menjaga ibu dan bayinya dari gangguan roh jahat dan makhluk halus
2	Banyak bergerak dan jalan-jalan terutama pada pagi hari saat udara masih segar	supaya persalinannya lancar
3	Ibu yang hamil tua, dianjurkan untuk sering melakukan gerakan menungging termasuk mengepel lantai dengan menggunakan tangan	supaya janin yang di dalam kandungan cepat turun dan membuka jalan lahir serta membuat persalinan lancar tanpa kesulitan.
4	Ibu hamil yang berambut panjang dianjurkan untuk mengikat rambutnya	supaya kelihatan rapi dan bersih
5	Dianjurkan untuk makan lebih banyak dan lebih sering, banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, susu dan makanan bergizi	supaya ibu dan bayi yang dikandungnya sehat
6	Dianjurkan untuk makan daun galing yaitu tumbuhan sejenis pakis yang mengandung banyak lendir	Memperlancar proses persalinan
7	Dipijat (bahasa sunda:'disangsurkeun')	Supaya bayi tidak turun ke bawah dan posisi bayi tidak berubah

Sumber: Data Primer

Budaya di masyarakat memiliki resep tentang makanan atau minuman yang tepat untuk memperlancar proses fisiologis kehamilan (Helman:2002) yang dipercaya akan berdampak terhadap kelancaran persalinan dan pasca salin. Anjuran makanan pada ibu hamil di Desa Karangsari sejalan dengan hasil penelitian M'soka et al (2010) di Zambia yang mana ibu hamil meyakini perlunya diet seimbang.

Hasil studi Higginbottom (2014) di Canada juga menemukan wanita hamil harus makan lebih sering dan atau dengan porsi yang lebih besar, banyak minum susu (dan juga jus apel) supaya kulit bayinya bagus dan juga untuk kesehatan dan kesejahteraan janin. Selain itu, penelitian yang dilakukan Otoo (2015) di Ghana menemukan buah-buahan, kepiting dan pisang mentah baik untuk ibu hamil karena buah-buahan dan kepiting membuat ibu dan janin sehat dan pisang mentah keras sehingga membuat janin kuat dan juga memberi kekuatan pada ibu saat persalinan.

Studi Graft (2014) yang melakukan studi ke wanita dari 35 etnik yang ada di Ghana tentang keyakinan dan praktik makanan dalam kehamilan menyimpulkan bahwa makanan tradisional dan suplemen memiliki lima fungsi yaitu mencegah anemia, menguatkan tubuh ibu hamil, meningkatkan kesehatan, meminimalkan gangguan fisiologis dan memaksimalkan kesehatan bayi.

Perilaku atau kebiasaan saat hamil juga harus dijaga sebagai bentuk perlindungan terhadap ibu dan janin. Keharusan menjaga perilaku dan menghindari pertengkaran ditekankan pada ibu hamil (Naidu:2013; M'soka *et al*: 2010). Wanita hamil juga hanya makan yang dimasak sendiri atau keluarganya, menggunakan artefak religi dan membawa kitab suci (Aziato *et al*:2016).

Pantangan/Larangan Yang Harus Diikuti Ibu Pada Saat Hamil

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pantangan-pantangan yang harus diikuti ibu pada saat hamil di Desa Karangsari dapat dilihat pada tabel Tabel 2.

Pantangan makanan selama kehamilan di masyarakat Karangsari sejalan dengan hasil penelitian Otoo (2015) di Ghana tentang larangan makan siput, pisang matang, okra, kacang tanah, milo, gandum, kentang, jahe dan mangga. Selain itu juga pembatasan makanan tertentu seperti gula tebu, alkohol, garam (M'soka *et al*: 2010). Masyarakat Ankara, Turki ada larangan makan ikan, kepala dan kaki domba serta daging kelinci (Ayaz & Efe: 2008).

Keharusan untuk memperhatikan perilaku atau aktifitas pada ibu hamil di Desa Karangsari juga ditemukan di berbagai daerah, seperti di Ghana ibu hamil tidak boleh menyiapkan atau mendekati api, dilarang melilitkan handuk atau kain di leher, memperlihatkan dada, membawa atau memikul barang-barang berat (Otoo: 2015). Selain itu, Ibu hamil di Desa Karangsari juga dilarang keluar dan jalan-jalan di malam hari karena khawatir diganggu oleh roh jahat. Secara fisik, penerangan di Desa Karangsari pada malam hari memang masih kurang sehingga khawatir ibu terjatuh, terlebih pada musim hujan, jalanan banyak yang licin. Selain itu karena lokasinya yang dekat dengan pantai wisata, di Desa Karangsari juga masih ada preman yang berkeliaran di malam hari sehingga akan sangat berbahaya bagi ibu hamil.

Syukuran atau Upacara Pada Masa Kehamilan

Hasil wawancara dengan informan mengenai upacara yang biasa dilakukan pada masa kehamilan didapatkan bahwa di Desa Karangsari masyarakat masih mempertahankan kebiasaan upacara *opat bulanan* dan *nujuh bulanan*. Upacara *opat bulanan* dilaksanakan pada saat usia kehamilan ibu menginjak empat bulan karena diyakini pada usia ini ditiupkan ruh ke dalam janin. Syukuran ini mengundang keluarga dan tetangga terdekat.

Tabel 2. Pantangan/Larangan Yang Harus Diikuti Ibu Pada Saat Hamil

No	Larangan/Pantangan	Akibat yang diyakini
1	Memakai pakaian yang sobek	bayinya akan cacat
2	Keluar dan jalan-jalan di malam hari	akan diikuti dan diganggu oleh roh-roh halus
3	Duduk di *bangbarung* (depan pintu)	susah pada saat melahirkan
4	Duduk di teras rumah dengan kaki *ngarumbay* (berselonjor ke tanah)	menghambat kelahiran sang bayi
5	Duduk di atas batu	menghambat kelahiran sang bayi
6	Duduk di sembarang tempat	menghambat kelahiran sang bayi
7	Melilitkan handuk di leher	tali pusat/ari-arinya melilit
8	Melihat orang yang sedang membolongi sesuatu	ada bekas bolongan di telinga anak
9	Makan es	menyebabkan besar saat bayi dan lama-lama menjadi kecil
10	Makan bakso	menyebabkan bayi besar
11	Makan jengkol	bayi yang lahir akan bau
12	Makan nenas	menyebabkan keguguran
13	Makan ikan asin	mengakibatkan gatal pada ibu
14	Makan ikan tongkol dan sarden	mengakibatkan perdarahan
15	Makan pisang	mengakibatkan rahimnya keluar
16	Makan mie	mengakibatkan rahimnya keluar
17	Makan nangka	mengakibatkan rahimnya keluar
18	Memakan buah-buahan yang menyatu/berdempet	Mengakibatkan bayi yang akan dilahirkan kembar siam.

Sumber: Data Primer

Besar kecilnya acara syukuran ini disesuaikan dengan kemampuan ibu hamil dan keluarganya. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus ada yaitu empat macam buah-buahan yang dibuat rujak dan empat macam 'beubeutian' (umbi-umbian) yang 'diseupan' (dikukus). Kemudian Ibu hamil harus menjual rujak itu kepada keluarga dan tetangga yang hadir, dan mereka membelinya dengan potongan genting yang berbentuk bulat seperti koin (uang recehan). Semakin banyak yang membeli maka diyakini proses kehamilan dan persalinan ibu akan semakin dimudahkan.

Pada upacara ini ibu hamil juga dimandikan oleh orang tua dan keluarganya dengan air yang dicampur dengan empat jenis bunga-bungaan yang sudah dijampi-jampi oleh *maraji*. Selain itu juga diadakan pengajian dan pada proses pengajian ini dibacakan Surah Yaasin, Surah Yusuf dan Surah An-Nisaa. Pengajian ini bertujuan untuk mendo'akan supaya persalinan lancar dan anak yang dilahirkan sehat, sholeh dan ganteng jika laki-laki serta sholehah dan cantik jika perempuan.

Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah diberi kepercayaan untuk hamil, mengakrabkan anggota keluarga dan tetangga dan sama-sama memberikan dukungan kepada ibu hamil dan suaminya.

Di usia kehamilan tujuh bulan, diadakan upacara yang serupa. Bedanya pada usia kehamilan ini buah-buahan yang disediakan untuk dibuat rujak, 'beubeutian' (umbi-umbian) yang 'diseupan' (dikukus), dan bunga-bungaan yang dicampur dengan air pada saat mandi, masing-masing jumlahnya ada tujuh macam.

Prosesi upacara ini sama dengan upacara *opat bulanan* yaitu ibu hamil menjual rujak kepada keluarga dan tetangga yang datang, dan mereka membeli dengan menggunakan genting yang dibentuk seperti koin. Ibu dimandikan dengan air yang dicampur tujuh macam bunga oleh orangtua dan keluarganya dengan dipimpin oleh *maraji*. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengajian yang dipimpin oleh Ustadz dan diikuti oleh keluarga dan tetangga yang tujuannya untuk mendo'akan agar ibu sehat dan selamat serta bayi yang dikandungnya sehat, selamat, cantik/cakep dan pintar sesuai harapan orangtuanya.

Upacara *opat bulanan* dan *nujuh bulanan* ini meskipun bagian dari budaya masyarakat Karangsari secara turun-temurun, namun dalam pelaksanaannya tidak memaksa, jadi sesuai dengan kemampuan ibu hamil dan keluarganya. Besar kecilnya penyelenggaraan upacara tidak dinilai oleh masyarakat, yang penting upacara ini dilaksanakan. Kepatuhan terhadap tradisi ini juga terjadi pada masyarakat Buton yang masih mempertahankan upacara *posipo* (upacara untuk ibu hamil anak pertama) (Hindaryatiningsih: 2016).

Upacara *opat bulanan* dan *nujuh bulanan* yang masih menjadi ritual yang dipatuhi oleh masyarakat Desa Karangsari memiliki makna yang sangat dalam. Ritual inisiasi menyampaikan pesan simbolis yang menyuarakan nilai dan keyakinan budaya yang sangat dalam (Davis-Floyd: 1992) dan bertujuan untuk melindungi ibu dan janin (dan kadang juga ayah, kerabat dan seluruh keluarga) dari kekuatan jahat (Van Gennep: 2004). Upacara seperti ini juga merupakan bentuk perhatian keluarga dan tetangga serta masyarakat sekitar (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: 2012) dan juga bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai kebaikan seperti nilai kebersamaan, nilai *respect*, nilai sosial yang diwujudkan dalam kerelaan membagikan rizki kepada sanak keluarga dan handai taulan yang hadir, sejak anak di dalam kandungan (Hindaryatiningsih: 2016).

Rowan (2006) menjelaskan bahwa hubungan antara ibu dan bayinya dimulai saat kehamilan dan perhatian calon ibu meningkat saat bayi mulai bergerak.

Perasaan ibu tentang bayinya akan sangat tergantung pada dukungan yang dia dapatkan dari suami, kerabat dan orang sekitar. Dukungan sosial memiliki manfaat untuk mengurangi stress (Glazier *et al*: 2004, Thomas *et al* : 2015, Mirabzadeh et al dalam Maharlouei: 2016), mendukung pola makan yang baik dan perilaku yang sehat (Higginbottom: 2014) juga memberi kepuasan pada ibu hamil (Gebuza *et al*: 2016).

Ritual Suami Dalam Kehamilan

Hasil wawancara dengan informan, memperlihatkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan suami pada saat istrinya sedang hamil di Desa Karangsari antara lain suami harus sering mengucapkan '*amit-amit'* terutama jika melihat atau mendengar hal-hal yang tidak disukai atau tidak menyenangkan. Hal ini agar bayi terhindar dari yang tidak diinginkan. Selain itu, setiap matahari meredup atau datang waktu magrib, seorang suami harus mengunyah '*panglay*' (bumbu dapur sejenis lengkuas) lalu dimuntahkan di setiap sudut rumah dan di depan pintu agar tidak ada yang mengganggu.

Masyarakat Karangsari meyakini bahwa jika ritual itu tidak dilakukan maka nyawa ibu dan bayinya akan terancam dan banyak sekali gangguan yang dapat terjadi pada ibu maupun bayinya. Masyarakat Karangsari juga meyakini bahwa ada pantangan-pantangan yang harus diikuti suami selama istrinya hamil.

Hasil wawancara mengungkap beberapa pantangan tersebut antara lain para calon ayah dilarang untuk menyembelih hewan seperti ayam, domba, ular dan sebagainya karena diyakini bayi yang dilahirkan nanti lehernya akan merah-merah. Calon ayah juga dilarang berbicara kasar/seenaknya, tujuannya untuk keselamatan ibu dan bayinya. Selain itu juga calon ayah dilarang melilitkan handuk ke leher karena dipercaya leher bayi akan terlilit tali pusat sehingga bayi akan sulit lahir pada saat persalinan. Selama istrinya hamil, suami juga dilarang memancing karena dipercaya bayi yang dikandung istrinya dapat mengalami cacat bibir sumbing.

Meskipun ada pantangan-pantangan tersebut, namun masyarakat Karangsari meyakini bahwa pantangan itu boleh dilakukan asal calon ayah mengajak bayi yang ada di dalam kandungan istrinya meskipun berjauhan misalnya calon ayah ada di Bandung sementara istrinya yang sedang hamil di Karangsari, pada saat dia akan melakukan satu kegiatan yang dilarang seperti memancing, dengan berkata "*dede utun ayo mancing*" (adik bayi ayo memancing). Dengan mengajak ini maka dipercaya bahwa akibat yang ditakutkan yaitu tali pusat melilit pada leher tidak akan terjadi pada bayinya.

Serangkaian ritual yang harus dilakukan oleh suami selama periode kehamilan, persalinan dan postpartum istrinya yang dikenal dengan *Ritual couvade* merupakan bentuk keterlibatan suami (Helman:2002, Cooper: 2005). Rasa empati suami pada istrinya seringkali muncul dalam bentuk *couvade syndrome* baik dalam bentuk gejala fisik maupun psikologis (Kazmierczak: 2013, Ganapathy: 2014)

Pada masyarakat tradisional, kehamilan dan persalinan merupakan proses yang normal dan sebagai identitas bagi seorang perempuan (Hillier: 2003). Untuk meyakinkan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya, masyarakat Desa Karangsari memeriksakan kehamilannya ke bidan dan juga tetap memanfaatkan paraji untuk memeriksa kehamilan, memimpin ritual upacara *opat bulanan* dan *nujuh bulanan* dan juga memberikan saran-saran untuk keselamatan diri dan bayinya.

Hal yang dikemukakan di atas sejalan dengan hasil penelitian Agus *et al* (2012), Almutahar (2014) dan Choguya (2014) yang mana dukun bersalin memiliki otoritas dalam kehamilan dan persalinan. Dengan demikian, masyarakat Desa Karangsari memanfaatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan tetap mempertahankan praktik-praktik tradisional yang didapatkan secara turun-temurun, sesuai dengan hasil kajian Otoo (2015) dan Choudhury *et al* (2012).

SIMPULAN

Masyarakat Desa Karangsari masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ibu pada saat hamil dan juga pantangan/larangan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Mereka meyakini jika pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan hal buruk pada ibu dan bayi yang dikandungnya. Suami memiliki keterlibatan dengan kehamilan istrinya yang ditunjukkan dengan kepatuhan suami mengikuti keharusan dan pantangan dan keyakinan akan akibat jika kebiasaan tersebut tidak diikuti.

Adat upacara *opat bulanan* dan *nujuh bulanan* masih dipertahankan oleh masyarakat desa ini, walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ibu hamil dan keluarganya. *Maraji* memiliki peran penting dalam memimpin upacara-upacara ini. Dengan demikian *maraji* masih memiliki otoritas dalam pelayanan kehamilan, walaupun pemanfaatannya oleh masyarakat berdampingan dan saling melengkapi dengan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Y., Horiuchi, S. and Porter. S. (2012). *Rural Indonesia women's traditional beliefs about antenatal care*. BMC Research, 5:589. http://www.biomedcentral.com/1756-0500/5/589.

Almutahar, H. (2014). *Perilaku Sosial Kesehatan Ibu Hamil Dan Melahirkan (Studi di Kawasan Perbatasan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimanatan Barat)*. Sosiohumaniora, Volume 16 (3): 252 – 256

Ayaz, S. and Efe, Y.S. (2008). *Potentially harmful traditional practices during pregnancy and postpartum*. The European Journal of

Contraception & Reproductive Health Care, 13 (3), 282-288, DOI: 10.1080/13625180802049427

Aziato, L., Odai, N.A,P, and Omenyo, N.C. (2016). *Religious beliefs and practices in pregnancy and labour: an inductive qualitative study among post-partum women in Ghana*. BMC Pregnancy and Childbirth, 16 (138), DOI 10.1186/s12884-016-0920-1

Phipps, B. and Beech, L.B. (2004). Normal Birth: Women Stories. In: Downe, S (ed.), *Normal Childbirth Evidence and Debate* (pp. 59-70) Churchill livingstone: London.

Blackshaw, T. (2006). Fathers and Chidbirth.In: Squire C (ed.) *The Social Context of Birth* (pp. 211-232). Radcliffe Medical Press Ltd: Abingdon.

Choguya, N.Z. (2014). *Traditional Birth Attendants and Policy Ambivalence in Zimbabwe*. Journal of Anthropology . Article ID 750240, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/750240

Choudhury, N.C., Moran, C.A., Alam, A.M., Ahsan, Z.K., Rashid, F.S. and Streatfield, K.P. (2012). *Beliefs and practices during pregnancy and childbirth in urban slums of Dhaka, Bangladesh*. BMC Public Health.http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/791

Cooper, S. (2005). *A Rite of Involvement?: Men's transition to fatherhood*. Durham Anthropology Journal Volume 13(2) ISSN 1742-2930

Davis-Floyd, R (1992) *Birth as an American Rite of Passage*. Berkeley, Calif: University of California Press.

Ganapathy, T. (2016). *Couvade syndrome among 1st time expectant fathers*. Muller Journal of Medical Science and Research, 5(1), 43-47.

Gebuza, G., Kaźmierczak, M., Mieczkowska, E. and Banaszkiewicz, M. (2016). *Adequacy Of Social Support And Satisfaction With Life During Childbirth***.** Polish Annals of Medicine, 23(1),135-140.

Glazier, R., Elgar, F. and Holzapfel, S. (2004). *Stress, Social Support, And Emotional Distress In A Community Sample Of Pregnant Women*. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 25 (1), 247–255.

Graft, A.A. (2014). *Food Beliefs and Practices During Pregnancy in Ghana:Implications for Maternal Health Interventions*. Health Care for Women International, 35(7), 954-972.

Helman, G.C. (2002). *Culture, Health and Illness*. London: Arnold Publisher.

Higginbottom, M.A.G., Vallianatos, H., Joan Forgeron, J., Gibbons, D., Mamede, F. and Barolia, R. (2014). *Food Choices And Practices During Pregnancy Of Immigrant Women With High-Risk Pregnancies In Canada: A Pilot Study*. BMC Pregnancy and Childbirth.http://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/370

Hillier, D. (2003). *Childbirth in the Global Village Implication for midwifery education and practice*. London: Routledge.

Hindaryatiningsih, N. (2016). *Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton.* Sosiohumaniora, Volume 18 (2): 100 – 107

Mander, R. (2001). *Supportive Care and Midwifery*. London: Blackwell Science

McCourt, C. (2006). Social Support and Childbirth. In: Squire C (ed.) *The Social Context of Birth* (pp. 187-2009). Radcliffe Medical Press Ltd: Abingdon.

M'soka, N.C., Mabuza L.H. and Pretorius, D. (2010). *Cultural And Health Beliefs Of Pregnant Women In Zambia Regarding Pregnancy And Child Birth*. *Curationis* 38(1), Art.#1232,7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/ curationis.v38i1.1232

Maharlouei, N. (2016). *The Importance of Social Support During Pregnancy*. Women's Health Bull, 3(1): e34991. doi: 10.17795/whb-34991

Naidu, M. and Koleki, N.K. (2013). *Indigenous Mothers: An Ethnographic Study of Using the Environment during Pregnancy*. Ethno Med, 7(2), 127-135

O'Neil, D. (2006). P*rocesses of Change*. http:// www.anthro.palomar.edu

Otoo, P., Habib, H. and Ankomah, A. (2015). *Food Prohibitions and Other Traditional Practices in Pregnancy: A Qualitative Study in Western Region of Ghana*. Advances in Reproductive Sciences, 3(1) 4149. http://dx.doi.org/10.4236/arsci.2015.33005

Rowan, C. (2006). Maternal infant Attachment. In: Squire, C (eds) *The Social Context of Birth* (pp: 153-171). Radcliffe Medical Press Ltd: Abingdon

Thomas, C.J., Letourneau, N.N., Campbell, T. and Giesbrecht, F,G. (2015). *Maternal social support during pregnancy supports postnatal maternal caregiving via reductions in prenatal depression***.** Paper presented at Alberta Children's Hospital Research Symposium, Calgary, April.

Van Gennep, A. (2004). *The Rites of Passage*. London: Routledge.

Winson,N., (2006). Transition To Motherhood. In: Squire, C (eds) *The Social Context of Birth* (pp: 137-151). Radcliffe Medical Press Ltd: Abingdon

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660
Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 168 - 176

EVALUASI KEBIJAKAN NARKOTIKA PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA

Uyat Suyatna
Program Pascasarjana Universitas Pasundan
E-mail: suyatnauyat5@gmail.com

ABSTRAK. Masalah utama dalam penelitian ini adalah narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *participation observation yang disebut juga dengan observasi aktif*, langsung pada 34 provinsi di mana kasus itu terjadi. Evaluasi kebijakan narkotika dengan indikator isi, implementasi, dan dampak kebijakan ditemukan hasil penyalahgunaan narkotika setiap hari 30-40 orang meninggal dunia. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan dewasa, menjadi produsen, pengedar, dan pengguna, narkotika di Indonesia.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Narkotika, Provinsi, dan Indonesia.

NARCOTICS POLICY EVALUATION AT 34 PROVINCES IN INDONESIA

ABSTRACT. *The main problem in this research is narcotic is very dangerous for human life. Therefore, the state made Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Psychotropic, and other Addictive Substances. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants both synthetic and semisintetis that can cause decreased or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. Narcotics abuse results in physical, mental, emotional and behavioral damage in society. The method used in this research is the participatory observation method which is also called active observation, directly in 34 provinces where the case happened. Evaluation of narcotics policy with indicators of content, implementation, and impact of policy found results of abuse of narcotics every day 30-40 people died. The results of this study, showing that children, adolescents, and adults, become producers, distributors, and users, narcotics at 34 provinces in Indonesian.*

Key words: Evaluation, Policy, Narcotics, Provinces, and Indonesian.

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, akan tetapi melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Oleh karena itu, peneliti sangat perlu merujuk teori evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat (Bahan) Berbahaya. Narkoba biasa diasosiasikan dengan kata NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Narkoba adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaanya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum.

Napza adalah istilah kedokteran untuk kelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan berpengaruh pada kerja otak (psikoaktif). Termasuk dalam hal ini obat, bahan atau zat, baik yang diatur undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak, tetapi sering disalahgunakan, seperti alcohol, heroin, ganja, kokain, dan sebagainya.

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan sebuah masalah sosial di masyarakat yang meresahkan. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang memprihatinkan dunia internasional.

Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh negara-negara di dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Direktur PLRIP-BNN Ida Utari pada Rakernis Terapi Rehabilitasi Napza pada 20 Maret 2014 di Kementrian Kesehatan menyebut di seluruh dunia pecandu berat narkoba berjumlah antara 15.5 juta - 38.6 juta. Prevalensi pengguna narkoba dunia adalah sekitar 5%, sedangkan Indonesia pada 2015 diperkirakan sebesar 2.8%, ada kenaikan hampir dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir (tahun 2004 prevalensi 1.75%).

Mencermati angka prevalensi dalam unit juta orang di tahun 2015, di mana apabila tidak ada penghambat

penyalahgunaan narkoba, dengan asumsi penduduk 250 juta orang, maka di Indonesia diperkirakan sekitar 5,1 juta orang akan menjadi penyalahgunaan narkoba atau di antara 50 orang WNI ada 1 orang pengguna narkoba.

Bisa jadi setiap lembaga yang mempunyai staf lebih dari 50 orang dipastikan ada di antaranya pengguna narkoba. Jika demikian lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Kehakiman), lembaga hankam, lembaga tinggi negara lain, perusahan swasta, dan milik negara di Indonesia dipastikan terdapat pengguna narkoba. Cepat atau lambat bisa menghancurkan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Pemerintah melalui berbagai instansi telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan hingga tahun 2014 sebanyak 68 orang terpidana kasus narkoba baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri divonis mati oleh pengadilan.

Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa, yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*. Hal ini terjadi karena adanya *demand* dan *supply*.

Indonesia menjadi salah satu negara sasaran peredaran narkoba yang dikendalikan jaringan internasional. Hasil deteksi BNN ada 72 jaringan internasional yang menjalankan bisnis narkoba. Saat ini, pihaknya tengah mendalami apakah antara satu jaringan dan jaringan lainnya saling berkaitan atau tidak. Jadi jaringan ini selalu bekerja dan memanfaatkan segala kelemahan yang ada, baik pengawasan maupun sistem alat kita, termasuk mesin x-ray yang kita punyai. Setelah semuanya dikuasai, barulah mereka melancarkan di lapangan. Biasanya, jalur laut salah satu pintu yang dipilih. Kemudian, pelabuhan-pelabuhan yang lemah dima nfaatkan seperti selat Malaka yang hilir mudik penyebrangan kapal sangat banyak namun pengawasannya sedikit dan sulit. Mereka memanfaatkann itu, jadi BNN perlu kerjasama dengan pihak yang terkait dengan jaringan ini.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan sekitar dua ratus juta orang di seluruh dunia telah menggunakan jenis narkotika secara illegal. Kanabis merupakan jenis Narkotika yang paling sering di gunakan, diikuti dengan Amfetamin, Kokain, dan Opioida. penyalahguannan Narkotika jenis ini di dominasi oleh pria, dan juga lebih terlihat di kalangan kaum muda dibandingkan kategori usia lebih tua. Sebanyak 2,7% dari populasi dunia dan 3,9% dari seluruh orang berusia 15 tahun keatas telah menggunakan Kanabis paling sedikit sekali antara tahun 2000 dan 2001.

Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.

Konvensi tahun 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasikan dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang ; dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor. Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan *(supply)*, tetapi juga dari sisi permintaan *(demand)*.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Narkoba menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, berdasarkan data dari BNN pada tahun 2014 tercatat tingginya prevalensi pengguna barang terlarang tersebut yang telah mencapai 4,2 juta penduduk Indonesia. Dari total itu di antaranya anak-anak, remaja,dan orang dewasa.

Jumlah pengguna Narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta orang. Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden. Sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Selain itu di Asean, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand.

Pada tahun 2015, berhasil diamankan sekitar 3 ton sabu yang berarti menyelamatkan banyak generasi muda. Satu gram saja bisa digunakan untuk 5 orang. Jadi dengan mengamankan 3 ton sabu sudah berapa ribu jiwa yang diselamatkan. Penggunaan narkoba, banyak disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang narkotika, psikotrapika, dan zat adiktif lainnya, serta kepedulian dari masyarakat, juga hukum yang masih belum mengikat secara maksimal. Tidak ada bagian masyarakat yang tidak *clear* dari narkoba, semua sudah terkena. Setiap hari ada 30-40 orang yang mati karena narkoba.

BNN mengungkapkan 807 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahya sepanjang tahun 2016. Jumlah ini mengalami peningkatan 56 persen dibandingkan pengungkapkan pada tahun 2015 yang lalu. Dari pengungkapan itu, sebanyak 1238 pelaku diamankan, sedangkan barang bukti yang disita antara lain 2,68 ton ganja kering, 1.016 ton sabu, 754.094 butir dan hanish, 5.012 butir daftar G, dan 2 butir Benzodiazepine.

BNN memusnahkan barang bukti sitaan narkotika dengan rincian 11 kilogram sabu, 170 gram kokain, dan 49 mililiter narkoba jenis baru 4-CMC atau Blue Safir. Barang haram itu merupakan bukti kejahatan dari empat kasus narkotika yang diungkap pada Desember 2016 hingga Januari 2017.

Pertama, merupakan pengungkapan 14 Desember 2016 di Jl. Simo Gunung Barat Tol II Suko Manunggal, Surabaya Jawa Timur. Dari situ, petugas menangkap dua tersangka berinisial EW (33) dan VAP (30) dengan barang bukti 170,5 gram kokain.

Kedua, pada Kamis 12 Januari 2017 di depan Masjid Raya, Jl. Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara. Dari kasus itu diamankan enam tersangka berinisial JAM (38), YAN (41), AS (30), SY (22), DAV (36), dan PREM (37). Mereka terlibat serah terima tas ransel hitam berisi delapan bungkus plastik kemasan teh yang di dalamnya terdapat 8.097 gram sabu.

Ketiga, pada Selasa 17 Januari 2017 di Jl. Daan Mogot Wijaya Kusuma, Grogol, Jakarta Barat, petugas mengamankan dua pria berinisial S (32) dan BT (31). Tersangka terlibat kasus pengedaran sabu bermodus paket kiriman berupa tabung water purifier. Di dalamnya terdapat 1.024,2 gram sabu.

Keempat, merupakan tangkapan BNN dengan barang bukti narkotika jenis baru Blue Safir pada Selasa 17 Januari 2017 di Tangerang Selatan, Banten. Dari kasus itu petugas mengamankan dua orang berinisial EPP (49) dan HE (34). Sebanyak sekitar hampir 50 mililiter itu. Dikirim dari Tiongkok ke Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017, 4 – Klorometkatinona (4 – CMC) atau Katinon masuk dalam Daftar Nomor Urut 104 Narkotika Golongan I. Untuk para tersangka, mereka terancam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pemerintah melalui berbagi instansi, telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan hingga 2014 serbanyak 68 orang terpidana kasus narkoba baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri divonis mati oleh pengadilan. Sedangkan 2 orang dari pengedar narkoba yang dikenal dengan "Bali Nine" dihukum mati, anggota lainnya 6 orang dihukum seumur hidup, dan anggota yang 1 orang, Renae Lawrence dihukum penjara 20 tahun..

Anderson (1979: 60) menyatakan "*policy evaluation can be briefly defined as the appraisal or assessment of policy, including its content, implementation and impact"*. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk evaluasi kebijakan narkotika di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan secara komprehensif, mendalam, dan apa adanya masalah penyalahgunaan Narkotika yang berdampak sosial bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan fenomena yang tercermin dalam tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *participation observation* yang juga disebut dengan observasi aktif (Soedarsono, 2001: 149). Metode ini diharapkan dapat memandu peneliti mengikuti langkah-langkah sesuai prosedur penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa informasi-informasi dari Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan data-data mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, serta dampak negatif Narkotika terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian evaluasi kebijakan narkotika merupakan metode untuk memperoleh umpan-balik bagi suatu program, agar pelaksana program dapat meningkatkan efektivitasnya. Namun, penelitian evaluasi kebijakan tidak selalu diterima dan didukung oleh para administrator, para pelaksana maupun oleh klien dari program itu sendiri. Bagi mereka, tugas utama pemerintah adalah memberikan program pelayanan, dan evaluasi hanyalah merupakan imbuhan. Meskipun penelitian itu membantu program dalam jangka pendek dan jangka panjang, cenderung mengganggu betapapun kecilnya. Oleh karena itu, para evaluator menyelenggarakan penelitian mereka, dalam suasana yang tidak menyenangkan, antara dibenci dan ditolelir. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk tidak mengganggu, tapi konflik kepentingan tertentu akan segera menghambat kegiatan penelitiannya.

Kekeliruan bisa terjadi mungkin secara disengaja, karena evaluator memiliki kepentingan tertentu untuk menutupi kelemahan implementasi kebijakan yang berada di bawah tanggung jawab rekan sejawatnya. Tetapi mungkin juga tanpa disadari hal ini terlakukan, karena evaluator tidak bisa menggunakan metode yang rasional melainkan hanya berdasar pada intuisi (Ripley, 1988: 167-168).

Anderson (1979: 60) menyatakan "*policy evaluation can be briefly defined as the appraisal or assessment of policy, including its content, implementation and impact"*. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk evaluasi kebijakan narkotika dalam masyarakat di Indonesia.

Secara umum, seperti dikutip dari Rodiah, *et. al,* 2016. Strategi promosi kesehatan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehinga diperlukan strategi komunikasi agar program dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Secara legal, promosi kesehatan diatur dalam SK Menteri Kesehatan no 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan. Bahkan untuk

promosi kesehatan di daerah secara spesifik pemerintah mengaturnya dalam SK no 1114/Menkes/ SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.

1. Isi Kebijakan *(Policy Content*)

Isi kebijakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika khusus golongan I dan II. Undang-Undang terbaru ini diyakini memiliki ancaman yang lebih berat dibandingkan gdengan Undang-Undang sebelumnya, untuk lebih jelasnya berbagai pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut akan disajikan sebagai berikut:

a. Perluasan Jenis dan Golongan

Pada undang-undang terdahulu, jenis golongan untuk masing-masing Narkotika dan Psikotripika dipisahkan secara jelas melalui lampiran jenis golongan di tiap-tiap undang-undang. Hal ini diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diikuti dengan lampiran untuk setiap jenis golongannya. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 26 jenis Narkotika, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bagian lampirannya terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I ini dikarenakan digabungkannya jenis Psikotropika Golongan I dan II ke dalam kategori Narkotika Golongan I.

b. Alat Bukti

Perluasan alat bukti khususnya yang menyangkut alat bukti eletronik ini memang sangat dibutuhkan, hal ini mengingat sebagai salah satu tindak kejahatan, peredaran Narkotika merupakan jenis kejahatan dalam bentuk jaringan di mana antara para pelaku sering tidak bertemu secara *face to face* bahkan nyaris tidak saling mengenal satu dengan yang lain, dan komunitas di antara para pelaku menggunakan media alat komunikasi elektronik seperti handphone maupun media chatting. Kemudian dalam hal lamanya waktu penangkapan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya memberikan waktu 24 jam dalam menangkap diikuti perpanjangan selama 48 jam apabila dalam pemeriksaan waktu tersebut tidak mencukupi (pasal 67). Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penangkapan dapat dilakukan selama 3 x 24 jam kemudian dapat diperpanjang 3 x 24 jam lagi apabila pemeriksaan dirasa belum mencukupi.

c. Ketentuan Pidana

Pada bagian ketentuan pidana ini telah terjadi beberapa perubahan yang cukup prinsipal dan mendasar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, di mana pada undang-undang terdahulu jumlah pasal dalam ketentuan pidana ini hanya berjumlah 23 pasal dan berkembang menjadi 35 pasal pada undang-undang terbaru.

Secara umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih berat daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 demikian pula dengan ancaman hukuman denda yang diberikan juga lebih berat.

Beberapa pokok perubahan tersebut di antaranya adalah penggunaan sistem pidana minimal. Pada undang-undang terbaru dikenal sistem pidana minimal di mana pada undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak ada. Hal ini terutama pada para pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Selanjutnya bagi penyalahguna Narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Yang cukup menarik adalah apa yang tertera dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di mana orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda 1 juta rupiah (ayat 1), sedangkan untuk pecandu Narkotika di bawah umur dan telah dilaporkan sebagaimana pasal 55 ayat (1) maka dia tidak dapat dipidana, kemudian untuk pecandu Narkotika yang telah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis juga tidak dituntut pidana (ayat 3).

Perkembangan mengenai trend kejahan Narkoba di Indonesia ini memang membawa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan berupa peningkatan tersebut memang cukup tinggi dan berkembang dengan sedemikian rupanya. Kondisi ini tentu saja menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia secara luas pada umumnya. Tentu kita tidak ingin melihat mental bangsa ini menjadi rusak akibat pengaruh Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Berbagai upaya pencegahan, penanggulangan, pemberantasan Narkotika di bumi pertiwi ini tentu akan sia-sia manakala semua pihak tidak bekerjasama. Hal ini tentu harus dibarengi dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan dengan segenap bantuan masyarakat dan komponen bangsa ini secara simultan.

Berbagai piranti hukum hanyalah sebuah hukum "mati" yang tidak akan ada gunanya apabila tidak dijalankan secara baik dan benar. Dan yang paling penting bahwa tugas untuk memerangi Narkoba ini bukanlah tugas Polri atau tugas BNN semata, melainkan tugas seluruh masyarakat Indonesia harus berperan aktif dalam memerangi Narkoba ini. Jika tidak maka upaya memberantas Narkoba di Indonesia akan sangat sulit untuk terwujud dan terlaksana dengan baik.

2. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sejak 1971 pemerintahan Soeharto sudah menaruh perhatian khusus pada masalah ini dengan membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 1971 yang bertugas menanggulangi masalah narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun1976 Tentang Narkotika dimaksudkan untuk mengatur masalah ini, dan seperti hukum yang menganggap masalah penyalahgunaan Narkotika sebagai persoalan kriminal, berusaha mengaturnya dengan ancaman pidana. Turunan dari Undang-Undang ini ada beberapa, termasuk surat keputusan Menteri Kesehatan pada 1977 yang mengatur masalah produksi narkotika untuk kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga memuat beberapa pasal yang mengatur soal peredaran dan penggunaan Narkotika.

Namun baru pada pertengahan 1990-an Indonesia memiliki undang-undang yang komprehensif untuk menangani masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Konvensi Psiktropika 1971; Undang-Undang Nomor 5 Tahun1997 Tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Konvensi PBB Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Psikotropika; serta Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan zat aditif lainnya.

Inti dari berbagai Undang-Undang ini adalah menjamin ketersediaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; mencegah terjadinya penyalahgunaan; dan memberantas peredaran gelap. Ancaman hukuman penjara diberikan "dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat," karena pelanggaran itu dianggap mengancam keamanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu. Penyalahgunaan zat-zat itu disebabkan beberapa faktor, antara lain:

a. Lingkungan sosial

Menurut Sintadewi, 2017. Promosi Kesehatan bagi pengguna narkoba perlu diperhatikan juga di tahap lingkungan sosial oleh karenanya penanganan khusus bagi pengguna narkoba agar bisa mengurangi dampak buruk penggunaan obat terlarang ini menjadi sebuah keniscayaan. Istilah pengurangan dampak buruk berasal dari terjemahan *Harn Reduction* yang berarti pengurangan/penurunan kerugian/kerusakan. Pengurangan dampak buruk obat terlarang merupakan bentuk konsep program yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif yang berkaitan dengan perilaku penggunaan obat terlarang. Tujuan ini lebih bersifat jangka pendek dan pragmatis dari pada tujuan jangka panjang berupa penghentian pengguaan obat terlarang.

Motif ingin tahu: di masa remaja, seseorang lazim mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Bentuk rasa ingin tahu dan ingin mencoba itu misalnya dengan dengan mengenal narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Kesempatan: kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau dampak perpecahan rumah tangga akibat *broken home*, serta kurangnya kasih saying merupakan celah kesempatan para remaja mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Sarana dan prasaran: ungkapan rasa kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya seperti memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, bisa jadi pemicu penyalahgunaan uang saku untuk membeli narkotika untuk memuaskan segala keingintahuan dirinya. Biasanya, para remaja mengawalinya dengan merasakan minuman keras. Baru kemudian mencoba-coba narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b. Kepribadian

Rendah diri: perasaan rendah diri di dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan sebagainya, sehingga tidak dapat mengatasi perasaan itu, remaja berusaha untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukan eksistensi dirinya, melakukan dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya, sehingga dapat merasakan memperoleh apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya.

Emosional: kelabilan emosi remaja pada masa pubertas dapat mendorong remaja melakukan untuk mengurangi kesalahan fatal. Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya. Padahal di sisi lain masih ada ketergantungan sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi. Dalam upaya terlepas dari konflik pribadi itu, mereka mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tujuan berusaha untuk mengurangi keterangan atau agar lebih berani menentang kehendak dan aturan yang diberikan oleh orang tuanya.

Mental: lemahnya mental seseorang akan mudah untuk dipengaruhi perbuatan dan tindakan atau hal-hal yang negatif oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga ke semua pengaruh negatif ini pada gilirannya menjurus pada aktivitas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungannya dan dirinya merasa diasingkan.

Merujuk pada penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di atas, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah penggolongan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi tiga golongan, yang mungkin berdasarkan pertimbangan medis tapi mengabaikan aspek kultural dan sosial. Undang-Undang itu menetapkan hukuman berat bagi orang yang terlibat dalam produksi dan perdagangan ilegal, tapi dalam prakteknya ada pembedaan berdasarkan kelas, latar belakang sosial dan lainnya. Sudah bukan rahasia lagi misalnya bahwa anak pejabat selalu lolos dari jerat hukum, sementara orang tanpa backing di kampung terus-menerus menjadi sasaran dan eksploitasi.

Jaksa biasanya akan membuat tuntutan lebih rendah terhadap mahasiswa atau pelajar karena yang bersangkutan diharapkan masih bisa diselamatkan dan hukuman penjara yang akan diterimanya justru membuat keadaan semakin parah. Masalah utama, tidak adanya fasilitas perawatan yang memadai, membuat para tahanan bercampur dengan kriminal biasa dan justru meneruskan kebiasaan mereka di dalam penjara. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penjara justru menjadi salah satu situs penting dalam rantai perdagangan Narkotika di Indonesia.

Para penegak hukum melakukan diskriminasi antara mereka yang dapat diselamatkan dan yang tidak tertolong lagi. Untuk kategori kedua perlakuan biasanya sangat keras dan bahkan ada keinginan tersembunyi untuk sesegera mungkin menyingkirkan para pecandu kambuhan karena biaya perawatan yang mereka habiskan jauh lebih besar dari kemungkinan untuk sembuh. Perubahan ke arah yang lebih baik hanya mungkin jika penyelenggara negara sadar bahwa masalah yang dihadapi sangat kompleks, memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga historis.

Maret 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ketua pengadilan tinggi dan negeri untuk menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Dari perspektif penegakan hukum narkoba di Indonesia sepuluh tahun terakhir, surat edaran ini merupakan suatu terobosan atas pertimbangan aspek kesehatan yang diberikan kepada para pengguna. Pengguna narkoba dikategorikan sebagai masalah kesehatan bukan tindak kejahatan yang memerlukan hukuman penjara. Walaupun demikian klasifikasi pengguna yang dimaksud dalam surat edaran ini masih terlalu sulit dipenuhi kebanyakan pengguna narkoba di Indonesia. Sebagai contoh jumlah barang bukti yang disyaratkan sangat tidak realistis walaupun untuk satu kali konsumsi, yaitu 0.15 gram untuk heroin. Selain jumlah barang bukti, persyaratan yang juga sulit dipenuhi adalah yang bersangkutan bukanlah residivis kasus narkoba.

Sejak tahun 2006 korban narkoba di Indonesia telah mengorganisir diri membentuk kelompok-kelompok di tingkat lokal serta berjejaring secara nasional dan internasional. Menyadari secara penuh bahwa ketertindasannya dipengaruhi berbagai kepentingan yang bermuara pada suatu produk hukum dengan informasi keliru yang telah mengakar di masyarakat, maka misi utama kelompok-kelompok ini adalah melakukan pendidikan mengenai narkoba di samping melakukan pembuktian-pembuktian terbalik atas stigma yang melekat pada korban narkoba. Penggalangan mitra untuk mendukung perwujudan kebijakan narkoba yang berpihak pada rakyat terus dilakukan di mana turut bergabung individu maupun lembaga-lembaga bantuan hukum, pembuatan rancangan undang-undang, beserta hasil penelitian evaluasi kebijakan narkotika.

Layanan pengurangan dampak buruk narkoba yang dilaksanakan di pusat-pusat kesehatan milik pemerintah, sejak 2004 telah berkembang luas terutama di daerah-daerah padat populasi pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Salah satu layanan kesehatan ini adalah siubstitusi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Walaupun baru sebatas pada jenis opioid, namun layanan ini menjadi preseden bagi upaya melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkoba. Dengan disediakan, diawasi, dan diatur oleh pemerintah sehingga dosis, harga, dan konsumsinya terkendali, maka para korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (*napza*), yang mengikuti layanan ini tidak perlu melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan napza karena harganya terkendali serta kualitas hidupnya dapat meningkat karena disupervisi secara medis dan sosial.

Telah banyak penelitian di berbagai belahan dunia yang menunjukkan bahwa layanan-layanan sejenis, di mana produksi, distribusi, dan konsumsi diatur serta diawasi oleh negara, justru tidak meningkatkan jumlah pemakai narkoba. Terlebih, kebijakan tersebut mendorong peningkatan kendali masyarakat dan pemerintah terhadap penggunaan zat-zat yang dikategorikan sebagai narkoba.

Pengawasan, pengendalian, dan pengaturan narkoba oleh negara merupakan pilihan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan hanya dengan pilihan kebijakan inilah harga, mutu, pendistribusian, dan konsumsi dikendalikan oleh negara sehingga sindikat kejahatan terorganisir yang selama ini menguasai produksi, distribusi, dan peredaran narkoba dapat ditumbangkan. Masyarakat dilindungi negara atas potensi negatif zat-zat yang khasiatnya telah dikenal dan dikonsumsi umat manusia di berbagai belahan dunia sejak ribuan tahun silam.

Masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah, maka untuk menanggulanginya harus dikeluarkan berbagai kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Narkotika tersebut. Berikut ini beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika:

Pertama, pada tahun 1971, pemerintah mendirikan sebuah lembaga Bakolak Inpres untuk menangani dan meminimalisir terjadinya kejahatan penyalahgunaan Narkoba, kenakalan remaja, dan pencucian uang.

Kedua, pada tahun 1999, lembaga baru bernama BKNN yang menggantikan tugas Bakolak Inpres.

Ketiga, pada tahun 2002, lembaga BKNN dirubah menjadi BNN di mana pada saat itu jaringan lebih luas, yang dapat menjangkau tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Lembaga ini yang ada di tingkat daerah dikelola oleh pemerintah daerah.

Keempat, Pada tahun 2009 dikeluarkan kebijakan mengenai pemberian kewenangan BNN setingkat menteri dengan jalur komando langsung kepada BNN provinsi, kabupaten, dan kota.

3. Dampak Kebijakan (Policy Impact) penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan sosial masyarakat

Akibat penyalahgunaan narkoba, sebagian besar remaja beresiko tinggi kecanduan narkoba adalah mereka yang longgar dari pengawasan orang tua. Tidak dapat komunikasi dengan orang tua *(introvert)*, pengendalian diri yang rendah (dasar agama yang kurang), tidak suka diatur, senang mencari sensasi, bergaul dengan pecandu, sulit beradaptasi, merasa dikucilkan, dan memiliki anggota keluarga yang pecandu.

Para pecandu akan merasa senang, nyaman, damai, dan kuat pada awal penggunaan. Namun, pada dasarnya berbahaya, baik bagi diri sendiri maupaun orang lain (keluarga), dan kehidupan sosial di masyarakat. Bagi diri sendiri antara lain: rusaknya sel saraf, efek ediksi yang berujung pada perbuatan kriminal, karena apapun ditempuh untuk mendapatkannya, gejala putus obat yang berakibat penderitaan badan yang sangat hebat, dapat menyebabkan penyakit jantung, ginjal, liver, merusak pankreas, resiko cacat pada janin, kelainan sek, gangguan metabolisme, resiko kanker, dan kematian.

Bagi keluarga: kerusakan pada individu berdampak langsung pada keluarga, sehingga terjadi disharmonisasi *(broken home)*. Bagi kehidupan sosial: pencurian dan perampokan, kebut-kebutan di jalan, menggangu keamanan dengan perkelahian, pemerkosaan atau perbuatan mesum, dan lain-lain.

Solusi Terbaik Untuk Pecandu Narkoba

Dewasa ini penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) semakin meluas, dan telah sampai pada tahap membahayakan. Zat ini telah dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat atas sampai ke bawah, dan semua kelompok masyarakat baik anak-anak, orang dewasa, kalangan ekskutif, legislatif, mahasiswa, pelajar maupun preman.

Pendekatan Spiritual

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam jiwa manusia, menurut pandangan psikologi Islam, disebabkan ketidak-tundukan individu kepada aturan-aturan yang diberikan Allah SWT. Penyimpangan secara vertikal kepada Allah SWT, secara langsung akan memberi dampak horizontal antar sesama manusia. Permasalahan dalam kehidupan seseorang akan muncul, jika ia tidak mampu menghadapi dan menye-lesaikan masalah dengan baik. Konflik yang sering terjadi merupakan penyebab utama suatu masalah, akan dapat diselesaikan apabila seseorang mempunyai kemampuan penataan konflik *(management conflict)* yang baik. Kegagalan seseorang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kehidupan, pada gilirannya nanti akan menyebabkan meningkatkan kecemasan dan perasaan ketidaknyamanan diri.

Obat Tawakal

Kondisi dan keadaan jiwa seseorang, dapat menggambarkan ahlak yang akan muncul darinya. Dan tingkat kecemasan seseorang, sangat berdampak pada munculnya akhlak yang buruk. Syahrarwardi (1994) menyatakan, bahwa hamba Allah hanya mungkin mencapai derajat kerendahan hati yang sejati, jika cahaya renungan Illahi mulai bersinar di dalam hatinya. Ketika tipuan kecongkakan jiwa pudar, ia pun menjadi lembut, patuh kepada Allah SWT. dan menghormati sesama manusia.

Akhlak buruk akibat kecanduan dalam dirinya akan diketahui setelah ia menyadari suasana hatinya yang cemas, yang menggambarkan kerapuhan kondisi jiwa yang sesungguhnya. Dan itu akibat lemahnya penyerahan diri (tawakal) si pecandu kepada sumber kekuatan Allah SWT. Hingga berpengaruh pada buruknya hubungan dirinya dengan orang lain, yang tergambar dalam periiaku asertif.

Kecemasan dapat ditanggulangi dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang di antaranya melalui ibadah. Dengan ibadah, seseorang akan dapat mengimbangi akal dan pikirannya. Dengan konsistensi mengingat Allah SWT. pada setiap waktu, dan menghadapkan diri kepada Allah SWT. sepenuhnya, seorang pecandu akan mendapatkan perlakuan secara ruhani dan kejiwaan. Saat berinteraksi dengan Allah SWT melalui ibadah, ia akan lepas dari kesendirian dan kekosongan ruhaninya.

Orang-orang yang bertawakal, modal pokok mereka adalah mengabdikan diri kepada Allah SWT. Mereka akan berlapang dada dan jauh dari pikiran-pikiran yang merepotkan dirinya, hingga mereka bisa hidup tentram, tanpa dirongrong kepentingan makhluk. Dan mereka tidak akan merasakan kesendirian di dunia, serta tidak akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, jujur, dan terbuka.

Mereka merupakan manusia yang kuat dan bebas. Seolah-olah mereka raja sejagad, beribadah tanpa ada godaan dan rintangan. Karena semua tempat dan waktu bagi mereka sama saja, tidak memberikan pengaruh apapun. Sebab modal pokok bagi mereka adalah tawakal kepada Allah SWT.

Sejak akhir tahun 90-an jumlah kasus pengguna narkoba di Indonesia meningkat sangat drastis. Kondisi ini, tidak hanya terjadi di dalam penjara, di mana akses terhadap layanan dan alat-alat kesehatan sangat terbatas. Namun, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) ilegal tetap beredar.

Gencarnya penegakan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika RI Tahun 1997 selain meningkatkan

jumlah penghuni rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan hingga melebihi kapasitas huninya, juga menjauhkan para pengguna narkoba dari akses layanan kesehatan. Stigma yang dikampanyekan ke masyarakat tentang pemakaian narkoba juga diterima kalangan profesional kesehatan sehingga semakin menyulitkan para pengguna untuk memperoleh peralatan suntik di gerai-gerai layanan kesehatan.

Semangat untuk memberikan hukuman kepada siapapun yang terlibat narkoba telah memenjarakan 175,000-an WNI sejak 1997 hingga akhir 2008. Tercatat 137,172 orang menghuni seluruh lapas dan rutan di Indonesia yang berkapasitas 88,559 orang – terdapat kelebihan penghuni 54,8% pada April 2009 (Ditjenpas, 2009). Di sejumlah lapas, kebanyakan penghuni tersangkut kasus narkoba. Kondisi kelebihan hunian ini merupakan pendukung tingginya angka kematian di dalam lapas dan rutan terutama karena buruknya sanitasi dikombinasikan dengan penurunan kekebalan tubuh.

Tujuan melindungi Rakyat Indonesia dari peredaran gelap narkoba tidak tercermin dari proporsi jumlah nara pidana dan tahanan tahun 2007 yang kebanyakan kasusnya adalah pengguna (74%), sementara kasus pengedar hanya 24%, dan produsen 2% (Puslitbang dan Info BNN, 2008). Pemenjaraan atas kasus narkoba bukan berarti tanpa adanya pelanggaran prosedur penyidikan yang dilakukan aparat. Sebagian besar pengguna narkoba yang pernah berurusan dengan aparat penegak hukum mengaku mengalami pelanggaran mulai dari kekerasan fisik, perampasan, pemerasan yang diistilahkan sebagai "damai", hingga pelecehan seksual (Pelanggaran HAM pada Komunitas Penasun – Jangkar, 2008).

Pengedar narkoba harus dihukum berat, dihukum mati, minimal diganjar 20 tahun penjara, karena mereka penyebab utama tingginya peredaran barang haram tersebut. Barang haram tersebut kata Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar, seusai Peringatan Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharam 1436 Hijriyah di Gelora Bung Karno.

Bahkan, menurut dia tidak hanya hukuman itu, melainkan aset pengedar yang berasal dari bisnis narkoba harus dirampas negara. Negara bisa merampas aset yang dimiliki pengedar narkoba dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Ia mengatakan, saat ini peredaran narkoba cukup tinggi, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah merambah perdesaan, sekolah, dan lain-lain. Ini cukup memprihatinkan karena pengguna narkoba bukan hanya orang dewasa, tetapi sudah dikonsumsi kalangan pelajar. Pengedar narkoba harus dihukum setimpal karena mereka telah merusak masa depan generasi muda bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN saat ini juga berjuang untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan barang tersebut, misalnya digunakan untuk biaya politik.

Delapan kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan pemberantasan narkotika harus paralel dan bersinergi menyelamatkan pecandu narkoba. Kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan M Yusuf Kalla harus memahami pembinaan sumber daya manusia khususnya pecandu narkoba untuk mewujudkan Indonesia emas.

Disebutkan, delapan kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan narkotika yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan BNN. Kabinet baru yang dibentuk presiden, khususnya delapan kementerian dan lembaga ini harus memahami tentang arah kebijakan legalnya penanganan narkotika. Dengan adanya sinergi ini, kita ingin memperbaiki profesionalisme penegak hukum narkotika.

BNN membutuhkan tambahan sebanyak 30 unit tempat rehabilitasi pecandu narkoba, sebagai upaya pemberantasan narkoba yang cukup tinggi di tanah air. Saat ini, kami hanya memiliki 4 unit tempat rehabilitasi pecandu narkoba di 4 provinsi, sedangkan 30 provinsi belum ada. Sehingga sarana tersebut terbatas untuk menampung 4 juta narapidana pecandu narkoba.

Idealnya, tempat rehabilitasi pecandu ini yaitu masing-masing provinsi se-indonesia memiliki 1 unit tempat rehabilitasi dan kedepannya masing-masing kabupaten/kota memiliki tempat rehabilitasi pencandu narkoba ini. Tempat rehabilitasi pecandu narkoba ini penting dalam pemberantasan peredaran narkoba. Karena apabila pecandu narkoba sembuh, tentu tidak ada lagi yang membeli barang haram itu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Narkoba, pada Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1436 Hijriyah, di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.

Pembacaan deklarasi gerakan nasional anti narkoba yang dipimpin ketua MUI, Din Syamsudin dan diikuti tokoh dari berbagai organisasi islam dan pemuda berikrar membantu pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba di negara ini. Isi gerakan nasional anti narkoba itu di antaranya hijrah tonggak kejayaan peradaban islam, iman hijrah, dan jihad akan membawa kementerian.

Bahaya penyalahgunaan narkotika telah memasuki kondisi darurat. Hampir di tiap kelurahan terdapat pengguna narkotika dalam berbagai ragamnya. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengupayakan langkah revolutif untuk menghilangkan penyalahgunaan narkotika dan mengupayakan Indonesia bebas narkotika pada tahun 2015.

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan narkotika telah dilakukan sesuai dengan dimensi isi kebijakan *(policy content),* implementasi kebijakan *(policy implementation),* dan dampak kebijakan *(policy impact)*, dalam masyarakat di Indonesia. Isi, implementasi, dan dampak kebijakan ini sangat baik

digunakan, akan tetapi masyarakat belum memahami, bahkan kurang peduli terhadap penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sedangkan, hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemberantasan narkotika sangat baik, akan tetapi masyarakat tidak paham pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sehingga, penjatuhan hukuman seberat-beratnya termasuk hukuman mati kepada gembong Narkotika untuk efek jera. Eksekusi mati bagi narapidana juga akan dilakukan bagi narapidana mati yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penentuan ini oleh menteri hukum, menteri dalam negeri, menteri sosial, menteri kesehatan, polri, jaksa agung dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Sedangkan, untuk pengguna Narkotika dengan direhabilitasi, membangun panti rehabilitasi dengan anggaran daerah. Obat-obatan disediakan kementerian kesehatan bekerja sama dengan kementerian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J.E. (1979). *Public Policy Making,* New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd edition.

Ripley, R.B. (1985). *Political Analysis in Political Sciences*, Chicago: Nelson Hall Inc.

Rodiah, S. (2016) Strategi Promosi Kesehatan Puskesmas DTP Tarogong Kabupaten Garut, Sosiohumaniora Vol.18 (1): 51-56

Dewi, E.A.S. dan Sumartias, S. (2017). Promosi Kesehatan HIV-AIDS dan Stigma terhadap Pengguna Narkotika Suntik (Panasun) di Kabupaten Sumedang. Sosiohumaniora. Vol. 19 (2): 128-139.

Soedarsono, R.M. (1999). Metode Penelitian Seni Pertunjukkan dan Seni Rupa. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukkan Indosesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun (2009) Tentang Narkotika, Psikotropoka, Preukuser, dan Zat Adiktif lainnya.

Utari. I. (2014). Rakernis Terapi Rehabilitasi Napza. https://www.kompasiana.com/oun.samlanh/54f3575f745513972b6c714e/darurat-narkoba-di-indonesia-data-dan-fakta-yang-mengerikan?page=all (diunduh tanggal, 20 juli 2018)

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 177 - 187
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

DAMPAK KEBIJAKAN UPAH MINIMUM TERHADAP MIGRASI INTERNAL DI SULAWESI SELATAN

Ambar Dwi Santoso[1], Bonar M. Sinaga[2], Sri Hartoyo[2], dan M. Parulian Hutagaol[2]
[1)]Pusdiklat BPS, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620, Jakarta
[2)]Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Darmaga 16680, Bogor
E-mail: ambardwisantoso@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan upah minimum terhadap migrasi internal. Analisis memfokuskan pada migrasi internal di Sulawesi Selatan dengan menggunakan data runtun-waktu 1995-2015. Analisis menggunakan model persamaan simultan dengan 55 persamaan struktural, dan estimasi dilakukan dengan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS). Hasil menunjukkan kebijakan upah minimum meningkatkan arus migrasi masuk ke kawasan Makassar, dan dalam mengantisipasinya menjadi penting untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah guna penciptaan lapangan kerja baru pada kawasan di luar kawasan Makassar.

Kata kunci: model ekonometrika, upah minimum, migrasi internal, pengeluaran pemerintah daerah

IMPACT OF MINIMUM WAGE POLICY ON INTERNAL MIGRATION IN SULAWESI SELATAN

ABSTRACT. *The study aims to analyse the impact of minimum wage policy on internal migration. This analysis focuses on internal migration in Sulawesi Selatan by using time-series data 1995-2015. The simultaneous equations model consisting of 55 structural equations were employed and estimated by 2SLS method. The results confirm that the minimum wage policy led to increase migration flows to the region of Makassar, and to anticipate it is necessary to increase local government spending in regions outside of Makassar for creating new jobs.*

Key words: *econometric model, minimum wage, internal migration, local government spending*

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan sedang mengalami proses transformasi, seperti Indonesia pada umumnya, perekonomian sedang beralih dari dominasi sektor pertanian di perdesaan menuju pangsa yang lebih besar pada kegiatan sektor non-pertanian di perkotaan (ILO 2015). Transformasi ekonomi prinsipnya adalah pembangunan ekonomi dan berkaitan erat dengan migrasi yakni menstransfer tenaga kerja (Lewis, 1954). Migrasi timbul karena perbedaan ekonomi dan mengalir dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan kesempatan ekonomi yang lebih besar, seperti lebih banyak pekerjaan tersedia dan pendapatan/upah lebih tinggi. Perekonomian Sulawesi Selatan selama tahun 2011-2015 terus berkembang meski pertumbuhannya melambat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 tumbuh 8,13 persen menurun menjadi 7,15 persen di tahun 2015 (BPS, 2016). Namun seiring pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia (2016) menengarai bahwa ketimpangan di Indonesia semakin melebar yang disebabkan oleh salah satunya karena pekerjaan yang tidak merata. Permintaan pekerja terampil dengan upah tinggi di perkotaan meningkat, sedangkan sebagian besar pekerja tidak memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan dan hanya tertampung dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Faktor pekerjaan yang tidak merata menjadikan ketimpangan upah meningkat.

Upah minimum dapat menjadi instrumen kebijakan menurunkan ketimpangan upah dan meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah di bawah upah minimum. Rama (2001) menemukan bahwa kenaikan upah riil di Indonesia sebesar dua kali lipat pada paruh pertama tahun 1990-an mendorong kenaikan upah riil rata-rata sebesar 5-15 persen, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja di daerah perkotaan hingga sebesar 5 persen. Chun dan Khor (2010) menunjukkan bahwa upah minimum di Indonesia berperan mengurangi ketimpangan upah dengan menaikkan tingkat upah pekerja di sektor formal.

Prinsip kebijakan upah minimum adalah memberikan perlindungan bagi pekerja untuk memperoleh upah yang layak dengan tetap memperhatikan faktor produktivitas dan kemajuan perusahaan (Izzaty dan Sari 2013). Mekanisme kelembagaan penetapan upah minimum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulanya ditetapkkan oleh menteri kemudian didelegasikan kewenangan pada gubernur. Pada awalnya penentuan upah minimum didasarkan pada pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), kemudian diubah menjadi berdasarkan kebutuhan hidup minimum (KHM), dan selanjutnya kebutuhan hidup layak (KHL) (Pratomo dan Adi Saputra 2011). Perlambatan ekonomi global yang berimbas pada ekonomi nasional akibat penurunan harga-harga komoditas global dan penurunan ekspor (BI 2016; OECD 2016), mendorong pemerintah melakukan perubahan kebijakan sistem pengupahan dengan menerapkan sistem formula berdasarkan pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang dimaksudkan sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja, dan menjadikan proses penetapan upah minimum

lebih sederhana, adil dan terproyeksi serta berpihak pada pekerja karena memberi kepastian kenaikan upah minimum setiap tahunnya (Tim PresidenRI, 2016).

Penerapan sistem formula dengan besaran persentase yang sama secara nasional membawa konsekuensi berpotensi meningkatkan perbedaan upah minimum antarwilayah. Besaran kenaikan nominal upah minimum akan bervariasi karena besaran awalnya berbeda-beda. Provinsi, kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum lebih tinggi dari wilayah lain akan memperoleh kenaikan nominal yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Di Sulawesi Selatan, secara umum berlaku upah minimum provinsi (UMP), dan terdapat tiga kabupaten/kota yang telah memberlakukan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Luwu Timur. Karena ketentuan UMK nilainya lebih tinggi dari UMP dan UMK Kota Makassar adalah yang tertinggi, maka potensi kenaikan nominal upah minimum di kawasan Makassar berdasarkan kebijakan pengupahan sistem formula untuk tahun selanjutnya menjadi lebih tinggi dari kawasan lain di Sulawesi Selatan.

Dalam prespektif Harris-Todaro (1970) peningkatan upah minimum sistem formula diduga meningkatkan pendapatan yang diharapkan dan akan mendorong migrasi internal antarwilayah di Sulawesi Selatan meningkat menuju ke daerah perkotaan di Kawasan Makassar. Bila migrasi masuk terus meningkat maka dapat menyebabkan surplus tenaga kerja meningkatkan pengangguran dan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan upaya pembangunan kawasan Makassar.

Tujuan yang ingin dicapai penelitian adalah untuk mengetahui dampak upah minimum terhadap migrasi internal antarwilayah di Sulawesi Selatan. Hasil analisis bermanfaat bagi pemerintah guna meninjau apakah kelembagaan pengupahan sistem formula mendukung arah pembangunan di Sulawesi Selatan.

Hubungan Upah Minimum dan Migrasi

Studi tentang upah minimum, umumnya berfokus pada dampak terhadap pekerjaan dan upah. Model neoklasik mendalilkan bahwa pada pasar tenaga kerja kompetitif dengan tenaga kerja homogen, upah minimum akan mengurangi jumlah pekerja dan meningkatkan pengangguran (Stigler 1946). Penerapam upah minimum menjadikan permintaan tenaga kerja menurun, sebaliknya penawaran tenaga kerja meningkat. Ukuran efek terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja bergantung pada elastisitasnya. Permintaan dan penawaran tenaga kerja yang lebih elastis terhadap perubahan upah dapat ditunjukan dengan kurva yang semakin datar. Melalui Gambar 1, Zavodny (2014) menggambarkan pengaruh dari upah minimum dan migrasi pada pasar tenaga kerja kompetitif. Panel (a) menunjukkan bahwa upah minimum W_{um}, posisinya lebih tinggi dari upah keseimbangan W^*. Dengan adanya upah minimum, jumlah pekerja yang dibutuhan menjadi berkurang dari L^* menjadi L_{um}. Sebaliknya, penetapan upah minimum meningkatkan jumlah orang yang bersedia bekerja dari L^* menjadi L_s. Karena jumlah pekerja yang dibutuhkan lebih sedikit dari jumlah orang yang bersedia bekerja, maka timbulah pengangguran yang besarnya sama dengan L_s–L_{um}.

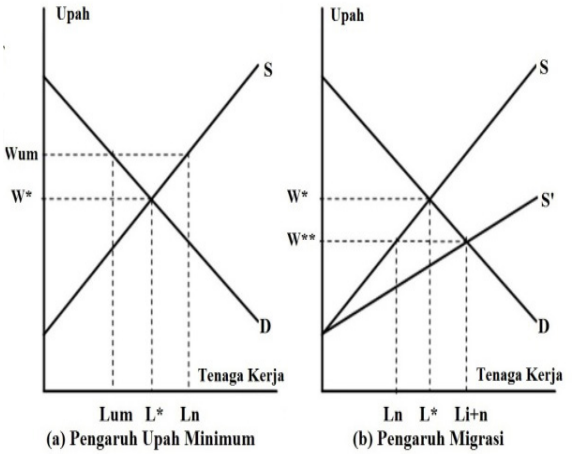

Sumber: Zavodny 2014

Gambar 1. Pengaruh Upah Minimum dan Migrasi terhadap Pasar Tenaga kerja

Dengan asumsi pasar kompetitif dan tenaga kerja homogen, model neoklasik juga memprediksi migrasi menyebabkan menurunnya upah pekerja. Panel (b) memperlihatkan dampak peningkatan pasokan tenaga kerja akibat migrasi masuk. Misalkan kondisi awal tidak ada migran, semua tenaga kerja dipasok oleh penduduk asli. Migrasi masuk meningkatkan pasokan tenaga kerja dari S ke S', berakibat menurunnya upah keseimbangan pasar dari W^* menjadi W^{**}. Penurunan upah mengurangi jumlah penduduk asli yang bersedia bekerja dari L^* menjadi L_n. Dengan upah yang rendah, pengusaha bersedia dan mampu mempekerjakan pekerja L_{i+n}. Sedangkan jumlah pekerja migran sebanyak $L_{i+n} - L_n$. Penetapan upah minimum mengurangi dampak negatif migrasi masuk terhadap upah, namun meningkatkan efek negatif terhadap pengangguran (Zavodny 2014).

Hubungan kebijakan upah minimum dan migrasi tenaga kerja, pertama kali dihipotesiskan oleh Harris-Todaro (1970) dalam konteks negara-negara berkembang, di mana upah minimum diperkirakan menjelaskan tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Aspek kunci yang menjadi kerangka kerja adalah asumsi Todaro (1969) bahwa individu yang berencana untuk migrasi dari daerah perdesaan ke perkotaan terlebih dahulu membuat keputusan berdasarkan perbandingan besarnya penghasilan yang diharapkan di perkotaan dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh di desa. Model Harris-Todaro memprediksi migrasi terus mengalir dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan sampai pada titik di mana upah minimum yang diharapkan di daerah perkotaan setara dengan pendapatan aktual yang dapat dicapai di sektor perdesaan.

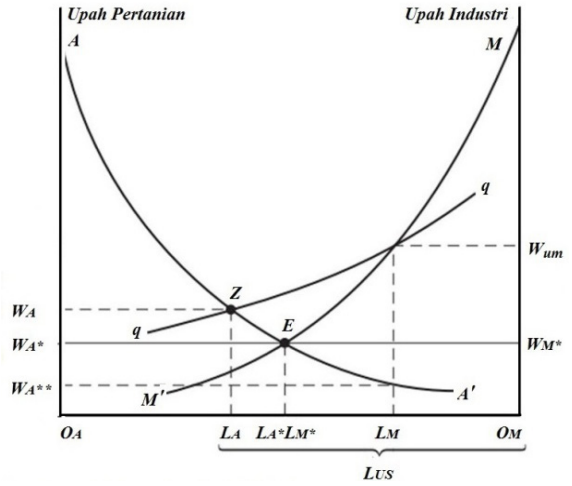

Sumber: Todaro dan Smith 2012

Gambar 2. Model Migrasi Harris-Todaro

Gambar 2 menunjukkan diagram model Harris-Todaro yang menjelaskan proses pencapaian titik keseimbangan pengangguran sehingga arus migrasi menuju kota berhenti (Todaro dan Smith, 2012). Model mengasumsikan perekonomian terdiri dari dua sektor, sektor pertanian di perdesaan dan sektor industri di perkotaan dengan total angkatan kerja yang tersedia sebanyak panjang garis O_AO_M. Kurva melengkung *AA'* menunjukkan tingkat permintaan tenaga kerja sektor pertanian, dan kurva melengkung *MM'* adalah tingkat permintaan tenaga kerja sektor industri.

Jika upah di sektor industri perkotaan ditetapkan sebesar W_{um} dan diasumsikan tidak ada pengangguran, maka tenaga kerja di sektor industri perkotaan sebanyak O_ML_M, sedangkan sisanya sebanyak O_AL_M bekerja di sektor pertanian perdesaan dengan upah $O_AW_A^{**}$. Kesenjangan tingkat upah terjadi antara desa dan kota sebesar W_{um} – W_A^{**}. Jika pekerja di perdesaan bebas melakukan migrasi, maka pekerja akan pergi ke kota untuk memburu upah yang lebih tinggi. Jika peluang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dinyatakan sebagai rasio antara penyerapan tenaga kerja sektor industri L_M , dan total angkatan kerja di perkotaan L_{US}, maka W_A=L_M /L_{US}(W_{um}) adalah nilai peluang mendapatan pekerjaan di perkotaan yang diperlukan untuk menyamakan tingkat pendapatan di perdesaan W_A, dengan tingkat pendapatan yang diharapkan di perkotaan sebesar $L_M/L_{US}(W_{um})$ sehingga calon migran memiliki kesempatan sama untuk memilih lokasi pekerjaan pada titik-titik sepanjang kurva indiferen *qq'*. Titik keseimbangan pengangguran baru sekarang berada pada titik Z, di mana kesenjangan upah riil kota-desa sebesar W_{um}–W_A. Jumlah pekerja yang masih berada di sektor pertanian O_AL_A, dan O_ML_M jumlah pekerja di sektor industri. Sisanya, O_ML_A–O_ML_M yang menganggur atau terlibat dalam kegiatan sektor informal berpenghasilan rendah. Hal ini menjelaskan adanya pengangguran di daerah perkotaan dan rasionalitas ekonomi dari terus berlanjutnya migrasi desa-kota meskipun di perkotaan tingkat pengangguran tinggi.

Studi Terdahulu

Studi upah minimum di Indonesia umumnya berkaitan dengan upah, tenaga kerja, distribusi pendapatan, serta kemiskinan. Hasil penelitian kebanyakan menunjukkan bahwa penerapan upah minimum menurunkan permintaan tenaga kerja dan meningkatkan upah pekerja yang berada dibawah upah minimum, sesuai standar model ekonomi neoklasik. Chun dan Khor (2010) mendapatkan temuan bahwa kebijakan upah minimum berperan dalam mengurangi ketimpangan upah di Indonesia dengan menaikkan tingkat upah individu pekerja di sektor formal yang pada awalnya memiliki upah bulanan di bawah 90 persen dari garis upah minimum bulanan, namun tidak berpengaruh pada individu yang bekerja dengan upah bulanan di atas garis 90 persen dari upah minimum bulanan. Magruder (2013) dengan menggunakan data dari tahun 1990an di Indonesia, menunjukkan bahwa upah minimum dapat menjadi alat koordinasi untuk pengembangan menuju keseimbangan upah tinggi. Dengan menggunakan estimasi *difference in spatial differences estimator* diperoleh hasil adanya kecenderungan kuat kenaikan upah minimum mendukung model dorongan besar (*big push*): meningkatkan pekerjaan formal dan menurunkan pekerjaan informal sebagai respons terhadap kebijakan upah minimum, serta meningkatkan permintaan produk lokal. Namun menurut Bird dan Manning (2008) yang menganalisis keterkaitan upah minimum terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan berkesimpulan bahwa kenaikan upah minimum tidak efektif menjadi instrumen anti-kemiskinan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hasil temuannya menunjukkan bahwa di antara orang miskin, kenaikan upah minimum hanya meningkatkan pendapatan bersih untuk 21 persen rumah tangga, sementara sisanya 79 persen rumah tangga mengalami kerugian.

Studi tentang upah minimum dan migrasi masih jarang ditemukan untuk kasus Indonesia. Giulietti (2015) merangkum bukti empiris dalam konteks Amerika Serikat bahwa penelitian tentang pengaruh upah minimum terhadap migrasi masih langka dan mencapai kesimpulan yang berbeda-beda. Namun terlepas dari temuan yang bervariasi, kebijakan upah minimum telah mempengaruhi arus migrasi serta pilihan lokasi.

Boffy-Ramirez (2013) menunjukkan bahwa pemilihan daerah tujuan migrasi sensitif terhadap perubahan upah minimum, dan dampaknya sangat bergantung pada lamanya seorang migran telah tinggal di Amerika Serikat. Temuan Boffy-Ramirez menunjukkan bahwa menaikkan upah minimum memiliki dampak positif pada upah migran dan tidak berpengaruh nyata terhadap pekerjaan seperti yang didalilkan model neoklasik. Kenaikan upah minimum yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan yang diharapkan, dan menarik lebih banyak pekerja berpendidikan rendah masuk ke negara bagian tersebut. Giulietti (2014) melakukan studi fokus pada

perubahan upah minimum federal Amerika Serikat untuk tahun 1996-1997 dan tahun 2007-2009, dan mendapatkan adanya efek magnet yang substansial, bahwa tingkat migrasi neto lebih tinggi di negara bagian di mana perubahan upah minimum lebih besar. Efek magnet yang terjadi menunjukkan ukuran yang cukup besar, seperti di New York upah yang diharapkan tumbuh 14,6 persen, tingkat migrasi netonya sekitar 0,61 persen, sementara di California upah yang diharapkan tumbuh 18 persen, tingkat migrasi netonya 0,80 persen. Analisis juga menunjukkan dampak keseluruhan kebijakan terhadap migran positif, bahwa perubahan upah minimum meningkatkan upah migran dan tidak menimbulkan konsekuensi pekerjaan.

Cadena (2014) meneliti dampak pasokan tenaga kerja lokal terhadap perubahan upah minimum atas respon dari keputusan pemilihan lokasi dari migran berketerampilan rendah. Candena mendapatkan aliran migran dari negara-negara bagian dengan upah minimum yang lebih tinggi mengurangi dampak negatif dari kebijakan mempekerjakan remaja pribumi, dan migran berketerampilan rendah cenderung tidak memilih negara dengan upah minimum yang lebih tinggi. Martin dan Termos (2015) meneliti respon migrasi terhadap variasi upah minimum negara bagian di Amerika Serikat, dan menemukan bahwa selisih satu dollar upah minimum riil antara dua daerah berkaitan dengan 3,1 persen lebih banyak pekerja berketerampilan rendah migrasi ke lokasi dengan upah minimum lebih rendah. Namun upah minimum tidak berpengaruh pada keputusan migrasi pekerja berketerampilan tinggi. Strobll dan Walsh (2016) dengan menggunakan data dari Thailand menunjukkan bahwa peningkatan migrasi berhubungan dengan peningkatan lebih tinggi secara proporsional pekerja yang bekerja dengan upah minimum relatif terhadap pekerja yang tidak mengikuti aturan upah minimum.

METODE

Penelitian ini menggunakan data runtun-waktu tahun 1995-2015 yang diperoleh dari beberapa sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja. dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Migrasi internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah migrasi risen. Seseorang dikategorikan sebagai migran risen bilamana tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu 5 tahun sebelumnya (BPS 2011).

Provinsi Sulawesi Selatan saat ini secara administratif terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Dalam penelitian ini Sulawesi Selatan dibagi dalam lima kawasan regional, yakni; Makassar, Parepare, Palopo, Bone, dan Bulukumba. Satu kawasan meliputi beberapa kabupaten/kota yang berdekatan dalam satu hamparan. Sehingga dalam kajian terdapat 20 arus migrasi asal-tujuan yang dibangun untuk menggambarkan arus migrasi internal di Sulawesi Selatan.

Untuk menganalisis dampak upah minimum terhadap migrasi internal di Sulawesi Selatan, dibangun model ekonometri sistem persamaan simultan dengan 55 persamaan struktural, terbagi dalam tiga blok, yakni blok migrasi 20 persamaan, blok pasar kerja 25 persamaan, dan blok output 10 persamaan. Estimasi model menggunakan metode *Two Stages Least Squares (2SLS)*. Dalam kajian ini ditampilkan 30 persamaan terkait upah minimum dan migrasi, sebagai berikut:

Persamaan Migrasi

$$M_{PEMA} = A_0+A_1*W2_{PE}+A_2*DTK2_{MA}+A_3*U_{MA}+A_4*PDB_{MA}+A_5*PDB_{PE}+e_1 \quad (1)$$

$$M_{POMA} = B_0+B_1*W2_{PO}+B_2*DTK2_{MA}+B_3*PDB2_{MA}+B_4*PDB_{PO}+B_5*TREND+B6*LM_{POMA}+e_2 \quad (2)$$

$$M_{BEMA} = C_0+C_1*W2_{BE}+C_2*W2_{MA}+C_3*DTK2_{MA}+C_4*PDB2_{BE}+C_5*LM_{BEMA}+e_3 \quad (3)$$

$$M_{BAMA} = D_0+D_1*W2_{MA}+D_2*DTK2_{BA}+D_3*PDB2_{BA}+D_4*U_{MA}+D_5*TREND+e_4 \quad (4)$$

$$M_{MAPE} = E_0+E_1*W_{MA}+E_2*W_{PE}+E_3*DTK_{PE}+E_4*U_{MA}+E_5*U_{PE}+E6*PDB_{PE}+E7*TREND+e_5 \quad (5)$$

$$M_{MAPO} = F_0+F_1*W2_{MA}+F_2*PDB2_{MA}+F_3*U_{MA}+F_4*DTK_{PO}+F_5*PDB_{PO}+F6*LM_{MAPO}+e_6 \quad (6)$$

$$M_{MABE} = G_0+G_1*W2_{MA}+G_2*DTK2_{BE}+G_3*U_{MA}+G_4*PDB2_{BE}+G_5*LM_{MABE}+e_7 \quad (7)$$

$$M_{MABA} = H_0+H_1*W2_{MA}+H_2*DTK2_{MA}+H_3*DTK2_{BA}+H_4*PDB2_{BA}+H_5*LM_{MABA}+e_8 \quad (8)$$

$$M_{PEPO} = I_0+I_1*W2_{PO}+I_2*W2_{PE}+I_3*DTK2_{PE}+I_4*U_{PO}+e_9 \quad (9)$$

$$M_{PEBE} = J_0+J_1*W2_{PE}+J_2*W2_{BE}+J_3*LM_{PEBE}+e_{10} \quad (10)$$

$$M_{PEBA} = K_0+K_1*W2_{PE}+K_2*DTK2_{BA}+K_3*DTK2_{PE}+K_4*PDB2_{BA}+K_5*LM_{PEBA}+e_{11} \quad (11)$$

$$M_{POPE} = L_0+L_1*W2_{PO}+L_2*U_{PO}+L_3*U_{PE}+L_4*LM_{POPE}+e_{12} \quad (12)$$

$$M_{BEPE} = M_0+M_1*W2_{BE}+M_2*W2_{PE}+M_3*U_{PE}+M_4*LM_{BEPE}+e_{13} \quad (13)$$

$$M_{BAPE} = N_0+N_1*W2_{BA}+N_2*DTK2_{BA}+N_3*LM_{BAPE}+e_{14} \quad (14)$$

$$M_{POBE} = O_0+O_1*DTK2_{BE}+O_2*DTK2_{PO}+O_3*U_{BE}+e_{15} \quad (15)$$

$$M_{POBA} = P_0+P_1*W2_{BA}+P_2*DTK2_{PO}+P_3*U_{BA}+e_{16} \quad (16)$$

$$M_{BEPO} = Q_0+Q_1*W2_{PO}+Q_2*W2_{BE}+Q_3*LM_{BEPO}+e_{17} \quad (17)$$

$$M_{BAPO} = R_0+R_1*W2_{PO}+R_2*U_{PO}+R_3*PDB2_{BA}+e_{18} \quad (18)$$

$$M_{BEBA} = S_0+S_1*W2_{BE}+S_2*W2_{BA}+S_3*DTK2_{BA}+S_4*PDB2_{BA}+S_5*TREND+e_{19} \quad (19)$$

$$M_{BABE} = T_0+T_1*W2_{BA}+T_2*DTK2_{BE}+T_3*LM_{BABE}+e_{20} \quad (20)$$

Persamaan Upah Tenaga Kerja:

$$W1_{MA} = AJ_0+AJ_1*DTK1_{MA}+AJ_2*STK_{MA}+AJ_3*UMP_{MA}+AJ_4*INF_{MA}+J_5*GK_{MA}+AJ6*LW1_{MA}+e_{21} \quad (21)$$

$$W2_{MA} = AK_0+AK_1*PDTK2_{MA}+AK_2*STK_{MA}+AK_3*UMP_{MA}+AK_4*INF_{MA}+AK_5*GK_{MA}+AK6*LW2_{MA}+e_{22} \quad (22)$$

$$W1_{PE} = AL_0+AL_1*DTK1_{PE}+AL_2*STK_{PE}+AL_3*UMP_{PE}+AL_4*INF_{PE}+AL_5*GK_{PE}+AL6*LW1_{PE}+e_{23} \quad (23)$$

$$W2_{PE} = AM_0+AM_1*STK_{PE}+AM_2*UMP_{PE}+AM_3*INF_{PE}+AM_4*GK_{PE}+AM_5*LW2_{PE}+e_{24} \quad (24)$$

$$W1_{PO} = AN_0+AN_1*DTK1_{PO}+AN_2*STK_{PO}+AN_3*UMP_{PO}+AN_4*INF_{PO}+AN_5*LW1_{PO}+e_{25} \quad (25)$$

$$W2_{PO} = AO_0+AO_1*DTK2_{PO}+AO_2*LSTK_{PO}+AO_3*(UMP_{PO}-LUMP_{PO})+AO_4*INF_{PO}+AO_5*GK_{PO}+AO6*LW2_{PO}+e_{26} \quad (26)$$

$$W1_{BE} = AP_0+AP_1*DTK1_{BE}+AP_2*LSTK_{BE}+AP_3*UMP_{BE}+AP_4 *INF_{BE}+ AP_5* GK_{BE}+AP6*LW1_{BE}+ e_{27} \quad (27)$$

$$W2_{BE} = AQ_0+AQ_1*STK_{BE}+AQ_2*UMP_{BE}+AQ_3*INF_{BE}+AQ_4* GK_{BE}+ AQ_5*LW2_{BE}+e_{28} \quad (28)$$

$$W1_{BA} = AR_0+AR_1*PDTK1_{BA}+AR_2*LSTK_{BA}+AR_3*UMP_{BA}+AR_4 *INF_{BA}+AR_5*GK_{BA}+ AR6*LW1_{BA}+ e_{29} \quad (29)$$

$$W2_{BA}=AS_0+AS_1*DTK2_{BA}+AS_2*STK_{BA}+AS_3*UMP_{BA}+ AS_4 *INF_{BA}+ AS_5*GK_{BA}+ AS6* LW2_{BA}+e_{30} \quad (30)$$

Keterangan:
M: Migrasi, W1: Upah Pertanian, W2: Upah Non Pertanian,
MA: Makassar, PE: Parepare, PO: Palopo, BE: Bone, BA: Bulukumba,
U: Pengangguran, STK: Angkatan Kerja, DTK1: Tenaga Pertanian, DTK2: Tenaga Non Pertanian,
PDB1: PDRB Pertanian, PDB2: PDRB Non Pertanian, UMP: Upah Minimum, GK: Garis Kemiskinan,
INF: Inflasi, LW1: Lag Upah Pertanian, LW2: Lag Upah Non Pertanian, LM: Lag Migrasi.

Kriteria statistik untuk validasi atas estimasi model ekonometrika digunakan *Root Mean Squares Percent Error (RMSPE)* dan *Theil's Inequality Coefficient (U-Theil)* (Koutsoyanis 1977). Kriteria statistik validasi yang menunjukan estimasi model yang baik adalah yang menghasilkan nilai RMSPE dan U-Theil yang semakin kecil. Koefisien U-Theil (U) berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai U adalah 0, itu berarti bahwa estimasi model sempurna, sedangkan jika U adalah 1, model ini dinilai naif (Pindyck dan Rubinfeld 1991).

Penelitian ini menggunaan simulasi historis (*ex-post*) pada periode 2011-2015 untuk mengevaluasi hasil kebijakan yang dapat berguna sebagai masukan kebijakan masa depan. Simulasi historis dalam kajian ini meliputi simulasi kebijakan peningatkan upah minimum dan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun alternatif simulasi kebijakan yang dilakukan adalah instrumen kebijakan yang mendorong tercapainya kebijakan migrasi internal dan pembangunan sebagai berikut:

S1= Kebijakan peningkatan upah minimum berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan,
S2= Kebijakan peningkatan upah minimum berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat kawasan,
S3= Kombinasi kebijakan peningkatan upah minimum berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingat kawasan dan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 25% di luar kawasan Makassar,
S4= Kombinasi Kebijakan peningkatan upah minimum berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingat kawasan dan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 25% di seluruh kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi dan Migrasi Internal

Pembangunan ekonomi dalam prespektif Todaro (1969) berkaitan erat dengan migrasi, karena kemajuan ekonomi secara keseluruhan di banyak negara maju dapat dikarakteristikan oleh adanya proses realokasi sumberdaya yang berlangsung secara bertahap dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi dari desa ke kota (Todaro dan Smith 2012). Migrasi terjadi karena adanya perbedaan kemajuan atau kesempatan ekonomi antarwilayah, dan migrasi bergerak menuju wilayah yang memberikan kesempatan ekonomi yang lebih besar. Pembangunan ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan bila terjadi peningkatan kapasitas ekonomi dari tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi juga dapat diindikasikan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berkurangnya pengganguran.

Tabel 1 menampilkan perkembangan PDRB, tenaga kerja, pengangguran, dan migrasi neto di Sulawesi Selatan memberi gambaran situasi pembangunan di Sulawesi Selatan, bahwa sektor non pertanian semakin terkonsentrasi di perkotaan kawasan Makassar dan sektor pertanian tetap berkembang di kawasan perdesaan. Kemajuan perkotaan kawasan Makassar ditunjukkan dengan perkembangan positif pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sektor non pertanian, dan perkembangan upah minimum.

Menurut Arman *et.al* (2016) meski pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan menunjukkan asimetrik ekonomi, terkonsentrasi pada kawasan Makassar dominan pada sektor non pertanian, namun mengindikasikan adanya interaksi ekonomi dan konektivitas antara kawasan berbasis pertanian dengan kawasan non pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor basis yang sensitif, kelebihan produksi, memberi pasokan dan banyak digunakan sektor lain di kawasan asal dan kawasan lain. Sedangkan sektor non pertanian menjadi sektor strategis, sensitif terhadap permintaan akhir dan responsif mendorong perekonomian, memiliki konektivitas dengan beragam sektor di kawasan asal dan kawasan lain.

Tabel 1. Distribusi PDRB, Tenaga Kerja, Pengangguran, Migrasi Neto di Sulawesi Selatan Tahun 2015

Kawasan	PDRB		Tenaga Kerja		Pengangguran (%)	NM (org)
	P (%)	NP (%)	P (%)	NP (%)		
Makassar	4.0	41.4	6.7	28.2	51.7	35995
Parepare	5.3	7.2	5.2	6.0	9.8	-6313
Palopo	5.5	12.0	11.2	8.1	17.5	-11057
Bone	5.9	8.2	9.7	7.5	12.6	-12155
Bulukumba	4.5	6.0	9.0	8.4	8.4	-6470
Total	25.2	74.8	41.8	58.2	100.0	

Ket: P=Pertanian, NP=Non Pertanian, NM=Migrasi Neto
Sumber: BPS, diolah

Gambar 3 memperlihatkan dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami tren meningkat, sejalan dengan sektor non pertanian meski tingkat pertumbuhannya masih lebih tinggi dari sektor pertanian. Hal berbeda terjadi pada penciptaan kesempatan kerja, pertumbuhan tenaga kerja pertanian menunjukan tren menurun bahkan negatif, dan pertumbuhannya selalu lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja non pertanian. Perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja sektor pertanian yang terjadi di Sulawesi Selatan tampak sejalan dengan temuan Adriani dan Wildayana (2015) bahwa pembangunan ekonomi sektor pertanian tidak diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja baru di sektor pertanian, dan pembangunan sektor pertanian tampak lebih diarahkan pada kegiatan yang padat modal daripada padat karya.

Bagi sektor pertanian, berkurangnya kesempatan kerja sektor pertanian berimplikasi meningkatnya kelebihan tenaga kerja sektor pertanian dapat menyebabkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan meningkatnya pengangguran. Antisipasi atas kelebihan tenaga kerja sektor pertanian adalah migrasi ke kawasan sektor non pertanian, mengingat karena kesempatan kerja yang lebih banyak di sektor non pertanian dan tren positif upah minimum.

Gambar 3. Pertumbuhan PDRB, tenaga Kerja, Upah Minimum, Pengangguran dan Migrasi Neto Kawasan Makasar di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2015

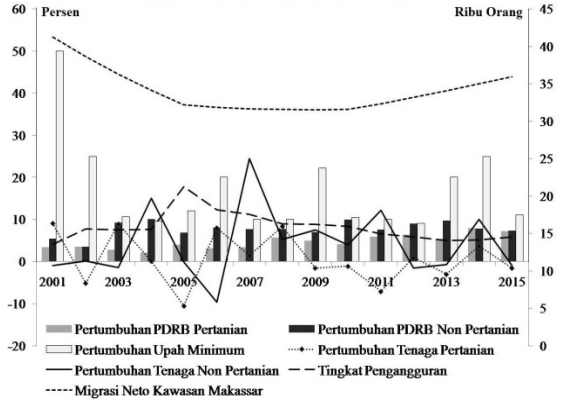

Sumber: BPS, diolah

Peninjauan migrasi secara spasial menjadi penting karena arus distribusi penduduk yang tidak merata. Tabel 1 memperlihatan kesenjangan distribusi migran, migrasi neto kawasan Makassar positif sedangkan pada kawasan lain negatif. Migrasi neto yang positif diantara kawasan lain adalah indikasi besarnya arus migrasi masuk. Perkembangan migrasi neto di kawasan Makassar tampaknya sejalan dengan kemajuan ekonomi kawasan Makassar (Nyompa et.al, 2012), dan menunjukkan kesesuaian dengan model Todaro bahwa tingginya arus migrasi dari kawasan pinggiran perdesaan menuju ke kawasan perkotaan lebih disebabkan tingginya intensitas pembangunan ekonomi di wilayah perkotaan, dan sebagai fenomena ekonomi dengan keputusan rasional migrasi akan terus terjadi dan mengalir menuju daerah kota meski tingkat penganggurannya tinggi.

Arus migrasi yang terus meningkat, menyebabkan surplus tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran, seperti di kawasan Makassar yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak, lebih dari separuh pengangguran di Sulawesi Selatan. Tren meningkatnya arus migrasi masuk ke kawasan Makassar menjadi kurang baik bagi upaya distribusi penduduk dan pembangunan. Perubahan pola mobilitas penduduk di masa datang penting diupayakan guna mencapai distribusi mobilitas penduduk yang seimbang, dan kesuksesannya bergantung pada perkembangan kawasan lain di luar kawasan Makassar.

Hasil Estimasi Model Ekonomi Migrasi

Model dibangun dalam penelitian ini telah mengalami beberapa kali respesifikasi degan menggunakan program SAS dengan prosedur SYSLIN, dan dianggap sudah memenuhi kriteria ekonomi dan statistik. Hasil estimasi parameter telah menunjukkan bahwa seluruh variabel penjelas memiliki tanda parameter estimasi sesuai hipotesis dan teori ekonomi. Berdasarkan kriteria statistik, nilai koefisien determinasi (R^2) secara umum cukup besar, lebih dari 0.9, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel penjelas yang terdapat di dalam model mampu menjelaskan fluktuasi setiap variabel endogen secara baik. Sedangkan nilai uji F, sebagian besar bernilai Prop>F bernilai <.0001, menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel penjelas dapat menjelaskan variabel endogen secara nyata. Tabel 2 menampilkan hasil estimasi parameter beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya migrasi masuk ke kawasan Makassar dari kawasan lain di Sulawesi Selatan, yang merupakan bagian dari 20 persamaan struktural dalam blok migrasi.

Berdasarkan hasil estimasi dalam Tabel 2, migrasi masuk ke kawasan Makassar berhubungan positif dengan kesempatan kerja dan upah non pertanian di kawasan Makassar, sedangkan pengangguran di kawasan Makassar berhubungan negatif terhadap migrasi masuk ke kawasan Makassar. Hal tersebut menunjukkan bahwa motif ekonomi seperti disebut Todaro (1980) relevan sebagai faktor yang mendasari motivasi bagi sebagian penduduk kawasan lain untuk pindah menuju ke kawasan Makassar. Migrasi ke kawasan Makassar mempunyai dua harapan, yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari pada yang diperoleh di kawasan asal. Selain, faktor kesempatan kerja dan upah, migrasi juga dipengaruhi oleh dayatarik kawasan, tercermin dari besarnya nilai PDRB yang menggambarkan besarnya kegiatan ekonomi kawasan. Migrasi masuk ke kawasan Makassar secara umum berhubungan positif dengan besaran PDRB kawasan Makassar.

Tabel 2. Hasil Estimasi Persamaan Migrasi Masuk Kawasan Makassar

Nama Variabel	Parameter	Pr > |t|
Migrasi dari Parepare ke Makassar		
Intersep	15558.94	<.0001
Upah non pertanian Parepare	-0.02117	<.0001
Tenagakerja non pertanian Makassar	0.006768	0.1087
Pengangguran Makassar	-0.00293	0.6412
PDRB Makassar	0.065223	0.8143
PDRB Parepare	0.346315	0.7223
R^2 = 0.93401 F = 39.63 (<.0001)	DW = 1.1047	
Migrasi dari Palopo ke Makassar		
Intersep	2879.518	0.3708
Upah non pertanian Palopo	-0.00049	0.6217
Tenagakerja non pertanian Makassar	0.003838	0.0857
PDRB non pertanian Makassar	0.540835	0.0852
PDRB Palopo	-0.09321	0.7238
Tren waktu	-619.559	0.0609
Lag Migrasi dari Palopo ke Makassar	0.623192	0.0143
R^2 = 0.98825 F = 182.28 (<.0001)	DW = 1.4901	
Migrasi dari Bone ke Makassar		
Intersep	5562.971	0.2659
Upah non pertanian Bone	-0.03549	0.0217
Upah non pertanian Makassar	0.029157	0.1054
Tenagakerja non pertanian Makassar	0.005626	0.3743
PDRB non pertanian Bone	-1.91853	0.1042
Lag Migrasi dari Bone ke Makassar	0.678944	<.0001
R^2 = 0.93697 F = 41.62 (<.0001)	DW = 1.7192	
Migrasi dari Bulukumba ke Makassar		
Intersep	9852.593	0.047
Upah non pertanian Makassar	0.062193	0.0002
Tenagakerja non pertanian Bulukumba	-0.01224	0.6306
PDRB non pertanian Bulukumba	-4.97556	0.093
Pengangguran Makassar	-0.02032	0.1764
Tren waktu	-920.274	0.0901
R^2 = 0.92032 F = 32.34 (<.0001)	DW = 1.4474	

Sumber: Hasil pengolahan

Dampak Kebijakan Upah Minimum

Kemampuan prediksi model yang digunakan dalam penelitian ini telah divalidasi dengan simulasi dasar untuk periode 2011-2015. Hasil validasi diperoleh 93.69 persen persamaan struktural mempunyai nilai RMSPE di bawah 30 persen dan 97.3 persen persamaan struktural mempunyai nilai U-Theil di bawah 0.2. Hal ini menunjukan bahwa model yang dibangun dan telah diestimasi memiliki nilai variabel hasil prediksi cukup dekat dengan nilai aktualnya, kriteria model yang baik terpenuhi. Dengan demikian model dapat digunakan untuk analisis simulasi historis.

Simulasi historis dalam kajian ini meliputi simulasi kebijakan peningkatan upah minimum dan pengeluaran pemerintah daerah. Simulasi kebijakan upah minimum dilakukan dengan menerapkan pengupahan sistem formula dimana perhitungannya adalah $UM_n=UM_t+\{UM_t*(Inflasi_t+DeltaPDB_t)\}$, yang mengisyaratkan kenaikan persentase upah minimum pada tingkat yang sama secara nasional. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan antarwilayah dalam hal pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada penelitian ini, simulasi pertama (S1) adalah peningkatan peningkatan upah minimum dilakukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, dan sebagai pembanding dilakukan simulasi kedua (S2) peningkatan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap kawasan.

Pilihan simulasi kebijakan tunggal S1 didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015, yakni peningatan upah minimum berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sama, hanya saja yang menjadi dasar hitung dalam kajian ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, yang sesungguhnya dasar hitung adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Tabel 3, hasil S1 berdampak terhadap peningkatan upah yang diterima pekerja rata-rata sebesar 2.91 persen. Peningkatan upah tersebut direspon oleh para pengusaha dan menyebabkan permintaan tenaga kerja menurun sebesar 0.82 persen. Hasil simulasi peningkatan upah minimum ini secara umum sejalan dengan model neoklasik, yakni meningkatkan upah rata-rata dan menurunkan permintaan tenaga kerja.

Namun secara spasial peningkatan upah minimum direspon beragam. Pada kawasan Makassar, hasil simulasi S1 berdampak paling besar, meningkatkan upah rata-rata 5.04 persen, dan menurunkan kesempatan kerja sebesar 2.12 persen. Sedangkan dampak terendah terjadi di kawasan Bulukumba, dimana simulasi S1 hanya meningkatkan upah sebesar 0.9 persen, dan menurunkan kesempatan kerja sebanyak -0.03 persen.

Perbedaan peningkatan upah antarkawasan ini menjadikan meningkatnya perbedaan upah, dan mendorong arus migrasi menuju kawasan yang memiliki upah yang tinggi. Migrasi masuk ke kawasan Makassar meningkat 2.68 persen, sedangkan migrasi keluar dari kawasan Makassar menurun -2.18 persen. Sehingga migrasi neto ke kawasan Makassar bernilai positif meningkat sebanyak 2211 orang dari semula 35585 orang meningkat menjadi 37796 orang. Hal serupa juga terjadi di kawasan Palopo, migrasi masuk meningkat 0.25 persen dan migrasi keluar menurun -4.28 persen, namun net migrasi masih bernilai negatif, hanya bekurang 992 orang dari semula sebesar -5533 orang menjadi -4541 orang.

Pada kawasan Bulukumba, meksi respon peningkatan upah dan penciptaan kesempatan kerja adalah yang terendah, namun respon migrasinya tampak nyata. Peningkatan upah minimum S1, meningkatkan migrasi masuk sebesar 1.98 persen dan juga meningkatkan migrasi keluar sebesar 10.45 persen. Sehingga migrasi netonya yang negatif bertambah sebanyak -1746 orang dari -9839 orang turun menjadi -11586 orang.

Untuk kawasan Bone, peningkatan upah minimum S1 menurunkan migrasi masuk sebesar -2.58 persen dan meningkatkan migrasi keluar sebesar 2.86 persen

Sehingga migrasi netonya yang negatif bertambah sebanyak -881 orang dari -14171 orang turun menjadi

-15051 orang. Sementara pada kawasan Parepare, simulasi S1 berdampak menurunkan migrasi masuk sebesar -11.31 persen dan migrasi keluar sebesar -4.43 persen, dan migrasi netonya yang negatif bertambah -567 orang menjadi -6618 orang dari sebelumnya -6043 orang.

Secara umum, dampak peningkatan upah minimum terhadap migrasi internal di Sulawesi Selatan sejalan anggapan Harris-Todaro (1970) dan temuan Boffy-Ramirez (2013) bahwa kenaikan upah minimum yang tinggi akan meningkatkan pendapatan yang diharapan calon migran dan menarik lebih banyak migran.

Tabel 3. Dampak Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Upah, Tenaga kerja, Output dan Migrasi

Variabel/ Kawasan	Nilai Dasar	Perubahan			
		S1	S2	S3	S4
Upah	(Rupiah)		(%)		
Total	443 783	2.91	2.86	3.44	3.44
Makassar	491 595	5.04	4.85	4.85	4.86
Parepare	424 297	4.08	4.03	4.64	4.64
Palopo	584 505	1.42	1.42	2.92	2.92
Bone	376 465	2.93	2.96	2.98	2.98
Bulukumba	342 054	0.96	0.94	1.32	1.32
Tenagakerja	(Orang)		(%)		
Total	3 331 096	-0.82	-0.80	1.60	2.15
Makassar	1 183 477	-2.12	-2.04	-2.04	-0.50
Parepare	378 666	-0.07	-0.06	4.08	4.08
Palopo	618 721	-0.04	-0.04	3.56	3.56
Bone	577 409	-0.28	-0.29	3.42	3.42
Bulukumba	572 823	-0.03	-0.03	3.54	3.54
Output/PDRB	(Miyar)		(%)		
Total	61 942.7	-1.34	-1.30	1.21	2.57
Makassar	28 609.8	-2.78	-2.68	-2.68	0.27
Parepare	7 950.1	-0.01	-0.01	0.68	0.68
Palopo	11 716.4	-0.06	-0.06	6.25	6.25
Bone	7 654.5	-0.38	-0.39	6.75	6.75
Bulukumba	6 011.9	0.00	0.00	3.55	3.55
Migrasi Masuk	(Orang)		(%)		
Makassar	61 457	2.68	2.50	-1.67	0.89
Parepare	12 251	-11.31	-11.09	4.62	2.98
Palopo	16 679	0.25	0.19	5.14	3.40
Bone	8 724	-2.58	-2.65	3.40	3.00
Bulukumba	8 487	1.98	1.80	7.43	3.89
Migrasi Keluar	(Orang)		(%)		
Makassar	25 872	-2.18	-2.06	6.10	2.91
Parepare	18 293	-4.43	-4.37	-3.90	-2.69
Palopo	22 211	-4.28	-4.16	-2.36	1.23
Bone	22 894	2.86	2.40	-3.02	-2.23
Bulukumba	18 326	10.45	10.04	9.15	11.18
Migrasi Neto	(Orang)		(Orang)		
Makassar	35 585	2211	2073	-2604	-205
Parepare	-6 043	-576	-560	1280	857
Palopo	-5 533	992	956	1382	294
Bone	-14 171	-881	-781	989	772
Bulukumba	-9 839	-1746	-1688	-1046	-1718

Keterangan :
S1 = Kebijakan tunggal upah minimum berdasarkan angka provinsi,
S2 = Kebijakan tunggal upah minimum berdasarkan angka kawasan,
S3 = Kebijaan kombinasi upah minimum berdasarkan angka kawasan dan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 25% di luar kawasan Makassar,
S4 = Kebijkan kombinasi upah minimum berdasarkan angka kawasan dan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 25% di seluruh kawasan.

Sumber: Hasil pengolahan

Penurunan permintaan tenaga kerja akibat kebijakan upah minimum, secara umum menjadikan output menurun sebesar -1.34 persen atau sebesar -832 milyar rupiah. Penurunan output tertinggi terjadi pada kawasan Makassar -2.78 persen atau -794.6 milyar rupiah, diikuti berturut-turut kawasan Bone sebesar -0.38 persen atau 29.2 milyar rupiah, kawasan Palopo sebesar -0.06 persen atau -7.4 milyar rupiah.

Hasil simulasi S1 ini tidak menguntungkan jika yang diharapkan adalah untuk mengurangi arus migrasi menuju ke kawasan Makassar dalam upaya menyeimbangkan distribusi penduduk dan pembangunan. Kebijakan S1 secara umum, meningkatkan arus migrasi masuk ke kawasan Makassar, menjadikan kesempatan kerja berkurang dan menyebabkan output menurun. Kebijakan S1 hanya menguntungkan pekerja yang dapat menikmati peningkatan upah, sementara sebagian tenaga kerja lainnya dirugikan karena berkurangnya kesempatan kerja akibat rasionalisasi oleh para pengusaha.

Ada dua kemungkinan yang perlu diperhatikan dengan penerapan kebijakan S1 sehingga secara umum tidak menguntungkan bagi pembangunan dan distribusi penduduk di Sulawesi Selatan, pertama kemungkinan penggunaan persentase kenaikan yang sama akibat kebijakan tunggal penggunaan satu angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang mengakibatkan variasi antarkawasan menjadi semakin besar. Kedua, kesenjangan pembangunan antarkawasan sejatinya telah ada di Sulawesi Selatan, bahwa kawasan Makassar memiliki skala ekonomi yang lebih besar dari kawasan lainnya, sedangkan kebijakan upah minimum cenderung berlaku untuk sektor formal yang ada di kawasan perkotaan. Dengan demikian kawasan Makassar memiliki keuntungan lebih dari kawasan lain, sehingga menambah besarnya dayatarik kawasan bagi penduduk kawasan lain untuk bermigrasi ke kawasan Makassar.

Simulasi kedua (S2) adalah kebijakan meningkatkan upah minimum berdasarkan pada angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tiap kawasan. Simulasi S2 ini dilakukan dengan maksud sebagai pembanding S1 guna mengevaluasi besaran tunggal kenaikan upah minimum dengan menerapkan kebijakan peningkatan upah minimum berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing kawasan dengan harapan peningkatan upah minimum sesuai dengan kemampuan kawasan itu sendiri.

Hasil simulasi S2 menunjukkan hasil yang serupa dengan S1, namun besarannya berbeda, dimana penurunan permintaan tenaga kerja dan output serta arus migrasi besarannya lebih kecil dari S1. Secara umum, peningkatan upah yang diterima pekerja menurun menjadi sebesar 2.68 persen dari sebelumnya S1 sebesar 2.91 persen. Permintaan tenaga kerja menurun menjadi sebesar -0.80 persen, dan penurunan output sebesar -1.3 persen. Hasil S2 menunjukkan respon dan kapasitas ekonomi masing-masing kawasan.

Hasil simulasi kebijakan tunggal S2, yakni peningkatan upah minimum berdasar pada keragaman wilayah juga tidak menguntungkan jika tujuan yang diharapkan adalah untuk mengurangi arus migrasi menuju ke kawasan Makassar dalam upaya menyeimbangkan distribusi penduduk dan pembangunan.

Pada kenyataannya, kebijakan tunggal peningkatan upah minimum tidak dapat dijalankan secara utuh, namun selalu dijalankan bersamaan dengan kebijakan lainnya. Kebijakan peningkatan upah minimum sebagai bagian kebijakan pemerintah yang tetap secara teratur dievaluasi besarannya menjadi tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, kebijakan kombinasi menjadi alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Mempertimbangkan latar belakang masalah kondisi struktur ekonomi yang berbeda antara kawasan Makassar dan kawasan lainnya di Sulawesi Selatan dan kecenderungan arus migrasi internal menuju ke kawasan Makassar, maka perlu dilakukan afirmasi pemihakan terhadap kawasan di luar kawasan Makassar dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan distribusi penduduk dan pembangunan yang lebih baik. Bentuk afirmasi yang memunginkan dilakukan salah satunya adalah peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah pada kawasan selain kawasan Makassar (Santoso *et.al*, 2017).

Simulasi ketiga (S3) adalah kombinasi peningkatan upah minimum berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing kawasan dan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 25 persen untuk kawasan di luar kawasan Makassar, sebagai instrumen afirmatif untuk meningkatkan pemerataan distribusi penduduk dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Sebagai pembanding, dilakukan simulasi keempat (S4) yakni kombinasi peningkatan upah minimum berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing kawasan dan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 25 persen untuk seluruh kawasan.

Hasil simulasi S3 kombinasi kebijakan upah minimum dan pengeluaran pemerintah daerah berdampak positif. Kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan output dan kesempatan kerja, dan mampu meredam dampak negatif dari kebijakan upah minimum.

Kebijakan S3 meningkatkan upah rata-rata sebesar 3.44 persen, peningkatan upah tertinggi di kawasan Makassar 4.85 persen dan terendah kawasan Bulukumba 1.32 persen. Hasil S3 juga berdampak pada kesempatan tenaga kerja secara umum meningkat sebesar 1.6 persen. Namun secara spasial dampak kebijakan S3 beragam, kawasan Makassar masih mengalami penurunan kesempatan kerja sebesar -2.04 persen, sementara pada kawasan lain meningkat antara 3 persen hingga 4 persen. Pola yang sama juga terjadi pada output, secara umum meningkat sebesar 1.21 persen, namun output kawasan Makassar menurun sebesar -2.68 persen, sementara pada kawasan lain mengalami peningkatan. Peningkatan output terbesar pada kawasan Bone 6.75 persen, dan terendah kawasan Parepare 0.68 persen.

Dampak dari kebijakan S3 pada migrasi menunjukkan hasil positif, bilamana yang menjadi tujuan adalah menurunkan laju arus migrasi masuk ke kawasan Makassar. Kebijakan S3 berdampak menurunkan migrasi masuk ke kawasan Makassar sebesar -1.67 persen dan meningkatkan migrasi keluar kawasan Makassar sebesar 6.1 persen. Pada kawasan lain, S3 berdampak meningkatkan migrasi masuk antara 3.4 persen di kawasan Bone hingga 7.43 persen di kawasan Bulukumba, dan menurunkan migrasi keluar pada kawasan Parepare -3.9 persen, kawasan Palopo -2.36 persen, dan kawasan Bone -3.02 persen. Sedangkan di kawasan Bulukumba, kebijakan S3 meningkatkan migrasi keluar sebesar 9.15 persen.

Akhirnya, kebijakan S3 berdampak pada arus utama migrasi pada kawasan Makassar dan kawasan Bulukumba yang keduanya menjadi memiliki migrasi neto yang negatif, sedangkan pada tiga kawasan lain migrasi netonya menjadi positif. Hasil simulasi S3 memberikan sinyal pentingnya penciptaan lapangan kerja baru di kawasan di luar kawasan Makassar dapat mengurangi arus migrasi masuk ke kawasan Makassar dan mengatasi kelebihan tenaga kerja (Adriani dan Wildayana, 2015).

Kebijakan S4 adalah pada dasarnya adalah kebijakan S3 ditambah peningkatan pengeluaran pemerintah daerah untuk kawasan Makassar, sehingga kebijakannya menjadi tanpa afirmasi. Dampak dari S4 terhadap peningkatan upah rata-rata, kesempatan kerja dan output secara umum menunjukkan hasil positif sama seperti simulasi S3, meningkatkan upah rata-rata sebesar 3.44 persen, kesempatan kerja 2.15 persen, dan output 2.57 persen. Namun secara spasial, S3 pengaruhnya pada kesempatan kerja masih negatif di kawasan Makassar, yakni sebesar -0.5 persen.

Dampak kebijakan S4 terhadap migrasi menunjukkan pola yang berbeda dengan S3. Kebijakan S4 meningkatkan migrasi masuk ke kawasan, termasuk kawasan Makassar meski hanya 0.89 persen. Sedangkan pada migrasi keluar, S4 menurunkan migrasi keluar pada kawasan Parepare sebesar -2.69 persen dan kawasan Bone -2.23 persen, namun meningatkan migrasi keluar di tiga kawasan lainnya. Peningkatan migrasi keluar terbesar pada kawasan Bulukumba mencapai 11.18 persen.

Hasil simulasi S4 menunjukkan dominannya kapasitas ekonomi kawasan Makassar dalam penciptaan lapangan kerja dan output dibandingkan kawasan lainnya sehingga menjadi dayatarik dan mendorong migrasi masuk dari kawasan lain. Karenanya perlu dan pentingnya melakukan perubahan kebijakan, strategi dan rencana pembangunan dan distribusi penduduk yang seimbang seperti dengan afirmasi terhadap kawasan pinggiran yang masih tertinggal pembangunannya.

SIMPULAN

Kebijakan peningkatan upah minimum hanya menguntungkan pekerja yang mendapatkan peningkatan pendapatan, namun tidak bagi sebagian tenaga kerja lainnya karena berkurangnya kesempatan kerja. Kebijakkan upah minimum berdampak mengurangi kesempatan kerja dan output, serta meningkatkan arus migrasi masuk menuju ke kawasan Makassar. Kebijakan peningkatan upah minimum tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan dan distribusi penduduk yang seimbang di Sulawesi Selatan jika tanpa disertai kebijakan lain. Untuk mengantisipasinya menjadi perlu dan penting untuk dilakuan kombinasi kebijakan upah minimum dengan afirmasi peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada kawasan di luar kawasan Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, D. dan Wildayana, E. (2015). *Integrasi pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Indonesia*. Sosiohumaniora. 17 (3). 204–212.

Arman., Hadi, S., Achsani, NA. dan Fauzi, A. (2016). *Analisis Sektor Strategis Pulau Sulawesi, Jawa Timur dan Kalimantan Timur*. Sosiohumniora. 18 (2). 91–99.

Badan Pusat Statistik. (2011). Migrasi Internal Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. (2016). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2011- 2015. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Bank Dunia. (2016). Ketimpangan yang Semakin Melebar. Jakarta: Tim Poverty Global Practice Bank Dunia.

Bird, K. and Manning, C. (2008). *Minimum Wages and Poverty in a Developing Country: Simulations from Indonesia's Household Survey.* World Development. 36 (5). 916–933.

Boffy-Ramirez, E. (2013). *Minimum Wages, Earnings, and Migration*. IZA Journal of Migration, ISSN 2193-9039, Springer, Heidelberg. 2. 1-24. http://dx.doi.org/10.1186/2193-9039-2-17

Cadena, B. (2014). *Recent Immigrants as Labor Market Arbitrageurs: Evidence from The Minimum Wage*. Journal of Urban Economics 80 (2014). 1–12.

Giulietti, C. (2014). *Is The Minimum Wage a Pull Factor for Immigrants?* Industrial and Labor Relations Review. 67(3). 649–674.

----------. (2015). *Do Minimum Wages Induce Immigration?*. IZA World of Labor. 2015(151). doi:10.15185/ izawol.151

Harris, JR. and Todaro, MP. (1970). *Migration, Unemployment and Development: A Two-sector Analysis*. The American Economic Review. 60 (1). 126–142.

International Labour Organization. (2015). Labour and social trends in Indonesia 2014-2015. Jakarta: Strengthening competitiveness and productivity through decent work. ILO.

Izzaty dan Sari, R. (2013). *Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. 4(2). 131–145.

Koutsoyanis, A. (1977). Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Second Edition. London: The Macmillan Press Ltd.

Khor, N. and Chun, N. (2010). *Minimum Wages and Changing Wage Inequality in Indonesia*. ADB Economics Working Paper Series No.196.

Lewis, WA. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Manchester School of Economic and Social. 22. 139-191.

Magruder, JR. (2013). *Can Minimum Wages Cause a Big Push? Evidence from Indonesia.* Journal of Development Economics, 100 (2013). 48–62. doi:10.1016/j.jdeveco.2012.07.003

Martin, D. and Termos, A. (2015). *Does a High Minimum Wage Spur Low-skilled Emigration?*. Economics Letters. 137(2015). 200-202.

Nyompa, S., Ali., N, MatJali, MF. dan Rostam, K. (2012). *Aspek Sosial dan Ekonomi di Bandar Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia*. Jurnal Perspektif 4(2). 85-98.

Pratomo, DS., dan Adi Saputra, PM. (2011). *Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945*. Journal of Indonesian Applied Economics. 5(2). 269-285.

Pindyck, RS., and Rubinfeld, DL. (1991). Econometrics Model and Economics Forecast. New York: Third Edition. McGraw-Hill Inc.

Rama, M. (2001). *The Consequences of Doubling The Minimum Wage: The Case of Indonesia*. Industrial and Labor Relations Review. 54 (4). 864-881.

Santoso, AD., Sinaga, BM., Hartoyo, S., and Hutagaol, MP. (2017). *Impact of Regional Government Expenditure and Investment on Internal Migration and Economy in Sulawesi Selatan,*

Indonesia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR). 32(1). 169-180.

Stigler, GJ. (1946). *The Economics of Minimum Wage Legislation*. The American Economic Review. 36(3). 358-365.

Strobl, E., and Walsh, F. (2016). *Monopsony, Minimum Wages and Migration*. Labour Economics. 42. 221-237. http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2016.09.004

Tim Presiden RI. (2016). 2 Tahun Pemerintahan JOKOWI-JK Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris. Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Todaro, MP. (1969). *A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries*. The American Economic Review. 59(1). 138-148.

----------. (1980). Internal Migration in Developing Countries: A Survey, in Population and Economic Change in Developing Countries. Richard A. Easterlin, ed. University of Chicago Press.

Todaro, MP., and Smith, SC. (2012). Economic development 11th ed. Boston: Pearson Education Inc.

Zavodny, M. (2014). *Who Benefits from The Minimum Wage—Natives or Migrants?*. IZA World of Labor. 2014(98). doi: 10.15185/izawol.98

Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20, No. 2, Juli 2018: 188 - 198
ISSN 1411 - 0903 : eISSN: 2443-2660

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Benazir Bona Pratamawati
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
E-mail: evie@unpad.ac.id

ABSTRAK. Konsekuensi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bagi negara Indonesia adalah keniscayaan menghadapi bebasnya arus perdagangan barang, jasa, pasar tenaga kerja dan investasi dengan negara ASEAN lainnya. Persoalan utama adalah kesiapan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan sekaligus peluang besar MEA. Kesiapan ini dapat lebih terarah jika pemerintah daerah melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dengan secara optimal menyosialisasikan MEA. Sebagai fase baru kehidupan perekonomian negara Indonesia di tingkat Kawasan, mengkomunikasikan [MEA secara optimal menjadi tantangan tersendiri karena tentu akan berdampak pada masyarakat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana seharusnya pemerintah KBB mengkomunikasikan MEA. Menggunakan metode studi kasus penelitian ini memperoleh data melalui wawancara mendalam, sudi dokumentasi dan observasi serta focuss Group Discussion. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kab. Bandung Barat belum melaksanakan fungsi komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan MEA kepada masyarakat secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya strategi khusus untuk menyosialisasikan MEA kepada masyarakat Kab. Bandung Barat. Upaya yang dilakukana baru sebatas menyelipkan content MEA di dalam beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat. Media komunikasi yang digunakan masih terbatas pada press release yang disampaikan kepada kelompok kerja wartawan serta dukungan kepada dinas terkait tentang penggunaan fasilitas IT oleh Dinas Komunikasi & Informasi berupa website. Mencermati hal ini, maka dari hasil penelitian ini disarankan agar KBB membentuk tim khusus yang menangani pengelolaan komunikasi lintas dinas, sehingga dapat memiliki strategi dan formulasi spesifik untuk mengkomunikasikan MEA kepada seluruh *stakeholder*

Kata kunci: Strategi, Komunikasi Politik Pemerintah, Sosialisasi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

GOVERNMENT POLITICAL COMMUNICATION OF KABUPATEN BANDUNG BARAT IN SOCIALIZING ASEAN ECONOMICS COMMUNITY (AEC)

ABSTRACT. *The consequences of ASEAN Economic Community (AEC) for Indonesia are the inevitability of facing the free flow of trade in goods, services, labor markets and investment with other ASEAN countries. The main problem that arises is the readiness of government, especially the local government to prepare the community facing the challenges as well as the great opportunities of AEC. This readiness can be more focused if local governments implement their political communication function optimally. As a new phase of Indonesia's economic life at the Region level, communicating the AEC becomes a challenge because it will certainly have an impact on the local community. This study aims to describe how Government of KBB should be communicate in preparing the community facing the AEC. Using case study methode, we obtained data through in-depth interviews, documentation study, observation and Focuss Group Discussion. The results showed that the government of West Bandung regency has not implemented its political communication function in socializing AEC to society optimally. This can be seen from the absence of specific strategies to socialize AEC to the community West Bandung. Efforts that are done just to insert the content of AEC in some activities that involve the community. The communication media used is still limited. Observing this, it is suggested that KBB establish a special team that handles cross-agency communication management, so it can have specific strategies and formulations to communicate the AEC to all stakeholders.*

Key words: *Government Political Communication, Asean Economic Community (AEC) socialization.*

PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari 2016 Indonesia mulai memasuki fase baru tatanan kehidupan bermasyarakat di tingkat kawasan yakni dengan mulai efektifnya ASEAN *Economic Community* (AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Awal Januari 2016 menandai langkah baru kesepuluh negara anggota kawasan ASEAN dalam bidang kerjasama ekonomi kawasan. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam – yang telah mempersiapkan dirinya berusaha memenuhi AEC *Blueprint* 2007 dalam menyongsong era baru kebijakan ekonomi tingkat kawasan tersebut. Konsekuensi berlakunya MEA yang utama adalah Indonesia harus membuka perdagangan barang, jasa, dan pasar tenaga kerja dengan negara ASEAN lainnya. Namun demikian, sejak tahun 2016 hingga pertengahan 2018 ini, perlu ada identifikasi apa saja yang sudah Indonesia lakukan dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi MEA? Bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah, dalam menghadapi MEA? Apakah masyarakat di daerah menyadari tantangan besar yang harus mereka hadapi, misalnya dalam persaingan dunia usaha dan ketenagakerjaan dengan adanya MEA ini? apakah masyarakat menyadari dampak MEA dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sehari-hari? Bagaimana pemerintah daerah melaksanakan fungsi

komunikasi politiknya dalam menyosialisasikan berbagai kebijakannya pada era MEA? dan berbagai pertanyaan lain yang muncul sejalan dengan berlangsungnya MEA ini.

Secara ideal, pemerintah daerah selayaknya ikut menyiapkan diri dalam menghadapi MEA, karena sebagai kebijakan internasional yang lahir dari sebuah bentuk perjanjian internasional, keberadaan MEA akan berdampak bagi kehidupan masyarakat negara anggota perjanjian tersebut. Mereka yang akan terkena dampak tersebut tidak hanya para pelaku usaha besar, namun juga pelaku usaha kecil, termasuk daerah-daerah yang baru lahir sebagai kota atau kabupaten hasil pemekaran seperti Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pemerintah KBB sudah selayaknya mengantisipasi dampak ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan pada kebijakan pemerintah pusat terkait MEA. Selayaknya, segera setelah kebijakan dibuat, maka pemerintah daerah perlu menyosialisasikannya kepada seluruh *stakeholders* termasuk kepada masyarakat luas guna menyiapkan masyarakat dalam menghadapi fase baru kehidupan perekonomian negara Indonesia di tingkat kawasan.

Merujuk pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang perlunya pemda melakukan sosialisasi MEA, maka pemerintah daerah KBB yang merupakan salah satu dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, perlu mengeluarkan kebijakan komunikasi politik tertentu dalam rangka menyosialisasikan pemberlakuan MEA guna menyiapkan seluruh *stakeholders* menghadapi fase baru tatanan perekonomian bangsa saat ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat setiap kebijakan internasional dalam tingkatan regional senantiasa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran MEA di tengah-tengah masyarakat harus diikuti dengan pemahaman dan perubahan cara berpikir dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang pada gilirannya menyentuh seluruh aspek kehidupan.

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah KBB masih belum memiliki kebijakan yang khusus yang dibuat untuk mengkomunikasikan tantangan MEA kepada masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya kegiatan atau strategi komunikasi yan spesifik dalam menyosialisasikan MEA secara optimal, baik oleh Dinas Komunikasi dan Informasi maupun oleh bagian Humas KBB. Padahal, jika mencermati peluang yang dimiliki negara Indonesia sebagai negara dengan pasar terbesar di ASEAN, sesungguhnya setiap daerah memiliki peluang yang juga sama besarnya dengan pasar yang ada. Langkah utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah menyiapkan masyarakat menghadapi fase baru ini. Tidak hanya terfokus pada masyarakat pelaku usaha, melainkan pada masyarakat secara umum.

Hal inilah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, termasuk pemda KBB. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun sebuah strategi komunikasi politik yang tepat dalam rangka menciptakan pemahaman dan perubahan cara berpikir masyarakat umum dalam menghadapi era pasar bebas di tingkat kawasan ASEAN ini. Strategi komunikasi politik yang tepat dapat menyiapkan masyarakat dengan pemahaman dan sikap kompetitif yang senantiasa waspada dalam menghadapi era baru MEA.

Penelitian untuk mengetahui gambaran bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh pemerintah daerah KBB dalam menyiapkan masyarakat menghadapi dampak MEA cukup penting agar dapat memperoleh gambaran bagaimana model strategi komunikasi politik pemerintah daerah KBB dalam menghadapi MEA. Dengan demikian, masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dalam Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)?

Secara rinci pertaanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerintah KBB mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi MEA?
2. Bagaimana pemerintah KBB membuat strategi sosialisasi khusus terkait Masyarakat Ekonomi Asean?
3. Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam mengoptimalkan dukungan bagi dinas-dinas lain terutama dengan menggunakan teknologi informatika?
4. Media komunikasi dan sosialisasi apa yang digunakan oleh pemerintah KBB dalam menyosialisasikan MEA?
5. Bagaimana pemda KBB menyosialisasikan Content MEA di kalangan internal aparat pemda KBB tentang segala sesuatu menyangkut MEA?

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan paradigma riset deskriptif kualitatif dengan metode Studi Kasus. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan konsep dan teori komunikasi politik pada pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.
2. Secara practtical, untuk mengetahui bagaimana pemda KBB menyiapkan perangkat daerahnya dalam merancang strategi komunikasi melaksanakan tantangan MEA.
3. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang dirancang oleh pemda KBB dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya pada era MEA.

Tujuan penelitian ini diharapkan menghasilkan model yang dapat diterapkan secara konkrit oleh pemerintah KBB dalam membuat kebijakan strategis dalam konteks MEA. Adapun konteks penelitian tentang komunikasi politik pemerintah daerah, terutama daerah yang baru berdiri sebagai akibat pemekaran seperti Kabupaten Bandung Barat.

Artikel ini merupakan hasil riset yang didanai oleh HIU skema RFU dan berusaha mengkaji komunikasi

pemerintah KBB tentang MEA dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi politik. Paparan berikut menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi politik pemerintah (*government political communication*).

Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan sebuah bidang kajian ilmu yang menggabungkan dua unsur besar keilmuan, yakni ilmu komunikasi dan ilmu politik. Berbicara mengenai definisi dari masing-masing istilah maka dapat dimulai dari definisi komunikasi. Menurut (Nimmo, 2005, p. 5) bergantung pada titik pandanganya, komunikasi adalah: pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengkoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; "penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran peserta – singkatnya, suatu pengertian, suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal yang dibagi dengan orang lain; atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol. Pada akhirnya, (Nimmo, 2005, p. 6) menyimpulkan komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.

Sementara itu, berkaitan dengan definisi politik, ilmuwan politik Mark Roelofs dalam (Nimmo, 2005, p. 8) menyatakan politik adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan berpolitik adalah berbicara. Roelofs juga menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik.

Pengertian komunikasi politik menurut (McNair, 2007, p. 4) sebagai sebuah kegiatan komunikasi mengenai politik yang disengaja, yang di dalamnya meliputi: (1) semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu; (2) komunikasi yang ditujukan kepada aktor-aktor politik tersebut oleh non-politisi, seperti para pemilih dan kolumnis surat kabar; dan (3) komunikasi tentang para aktor politik tersebut dan aktivitas mereka yang dimuat atau dipublikasikan dalam berita, editorial surat kabar, maupun bentuk diskusi politik lainnya yang menggunakan media. McNair juga berpendapat bahwa komunikasi politik tidak hanya meliputi bahasa verbal ataupun pernyataan tertulis, melainkan juga alat-alat visual lainnya seperti pakaian, dandanan, gaya rambut, desain logo, yakni semua elemen komunikasi yang dapat dikatakan membentuk sebuah "citra" atau identitas politis.

Adapun komunikasi politik pemerintah (*government political communication*), secara spesifik dikemukakan Stephen Hess dalam (Hamilton, 1996) *the government/press connection: press officer and their office*, bahwa fungsi pemerintah di alam demokrasi ini adalah untuk menyebarkan informasi tentang jalannya pemerintahan itu sendiri.

Lebih jauh, (Millett) menyatakan, komunikasi di lembaga pemerintahan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Mempelajari apa yang public inginkan dan aspirasi mereka. (l*earning about public desire and aspiration*)
b) (menasihati public tentang apa yang seharusnya diinginkan. (a*dvising the public about what is should desire*)
c) Memastikan mekanisme kontak yang memuasakan antara public dengan para staf manajemen pemerintah (*ensuring satisfactory contact between public and management officials*)
d) Menginformasikan kepada public tentang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah (*Informing the public about what an agency is doing*).

Dari konsep diatas, dapat dipahami bahwa dasar pemikiran komunikasi pemerintah yang paling mendasar adalah 1) publik punya hak untuk tahu dan 2) adanya kebutuhan pemerintah sendiri untuk mendapatkan input dari publik. Oleh karenanya, secara umum tujuan utama Komunikasi Pemerintahan, yaitu:

1) Memberi tahu warga negara mengenai kebijakan pemerintah, DPRD , dinas-dinas, serta aktivitasnya sehari-hari.
2) Memberi kesempatan kepada warga menyatakan pandangannya mengenai proyek-proyek yang penting / baru sebelum keputusan dijatuhkan oleh pejabat-pejabat yang dipilih.
3) Untuk memberikan penerangan kepada warga negara mengenai cara-cara kerja perangkat pemerintah dan memberikan informasi kepada mereka mengenai hak-hak dan kewajibannya
4) Untuk meningkatkan rasa bangga sebagai warga negara ((Black, 2000, p. 173)

Tugas pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan adalah mengangkat dan memberi tahu hal-hal yang tidak diketahui padahal seharusnya diketahui, ataupun mempopulerkan hal-hal yang tidak populer padahal hal tersebut seharusnya populer. Syarat yang harus dipenuhi dalam mempopulerkan hal-hal yang harus dipopulerkan ini adalah harus ada data atau fakta. Oleh karenanya, tugas utama bidang komunikasi Pemerintahan mengumpulkan fakta yang dibutuhkan melalui riset (misal riset pemetaan pemuka pendapat).

Dari paparan tentang komunikasi politik pemerintah tersebut, peneliti mencoba menggunakan konsep-konsep tersebut sebagai landasan analisis atas bagaimana seharusnya pemerintah KBB menginformasikan dan juga menasihati public terkait peluang dan tantangan MEA.

Strategi Komunikasi

Sally J Patterson dalam bukunya "*Strategic Communication*", (Patterson, 2009) mengemukakan pentingnya penyusunan strategi komunikasi untuk menghadapi suatu perubahan dan tantangan, karena:

- ✓ *It is the key to successful social change.*
- ✓ *Its mission driven, audience focused and action oriented.*
- ✓ *It is the art of expressing ideas combined with the science of transmitting information.*
- ✓ *It is crafting the message so that it motivates target audiences to act in desired manner.*

Pemilihan media komunikasi merupakan strategi komunikasi pemerintah , seperti dikutip oleh Elfe Mingkid dalam tulisannya yang dimuat di jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 November 2015: 188 – 192 bahwa komunikasi merupakan cara yang dipergunakan dalam mengadakan hubungan dengan orang lain baik di dalam maupun di luar organisasi yang dalam kategori komunikasi metode lisan dan tulisan. Secara konseptual, pemahaman akan media komunikasi dapat terlihat dari pemikiran Harold Laswell dalam Mingkid (2012) In which channel yaitu saluran atau media yang digunakan d alam proses komunikasi apakah langsung atau tatap muka dan sebagainya; Siagian (1997 :122) bahwa poses komunikasi setidaknya melibatkan saluran, ialah alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan; Onong (1986;6) unsurunsur komunikasi antara lain adalah media yaitu sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.

MEA jelas merupakan suatu perubahan yang melahirkan tantangan baru, apalagi situasi masyarakata di era digital saat ini dapat dikatakan berada pada situasi serba berfungsi cepat, kacau, dan kompleks. Banyak orang merasa kewalahan dengan campuran media, pemboman pesan, dan intensitas emosi, promosi dan proklamasi dari pengiklan, pakar media, dan minat komersial dan non-profit. Maka dalam situasi ini memformulasikan strategi komunikasi yang tepat bagi pemerintah daerah KBB menjadi sebuah keniscayaan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015 menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan terbuka yang berbasis produksi; dengan pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. Dan mulai tahun 2016 Indonesia menghadapi tantangan simultan baik tantangan eksternal maupun internal, sebagai berikut:

Tantangan eksternal:

1. Tingkat Persaingan Perdagangan Semakin Ketat
   - o Tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam dalam pemasaran barang dan jasa, yang bermula dengan penerapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 yang implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002.
   - o Perdagangan intra kawasan ASEAN meningkat sangat tajam sejak diberlakukannya AFTA. Sementara itu, Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 14,6% terhadap ekspor intra kawasan ASEAN (2011)
2. Neraca Perdagangan Indonesia dengan ASEAN mengalami defisit yang semakin besar.
3. Peningkatan Daya Tarik Investasi
   - o Di sisi investasi langsung masuk (FDI inflow) ke kawasan ASEAN, Indonesia terlihat menjadi salah satu negara ASEAN kedua yang diminati oleh investor, setelah Singapura.
   - o Dari total investasi langsung yang masuk ke kawasan ASEAN pada tahun 2011, 16,3% ditujukan ke Indonesia; dimana proporsi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
   - o Ke depan, perlu ditingkatkan daya tarik investasi di Indonesia agar dapat bertahan sebagai negara tujuan investasi di ASEAN

Tantangan Internal:

a. Stakeholders banyak yang masih belum memahami MEA, baik di kalangan pengusaha, akademisi, aparat pemerintah (pusat & daerah). Bahkan survey pada 399 responden di lima kota besar tahun 2011 yang dilakukan oleh Benny & Kamarulnizam menyatakan hanya 39% stakeholder yang mengetahui tentang MEA, padahal 96% menyatakan mengetahui ASEAN. 66% menyatakan belum pernah mendapat penjelasan dari pemerintah tentang MEA.
b. Belum siapnya daerah menghadapi MEA, hal ini terlihat dari masih banyaknya pemda yang belum mempersiapkan regulasi dan program kerja terkait MEA serta masih belum terkelolanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan MEA.
c. Tingkat Pembangunan yang bervariasi antar daerah
d. Kondisi Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Asian Productivity Organization (APO), dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Indeks Pembangunan Manusia untuk Indonesia berada pada peringkat ke-6 di ASEAN

Dari paparan tentang MEA ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kepentingan yang cukup signifikan untuk mengantisipasi tantangan eksternal dan internal tersebut. Bahkan seperti dinyatakan Razak & Elyta dalam artikel mereka yang dimuat di Jurnal Sosiohumaniora Vol 19 no 3 tahun 2017, bahwa MEA yang terdiri dari negara-negara anggota

Association of South East Asia Nation (ASEAN) dibentuk untuk dijadikan sebagai pasar produksi tunggal di kawasan ASEAN. Selain itu terbentuknya ASEAN agar aktivitas perdagangan menjadi lebih dinamis dan mampu bersaing. Kerjasama ASEAN memperkokoh hubungan antar negara yang didalamnya terdapat inisiatif ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipandang relevan dengan masalah yang ingin diteliti, yakni mengkaji dan menganalisis secara mendalam kesiapan serta strategi komunikasi politik pemda KBB dalam menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA.

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2012, pp. 4-5).

Dalam konteks riset di KBB ini, pendekatan kualitatif diharapkan sejalan dengan tujuan penelitian yakni untuk mengetahui secara cermat dan mendalam aktivitas yang dilakukan oleh pemda KBB dalam menghadapi MEA dan strategi komunikasi politik dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. (Stake, 1995) dalam (Creswell, 2012, p. 20) menyatakan bahwa Studi Kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka peneliti berasumsi metode studi kasus cukup tepat digunakan untuk menyelidiki secara cermat dan mendalam aktivitas yang dilakukan oleh pemda KBB dalam menghadapi MEA dan strategi komunikasi politik dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakannya. Penggunaan metode studi kasus ini dengan landasan bahwasannya pemberlakuan MEA merupakan sebuah kegiatan dengan rentang waktu yang jelas dan merupakan sebuah program yang baru pertama kali diberlakukan dalam skala internasional di tingkat kawasan. Maka penting untuk mengkaji dan menganalisis kegiatan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi era atau fase baru tatanan kehidupan bermasyarakat Indonesia saat ini. Hal ini dapat dimulai dengan mengkaji dan menganalisis aktivitas komunikasi politik yang terjadi di tingkat daerah, dalam hal ini pemda KBB.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Kegiatan wawancara mendalam yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dengan instrumen penelitiannya berupa daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya.

Sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber-sumber lain yang relevan, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan atau program komunikasi politik pemda KBB dalam menghadapi MEA. Studi dokumentasi berupa peraturan daerah, suat perintah, suat keputusan dan bisa juga berupa artikel atau tulisan yang dapat ditemukan di media massa. Selain itu, data sekunder juga didapatkan melalui kegiatan observasi yang dilakukan secara langsung dalam setiap aktivitas atau program komunikasi politik yang dilakukan oleh pemda KBB.

Subjek penelitian ini adalah para pejabat pembuat keputusan di tingkat kabupaten yang memiliki peranan kuat dalam hal pembuatan kebijakan dan pembuatan keputusan sehubungan dengan berlakunya MEA, yang meliputi kepala daerah KBB (Bupati & Wakil Bupati), Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi beserta tim, dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat beserta tim, ketua DPRD serta pihak-pihak yang dianggap memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan aktivitas komunikasi politik pemda KBB sehubungan dengan pemberlakuan MEA.

Sementara itu, objek penelitian ini adalah kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemda KBB dalam menghadapi MEA dan strategi komunikasi politik yang dilakukan guna menyosialisasikan berbagai kebijakan dalam angka mempersiapkan masyarakat menghadapi MEA.

Lazimnya penelitian deskriptif kualitatif, sample penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih orang tertentu sebagai informan yang telah ditentukan terlebih dahulu kriterianya, dimana dalam penelitian ini, kriteria informan mencakup:

1. Kepala Daerah atau wakilnya (Bupati /wakil bupati)
2. Pejabat di lingkungan pemda KBB yang setidaknya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, baik kebijakan strategis maupun kebijakan teknis seperti kepala Dinas, sekretaris atau kepala bagian.

3. Tokoh Masyarakat yang sering terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemda KBB.
4. Tokoh Media

Validasi data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu mengkonfirmasi ulang semua data yang diperoleh kepada para informan sehingga diperoleh derajat data yang jenuh (*saturated data*). Selain itu, triangulasi juga dilakukan kepada para ahli pembuat kebijakan dan ahli komunikasi politik pemerintah, sebagai upaya mengkonfirmasi temuan data yang ada.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi serta Focuss Group Discussion kemudian diolah dengan cara dibuat transkrip dan dikategorisasikan sesuai kebutuhan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep-konsep komunikasi politik pemerintah, sehingga dapat diambil kesimpulan. Proses analisis data dilakukan sejak awal masa pengumpulan data hingga akhir saat pembuatan kesimpulan. Artinya proses analisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data di lapangan berupa observasi dan wawancara mendalam serta Focuss group Discussion (FGD), diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut:

I. Persiapan menghadapi MEA

Merujuk pada dokumen yang kami terima dari pemda KBB saat penelitian lapangan, aparat pemerintah daerah KBB mengklaim bahwa MEA sudah cukup mendapat perhatian. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari adanya kegiatan yang dilakukan pemda KBB bekerjasama dengan Universitas Pasundan yang sejak tahun 2009 melakukan sosialisasi MEA dengan sasaran para pelajar tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) & MA (Madrasah Aliyah) di wilayah KBB.

Salah satu informan dalam penelitian ini Kun Kunrat, tokoh masyarakat KBB yang juga dosen Universitas Pasundan mengemukakan bahwa sosialisasi dikemas dalam bentuk simulasi sidang ASEAN berbahasa Inggris di kota Bandung. Kegiatan ini kemudian berlanjut dengan pemda provinsi Jawa Barat, (termasuk didalamnya pemda KBB) dengan anggaran sebesar 2 Milyar yang dialokasikan dalam APBD pemprov Jabar dan ini melibatkan 67 lembaga Pendidikan menengah atas.

"Jadi tentang MEA ini sebetulnya untuk kalangan pelajar se Jawa Barat sudah dilakukan sosialisasi, hanya mungkin bagi birokrat di KBB informasi MEA belum begitu kuat." (data FGD tanggal 17 November 2017 di Hotel Vio Bandung).

Peneliti mencermati pernyataan Kun Kunrat bahwa sosialsiasi MEA sudah dilakukan kepada segmen pelajar dan mahasiswa, sebetulnya belum dapat dikatakan sebagai sosialisasi yang tepat sasaran. Karena dalam konteks MEA, stakeholders utama adalah para pelaku ekonomi seperti pengusaha, para professional dan tenaga kerja terampil. Seharusnya yang menjadi target utama sosialisasi MEA adalah kelompok ini terlebih dahulu, kelompok pelajar dapat dijadikan sasaran berikutnya. Secara konseptual seperti dikemukakan (Black, 2000), tujuan komunikasi politik pemerintah adalah memberitahukan kepada masyarakat apa yang seharusnya mereka ketahui. Maka dalam konteks MEA, memberitahukan segala sesuatu tentang peluang dan tantangan MEA tentu lebih utama disampaikan kepada stakeholder utama yakni pelaku ekonomi.

Sementara itu, secara umum, baik dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) maupun Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) pemda KBB menyatakan belum memiliki strategi khusus untuk menghadapi MEA. Hal ini dikemukakan oleh kepala Dinas Komunikasi & Informasi Ludi Awaludin,

> "kalau saya baca kondisi di masyarakat secara langsung nampaknya masyarakat belum memahami betul apa itu MEA. Tetapi dinamikanya sudah *nyampe*. Contohnya saya melihat di media-media social, potensi pariwisata KBB sudah sering muncul, terutama Lembang. Padahal pemerintah tidak secara khusus melakukan sosialisasi MEA, tapi potensi pariwisata KBB sudah sampai ke masyarakat di luar negeri."

Dadang Harisudin, sekretaris Disperindag KBB juga menyatakan hal yang sama dengan Kadiskominfo, bahwa sosialisasi khusus tentang MEA belum ada, tetapi pada setiap kegiatan dan program kerja Disperindag kemasyarakat, selalu ditekankan tentang pentingnya peningkatan kualitas karena sedang menghadapi pasar bebas Asean.

> "sosialisasi MEA sudah pernah diselenggarakan oleh provinsi, di gedung Sate tempatnya. Di internal kita dilaksanakan oleh bagian perekonomian. Karena kan dinas yang terkait MEA *teh* banyak, ada dinas perindustrian, pariwisata, ketenagakerjaan, perdagangan, dan koperasi juga masuk karena ada UMKMnya."

Sosialisasi MEA dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota kabupaten diakui Dadang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015.

> "setiap kita melakukan kegiatan ke masyarakat, misalnya pelatihan segala *macem* itu kita sampaikan tentang MEA, jadi kegiatan apapun dikaitkan dengan isu MEA. Misalnya kenapa harus meningkatkan daya saing produk, Karena kita bersaing dengan produk-produk dari luar, dari negara-negara ASEAN"

Dari tiga pernyataan di atas, secara eksplisit para informan memberikan pengakuan tentang belum adanya sosialisasi khusus tentang MEA kepada masyarakat.

Maka jika merujuk pada konsep komunikasi politik pemerintah, masyarakat KBB belum mendapatkan haknya memperoleh informasi tentang MEA karena pemerintah KBB belum melakukan sosialisasi secara sistematis dan terarah.

Walaupun, pernyataan Dadang Harisudin dikuatkan dengan adanya kegiatan "Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat" yang. diselengarakan tanggal 13 Oktober 2015 di Hotel Takashimaya Lembang, tidak berarti rapat koordinasi yang hanya satu kali ini sudah menggugurkan kewajiban pemerintah memberi tahu masyarakat tentang MEA.

Temuan penelitian lainnya terungkap bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah KBB menyampaikan beberapa formulasi dukungan daerah yang diperlukan dalam menghadapi tantangan MEA, tetapi peneliti mencermati, pada prakteknya formulasi tersebut belum diejawantahkan secara konkrit.

Secara rinci hasil rapat tersebut menyatakan bahwa bentuk formulasi dukungan daerah KBB dalam menghadapi tantangan MEA antara lain:

A. Strategi publikasi yang intensif dan menyeluruh, yang meliputi:
   - ➢ Publikasi tentang MEA yang lebih luas, menggunakan media cetak, media elektronik (terutama TV yang dapat menjangkau masyarakat kelas menengah bawah), dan jejaring sosial;
   - ➢ Publikasi yang bersifat edukatif (tidak bersifat negatif), dengan materi yang disesuaikan dengan target group nya;
   - ➢ Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang MEA, bukan untuk menghindari MEA;
   - ➢ Mendirikan pusat layanan informasi MEA daerah.

B. Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah, mencakup:
   - ▪ Membenahi kemudahan perizinan usaha dan menurunkan biaya rente ekonomi (seperti: pungutan liar dan biaya birokrasi lainnya);
   - ▪ Perbaikan infrastruktur (seperti: jalan dan pelabuhan); w
   - ▪ Perbaikan kualitas aparatur daerah;
   - ▪ Harmonisasi regulasi dan penyederhanaan peraturan.

C. Strategi Peningkatan Peran UKM meliputi:
   - • Fasilitasi promosi dagang untuk UKM di kawasan ASEAN
   - • Pelayanan informasi akses pasar dan prosedur ekspor kawasan ASEAN;
   - • Mengadakan pelatihan untuk meningkatan kualitas produk UKM;
   - • Memfasilitasi UKM dalam memperluas akses pendanaan.

D. Strategi Lainnya, berupa:
   - ✓ Mempromosikan destinasi pariwisata dengan lebih aktif dan mandiri;
   - ✓ Bekerja sama dengan akademisi terkait pembekalan tenaga kerja siap kerja;
   - ✓ Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah

Bahkan dalam rapat koordinasi tersebut, pemda KBB menyimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan MEA di tahun 2016, harus dilakukan beberapa hal penting, seperti:

1) Meningkatkan Daya Saing (Competitive Advantage);
2) Membenahi Infrastruktur;
3) Mendorong tumbuh kembangnya Ekonomi Kreatif;
4) Regulasi harus mendorong pertumbuhan dan penguatan ekspor;
5) Mengurangi/ menghapus Biaya ekonomi tinggi;
6) Meningkatkan pertumbuhan diversifikasi ekspor industri bukan seperti sekarang didominasi ekspor bahan baku;
7) Membuat prioritas dalam mencintai produk dalam negeri. (sumber: Materi presentasi dalam bentuk Power point oleh Asisten bidang Perekonomian & Pembangunan KBB pada rapat koordinasi Persiapan MEA tanggal 13 Oktober 2015.)

Selain tekad pemda KBB yang disimpulkan dalam rapat koordinasi tersebut, Dadang Harisudin menambahkan bahwa untuk meningkatan kualitas produk salah satunya dengan membuat inovasi-inovasi produk yang khas menjadi identitas KBB, seperti batik Oncom. kendati belum sampai di ekspor, tetapi pemasaran local sudah mulai tinggi.

> "semua produk dan inovasi selalu kami himbau agar didaftarkan HKI dan SNI nya, karena yang memiliki nilai jual tinggi harus produk yang sudah berSNI."

Kebijakan pemerintah pusat dalam standar produk yang menwajibkan melalui sertifikasi berupa SNI dan bahkan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya ini hanya sanggupdilakukan oleh pemda KBB berupa himbauan, mengingat para produsen yang ada di KBB kebanyakan masih dalam kategori skala industry kecil bahkan industri rumahan.

Hal ini dibenarkan oleh Asep, salah seorang staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB dalam wawancara denan peneliti,

> "iya kalau soal SNI dan HKI masih banyak yang belum sanggup, karena keterbatasan kemampuan biaya dari para produser. Sementara kami dari *Indag kan* sifatnya hanya bisa memfasilitasi, belum bisa menanggung biaya." (Wawancara dengan informan Asep, tanggal 8 November 2017 di kantor Disperindag KBB).

Walaupun menghadapi berbagai keterbatasan, dikemukakan Dadang Harisudin bahwa di luar negara ASEAN, KBB ternyata malah sudah menyasar pasar Timur Tengah, dengan mengeskpor cendera mata berupa miniature binatang-binatang ke negara Arab. Sedangkan

industri Agro mencakup makanan dan minuman berupa obat herbal berbahan dasar Jahe. Sementara pasar local meliputi: kerupuk Gurilem, Ikan Pepetek, Susu Murni dan sayur mayur seperti wortel.

Dari wawancara dengan sekretaris Disperindag ini nampak bahwa sosialisasi MEA belum dilakukan dengan menggunakan strategi khusus, mereka hanya focus pada tugas pokok fungsi (tupoksi) yakni memfasilitasi dinas pertanian dan dinas koperasi & UMKM untuk memasarkan produk-produk yang ada di masyarakat kepada para stakeholder.

> "jadi kan *gini*, secara umum nanti ada MEA itu apa saja *kan* produknya harus jelas, *nah* yang melaksanakan instansi terkait misalnya produk pertanian kalua diolah jadi industry, misalnya kentang jadi keripik. *Nah* Disperindag memfasilitasi, misalnya dengan cara ikut pameran di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional seperti inna craft. Dengan ikut pameran kita juga jadi punya pengetahuan kualitas dan ragam jenis barang dari daerah lain dan negara lain. Terutama barang dari China, kita amati kenapa bias bagus tapi murah" (Wawancara dengan sekretaris Disperindag, tanggal 17 Juni 2017 di kantor Diseprindag KBB).

Dari paparan data hasil wawancara mendalam dengan para informan tentang persiapan KBB menghadapi MEA, peneliti mencermati bahwa secara tekstual, pemerintah KBB sudah membuat formulasi strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi MEA, namun secara praktikal belum dilaksanakan dengan optimal.

Misalnya, ada strategi komunikasi dengan cara membuat publikasi tentang MEA menggunakan media cetak, media elektronik (terutama TV yang dapat menjangkau masyarakat kelas menengah bawah), dan jejaring sosial; tetapi pada prakteknya belum ada satupun yang dilaksanakan.

Begitu juga dengan rencana membuat publikasi yang bersifat edukatif (tidak bersifat negatif), dengan materi yang disesuaikan dengan target group, baru sebatas konsep di atas kertas, belum ada satupun dinas atau instansi yang melaksanakannya. Seperti halnya rencana mendirikan pusat layanan informasi MEA daerah, suatu rencana yang sangat ideal sebetulnya, saying belum direalisasikan.

II. Sosialisasi MEA

Data lapangan juga menunjukkan pemerintah KBB belum banyak melakukan sosialisasi secara khusus tentang MEA, padahal secara khusus tugas menyosialisasikan MEA baik kepada masyarakat umum maupun kepada seluruh karyawan berada di wilayah kerja Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan.

Dikemukakan informan Asep dari Disperindag bahwa dinasnya berusaha menyosialisaskan industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di KBB agar dapat mulai dikenal oleh negara anggota komunitas Asean yang kebetulan berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di KBB, salah satunya dengan mewajibkan ritel-ritel di trempat-tempat wisata untuk menjual dan memajang produk-produk IKM.

Terkait dengan media sosialisasi, Disperindag sendiri seperti dinyatakan Harisudin, hanya mengandalkan media massa sebagai media komunikasi khusus untuk menyosialisasikan apapun termasuk MEA.

> "kami tidak banyak menggunakan medsos, ada website tapi ikut ke website KBB, bukan khusus Disperindag. Begitu juga twiter atau facebook, kita *ga pake*. Ada *sih* grup whatsap, tapi itu dibuat oleh grup komunitas, misalnya grup para pengusaha kuliner, Disperindag ikut di grup tersebut dalam kapasitas pembina, ada juga grup wahtsap Forum UMKM."

Di tengah masivnya penggunaan social media di kalangan masyarakat dan swasta, nampaknya pemerintah KBB belum tertarik menggunakan media social sebagai media komunikasi khususnya sosilisasi MEA, seperti dinyatakan Harisudin,

> "kami cukup menggunakan wartawan pokja saja, kasih press release ke mereka, selesai *deh*"

Berbeda dengan Dispreindag, Diskominfo nampak lebih variatif menggunakan berbagai media sebagai saluran informasi, seperti dikemukakan kepala Dinas Kominfo Ludi Awaludin,

> "kita sudah ada *e-govt*, jadi itu yang kita maksimalkan untuk menghadapi MEA. Aplikasi informatika di pemerintahan ini mempunyai tiga fungsi, pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintahan, pemerintah dengan kalangan bisnis dan pemerintah dengan warga negara atau masyarakat. Termasuk supporting ke dinas-dinas lain."

Support untuk dinas lain tersebut dijelaskan Awaludin misalnya bagaimana mengembangkan bisnis online untuk 1000 UMKM di KBB, dimana para pengusaha UMKM ini dilatih untuk bisa akses ke dunia maya.

> "dengan masyarakat kita melakukan upaya edukasi, seperti pemanfaatan digital, sosmed, semoga mereka bias memilah mana yang positif mana yang negative. Ada juga lokakarya dan sosialisasi ke sekolah-sekolah tapi tidak khusus dengan content MEA."

Awaludin juga menyatakan bahwa Kominfo lebih banyak mendukung dinas-dinas lain, melalui tiga bidang yakni yang pertama infrastruktur dan teknologi, kedua, aplikasi dan management data serta ketiga *e-govt*. Salah satu andalan Kominfo adalah website KBB yang dikelola langsung oleh dinas Kominfo.

> "website di bawah IKP (Informasi Komunikasi & Publikasi), anak-anak IKP yang membuat konten nya. Kita harapkan website kita kaya dengan

informasi, untuk misi terdekatnya. Iconnya adalah *smart city*. "

Dari paparan data hasil observasi dan wawancara mendalam dan FGD dengan para narasumber, peneliti mencermati, MEA belum menjadi isu utama dalam program kerja pemerintah KBB. Kendati mereka menyatakan tahu tentang MEA, tetapi nampak sebetulnya belum paham secara rinci bagaimana MEA bekerja. Hal ini terlihat dari masih gamangnya para aparat menjawab tentang bagaimana upaya mereka menyosialisasikan MEA. Jawaban yang diberikan lebih bersifat teknis pekerjaan yang biasa mereka lakukan yang sama sekali tidak dalam konteks MEA dan tidak berupa jawaban strategis, walaupun yang menjawab adalah seorang kepala Dinas.

Dari hasil FGD, narasumber utama Moh. Rizky Safari Kasubdit Kerjasama Asean bidang internal dan eksternal Kementerian Luar Negeri RI menilai bahwa nampaknya pemerintah KBB sudah cukup tanggap terhadap tantangan dan peluang MEA ini, buktinya sudah pernah dilakukan rapat koordinasi tentang hal ini.

"kalau saya lihat, pemda KBB sudah terlihat ada upaya mempersiapkan diri menghadapi MEA sejak tahun 2015. Dimulai dengan rakord2 mungkin ya? Lalu pernah juga ikut sosialisasi Asean yang diselenggarakan oleh Pemprov Jabar. Tetapi perlu dicermati lagi apakah sudah ada regulasi khusus yang mengatur tentang strategi menghadapi MEA. Kalua memang sudah ada, berarti langkah selanjutnya pemda KBB harus mulai berani membuka akses pasar ke negara-negara Asean untuk mulai mengaktifkan kegiatan perdagangan luar negerinya." (M. Rizky Safari, Kasubdit Bidang Kerjasama Asean Kemenlu RI dalam FGD tanggal 17 November 2017).

Lebih jauh menurut M. Rizky Safari, pemda KBB harus sanggup memanfaatkan peluang negosiasi dengan negara lain di Asean. Oleh karenanya diperlukan adanya *Policy Design* yang dibuat oleh pemda KBB khusus untuk menghadapi peluang dan tantangan MEA.

"Kalau sampai pemda KBB menyertakan ASEAN dalam Visi Misinya, maka itu sesuatu yang hebat."

Diungkapkan Rizky, Kemenlu memiliki tupoksi untuk sosialisasi komunitas Asean ke sekolah-sekolah, kampus, pengusaha, dan semua stakeholders. tetapi karena terkendala anggaran, sosialisasi tidak bias massif. Itu sebabnya pemerintah daerah seharusnya aktif melakukan sosialisasi MEA secara mandiri.

"karena masyarakat harusnya dapat memanfaatkan peluang MEA, terutama investasi, sehingga dengan AFTA yg zero tarif, seharusnya produk2 kita bias membanjiri negara-negara lain. Walaupun saya akui bahwa sejak 1990-2004, masyarakat kita memang tidak disiapkan untuk AFTA, jadi bukan tidak siap, tapi memang tidak disiapkan. "(M. Rizky Safari, Kasubdit Bidang Kerjasama Asean Kemenlu RI dalam wawancara triangulasi tanggal 12 Oktober 2017).

Menurut Rizki, fungsi strategis Kemenlu sendiri adalah membuka kunci pintu-pintu dengan negara lain agar dapat dimanfaatkan oleh daerah. Bahkan pada era presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, bidang ekonomi *(Trade), Tourism & Investment* sudah mulai di genjot.

"Jadi Kemenlu hapal betul dengan kondisi di setiap negara, sehingga dapat dimanfaatkan oleh daerah. Masalahnya pemda juga jarang ada yang mau berkomunikasi dengan kami, sementara keterbatasan anggaran di kementerian kami juga menjadi kendala untuk kami bias mendatangi daerah yang jumlahnya hamper 500 unit di seluruh Indonesia. Kemampuan kami paling dalam satu tahun hanya 12 kali melakukan sosialisasi di daerah."

Terkait MEA, ada beberapa issue krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain tentang standarisasi.

"Standar barang-barang untuk ekspor sudah ada di AFTA dalam bentuk kesepakatan di tingkat Menteri, makanya secara teknis kewenangan menentukan standar ada di kementerian-kementerian. Di sisi lain Pemda harusnya paham dengan kondisi daerahnya masing-masing, kemudian dioptimalkan oleh biro kerjasama luar negeri, *nah* KBB punya *nggak* biro ini?"

Dijelaskan Rizky, potensi Indonesia dibandingkan negara lain sebetulnya jauh lebih bagus negara Indonesia, oleh karenanya peluang MEA ini justru harusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh negara Indonesia.

"contohnya Singapore, mereka punya apa? Bisa ambil manfaat apa dari MEA? *Ga* ada. Justru kita yg sebetulnya punya banyak peluang. Deplu siap buatkan *template policy design* untuk pemda-pemda. Salah satu peran pemda itu mendorong komersialisasi hasil riset dan KBB harus tahu persis produk unggulannya apa? Seperti di Thailand, 1 kecamatan punya 1 produk unggulan".

Sejalan dengan Rizky, ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) KBB, Ade Khaerudin juga menyatakan bahwa yang paling dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi di KBB adalah adanya keberpihakan dan fasilitasi pemerintah KBB kepada para pengusaha terutama pengusaha lokal KBB.

"keberpihakan itu misalnya regulasi-regulasi yang memudahkan investasi di KBB, atau membuka akses pasar ke negara-negara luar." (Ade Khaerudin, ketua Kadin KBB, dalam wawancara tanggal 3 November 2017).

Menurut Ade, dirinya mencermati bahwa secara realistis KBB nampaknya belum siap hadapi MEA, padahal sebetulnya potensi KBB itu cukup banyak, tapi pemdanya belum bisa *explore*. Oleh karenanya, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM masy KBB menghadapi MEA, Kadin sendiri mencoba turut berkontribusi dengan melakukan pembinaan kepada 120 siswa-siswa SMK di KBB.

> "Selain itu pekerja yang lulusan SMP diberi rekomendasi agar diijinkan oleh perusahaannya untuk ikut sekolah sabtu minggu."

Kadin KBB kendati kepengurusannya baru dua periode, Nampak cukup antusias menegaskan perannya dalam kiprah ekonomi KBB. Salah satunya dapat dilihat dari aktivitas Kadin KBB yang bekerjasama dengan Universitas Komputer (Unikom) ikut memberikan materi kewirausahaan pada para mahasiswa, agar punya wawasan secara praktikal tentang wirausaha.

> "Itu kami lakukan karena kami paham betul meningkatkan kualitas SDM harus melalui Pendidikan, sementara KBB belum punya universitas, jadi wajar kaluau SDM nya masih lemah."

Selain membantu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, menurut Ade, langkah strategis juga dilakukan dengan cara Kadin memfasilitasi konsultasi perusahaan tentang kegiatan CSR agar lebih efektif.

> "Dan itu dilakukan secara mandiri oleh Kadin KBB tanpa ada bantuan dana dari pemda. Padahal layaknya Kadin itu menjadi mitra Pemda, apalagi sebetulnya Kadin yang lebih tahu kondisi di lapangan dibandingan dengan pemda. Apa yg dibutuhkan masyarakat dan pengusaha itu datanya ada di Kadin bukan di pemda. Tetapi memang Kadin merasa malas kerja sama dengan pemda karena birokrasi yang berbelit dan adanya perbedaan paradigma. Paradigm Kadin sebagai pengusaha sementara pemda sebagai birokrat, ya susah untuk bias nyambung."

Menurut Ade, seharusnya Kadin tahu apa yang direncanakan pemda KBB dalam konteks MEA, karena Kadin dapat menjadi jembatan antara investor dengan pemda. Tetapi nampaknya sejauh ini pemda belum melakukan sosialisasi tentang MEA baik ke pengusaha yg ada dalam wadah Kadin ataupun ke *stakeholder* yang lain.

> "Jadi Kadin nya saja yg aktif sendiri mencari info tentang MEA. Padahal harusnya pemda dan Kadin dapat berkomunikasi dengan baik. Misalnya untuk menggarap potensi wisata industry dan pariwisata, harus sejalan dulu antara pengusaha dengan pemerintah. Tapi Tahun ini di KBB sedang panas karena menjelang pilkada, jadi Kadin agak menjaga jarak dulu. Ini berbeda karena Kadin yang lama lebih banyak meminta proyek ke pemda, dan imbalannya memberikan dukungan politik pada penguasa. Sekarang ini kami tidak mau begitu, Kadin harus professional dan mandiri, dan tidak terlobat dengan praktek politik kotor. Karena Kadin adalah organisasi yg dibentuk oleh UU, dimana semua organisasi bisnis harus menjadi anggota ikadin. Artinya semua pelaku ekonomi wajib menjadi anggota Kadin. Saat ini anggota Kadin KBB baru ada 75 dari berbagai sector usaha, mulai manufaktur, tekstil, UMKM, dll. Sehingga, menghadapi situasi seperti ini, kami berpikir dengan terobosan pemikiran, jika ada pengusaha anggota Kadin menjadi kepala daerah, maka nampaknya KBB bisa lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, karena kan orang Kadin *mah* apal medan." (Ade Khaerudin, ketua Kadin KBB, dalam wawancara tanggal 3 November 2017).

Pada intinya, Kadin KBB berpandangan bahwa Pemda itu harus punya peta tentang para pengusaha di KBB, pengusaha local mana dari luar KBB. Saat ini yang banyak beraktivitas bisnis di KBB justru bukan pengusaha asli KBB, tetapi kebanyakan investor dan pengusaha dari Jakarta. Bukan berarti menolak yang dari luar, tetapi pemda KBB harus lebih memprioritaskan yang dari dalam KBB.

SIMPULAN

Dari data yang diperoleh di lapangan serta analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah KBB belum mempunyai strategi sosialisasi khusus terkait Masyarakat Ekonomi Asean. Upaya pengkomunikasian MEA baru dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang sedang berusaha melengkapi perangkat organisasinya agar dapat mengoptimalkan dukungan bagi dinas-dinas lain terutama dengan menggunakan teknologi informatika. Adapun media komunikasi dan sosialisasi yang digunakan saat ini adalah website dan kelompok kerja wartawan. Sejauh ini, c*ontent* MEA belum disampaikan secara eksplisit dan rinci dalam kegiatan pelatihan-pelatihan bagi pelaku ekonomi di KBB, tetapi hanya diselipkan bahwa kita harus siap menghadapi MEA tanpa merinci bagaimana caranya dan apa itu MEA serta dampaknya dalam kehidupan perekonomian masyarakat KBB, oleh karenanya perlu ada penguatan informasi di kalangan internal apparat pemda KBB tentang segala sesuatu menyangkut MEA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh dana Hibah Internal Unpad (HIU) dengan skema Riset Fundamental Unpad (RFU) tahun 2017. Untuk itu kami menyampaikan terimakasih kepada rektor Unpad melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat & Inovasi (DRPMI) yang telah memberi kesempatan

pada kami untuk membuat penelitian ini. Selain itu kami juga menghaturkan terima kasih kepada redaksi jurnal Sosiohumaniora yang telah berkenan memuat hasil riset kami ini.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber riset dari Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Komunikasi & Informasi, dan Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Juga kepada narasumber triangulasi yaitu Kasubdit Kerjasama Regional & Internasional Kementreian Luar Negeri RI Mohamad Rizky Safari, Ketua Kamar Dagang Indonesia KBB Ade Khaerdudin dan Tokoh Masyarakat KBB Drs. Kun Kunrat M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

Razak, A. dan Elyta. (2017) Faktor Penghambat Kerajinan Anyaman Tangan Di Perbatasan Sajingan Besar Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, Sosiohumaniora, Vol. 19(3): 213 -217

Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage.

Creswell, J.W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Perdagangan RI. (2015). *Buku Menuju ASEAN Economic Community*. Jakarta.

Masyarakat ASEAN, edisi 15/ April 2017, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

McNair, B. (2007). *An Introduction to Political Communication.* London: Routledge.

Mingkid, E. (2015). Penggunaan Media Komunikasi Promosi Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Manado, Sosiohumaniora, Vol. 18 (3): 188-192

Nimmo, D. (2005). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Remaja Rosda Karya

PANDUAN UNTUK PENULIS

JUDUL ARTIKEL (mak. 14 kata)
(Huruf Kapital, Times New Roman, 12 *point, Bold, centered*)
(*kosong, spasi tunggal*)
Penulis Pertama[1], Kedua[2], dan Ketiga[3] (10 point)
[1] Alamat instansi (Instansi, Fakultas, Universitas, alamat lengkap) (10 point)
(kosong, spasi tunggal)
(E-mail:peneliti@alamat.com (10 point, italic)
(*dua ketuk spasi tunggal*)

ABSTRAK
(bold, 10 Point).
Abstrak dalam bahasa Indonesia, tidak lebih dari 250 kata.
Abstrak mencakup permasalahan, metode, dan temuan serta simpulan. Abstrak dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata.
(kosong,spasi tunggal)
Kata kunci:
***Key words*:** Tuliskan maksimal 5 kata-kata kunci (key words).
(tiga ketuk spasi tunggal)

PENDAHULUAN (tanpa subjudul)
(10 point kapital)
(kosong, spasi tunggal)

METODE
(10 point kapital)
(kosong, spasi tunggal)

HASIL DAN PEMBAHASAN
(10 point kapital)
(kosong, spasi tunggal)
(dalam hasil sertakan data temuannya baik dalam bentuk tabel ataupun hasil wawancara, sedangkan dalam pembahasan harus disertai kutipan referensi yang relevan)

SIMPULAN
(10 point kapital)
(kosong, spasi tunggal)

UCAPAN TERIMA KASIH
(10 point kapital)
(kosong, spasi tunggal)
Penulis dapat menuliskan ucapan terima kasih kepada individu, lembaga pemberi dana penelitian, dsb. Ucapan terima kasih ditulis sebelum Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA
(10 point kapital)
(kosong, spasi tunggal)

Kepustakaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya kepustakaan yang dikutip atau yang dijadikan rujukan dan ditulis dalam teks. Penulisan rujukan dalam badan karangan dilakukan sebagai berikut:
- Apabila terdiri dari satu orang penulis, ditulis sebagai berikut: McNeely (1995:…) atau (McNeely, 1995:…)
- Apabila terdiri dari dua orang penulis, ditulis sebagai berikut: McNeely & McCurdy (1995) atau (McNeely & McCurdy, 1995)
- Apabila terdiri dari tiga orang penulis atau lebih, ditulis sebagai berikut: McNeely *et al.* (1995) atau (McNeely *et al*., 1995). Kata/ istilah *et al*., hanya digunakan untuk referensi berbahasa asing. Untuk referensi berbahasa Indonesia digunakan istilah dkk., misalnya Suparman, dkk. (1996).

Sitasi/Kutipan
- *Running note* atau *footnote* Penulisan dalam Daftar Pustaka dilakukan sebagai berikut:

Sumber buku:
- Strahler, A. N. 1957. Physical geography. New York: Wiley.
- Farrington,J.,Turton,C.,&. ames,A.J. (Eds.). 1999. Participatory watershed development: Challenges for the twenty-first century. New Delhi: Oxford University Press.
- Shaxson, T. F. 2000. People's involvement in watershed management: Lessons from working among resource-poor farmers. In R. Lal (Ed.), Integrated watershed management in the global ecosystem (pp. 345–363). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Van Noordwijk, M., van Roode, M., McCallie, E. L., & Lusiana, B. (1998). Erosion and sedimentation as multiscale, fractal processes: Implications for models, experiments and the real world. In F. W. T. Penning de Vries, F. Agus, & J. Kerr (Eds.), Soil erosion at multiple scales (pp. 223–253). New York: CAB International.

Sumber jurnal:

diharuskan mensitir atau mengutip dari sumber jurnal Sosiohumaniora

Tomich, T. P., Fagi, A. M., de Foresta, H., Michon, G., Murdiyarso, D., Stolle, F., & van Noordwijk, M. 1998. Indonesia's fires: Smoke as a problem, smoke as a symptom. Agroforestry Today, 10(1), 4–7.

Sumber prosiding seminar:

Fay, C., de Foresta, H., & Sirait, M. 1998. Progress towards recognizing the rights and management potentials of local communities in Indonesian statedefined forest areas. Paper presented at the workshop on participatory natural resource management in developing countries, Mansfield College, Oxford, April 6–7.

Sumber internet:

Knox McCulloch, A., Meinzen-Dick, R., & Hazell, P. 1998. Property rights, collective action and technologies for natural resource management: A conceptual framework. CAPRi Working Paper No.1. Washington DC, USA:International Food Policy Research Institute. http://www.capri.cgiar.org/pdf/capriwp01.pdf.

Sumber disertasi/tesis:

Zandbergen, P. 1998. Urban watershed assessment: Linking watershed health indicator to management. Ph.D. Thesis. Resource Management and Envi-ronmental Studies, University of British Columbia, Vancouver.

Satuan, singkatan, nomenklatur, dan lambang

Satuan dan singkatan menggunakan sistem SI *(Systeme Internationale)* Nomenklatur nama ilmiah tumbuhan dan hewan ditulis lengkap dengan nama authornya. Nama ilmiah sesuai dengan aturan nomenklatur harus digunakan pada penulisan yang pertama kali, selanjutnya dapat disingkat sesuai aturan yang berlaku dan atau menggunakan nama daerah. Penggunaan lambang ditulis sebagai berikut: contoh, lambang alpha ditulis dengan bukan dengan huruf a.

FORMAT NASKAH

Artikel yang dimuat dalam jurnal ini dapat berupa kajian konseptual dan atau hasil-hasil penelitian pada masing-masing disiplin ilmu atau interdisiplin. Secara umum, sistematika artikel terdiri atas pendahuluan/introduksi yang menguraikan latar belakang dan perma-salahan yang dikaji yang ditunjang oleh referensi yang relevan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan/rekomendasi. Pada kajian yang bersifat konseptual, bagian metode dapat ditiadakan bila dianggap tidak perlu. Naskah ditulis dalam dua kolom pada kertas berukuran A4, dengan jarak antar kolom 1 cm. Panjang tulisan maksimal 6 - 10 halaman berspasi tunggal, termasuk daftar pustaka, gambar, tabel, dan lampiran. Setiap halaman memiliki margin atas 3.5 cm, margin bawah 2.5 cm margin kiri dan kanan 2 cm. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bentuk huruf Times New Roman 12. Naskah juga dapat ditulis dalam bahasa Inggris.

Naskah dimulai dengan halaman pertama yang memuat:

- Judul singkat (running head). Penulis diminta untuk membuat judul singkat (maksimal 14 kata).
- Judul lengkap (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).
- Nama penulis, afiliasi, dan alamat korespondensi (mis. E-mail).

Gambar dan Tabel

- Gambar yang akan ditampilkan dalam jurnal adalah gambar hitam-putih. Bila menginginkan, penulis dapat menyertakan gambar berwarna, namun penulis akan dikenai biaya pencetakan gambar berwarna tersebut. ***(mak. 6 untuk gambar dan tabel)***
- Gambar dan tabel diberi nomor sebagai berikut: Gambar 1., Gambar 2, dst. Tabel 1, Tabel 2, dst.
- Gambar dan tabel yang substansinya sama, ditampilkan salah satu.
- Tabel berbentuk pivot table.
- Letak penempatan Tabel diatas gambar tabel (9 point kapital)
- letak penempatan Gambar di bawah gambar (9 point kapital)
- Untuk keterangan di simpan di bawah gambar tabel atau gambar (9 point kapital)

Penulisan subjudul (heading)

- Subjudul tingkat pertama semuanya dicetak tebal ditulis dengan huruf kapital, misal: **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN**
- Subjudul tingkat kedua, semuanya dicetak tebal dan ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap kata, misal: **Sistem Pengelolaan Lingkungan Tradisional**
- Subjudul tingkat ketiga, semuanya ditulis dengan huruf miring dan huruf kecil kecuali huruf pertama dari setiap kata, misal: *Sistem Kebun Talun*

PENYERAHAN NASKAH

Lakukan registrasi online pada alamat **http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register**. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word di utamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah centang pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti panduan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirmkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

INDEKS PENULIS

A

Agus Nero Sofyan 132–137

B

Benazir Bona Pratamawati 188–198

D

Dadang Suganda 132–137

E

Evie Ariadne Shintadewi 188–198

F

Ferinandus Leonardo Snanfi 122–131

H

Hakimul Ikhwan 122–131

I

I Nyoman Suwija 115–121
Indra Gumay Febryano 109–114
Iwang Gumilar 145–153

J

Juariah 162–167

K

Kunto Sofianto 132–137

L

Lina Nur Aminah 109–114

M

Maman Sutirman 132–137
Muhadjir Darwin 122–131
Muhammad Dahlan 103–108

R

Rahmat Safe'i 109–114

U

Uyat Suyatna 168–176

INDEKS SUBJEK

A

Asli Papua Berkontestasi 122–131

B

Badan Usaha Milik Daerah 103–108, 108
Budaya Masa Kehamilan 162–167

E

Evaluasi 168–176, 175–176

F

fashion 132–137, 133–137, 135–137, 136–137

G

gender 138–144, 139–144, 140–144, 141–144, 142–144

H

hubungan kekerabatan 115–121, 121
Hutan Kemasyarakatan (HKm) 109–114, 111–114

I

Indonesia 168–176, 169–176, 170–176, 173–176, 175–176

K

kalangan pelajar 154–161, 158–161, 159–161, 160–161, 161
kata sapaan bahasa Bali 115–121, 116–121, 119–121
Kebergunaan Sistem Akuntansi Manajemen 103–108
Kebijakan 168–176, 170–176, 171–176, 172–176, 174–176
Kepercayaan 162–167, 164–167
Kinerja Perusahaan. 103–108
Komunikasi Politik Pemerintah 188–198, 189–198

M

mangrove 145–153, 146–153, 147–153, 148–153, 149–153, 150–153, 151–153, 152–153
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 188–198, 189–198
Media sosial 154–161, 155–161, 156–161, 158–161, 159–161
migrasi internal 177–187, 178–187, 180–187, 181–187, 184–187, 185–187
model ekonometrika 177–187, 181–187

N

Narkotika 168–176, 169–176, 170–176, 171–176, 172–176, 173–176, 174–176, 175–176, 176

P

partisipasi 145–153, 146–153, 147–153, 149–153, 150–153, 151–153, 152–153
partisipasi politik 154–161, 155–161, 156–161, 157–161
patriarkhi 138–144
pemasaran 132–137
pemilih pemula 154–161, 155–161, 157–161, 158–161, 159–161, 160–161, 161
Pemilihan Kepala Daerah 122–131, 124–131, 125–131, 126–131, 127–131, 129–131
pemilu legislatif 154–161, 160–161
Pendapatan petani 109–114
pengeluaran pemerintah daerah 177–187, 181–187, 183–187, 184–187, 185–187, 186–187
perempuan 138–144, 139–144, 140–144, 141–144, 142–144, 143–144, 144
persepsi 145–153, 146–153, 147–153, 148–153, 149–153, 150–153, 152–153
Perubahan Lingkungan Eksternal 103–108, 104–108, 105–108
Perubahan tutupan lahan 109–114, 112–114, 113–114, 114
politik 138–144, 139–144, 140–144, 141–144, 142–144, 143–144, 144
Politik Identitas Etnik 122–131, 124–131
Praktik 162–167, 164–167
Provinsi 168–176

S

seni kelom geulis 132–137
Setiadi 122–131
Sosialisasi 188–198, 193–198, 195–198
sosiolinguistik 115–121
Strategi 188–198, 189–198, 191–198, 194–198

T

Tasikmalaya 132–137, 133–137, 134–137, 136–137, 137

U

upah minimum 177–187, 178–187, 179–187, 180–187, 181–187, 182–187, 183–187, 184–187, 185–187, 186–187

W

wanita 132–137, 133–137, 135–137, 136–137

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Eng. Pradono, SE., M.Ec., Dev (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
2. Dr. Chandradewini, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
3. Dr. Ismail Nurdin, M.Si. (Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
4. Dr. Risna Resnawati, MP. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
5. Dr. Ir. Hasan Hadiana, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
6. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
7. Dr. Elis Suryana Nani Sumarlina, MS. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
8. Dr. Achmad Rizal, S.Pi., M.Si. (Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Universitas Padjadjaran)
9. Prof. Dr. Nandang Alamsyah Delianoor, SH., M.Hum. (Fakultas ISIP, Universitas Padjadjaran)
10. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. (Fakultas ISIP, Universitas Padjadjaran)
11. Dr. Sawitri Budi Utami, S.IP., M.Si. (Fakultas ISIP, Universitas Padjadjaran)
12. Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, S.S., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
13. Mokhamad Anwar, SE., M.Si., Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)
14. Dr. Ir. Hj Yosini Deliana, MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
15. Ari Ganjar Herdiansah, S.Sos., M.Si., Ph.D. (Fakultas ISIP, Universitas Padjadjaran)
16. Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd. (Fakultas IKOM, Universitas Padjadjaran)
17. Prof. Dr. Ir. Yogi, MS. (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
18. Bevaola Kusumasari, M.Si., Ph.D. (Prodi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM)
19. Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM., CQM., CMA. (Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta)
20. Dr. Rossy Lambelanova, AP., S.IP., M.Si. (Pasca Sarjana, Intitut Pemerintahan Dalam Negeri)

Sebagai Mitra Bestari *(Peer Reviewer)* pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 20 No. 2 Juli 2018. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi